

ANALISIS CSIS

Disiplin Nasional, Kreativitas dan Pendidikan

- Peranan Kepemimpinan dalam Menegakkan Disiplin Masyarakat
- Disiplin Nasional, Moralitas, dan Kreativitas
- Peningkatan Pembinaan Disiplin Nasional dalam Sistem dan Pola Pendidikan Nasional
- Orientasi Pendidikan Dasar Kita
- Profesi Guru di Indonesia: Tawaran dan Tantangannya
- Pendidikan, Politik, dan Ketahanan Nasional
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN



Analisis CSIS

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

Logo CSIS



Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjanan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi -- tiadanya sikap a priori -- pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat *Nalar Ajar Terusan Budi* yang tertera pada lingkaran piringan adalah *surya sengkala*: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus menge-mukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. *Nalar* menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, *Ajar* berwatak 7, *Terusan* berwatak 9, dan *Budi* berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. Nalar Ajar Terusan Budi juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya meng-analisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta meng-uraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo dibuat oleh G. Sidharta dalam bentuk asli berupa piringan perunggu.

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab

Rufinus LAHUR

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEOF, A.M.W. PRANARKA, J. Soedjati DJIWANDONO,
M. Hadi SOESASTRO, Harry TJAN SILALAHI, Jusuf WANANDI,
Clara JOEWONO, Kirdi DIPOYUDO, Djisman S. SIMANDJUNTAK,
A.R. SUTOPO, Onny S. PRIJONO

Redaksi Pelaksana

Bambang WALGITO, Sunarto NDARU MURSITO,
Medelina K. HENDYTIO

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X



ANALISIS CSIS

TAHUN XVIII, NO. 4, JULI-AGUSTUS 1989

Daftar Isi

• Pengantar Redaksi	282
• Peranan Kepemimpinan dalam Menegakkan Disiplin Masyarakat <i>Sayidiman SURYOHADIPROJO</i>	284
• Disiplin Nasional, Moralitas, dan Kreativitas <i>Dedi SUPRIADI</i>	302
• Peningkatan Pembinaan Disiplin Nasional dalam Sistem dan Pola Pendidikan Nasional <i>Anwar JASIN</i>	318
• Orientasi Pendidikan Dasar Kita <i>Washington P. NAPITUPULU</i>	336
• Profesi Guru di Indonesia: Tawaran dan Tantangannya <i>T. Raka JONI</i>	347
• Pendidikan, Politik, dan Ketahanan Nasional <i>A.M.W. PRANARKA</i>	359
• Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN <i>SUDIBYO & Yoyok ARIESSUSANTO</i>	372

Pengantar Redaksi

DALAM TULISANNYA *Sayidiman Suryohadiprojo* mengungkapkan bahwa sukar dibayangkan adanya disiplin tanpa adanya kepemimpinan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa disiplin bukanlah tujuan, tetapi sarana vital demi tercapainya masyarakat yang produktif dan mandiri, maju dan sejahtera.

Dedi Supriadi menggambarkan bahwa pada dasarnya disiplin nasional menyangkut kemampuan bangsa Indonesia untuk menghayati dan mewujudkan prinsip-prinsip moralitas hidup bermasyarakat berdasarkan Pancasila. Upaya ini seyogyanya mampu menunjang tumbuh suburnya kreativitas masyarakat, sebab hanya dengan cara ini penegakan disiplin nasional akan mempunyai arti lebih besar. Dalam rangka itu, ABRI terpanggil untuk mewujudkan kemampuannya terutama melalui keteladanan dan kearifan dalam menggariskan kebijaksanaan.

Sebagaimana pengertian disiplin inheren dalam pengertian pendidikan, pengertian disiplin nasional juga inheren dalam pengertian pendidikan nasional. Menurut *Anwar Jasin*, dengan lahirnya Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, disiplin hendaknya dapat dikembangkan dan dibina secara lebih terarah, karena tujuan hidup berdisiplin itu terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. Sudah harus menjadi kewajiban ketiga lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat untuk secara saling mendukung meningkatkan upaya pengembangan dan pembinaan disiplin nasional berdasarkan tata nilai Pancasila. Semua pihak harus memiliki tekad dan kemauan politik untuk memperlihatkan keteladanan dalam hidup berdisiplin sehingga mereka menjadi panutan generasi muda.

Pendidikan dasar adalah persiapan yang diperlukan oleh seseorang, baik menyangkut pengetahuan, keterampilan yang relevan, maupun sikap mental pembaruan dan pembangunan yang dapat digunakan sebagai modal dasar untuk maju terus dalam kehidupannya. Menurut *Washington P. Napitupulu*, seorang tamatan lembaga pendidikan dasar seyogyanya sudah cukup termotivasi untuk mampu dan mau belajar sepanjang hayat, baik melalui lembaga pendidikan menengah, pengalaman kerja maupun berbagai program pendidikan luar sekolah.

Guru merupakan unsur penting dalam proses belajar mengajar dalam menegakkan disiplin dan kreativitas peserta didik. Tetapi selama ini profesi guru tertimbun oleh pelbagai masalah, internal maupun eksternal, yang mempengaruhi peranannya. *T. Raka Joni* mengemukakan

kakan bahwa, dengan keluarnya Surat Keputusan Menpan No. 26/1989 tertanggal 2 Mei 1989, langkah awal yang mendasar untuk mengakhiri perlakuan kurang taat asas terhadap jajaran guru telah diambil. Di samping menawarkan janji yang membangkitkan harapan, langkah mendasar ini juga disertai seperangkat tantangan berat yang harus dihadapi apabila kita ingin memprofessionalkan jabatan guru. Dengan perkataan lain, tekad untuk menjadikan jabatan guru sebagai karier profesional harus diterjemahkan menjadi pelbagai upaya yang sistematis, konsisten dan berjangka panjang oleh pelbagai pihak yang terkait.

A.M. W. Pranarka menguraikan bahwa pendidikan dan politik sebagai aktualisasi ideologi yang merupakan pilihan eksistensi akan selalu mempunyai sifat kontekstual yang bergerak, berubah dan berkembang. Dalam hal ini sistem pendidikan maupun sistem politik harus mempunyai daya relevansi sehingga dapat produktif, tepat guna dan hasil guna. Juga dikemukakan kaitan antara doktrin ketahanan nasional dan konsep kebudayaan serta pendidikan yang membawa beberapa implikasi terhadap politik pendidikan nasional, dan juga beberapa langkah terobosan dalam politik pendidikan yang diperkirakan mempunyai makna strategis.

Ringkasan peristiwa tentang kegiatan ASEAN, yang diasuh oleh *Sudibyo* dan *Yoyok Ariessusanto* sebagai anggotanya, menyajikan berbagai kegiatan ASEAN dari bulan Maret sampai Juni 1989 dalam terbitan ini.

Juli 1989

REDAKSI

Peranan Kepemimpinan dalam Menegakkan Disiplin Masyarakat

Sayidiman SURYOHADIPROJO

Pendahuluan

YANG DIMAKSUDKAN dengan disiplin masyarakat dalam makalah ini adalah sikap anggota atau warga masyarakat, demikian pula lembaga-lembaga masyarakat yang mereka bentuk, yang secara sadar atau tidak sadar menjalankan semua ketentuan dan peraturan masyarakat secara patuh dan tertib. Satu masyarakat yang maju dan sejahtera tidak dapat terwujud tanpa kehadiran tingkat dan mutu disiplin yang memadai. Sebab kemajuan dan kesejahteraan menuntut keteraturan dan kestabilan di samping dinamika dan semangat.

Bentuk kepatuhan yang paling baik adalah tentunya yang bersifat sadar. Sebab sikap patuh dan tertib yang sadar bersumber dari prakarsa yang positif, dan karena itu menghasilkan mutu kehidupan masyarakat yang tinggi. Akan tetapi sikap kepatuhan yang sadar biasanya hanya dapat terwujud apabila ada tingkat pengendalian diri yang cukup tinggi pada individu. Hal itu tidak se-

nantiasa dapat diharapkan terwujud pada setiap warga masyarakat. Oleh sebab itu sikap kepatuhan yang timbul karena refleksi atau kebiasaan mungkin sekali akan lebih menjadi tuntutan yang realistik. Dalam hal itu warga masyarakat bersikap patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku karena sudah menjadi kebiasaan untuk menempatkan diri secara patuh dalam satu kehidupan bersama. Mutu dari sikap demikian untuk kehidupan masyarakat tidak se tinggi sikap patuh yang dilandasi pengendalian diri yang kuat. Namun secara operasional sikap demikian masih amat berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksudkan dengan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang atau kumpulan orang untuk mengajak dan menimbulkan motivasi kepada orang-orang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu yang telah dimufakati sebagai tujuan bersama. Karena pengertian kepemimpinan tidak lepas dari pengertian pimpinan, maka dalam kepemimpinan termasuk adanya kelebihan tertentu yang dimiliki orang yang men-

jalankan kepemimpinan itu dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tanpa ada kelebihan tertentu akan sukar terjadi proses untuk mengajak dan menimbulkan motivasi kepada orang lain.

Makalah ini berusaha mengemukakan hubungan antara peran kepemimpinan dengan penegakan disiplin masyarakat, khususnya di Indonesia. Oleh sebab kepemimpinan dalam masyarakat berbeda-beda perannya sesuai dengan fungsinya, maka akan dibicarakan peran kepemimpinan dalam lingkungan keluarga dan rumah tangga, kepemimpinan di sekolah dan lembaga pendidikan, kepemimpinan dalam organisasi masyarakat, kepemimpinan aparatur pemerintah dan lembaga tinggi negara.

Peran Kepemimpinan di Lingkungan Keluarga

Sikap hidup yang patuh dan tertib, baik yang didasarkan kemampuan kendali diri yang tinggi maupun yang terwujud sebagai kebiasaan, akan tumbuh paling baik dalam diri manusia apabila diberikan landasannya sejak orang berusia muda. Pendidikan dan cinta yang diberikan oleh orang tua kepada anak sejak masih bayi merupakan landasan yang penting itu, oleh karena itu peran kepemimpinan yang dilakukan oleh orang tua, yaitu ayah dan ibu, amat mendasar dalam penegakan disiplin masyarakat. Orang tua yang ingin membina keluarga yang baik secara naluri berusaha mendidik anak-anaknya dengan penuh rasa kasih sayang sejak bayi. Sebab orang tua yang normal menginginkan agar anaknya dapat tumbuh menjadi manusia yang lebih bermutu dan lebih maju daripada dirinya sendiri. Untuk menjadikan lingkungan keluarga berhasil men-

didik anak menjadi orang yang lebih baik diperlukan rumah tangga yang tertib dan teratur. Justru karena orang tua mencintai anak, maka mereka menginginkan agar anak sejak kecil menepati ketentuan yang diletakkan untuk rumah tangganya. Sehingga, di samping orang tua harus mempunyai kemampuan untuk mencintai anak, mereka juga harus dapat mengajak anak untuk menjalankan segala ketentuan yang telah mereka tetapkan. Kalau anak melanggar ketentuan yang ada, maka orang tua yang baik harus segera menegurnya. Kalau masih tetap menjalankan pelanggaran, maka tampaknya teguran yang bersifat verbal tidak mempan untuk menggugah kesadaran. Karena itu harus dilakukan pemaksaan berupa hukuman fisik. Hal itu dilakukan bukan dengan maksud menyakiti anak, melainkan justru karena mencintai anak, sehingga tidak terlanjur menjadi tidak tahu aturan. Dengan cara demikian akan timbul satu kondisi dalam mental anak agar menjadi terbiasa mengikuti segala ketentuan orang tua. Yang amat penting orang tua menepati ketentuan yang telah ditetapkannya sendiri. Dan harus senantiasa memikirkan bahwa ketentuan-ketentuan itu masuk akal.

Makin anak menjadi besar makin ia dapat menggunakan pikirannya. Maka orang tua berusaha mengajaknya berpikir mengapa satu hal harus dilakukan secara patuh dan tertib. Umpama saja, mengapa anak itu harus mengatur tempat tidurnya sendiri, atau mengapa ia harus ada di rumah selambat-lambatnya jam enam sore untuk kemandian belajar. Faktor kendali diri mulai diusahakan untuk tumbuh pada anak. Ditimbulkan pengertian bahwa kepatuhan dan keterlibatan itu sebenarnya bukan kepentingan orang tua semata-mata, melainkan kepentingan anak sendiri.

Pendidikan agama amat bermanfaat untuk dipraktekkan. Tefapi harus dijaga bahwa ketentuan ritual dibarengi dengan pengertian yang dapat diterima oleh ratio anak. Misalnya, tidak semata-mata mengharuskan menjalankan ibadah puasa selama satu bulan, melainkan juga dijelaskan apa manfaat menjalankan ibadah puasa untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Pada waktu anak menjadi dewasa sikap orang tua perlu disesuaikan dengan itu. Orang tua memberikan kebebasan lebih banyak kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri atas satu hal, tetapi setelah lebih dahulu memberikan pendapat atau saran tentang konsekuensi setiap keputusan yang diambil. Dengan begitu tumbuh rasa tanggung jawab, sikap kemandirian yang amat penting untuk memperoleh disiplin yang bermutu. Untuk menjalankan hal itu semua diperlukan kualitas ayah dan ibu yang cukup tinggi, yang dalam kenyataan di Indonesia belum tentu tersedia dengan cukup. Oleh sebab itu menjadi kewajiban pemerintah yang menghendaki peran keluarga yang lebih besar dalam penegakan disiplin masyarakat agar mengatur informasi yang mengandung pelajaran dan tuntunan kepada para orang tua. Sebagaimana sekarang diadakan pemberian informasi untuk keluarga berencana juga dapat diadakan pemberian informasi yang terus-menerus dan teratur tentang pendidikan di lingkungan keluarga dan rumah tangga. Kepada badan-badan yang memberikan berbagai penerangan dan pendidikan seperti kumpulan pengajian, badan dakwah, pengkotbah di mesjid dan gereja, diminta untuk ikut serta memberikan informasi kepada orang tua agar bersikap aktif dalam mendidik anak-anaknya.

Seluruh usaha dilakukan untuk membuat kepemimpinan orang tua berjalan dan efek-

tif. Para ayah atau ibu yang bekerja memang mengalami hambatan tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mendidik anaknya. Bahkan mungkin tindakan sanksi kepada orang tua yang mengabaikan pendidikan anaknya perlu dipertimbangkan, meskipun sebetulnya setiap orang tua yang normal akan selalu memperhatikan pertumbuhan anaknya. Satu *breakdown* dalam hubungan orang tua, baik dalam bentuk perceraian atau ada yang meninggal, tentu mempunyai dampak yang kurang baik untuk pertumbuhan anak. Oleh sebab itu perlu diusahakan agar jumlah perceraian dalam masyarakat berkurang dan kesehatan ditingkatkan mutunya.

Kalau para orang tua dapat menjalankan kepemimpinan mereka dengan memuaskan, maka landasan untuk penegakan disiplin masyarakat sudah terbentuk; mungkin dapat dikatakan bahwa separuh jalan telah dilampaui. Kemudian perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan kepemimpinan di tingkat lain.

Kepemimpinan di Sekolah

Yang langsung melengkapi kepemimpinan di lingkungan keluarga adalah kepemimpinan di sekolah. Setelah anak cukup umur ia memasuki lingkungan baru di luar keluarga, yaitu sekolah. Tergantung dari berbagai faktor maka ia akan berada di lingkungan sekolah itu dari sekurang-kurangnya enam tahun sampai 17 tahun. Sebab itu lingkungan sekolah senantiasa mempunyai pengaruh cukup besar terhadap sikap hidup manusia. Pengaruh yang besar itu antara lain keluar dari sikap dan perilaku guru, khususnya kepemimpinannya di dalam dan di luar ruang belajar.

Sikap dan kepemimpinan guru itu juga dapat berpengaruh terhadap terwujudnya disiplin pada murid-muridnya. Seorang guru yang pembawaannya selalu tertib dan menepati setiap peraturan sekolah menimbulkan pada murid rasa respek dan dorongan untuk menirunya. Apalagi kalau ia dapat memberikan pelajaran yang oleh murid dirasakan menarik. Pelajaran yang menarik hanya dapat terjadi, kalau guru itu betul-betul menguasai bahan yang diajarkan dan mengetahui bagaimana merebut perhatian muridnya. Dalam merebut perhatian murid ia harus dapat menempatkan diri dalam kondisi murid sehingga segala hal yang dihidangkan diterima dengan pikiran dan perasaan yang hidup. Guru yang demikian tentu selalu terbuka melayani segala pertanyaan murid. Malahan ia merangsang murid untuk berpikir dan tidak hanya menghafalkan fakta semata-mata. Ia akan rangsang murid untuk mengemukakan pikiran dan berkomunikasi dengan pihak lain.

Ini semua mendorong murid menjadi manusia yang lebih mampu menggunakan nalarinya dan menyadari bahwa ia hidup dalam komunitas yang harus selalu ia perhatikan. Maka timbul kesadaran akan perlunya keteraturan dan disiplin. Ia akan sadari bahwa tanpa disiplin dan keteraturan tidak mungkin diraihnya prestasi dalam pelajaran apa pun. Kesemuanya menuntut disiplin dan keteraturan berpikir dan merasakan untuk dapat menghasilkan prestasi.

Adalah kepemimpinan guru yang dapat mengkomunikasikan itu kepada murid, mulai Taman Kanak-kanak hingga menjadi mahasiswa. Hal demikian belum ada di Indonesia, baik di Taman Kanak-kanak atau di Perguruan Tinggi. Para guru masih belum mempunyai tingkat kepemimpinan yang memadai kecuali sejumlah orang guru yang

menjadi kasus tersendiri karena bermutu lebih tinggi dari standar umum para guru.

Bahwa para guru, termasuk para dosen di Perguruan Tinggi, belum memenuhi syarat yang diperlukan, disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain adalah:

1. Pendidikan para guru masih perlu diperbaiki, baik standar intelektual maupun yang berhubungan dengan pembentukan sikap mental;
2. Masih kurang cukup perhatian yang diberikan oleh yang berwajib terhadap kehidupan guru, baik dalam hal gaji maupun terhadap kehidupan sehari-hari;
3. Suasana masyarakat yang kurang mendukung dan bahkan cenderung merintangi kepemimpinan guru yang baik.

Oleh sebab itu perlu ada usaha untuk memperbaiki kondisi guru terlebih dahulu sebelum mengharapkan satu peningkatan umum dari kepemimpinan di sekolah yang berdampak positif terhadap penegakan disiplin masyarakat. Dalam pendidikan guru perlu ditetapkan bahwa calon guru Sekolah Dasar pun harus lulusan Perguruan Tinggi untuk menjamin mutu intelektual. Sudah barang tentu dalam Perguruan Tinggi itu pemberian pelajaran atau kuliah untuk calon guru harus memperhatikan mutunya. Akan amat membantu pembentukan sikap mental guru kalau selama pendidikan para calon guru diasramakan bersama-sama. Sebab dalam kehidupan dalam asrama lebih mudah menumbuhkan sifat-sifat kepemimpinan daripada kalau mereka tinggal di tempat masing-masing.

Pemberian gaji dan berbagai kompensasi lainnya amat perlu ditingkatkan sehingga tidak timbul perasaan bahwa pekerjaan guru dinilai lebih rendah oleh masyarakat dari-

pada pekerjaan lainnya. Akan tetapi bersamaan dengan perbaikan gaji juga harus ada pengawasan yang lebih cermat terhadap perlaku dan cara mengajar. Tidak boleh lagi terjadi bahwa dosen di Perguruan Tinggi mengabaikan tugasnya terhadap mahasiswa yang sekarang masih begitu sering terjadi. Harus ada sanksi-sanksi yang jelas dan tegas terhadap setiap pelanggaran yang dibuat seorang guru. Dengan begitu akan timbul harga diri yang lebih tinggi pada para guru dan sebaliknya juga timbul penghargaan masyarakat yang lebih tinggi kepada guru. Adalah satu kenyataan bahwa di masa penjajahan Belanda dan Jepang penghargaan masyarakat terhadap guru masih tinggi. Akan tetapi anehnya adalah bahwa justru sejak kita menjadi bangsa yang merdeka ada kecenderungan umum yaitu kurang menghargai guru secara kongkrit. Dalam teori kita memang menghargai pekerjaan guru, seperti selalu terdengar dalam pidato-pidato pejabat penting. Akan tetapi dalam kenyataan lain pula keadaannya. Ini erat hubungannya dengan suasana masyarakat yang telah terbentuk selama ini, khususnya setelah kita menjalankan pembangunan nasional.

Sejak kita merdeka telah timbul suasana dalam masyarakat bahwa yang penting adalah kekuatan dan kekuasaan (*power*). Ini pertama terbawa oleh suasana perjuangan kemerdekaan yang mengharuskan penggunaan kekuatan fisik. Setelah pengakuan keadilan, masyarakat langsung terbawa dalam sistem politik parlementer yang kembali menunjukkan pentingnya kekuatan, sekalipun bukan kekuatan fisik. Dengan begitu suasana yang mementingkan power tetap berlangsung. Ketika kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959 ternyata malahan yang terjadi adalah Demokrasi Terpimpin. Dengan itu malahan ditegakkan supremasi faktor

politik atas segala aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Ketika Orde Baru menggantikan Demokrasi Terpimpin mula-mula ada niat baik untuk kembali ke UUD 1945 dan Pancasila secara murni. Akan tetapi dengan dilakukannya pembangunan nasional yang bertitik berat pembangunan ekonomi telah terjadi satu proses yang menonjolkan arti materi dan uang dalam kehidupan masyarakat. Dan itu tetap bersifat power yang mendominasi masyarakat, baik power yang timbul dari materi dan uang itu atau power untuk dapat menguasai materi dan uang sebanyak mungkin. Oleh sebab itu ada orang mengatakan bahwa masyarakat kita dilanda materialisme.

Ini semua berakibat negatif untuk faktor pendidikan, khususnya di sekolah. Memang tak dapat dihindari bahwa dalam satu masyarakat yang mengadakan industrialisasi peran materi dan uang jauh lebih besar dari pada dalam masyarakat agraris. Akan tetapi dengan kepemimpinan yang baik pada tingkat pemerintahan dan tingkat nasional masih dapat dijaga kewajaran dari peran materi dan uang sehingga tak perlu terlalu menyingkirkan etik dan moral. Bahwa dalam satu kehidupan bangsa peran kekuatan dan kekuasaan tak dapat diabaikan, adalah satu kebenaran. Akan tetapi itu pun tak perlu mengakibatkan bahwa faktor kekuatan dan kekuasaan mempunyai supremasi yang begitu menentukan terhadap kehidupan masyarakat. Ini pun amat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan pemerintahan dan kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu peran kepemimpinan guru masih dipengaruhi oleh suasana masyarakat yang baik-buruknya di luar bidang guru dan persiapan guru. Tentang itu akan dikemukakan di bagian berikut.

Meskipun peran kepemimpinan guru mempunyai dampak paling besar terhadap

murid, namun pengelolaan pendidikan juga mempunyai pengaruh yang tak boleh diabaikan. Pertama adalah pengelolaan pendidikan pada tingkat nasional. Apabila terjadi perubahan yang terlambat sering dalam pelaksanaan pendidikan, maka akan berpengaruh buruk terhadap pikiran dan perasaan murid. Apalagi kalau perubahan itu menimbulkan kerugian pada murid. Tidak dapat disangkal bahwa perubahan dalam pengelolaan tak dapat dihindakan, namun sebaiknya itu dibatasi umpamanya untuk setiap 10 tahun sekali.

Kurikulum adalah hal lain yang juga berpengaruh terhadap murid. Kalau kurikulum padat sekali dengan jumlah mata pelajaran yang banyak, maka sukar diharapkan adanya pengembangan sikap mental yang mantap pada murid. Ia terlalu terdesak untuk membagi pikiran dan perasaannya untuk banyak hal dalam satuan waktu tertentu. Apalagi kalau banyaknya pelajaran itu kurang dapat diterima oleh akal sehat, seperti adanya pelajaran sejarah umum dan sejarah perjuangan bangsa sebagai dua mata pelajaran terpisah yang harus dihadapi murid dalam tahun pelajaran yang sama. Ini semua merintangi terbentuknya kemantapan dalam pikiran dan perasaan murid yang akhirnya mengganggu rasa disiplinnya. Kondisi sekolah yang kurang terurus atau kurang diatur urusan dalamnya menimbulkan pada murid kesan yang negatif yang berdampak buruk terhadap rasa kepatuhannya. Maka fungsi kepala sekolah tidak cukup hanya mengatur pelajaran tetapi juga harus memberikan perhatian kepada kondisi sekolah.

Yang amat besar pengaruhnya adalah bagaimana pimpinan sekolah menyusun organisasi murid atau organisasi mahasiswa pada tingkat Perguruan Tinggi. Perlu kepemimpinan yang tepat dari para kepala sekolah, rektor dan dekan untuk dapat menumbuh-

kan pada murid dan mahasiswa sikap yang positif terhadap kehidupan. Pendekatan yang terlambat mengekang kebebasan menimbulkan reaksi yang menentang dan berakibat terganggunya disiplin atau apatis. Sebaliknya pendekatan yang samasekali membebaskan atau tidak peduli terhadap murid dan mahasiswa juga merusak, oleh karena pada hakikatnya murid dan mahasiswa masih mengharapkan bimbingan. Jadi yang diperlukan adalah sikap seperti yang digunakan oleh orang terhadap anaknya yang mulai dewasa. Yaitu memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan setelah menyampaikan saran dan pendapat tentang alternatif keputusan yang dapat diambil serta konsekuensi dari setiap alternatif itu. Dan mendidik agar setiap keputusan yang diambil juga dipikul tanggung jawab sepenuhnya. Maka sikap yang tegas di satu pihak dan sikap sebagai ayah atau kakak di pihak lain, merupakan pendekatan yang terbaik untuk para murid yang menginjak dewasa dan mahasiswa.

Sebagaimana juga di lingkungan keluarga, para pemuda harus merasakan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan jujur. Harus ditumbuhkan bahwa akhirnya disiplin dan ketertiban adalah kepentingan murid dan mahasiswa dan bukan hanya kepentingan guru dan sekolah. Ini hanya mungkin kalau ada kontak yang erat antara guru dan murid, dosen dengan mahasiswa. Untuk memperkokoh aspek keluarga dan sekolah, maka organisasi orang tua, murid dan guru perlu dihidupkan dan bergerak aktif.

Kepemimpinan Organisasi Masyarakat

Pengertian organisasi masyarakat di sini digunakan dalam arti luas. Yang termasuk

di dalamnya ialah Gerakan Pramuka maupun Karang Taruna, tetapi juga organisasi pemuda dan partai politik. Meskipun berbagai macam organisasi itu mempunyai sifat berbeda-beda, namun mereka juga mempunyai persamaan. Persamaannya ialah mereka semua berusaha memberikan sumbangan kepada kehidupan masyarakat yang makin beraneka ragam aspeknya. Karena itu mereka semua berperan dalam peningkatan disiplin masyarakat, atau juga dapat menimbulkan penurunan disiplin itu. Yang diharapkan agar kepemimpinan yang dijalankan dalam tiap-tiap organisasi itu mempunyai dampak positif dan langsung terhadap peningkatan disiplin para anggotanya, termasuk disiplin terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Pada umumnya organisasi yang dapat menimbulkan sikap disiplin anggota terhadap organisasi, anggota tersebut juga mempunyai disiplin terhadap masyarakat. Akan tetapi meskipun secara umum itu benar, namun itu belum tentu demikian. Dapat terjadi bahwa kepemimpinan yang dijalankan dalam organisasi begitu kuat menimbulkan ikatan dan kebanggaan serta *esprit de corps* untuk organisasi itu, sehingga pada anggota timbul perasaan bahwa kehidupannya tidak lagi dipengaruhi atau ditentukan oleh hal-hal yang ada di luar organisasinya. Perasaan itu dapat menimbulkan sikap menganggap remeh terhadap kehidupan masyarakat di luar organisasinya. Itu antara lain pernah kita lihat pada satuan tentara tertentu, tetapi juga pada organisasi politik. Keadaan demikian adalah hasil dari kepemimpinan dalam organisasi yang berat sebelah dan kurang berpandangan luas. Akibatnya tidak saja merugikan masyarakat, tetapi juga organisasi itu sendiri dan para anggotanya.

Kehadiran berbagai organisasi masya-

kat adalah baik bagi masyarakat itu. Selain itu mengandung implementasi dari kebebasan berasosiasi sebagai salah satu hak azasi manusia, itu juga memperkuat masyarakat karena dapat menyalurkan berbagai pikiran dan perasaan para warganya secara produktif. Dengan pengertian bahwa organisasi itu dipimpin secara baik, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Itu berarti bahwa baik tujuan maupun implementasi pencapaian tujuan sesuai dengan kepentingan umum. Seorang warga masyarakat yang turut dalam organisasi akan tersalur pikiran dan perasaannya secara baik. Kalau ia masih pemuda, maka di samping ia mengalami pendidikan di rumah dan di sekolah, juga ia berinteraksi dengan pemuda-pemuda lain dalam organisasi yang diikutinya. Maka kalau kepemimpinan organisasi itu baik dan efektif, pemuda itu akan diajak dan diberi motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif bagi organisasi itu. Karena organisasi itu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, maka pemuda itu terbawa untuk berbuat positif untuk kepentingan umum. Dengan begitu ia juga akan lebih mudah untuk menaati berbagai ketentuan dan peraturan masyarakat.

Hal yang sama berlaku untuk seorang warga yang sudah dewasa dan bahkan berkeluarga. Kehidupan bersama dengan warga lain dalam organisasi memberikan pandangan yang lebih luas daripada kalau hanya menutup diri. Ia akan memperoleh masukan yang mungkin bermanfaat pula untuk kehidupannya sebagai kepala keluarga. Di samping ia menunaikan kewajiban terhadap masyarakat melalui pekerjaan atau profesi, maka partisipasi dalam organisasi menambah sumbangan dan kegunaan untuk masyarakat.

Mungkin saja terjadi ketegangan atau konflik antara organisasi satu dengan yang lain, baik karena persaingan dalam meraih prestasi sebagai organisasi sejenis atau alasan lain. Itu semua tidak perlu merugikan masyarakat secara umum, asalkan kedua organisasi mempunyai kepemimpinan yang baik. Bahkan persaingan dapat merangsang prestasi yang lebih tinggi selama tidak menjadi berlebihan sehingga merugikan kepentingan umum. Agar tidak merugikan kepentingan umum diperlakukan kepemimpinan organisasi yang baik. Yaitu kepemimpinan yang menyadari bahwa tiap-tiap organisasi masyarakat itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau masyarakat terganggu dan sakit, setiap bagiannya turut mengalami akibatnya. Itu berarti bahwa setiap usaha organisasi tidak dapat dilepaskan dari kebaikan untuk masyarakat. Persaingan masih baik kalau itu mendorong prestasi pihak-pihak yang bersaing dan memajukan masyarakat. Akan tetapi kalau persaingan menjadi begitu jauh sehingga mematikan pihak lain, maka merugikan masyarakat dan karena itu sudah melampaui batas.

Persoalannya adalah bagaimana mendapatkan kepemimpinan yang baik untuk tiap-tiap organisasi. Oleh karena tiap-tiap organisasi mempunyai tujuan sendiri-sendiri dan berdasarkan itu menyusun anggaran dasar dan rumah tangga masing-masing, maka berdasarkan itu dapat dibuat kriteria yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berminat menjadi pimpinan organisasi itu. Sebaiknya para anggota organisasi masyarakat memilih pimpinan dari anggota organisasi yang berminat atau setuju untuk menjadi pimpinan. Dengan membandingkan sikap dan perilaku setiap calon pemimpin dengan kriteria yang sudah ditetapkan, dan dengan memperhatikan riwayat hidupnya baik di

dalam maupun di luar organisasi, setiap anggota dapat menetapkan pilihannya. Kemudian mereka yang mendapat suara terbanyak terpilih menjadi pimpinan organisasi, baik sebagai formatur untuk menyusun personalia pimpinan secara keseluruhan atau seluruh personalia pimpinan dipilih secara langsung oleh anggota.

Pemilihan pimpinan secara demokratis dan teratur itu mempunyai dampak yang baik terhadap sikap disiplin setiap anggota organisasi. Pertama, mereka dibiasakan untuk memperjuangkan pendapat mereka tetapi di pihak lain juga untuk menghargai pendapat orang lain. Interaksi sosial demikian menimbulkan sikap kemasyarakatan yang positif dan mencegah timbulnya sikap mau menang sendiri. Kedua, karena pimpinan adalah hasil proses pemilihan yang dilakukan oleh para anggota, maka selanjutnya para anggota juga akan kerja sama dengan pimpinan demi memajukan organisasi. Itu berarti bahwa ada sikap disiplin yang hidup dari bawah dan bukan sesuatu yang hanya dipaksakan dari atas. Hal demikian mempengaruhi pula sikap anggota organisasi itu dalam kehidupannya bermasyarakat.

Di Indonesia yang masih amat memprihatinkan adalah perkembangan organisasi politik. Organisasi politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kehidupan berbangsa, maka kondisi yang kurang mantap dari organisasi politik itu kurang menguntungkan bagi peningkatan disiplin masyarakat. Di antara organisasi politik, Golkar adalah yang paling maju dan teratur. Akan tetapi Golkar masih mempunyai kekurangan yang pokok, yaitu sebagai organisasi masih kurang mandiri dan masih amat tergantung pada kekuatan dari luar, khususnya dari organisasi ABRI dan pemerintah. Dengan begitu kepemimpinan yang dihasilkan Golkar

juga lebih menggambarkan kepemimpinan yang banyak tergantung kepada kekuatan lain dan bukan kepemimpinan yang merupakan hasil sifat dan kemampuan pribadi orang-orang itu. Karena itu orang-orang itu kurang mampu memancarkan kewibawaan yang mempengaruhi sekelilingnya untuk sungguh-sungguh berdisiplin, sekali pun menduduki jabatan tinggi dengan otoritas yang besar. Padahal sebetulnya otoritas politik yang dimiliki dapat amat bermanfaat untuk menimbulkan motivasi dan dorongan kepada lingkungannya agar menjadi masyarakat yang produktif, khususnya memiliki sikap disiplin yang tinggi. Contohnya yang paling kongkrit adalah bahwa sudah sejak permulaan Pelita I pemerintahan Orde Baru menetapkan program penyempurnaan Aparatur Negara; akan tetapi hingga kini Aparatur Negara masih tetap belum dapat diandalkan, tidak saja dilihat dari sudut profesional tetapi lebih-lebih dari sudut mental. Ketidakberhasilan ini bukan saja kegagalan kepemimpinan teknis, akan tetapi merupakan kekurangan besar dalam kepemimpinan politik. Sebab program penyempurnaan Aparatur Negara merupakan satu sasaran politik Orde Baru yang amat mendasar.

Apalagi kalau kita melihat kondisi partai-partai politik PPP dan PDI. Tidak saja senantiasa terdapat berbagai keruwetan dalam kepemimpinan organisasi itu, bahkan juga kondisi organisasinya masih amat mengkhawatirkan. Keadaan organisasi politik yang demikian kurang mendukung terwujudnya kepemimpinan yang meningkatkan disiplin masyarakat.

Dibandingkan dengan organisasi politik, maka perkembangan organisasi sosial seperti lembaga swadaya masyarakat jauh lebih positif. Peranan organisasi seperti Muhammadiyah dengan berbagai lembaga pendidikan

dikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, rumah-rumah sakitnya dan badan-badan kemasyarakatan lainnya dapat mendorong masyarakat untuk hidup teratur dan memperhatikan disiplin. Kalau di masa mendatang mutu dari tiap-tiap badan dapat diingkatkan, maka peranan lembaga swadaya masyarakat itu amat besar.

Juga peranan dari organisasi seperti Gerakan Pramuka, Karang Taruna amat positif untuk peningkatan disiplin masyarakat. Sebab dalam organisasi itu para pemuda juga dibiasakan bersikap dan hidup secara tertib dan teratur. Demikian pula perkumpulan olah raga dapat bermanfaat, kalau tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor kebendaan. Sayang sekali bahwa dalam 10 tahun belakangan ini dunia olah raga amat dipengaruhi oleh faktor kebendaan itu, karena tidak dapat melepaskan diri dari gelombang profesionalisme olah raga yang sedang meliputi dunia. Hanya kalau di negara industri profesionalisme olah raga memberikan imbalan kebendaan sesuai dengan prestasi atlit yang dibuktikan, di Indonesia banyak atlit menuntut imbalan yang tinggi sebelum dapat membuktikan sesuatu yang cukup berarti. Akibatnya amat merusak disiplin di dunia olah raga. Padahal dulu sebelum pengaruh kebendaan begitu kuat dunia olah raga di Indonesia justru mempunyai peranan yang besar dalam menghadirkan pemuda-pemuda yang dengan penuh disiplin tekun berlatih dan menghasilkan prestasi yang tidak jauh berbeda dari yang sekarang dihasilkan dengan biaya yang begitu tinggi serta malahan tanpa adanya semangat yang bermakna.

Diperlukan kepemimpinan yang betul-betul kuat dan bijaksana di dunia olah raga untuk meluruskan kondisi yang kurang menguntungkan itu. Di satu pihak memang kita tidak mungkin lepas dari pengaruh pro-

fesionalisme olah raga dengan segala tuntutan kebendaannya. Namun di pihak lain profesionalisme yang bermutu hanya dapat terwujud kalau diisi nilai mental yang memadai. Kalau kita perhatikan betapa kuat disiplin dan semangat perjuangan para olahragawan profesional di Eropa dan Amerika untuk dapat menghasilkan prestasi yang berarti, maka memang tak mungkin dapat dilahirkan olah raga profesional tanpa disiplin dan semangat perjuangan yang tinggi.

Organisasi pemuda yang aneka ragam sifatnya dapat menjadi sarana bagi pemuda untuk berbagai macam hal yang bermanfaat. Di situ mereka dapat bertemu dan berinteraksi dengan pemuda lain yang tidak sama tingkat sosialnya, tidak sama pendidikannya dan kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi mereka mempunyai persamaan dalam keinginan untuk mengembangkan kepribadiannya dalam pengabdian kepada masyarakat, negara dan bangsa. Itu akan memberikan perluasan pandangan yang amat penting dalam mengembangkan kemampuan memimpin. Di pihak lain mereka dibiasakan untuk menepati peraturan dan ketentuan yang telah dimufakati bersama, dan itu menumbuhkan kesadaran berdisiplin.

Ini semua amat bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat, dan untuk para pemuda. Akan tetapi di Indonesia ada gejala yang kurang baik sejak beberapa lama, di mana organisasi pemuda tertentu digunakan oleh pihak orang yang lebih tua untuk memupuk dukungan politik yang kurang sehat. Organisasi pemuda itu dimanjakan dalam berbagai segi, termasuk dalam kebendaan, sehingga mempunyai taraf hidup yang jauh di atas rata-rata organisasi pemuda yang lain. Karena memang hendak menggunakan organisasi itu untuk dukungan politik, maka pimpinan organisasi itu diangkat oleh pihak yang lebih

tua yang berkepentingan. Kalau tidak diangkat secara terang-terangan, maka diadakan manipulasi dengan menggunakan kekuasaan memerintah dan kekuatan keuangan untuk mempengaruhi proses pemilihan pimpinan. Tidak jarang terjadi bahwa pimpinan yang terpilih dengan cara itu bukan orang yang mempunyai kemampuan memimpin yang memadai.

Ia adalah seorang pemimpin yang dikarbit, bagaikan pisang muda yang dikarbit agar kelihatan matang padahal ia masih jauh dari memadai. Praktek demikian amat bertentangan dengan kepentingan bangsa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan disiplin dan mutu organisasi. Mudah-mudahan gejala demikian makin ditinggalkan oleh karena amat merusak kehidupan organisasi pemuda. Padahal organisasi pemuda amat penting peranannya untuk pengembangan kepemimpinan bangsa di masa depan. Lambat laun kita harus mampu mengekspos tindakan dan perbuatan orang-orang tua yang merusak organisasi pemuda itu, sehingga mereka tidak lagi dapat menjalankan manipulasinya.

Yang dapat menjalankan peranan besar sebagai organisasi masyarakat sebenarnya adalah organisasi dakwah Islam. Kita melihat bahwa makin hari perhatian kaum muda Muslim terhadap kehidupan beragama makin bertambah. Hanya sayang sekali bahwa perkembangan yang positif belum memadai dampaknya terhadap sikap kehidupan mereka sehari-hari. Itu berarti bahwa para pemimpin yang memberikan dakwah belum cukup menghubungkan kehidupan beragama dengan sikap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Memang kecenderungannya masih tetap saja untuk menghubungkan kehidupan beragama dengan kehidupan di akhirat dengan alasan bahwa kehidupan

yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat, sedangkan kehidupan di dunia hanyalah sebentar sekali dan dianggap kurang berarti. Pandangan demikian amat menyesatkan oleh karena bukan memberikan pandangan sebenarnya dari ajaran agama Islam. Itu pula sebabnya mengapa umat Islam dan khususnya di Indonesia sekali pun secara kuantitatif terus meningkat, namun secara kualitatif belum menunjukkan satu kebangkitan kembali yang memadai. Karena umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas dalam masyarakat, maka dengan sendirinya itu memberikan gambaran yang kurang baik kepada masyarakat pada umumnya. Padahal sebenarnya umat Islam sendiri berkepentingan untuk menjadi lebih maju dalam berbagai segi kehidupan di dunia. Bagaimana dapat mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan tanpa memperbaiki sikap hidup sehingga sesuai dengan keperluan kehidupan di dunia dewasa ini dan di masa mendatang. Ia bukanlah pemimpin Islam yang baik, kalau ia tidak turut berusaha mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan umatnya. Padahal sebenarnya para pemimpin Islam, dan khususnya para ulama, besar wibawanya terhadap umat yang mereka pimpin. Namun tampaknya kepemimpinan tidak ditujukan secara baik untuk memperbaiki kehidupan umat.

Jelas diperlukan satu perubahan mendasar dalam kepemimpinan umat Islam, termasuk di Indonesia, sehingga ajaran Islam memperoleh pendekatan dan pelaksanaan yang lebih tepat seturut kehendak agama itu sendiri. Kalau dakwah dimanfaatkan dengan baik oleh para pemimpin Islam yang merasa bertanggungjawab atas kemajuan umatnya, maka pasti akan dilihat satu perkembangan yang amat positif di Indonesia. Bagaimana pun juga kemajuan satu bangsa tidak dapat diharapkan atau didasarkan

pada sikap hidup dan pandangan sebagian kecil bangsa itu. Betapa hebat bagian kecil itu dalam mengembangkan hidupnya, namun tak mungkin hanya karena mereka saja bangsa kita akan terangkat nasibnya dan posisinya dalam percaturan internasional. Tidak mustahil bagian kecil itu akan menguasai Indonesia secara politik dan ekonomi dan menikmati kehidupan yang tidak kalah dari kemajuan yang dicapai oleh masyarakat yang paling maju di dunia, namun bangsa secara keseluruhan masih akan tetap pada tingkat yang rendah. Mungkin sekali India merupakan contoh yang mendekati gambaran itu; meskipun sekitar 30% rakyatnya berada pada standar kehidupan yang setingkat dengan bangsa industri dan itu meliputi tidak kurang dari 200 juta orang, namun selama yang 70% tetap dalam kondisi yang sama, India belum dapat dianggap sebagai negara dan masyarakat yang maju. Maka masalah kita adalah bagaimana memperbaiki mutu kepemimpinan Islam, apabila kita tidak saja mempunyai afiliasi dengan agama Islam tetapi juga mempunyai komitmen dengan Pancasila dan kebangsaan Indonesia.

Sejak kita merdeka dan khususnya sejak kita melaksanakan pembangunan nasional sudah tumbuh aneka ragam organisasi dalam masyarakat. Di samping yang telah disinggung di atas, juga sudah berjalan organisasi lain seperti organisasi para pengusaha yang bernama Kadin, organisasi kaum profesional berupa aneka ragam himpunan profesi, dan masih banyak lagi. Ada yang bersifat lokal atau daerah dan ada pula yang bersifat nasional. Semua organisasi itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan masyarakat, termasuk peningkatan disiplin dan disiplin anggota, apabila dipimpin dengan baik. Bahkan makin banyak terbentuk organisasi, asal tidak bertentangan dengan Pancasila

dan UUD 1945, akan lebih baik untuk perkembangan bangsa dan masyarakat. Namun manfaat dari tiap-tiap organisasi itu masih ditentukan oleh tujuan organisasi itu dan kepemimpinan yang berjalan di dalamnya.

Kepemimpinan Aparat Pemerintah dan Lembaga Negara

Sebagai masyarakat dalam satu negara yang sedang berkembang, maka masyarakat Indonesia masih amat dipengaruhi oleh pemerintah dan aparatnya. Pemerintah mempunyai peranan yang kuat sekali dalam masa penjajahan, ketika Belanda dengan jumlah orang yang sedikit harus menguasai Indonesia yang amat luas wilayahnya dan besar penduduknya. Ketika menjadi bangsa yang merdeka telah disadari bahwa masyarakat tidak boleh terlalu tergantung pada pemerintah, kalau menginginkan satu kehidupan yang maju dan sejahtera. Namun perubahan itu tidak dapat terjadi dengan mudah dan cepat. Apalagi mempunyai pemimpin yang kuat wibawanya seperti Bung Karno, ditambah lagi dengan sifatnya yang senang men-dominasi. Dalam Orde Baru pun kita belum sempat menegakkan kehidupan masyarakat yang lebih mandiri. Sebab dalam pembangunan ekonomi peran pemerintah menjadi amat sentral, karena kekuatan keuangan sebagai hasil kenaikan harga minyak dan gas bumi. Baru setelah harga minyak turun dengan drastis dan keuangan pemerintah menjadi amat menipis, maka dirasakan perlunya masyarakat yang mandiri. Akan tetapi keinginan demikian masih jauh dari kenyataan, dan dalam praktek pengaruh pemerintah terhadap kehidupan masyarakat amat besar.

Oleh sebab itu kalau pemerintah dapat menunjukkan kepemimpinan yang baik,

maka sikap dan perilaku yang diperlihatkan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan pasti mempunyai dampak yang positif terhadap masyarakat. Masyarakat mempunyai panutan yang menjadi pedoman perlakunya dan tauladan yang diberikan oleh orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan aparatnya. Ini juga menyangkut sikap yang berhubungan dengan disiplin dan kepatuhan kepada segenap ketentuan dan peraturan. Namun amat disayangkan bahwa dalam kenyataan sikap dan perilaku sebagian besar anggota pemerintah dan aparatnya masih jauh dari memuaskan. Ketika bangsa Indonesia belum menjalankan pembangunan nasional dan politik yang menjadi panglima, para warga pemerintah juga terpengaruh oleh kondisi waktu itu. Banyak anggota pemerintah menjadi anggota partai politik untuk menjamin karier dan hubungannya dengan atasannya. Organisasi pemerintahan beserta aparatnya lebih ditentukan oleh hubungan atasan-bawahan berdasarkan kepartaian daripada hubungan organisasi sesuai dengan keperluan manajemen yang sehat. Dalam hal demikian sukar ditemukan disiplin organisasi karena kepatuhan ditentukan oleh hubungan pribadi. Itu menjadi lebih berbahaya lagi ketika PKI berhasil menyerup di banyak instansi pemerintah dan dengan sengaja menggoyahkan organisasi itu demi kepentingan menguasai keadaan.

Yang paling sedikit terkena infiltrasi PKI adalah TNI-AD, meskipun tidak samasekali bebas. Masih ada perwira-perwira yang dapat dipengaruhi, baik dengan cara menarik simpatinya kepada ideologi komunis maupun dengan mengiming-imingi jabatan dan karier yang menonjol. Namun sekali pun begitu TNI-AD adalah yang paling mampu menghadapi dan melawan PKI. Oleh sebab itu kepemimpinan yang ditunjukkan TNI-AD dapat menjadi pedoman bagi masya-

kat untuk mengadakan perlawanan terhadap pemberontakan Gestapu/PKI. Dan karenanya pemberontakan itu dapat dikalahkan serta perebutan kekuasaan atas Republik Indonesia oleh pihak komunis dapat dibatalkan. Andaikata tidak ada kepemimpinan TNI-AD amat disangsikan apakah PKI dapat dibendung mengingat unsur pemerintah lainnya sudah demikian rusaknya diinfiltrasi oleh PKI.

Sejak lahir Orde Baru, disadari betapa pentingnya peranan pemerintah dan aparatnya. Sebab itu sejak semula ditetapkan perlunya penyempurnaan aparatur negara, di mana disiplin mempunyai tempat yang utama. Ketika mulai pembangunan nasional hal itu ditegaskan kembali dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Akan tetapi dengan amat menyesal harus dikatakan bahwa setelah berada di Pelita V pun belum dapat dikatakan bahwa disiplin pemerintah dan aparatnya sudah dapat dianggap mencukupi sebagai panutan masyarakat. Malahan karena pengaruh kebendaan yang kuat disiplin menjadi makin rusak. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi begitu meluas di lingkungan pemerintah sampai ada yang mengatakan bahwa korupsi sudah membudaya di Indonesia. Tidak saja korupsi makin meluas, jumlahnya juga makin bertambah dalam ukuran uang. Malahan ada bagian pemerintah tertentu yang menurut pihak yang berkepentingan, secara terang-terangan minta disuap dengan ratusan ribu dollar, kalau orang hendak memperoleh pelayanan.

Parahnya kondisi pemerintah dan aparatnya lebih menonjol lagi, karena tidak dapat dipastikan unsur atau orang mana dalam aparat penegakan hukum yang masih bebas dari korupsi itu. Sehingga menjadi amat sulit untuk menyelesaikan ketidakbe-

resan ini melalui saluran hukum.

Kondisi pemerintah dan aparatnya yang demikian tentu tidak membantu untuk menegakkan disiplin dalam masyarakat. Malahan sebaliknya yang terjadi, yaitu timbul di masyarakat anggapan bahwa justru orang yang berdisiplin akan dirugikan, karena orang demikian kurang bersedia melayani keperluan pihak yang berkuasa. Maka yang diutamakan bukan disiplin, melainkan cara yang paling baik dapat menarik perhatian dan bantuan pihak yang berkuasa.

Itu tidak berarti bahwa dalam pemerintah dan aparatnya tidak lagi ada orang yang dapat diandalkan sikapnya dan yang masih berdisiplin. Masih cukup ada orang yang demikian, tetapi mereka tidak dapat berperan dengan semestinya oleh karena arus utama yang meliputi sikap orang yang duduk dalam pemerintahan adalah bagaimana memperoleh manfaat maksimal dari jabatan pemerintah untuk kepentingan sendiri. Yang diutamakan bukan melayani masyarakat, melainkan melayani yang berkuasa. Sebab hanya sikap demikian yang memberikan manfaat kebendaan yang dikehendaki.

Jadi kalau pemerintah dan aparatnya hendak berpengaruh positif dalam peningkatan disiplin masyarakat, terlebih dahulu harus dirasakan oleh masyarakat bahwa pemerintah dan aparatnya sudah berubah sikapnya dan menganut arus yang mengutamakan disiplin dan sikap hidup yang penuh komitmen untuk negara dan bangsa. Secara kongkrit itu dirasakan oleh masyarakat kalau ada pelayanan dari pemerintah dan aparatnya yang sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Demikianlah juga dalam sikap dan tindakan aparat penegak hukum yang berlaku jujur sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau itu semua sudah

terjadi, masyarakat akan memperoleh keyakinan bahwa siapa pun yang melanggar hukum dan peraturan akan ditindak sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat akan sadar bahwa berdisiplin dan patuh pada peraturan akan lebih baik untuk kepentingannya sendiri daripada melanggar ketentuan hukum dan menyalahi peraturan. Adalah satu kenyataan bahwa disiplin akan berkembang dengan baik, apabila orang menyadari bahwa berdisiplin adalah kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan pemerintah atau siapa saja. Kalau sudah dapat ditumbuhkan kesadaran itu maka pasti masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang kuat disiplinnya.

Sudah ada bukti bahwa masyarakat Indonesia dapat menunjukkan kepatuhan yang tinggi, yaitu kepatuhan setiap unsur masyarakat Indonesia terhadap hukum adat. Padahal tidak ada satu kekuasaan yang kongkrit dan benar-benar menakutkan di belakang hukum adat, seperti kekuasaan pemerintah yang ada di belakang hukum positif yang berlaku. Namun demikian manusia Indonesia patuh kepada hukum adat. Kalau kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat dapat ditransformasikan menjadi sikap disiplin terhadap ketentuan hukum dan segenap peraturan yang berlaku, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan disiplin yang tak kalah kuatnya dari bangsa manapun di dunia. Kuncinya terletak dalam kepemimpinan yang dapat menimbulkan kesadaran pada masyarakat, bahwa disiplin adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan setiap orang dan bukan semata-mata kepentingan negara dan masyarakat.

Dan kepemimpinan yang hendak berhasil menumbuhkan kesadaran itu pada masyarakat harus terlebih dahulu mampu mengubah sikap dan perilaku pemerintah dan

aparatnya. Sebab dengan sikap dan perilaku pemerintah dan aparatnya yang memadai, dapat dirangsang masyarakat untuk menyadari bahwa disiplin merupakan kepentingan sendiri. Itu berarti bahwa diperlukan kepemimpinan pada mereka yang mengendalikan pemerintah dan segenap aparatnya, dari para menteri, direktur jenderal, hingga para lurah. Sekarang ada kecenderungan bahwa yang diperhatikan adalah segi teknik dari pekerjaan. Bahkan tidak jarang para menteri mengatakan bahwa mereka hanyalah sebagai pembantu Presiden, jadi hanya sebagai pelaksana dari apa yang ditetapkan Presiden. Sikap demikian dengan sendirinya tidak membawa timbulnya kepemimpinan dan tanggung jawab yang melampaui pelaksanaan pekerjaan secara teknis.

Mungkin sekali bahwa tingkat teknis dari pekerjaan pemerintah dan aparatnya sudah lebih tinggi. Sekarang sudah lebih banyak anggota aparat pemerintah yang lulusan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Akan tetapi peningkatan mutu teknis dari pekerjaan pemerintah tidak dengan sendirinya mengakibatkan peningkatan sikap dan disiplin. Seperti dikatakan seorang yang memperhatikan gerak-gerik aparat pemerintah dan penegakan hukum, bahwa orang justru makin pandai untuk menghindari sanksi hukum dalam usahanya yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu yang diharapkan dari para pejabat pemerintah tidak hanya pengendalian organisasinya secara teknis, tetapi juga membuat organisasi yang dipimpinnya mempunyai moralitas lebih tinggi.

Agar senantiasa ada dorongan terhadap para pejabat pemerintah itu, maka peranan dari mereka yang duduk dalam lembaga tinggi negara amat diperlukan. Para anggota DPR, DPA, Mahkamah Agung dan Badan

Pengawas Keuangan dengan caranya sendiri-sendiri perlu mendorong agar para pejabat pemerintah menjadi aparat yang berdampak positif kepada masyarakat. Sekarang tampak bahwa justru mereka yang duduk dalam lembaga tinggi negara itu merasa bahwa peran mereka jauh di bawah para pejabat eksekutif. Seakan-akan ada keengganan untuk menyatakan sesuatu yang dapat dianggap menodai atau menyalahkan para pejabat pemerintah, meskipun itu benar. Perasaan ini mungkin erat hubungannya dengan kekuasaan yang nyata di tangan masing-masing. Memang orang yang menjadi pejabat eksekutif, termasuk para penegak hukum, secara kongkrit memegang kekuasaan. Sedangkan mereka yang duduk dalam lembaga tinggi negara yang lain tidak secara kongkrit memegang kekuasaan.

Akan tetapi peran yang harus dilakukan anggota lembaga tinggi negara adalah antara lain untuk mengawasi eksekutif dan di situ-lah letak kekuasaan mereka. Memang itu tidak langsung bersangkutan dengan kekuasaan secara kongkrit, tetapi itu tidak berarti bahwa peran tersebut kurang penting dari pada apa yang dilakukan pihak eksekutif.

Malahan dengan kondisi pemerintah dan aparatnya yang demikian rendah dilihat dari sudut moral dan mental, peran lembaga tinggi negara itu menjadi lebih penting. Maka juga diharapkan berfungsinya kepemimpinan para anggota lembaga tinggi negara untuk dapat mendorong eksekutif bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan secara moral para anggota lembaga tinggi negara turut bertanggungjawab atas kondisi pemerintah dan aparatnya yang tidak kunjung baik itu. Yang terutama harus memperoleh perhatian besar adalah perbaikan moral dan mental aparat penegakan hukum. Sekarang baik pi-

hak pengadilan, kejaksaan, para pembela dan pihak kepolisian di mata masyarakat jauh dari tingkat kebersihan yang minimal. Selama itu masih tetap demikian, akan sukar sekali mengharapkan respek masyarakat terhadap berlakunya ketentuan hukum; dan dengan demikian juga masih jauh sekali perjalanan kita menuju masyarakat yang berdisiplin.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa keadaan aparat pemerintah dan aparat hukum tidak separah itu; buktinya Indonesia sudah dapat menjalankan pembangunan nasional yang selalu dipuji oleh dunia luar, termasuk Bank Dunia. Ini sama saja dengan menghadapi gelas yang separuh berisi air. Ada yang berkata bahwa gelas itu berisi separuh, tetapi ada pula yang mengatakan gelas itu kosong. Semua tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Dalam hal ini sudah jelas bahwa kita harus memandang persoalannya dari segi peningkatan disiplin masyarakat. Dari sudut itu siapa pun harus mengakui, bahwa sekali pun kita telah membuat kemajuan dalam pembangunan ekonomi, namun dilihat dari sudut mental masih banyak sekali kelemahannya. Tidak hanya lemahnya disiplin, tetapi juga soal etos kerja, kejujuran dan komitmen.

Salah satu aparat pemerintah yang dapat berperan besar adalah ABRI. Meskipun disiplin dalam ABRI belum sempurna, namun dibandingkan dengan aparat pemerintah lainnya masih lebih dapat diandalkan. Tentu ini merupakan hasil dan akibat dari pendidikan dan latihan yang harus dialami setiap anggota ABRI, baik ia perwira, bintara atau tamtama.

Karena itu sebenarnya organisasi ABRI dapat dimanfaatkan secara langsung untuk menimbulkan sikap disiplin pada anggota

masarakat. Di banyak negara lain diadakan wajib militer bagi para anggota masyarakat untuk menimbulkan sikap disiplin pada para anggota masyarakat, selain itu juga berguna untuk membentuk kekuatan cadangan untuk pertahanan negara. Bahkan tidak hanya disiplin yang hendak diraih dari pelaksanaan wajib militer, melainkan juga etos kerja, kebiasaan untuk memelihara kesegaran jasmani, dan banyak hal lain. Adalah satu kenyataan bahwa di negara-negara industri baru Korea Selatan, Taiwan dan Singapura berlaku sistem wajib militer untuk semua pemuda yang sudah cukup umur. Di Korea Selatan dan Taiwan tampak sekali dampak dari wajib militer itu, di pabrik-pabrik. Tenaga kerja dalam pabrik itu bersikap tidak beda dengan prajurit yang ada dalam satuan militer. Akibatnya adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pabrik, di mana disiplin merupakan salah satu faktor. Malahan di Singapura seorang yang hendak bekerja harus menunjukkan bukti bahwa ia sudah selesai menjalankan wajib militer.

Itu tidak mengherankan, oleh karena dalam dinas militer dapat ditumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya belum ada pada seorang; dan kalau sudah menjadi kebiasaan, maka melalui dinas militer akan lebih diperkuat. Jadi pemuda-pemuda yang tadinya kurang mengenal disiplin, tidak biasanya bekerja keras, kurang suka mengeluarkan tenaga fisiknya, kurang dapat bekerjasama dengan orang lain, tidak biasa bangun pagi dan memelihara kesegaran jasmani, tidak biasa tepat waktu, semua ini dapat diubah dengan menumbuhkan kebiasaan baru pada mereka selama menjalankan dinas militer. Di samping itu mereka dibiasakan untuk bersikap teguh, berpakaian tertib dan memelihara roman muka, mempunyai keberanian, serta dapat menggunakan pera-

latan dan senjata. Dan yang terpenting mereka dilatih untuk dapat menjalankan kepemimpinan. Tentu akibat dari dinas militer tidak akan sama pada tiap-tiap orang, karena itu juga dipengaruhi oleh sifat pribadi masing-masing. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa mayoritas dari mereka yang selesai menjalankan dinas militer adalah orang yang berdisiplin, sanggup bekerja keras, tahu waktu dan bersikap tertib.

Mengingat itu semua maka akan baik sekali apabila di Indonesia diadakan dinas militer. Namun ada beberapa kendala yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wajib militer di Indonesia. Yang terutama adalah biaya yang diperlukan tidak kecil dan orang yang selesai menjalankan dinas militer harus mempunyai pekerjaan; kalau tidak ada pekerjaan ada bahaya bahwa dengan hasil latihan militernya ia dapat beralih ke kriminalitas. Oleh sebab itu sebaiknya di Indonesia diadakan wajib militer bagi semua pemuda yang diterima bekerja, baik untuk lingkungan pemerintah maupun swasta, sehingga mereka tidak menjadi penganggur setelah selesai menjalankan dinas militer. Sebaliknya organisasi yang menerima mereka bekerja akan memperoleh keuntungan, karena tenaga kerjanya sudah dapat diandalikan disiplin dan sikapnya.

Setiap tahun aparat pemerintah dan perusahaan swasta mengadakan rekrutmen, baik untuk tingkat pekerjaan staf atau non-staf. Sebaiknya diatur waktunya untuk mengadakan rekrutmen itu, sehingga Departemen Tenaga Kerja dapat mengatur dinas militer untuk mereka dengan bekerjasama dengan Departemen Hankam. Kalau setiap tahun direkrut sebanyak 100.000 orang, maka ABRI diminta untuk melatih orang-orang itu di lembaga pendidikannya yang tersebar di setiap Kodam. Wajib militer un-

tuk mereka dapat dilakukan dengan mengadakan latihan dasar kemiliteran yang biasanya berlangsung selama 3 bulan. Setelah itu mereka meninggalkan dinas militer dan mulai masuk bekerja dalam organisasi pemerintah dan swasta yang merekrut mereka. Sesudah itu mereka setiap tahun mengadakan latihan ulangan yang dilakukan pada akhir minggu. Latihan ulangan itu dilakukan pada empat akhir minggu secara berturut-turut. Karena diadakan pada akhir minggu maka tidak akan mengganggu pekerjaan mereka masing-masing.

Di muka digunakan angka rekrutmen 100.000 orang. Akan tetapi kalau dihubungkan dengan kenyataan bahwa Indonesia setiap tahun bertambah angkatan kerja sekitar 2 juta orang, maka besar kemungkinan bahwa angkanya jauh lebih besar dari 100.000 orang. Maka kelihatan betapa besar akibatnya, baik untuk kepentingan peningkatan disiplin masyarakat dan sikap hidup lain yang menunjang produktivitas maupun untuk pembentukan kekuatan cadangan bagi Hankam kita.

Melihat manfaat yang jelas itu kiranya program demikian sepatutnya dibiayai oleh pemerintah. Sebab ini merupakan salah satu aspek pembangunan sumber daya manusia. Bukankah dengan peningkatan disiplin, tumbuhnya kebiasaan baru yang bersangkutan dengan etos kerja, dan lain-lain itu akan meningkatkan pula produktivitas angkatan kerja kita? Dan ini tentu amat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan secara langsung berpengaruh kepada organisasi kerja baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Mungkin juga dengan cara ini dapat dihilangkan penyakit mental yang sekarang sedang meliputi aparat pemerintah dan aparat penegakan hukum kita. Untuk menyelenggarakan latihan militer secara

baik di semua Kodam maka pihak ABRI, khususnya TNI-AD, harus meningkatkan mutu dari korps instrukturnya. Sebab banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang diharapkan tergantung dari penyelenggaraan latihan tersebut. Dengan penyelenggaraan wajib militer seperti itu juga sekaligus dibina kekompakan antara ABRI dan masyarakat.

Penutup

Dari uraian yang telah diberikan dapat ditunjukkan betapa besar hubungan antara kepemimpinan dan peningkatan disiplin masyarakat. Bahkan boleh dikatakan bahwa sukar dapat dibayangkan adanya disiplin tanpa ada kepemimpinan. Namun yang diperlukan tidak hanya kepemimpinan di satu segi saja, melainkan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kepemimpinan dalam lingkungan keluarga amat penting, karena manusia mulai hidupnya dalam lingkungan itu. Demikian pula kepemimpinan di lingkungan sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga pendidikan yang tertinggi. Juga kepemimpinan dalam berbagai organisasi masyarakat di mana pemuda itu memperoleh pengalaman sebelum menjadi manusia dewasa, di samping kepemimpinan di lingkungan pekerjaan, baik pemerintah maupun swasta.

Yang paling pokok harus dikomunikasikan dan ditumbuhkan sebagai kesadaran adalah bahwa hakikat disiplin merupakan kepentingan masing-masing pribadi dan

bukan kepentingan pemerintah semata-mata. Kalau kesadaran itu dapat ditumbuhkan, maka akan lahir usaha dari setiap pribadi untuk senantiasa berdisiplin tanpa ada yang menyuruhnya. Bawa itu dapat terjadi dapat dilihat pada kepatuhan manusia Indonesia terhadap hukum adat, yang juga berjalan tanpa ada yang menyuruhnya.

Namun harus pula diperhatikan bahwa disiplin tidak boleh menjadi tujuan. Disiplin

ditumbuhkan untuk memperoleh masyarakat yang lebih produktif dan lebih mampu mewujudkan kemandiriannya. Sedangkan produktivitas dan kemandirian dicapai untuk membentuk masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Akan tetapi sekalipun disiplin tidak boleh menjadi tujuan, pencapaian tujuan itu tak akan terjadi tanpa ada disiplin yang cukup kuat. Disiplin masyarakat merupakan sarana pencapaian tujuan nasional yang tak dapat ditinggalkan.

Disiplin Nasional, Moralitas, dan Kreativitas

- Mengkaji Implikasi dari Dwifungsi ABRI

Dedi SUPRIADI

DALAM SAMBUTANNYA ketika melantik para perwira remaja lulusan Akabri pada tanggal 26 Juli 1988, Presiden Soeharto secara khusus minta kepada para anggota ABRI untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin nasional. Tetapi diingatkan bahwa disiplin tersebut harus mampu menumbuhkan kreativitas masyarakat. Kata Kepala Negara ketika itu, "Disiplin nasional adalah suatu keharusan kalau kita ingin berhasil dalam pembangunan. Tetapi penegakan disiplin nasional tersebut harus diimbangi oleh penumbuhan kreativitas, karena pembangunan tidak mungkin berhasil bila bangsa ini tidak kreatif dan produktif."¹

Penegasan Kepala Negara itu mempunyai arti khusus di tengah gencarnya kampanye penegakan disiplin nasional. Kesan umum bahwa disiplin yang secara tradisional dikembangkan dalam tubuh ABRI bisa menghambat kreativitas, digarisbawahi pula oleh Presiden. Dalam ucapan Kepala Negara

tersirat bahwa anggapan itu harus dibantah, dan ekses yang terjadi harus dihindarkan. Bahkan bukan hanya dihindarkan, melainkan harus mampu diciptakan situasi yang sebaliknya dari kesan umum.

Disiplin yang seyogyanya dipelopori oleh ABRI adalah disiplin yang memungkinkan tumbuhnya dinamika dan kreativitas masyarakat. Tanpa ada peluang ini, penegakan disiplin nasional tidak mempunyai nilai tambah yang berarti bagi pembangunan bangsa. Dalam hal ini, disiplin nasional diartikan sebagai ketaatan yang disertai oleh kesadaran terhadap hukum-hukum, norma-norma, dan kewajiban yang telah disepakati bersama, baik pada tingkat makro-nasional, meso-institusional, maupun mikro.

Tumbuhnya pemikiran bahwa disiplin nasional perlu ditegakkan berpangkal dari kesadaran akan kenyataan yang kita alami sekarang dan tantangan-tantangan yang kita antisipasi pada masa-masa mendatang (cra lepas laidas). Memang harus diakui bahwa pembangunan nasional telah membawa banyak perubahan positif dan konstruktif da-

¹Kompas, 27 Juli 1989

lam berbagai sektor kehidupan, yang notabene merupakan pencerminan dari adanya disiplin dalam masyarakat kita. Tetapi kita pun secara jujur harus mengakui bahwa hasil-hasil yang kita capai itu belum optimal. Diagnose menyimpulkan bahwa salah satu hambatannya ialah masih rendahnya disiplin (jadi bukan tidak ada disiplin), dan inilah yang harus ditingkatkan.

Gejala mengenai masih rendahnya disiplin nasional dengan mudah kita amati dalam kehidupan sehari-hari yang kita bandingkan dengan sosok kehidupan sosial dan kेनगरaan yang kita cita-citakan dalam Pancasila, UUD 1945, dan aturan-aturan lainnya. Masih banyak aturan dan norma-norma kemasyarakatan yang belum dapat diwujudkan secara maksimal. Menurut diagnose Soemitro, ini berpangkal pada kurangnya kesadaran etika masyarakat dan juga aparatur pemerintahan. "Perlu secara jujur kita akui bahwa selama ini memang terjadi proses erosi budaya yang mengaburkan norma dan nilai-nilai etika,"² yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kenyataan seperti ini sungguh tidak menguntungkan bagi langkah besar bangsa ini dalam menyongsong era lepas landas yang hanya tinggal satu Pelita lagi.

Tulisan ini mencoba meneropong persoalan disiplin nasional dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip moralitas, dinamika kreativitas masyarakat, dan kepeloporan ABRI dalam keseluruhan upaya ini. Hal-hal yang dilihat korelasinya ini masing-masing mewakili unsur etika hidup bermasyarakat, kekuatan untuk berubah, dan unsur kepemimpinan sebagai penggeraknya pada tingkat supra-struktur.

²Soemitro (Jenderal TNI Purn.). "Lima Tahun Menjelang Lepas Landas," *Kompas*, 14-15 Juni 1988.

Disiplin dalam Perspektif Budaya

Dengan menempatkan ABRI sebagai perintis, bagaimanakah kita seyogyanya memandang disiplin nasional? Pertama-tama harus dicatat bahwa disiplin nasional merupakan pencerminan budaya suatu bangsa. Ada korelasi antara perkembangan kebudayaan dan keberbudayaan suatu masyarakat dengan disiplin warganya terhadap aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Semakin matang perkembangan suatu kebudayaan dan komitmen masyarakatnya terhadap nilai-nilai budaya yang relevan dengan tuntutan yang selalu berkembang, maka semakin kuat komitmen masyarakatnya untuk hidup berdisiplin.

Di pihak lain, perilaku tak berdisiplin (disiplin yang rendah) merupakan manifestasi dari, dan tumbuh subur dalam, masyarakat yang sakit, banyak diliputi ketidakpastian hukum, atau banyak terjadi disonansi kognitif dan sosial pada masyarakat. Disonansi ini disebabkan oleh tiadanya kesejalan antara kata dengan perbuatan, teori dengan praksis, ketidakkonsekuensi dalam penegakan hukum, kaburnya norma-norma, dan kesenjangan antara peran ideal yang seyogyanya dimainkan oleh pemimpin (dalam arti luas meliputi orangtua, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemimpin formal) dengan peran nyata yang mereka tampilkan. Situasi demikian dapat melahirkan "generasi serba bingung" dalam mencari acuan nyata bagi perilaku mereka, sebab batas antara benar dan salah, baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, kurang jelas.

Yang dikehendaki ialah tumbuhnya konsonansi pada alam pemikiran, penghayatan, dan pengalaman setiap individu dalam masyarakat mengenai *what should be* dengan

what it is, atau harapan dengan kenyataan. Situasi demikian akan tumbuh dalam masyarakat di mana hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, martabat setiap individu dihormati, prakarsa dan kreativitas dihargai, kejujuran dijunjung tinggi, budaya malu dikembangkan, dan keteladanan ditumbuhkan. Dengan menggunakan tolok ukur ini, kita bisa menakar posisi kita dan mendiagnose penyebab dari masih rendahnya disiplin dalam masyarakat kita.

Tetapi disiplin bukanlah warisan budaya yang tak bisa diubah kecenderungannya. Kehiliran pula anggapan yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa tertentu sudah dari "sana"-nya merupakan bangsa yang berdisiplin, sedangkan bangsa-bangsa yang lain adalah bangsa yang lahir untuk tidak berdisiplin atau memiliki disiplin yang rendah. Kita boleh iri, mengapa orang-orang di negara maju bisa hidup lebih tertib, lebih mampu menjunjung tinggi hukum, lebih memiliki tenggang rasa, malu untuk melakukan perbuatan tercela, tidak meludah, membuang sampah, atau merokok seenaknya di tempat-tempat umum, dan mau antri di loket-loket umum.

Apa yang telah mereka capai tidak datang dengan sendirinya, melainkan hasil usaha keras dan lama. Disiplin nasional dikampanyekan, didifusikan, meskipun tidak selalu melalui kampanye khusus. Mereka mengupayakan secara *built-in* dalam program-program pembangunan masyarakat, dengan mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan, media-massa, dan masyarakat. Mereka melakukan hal itu melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu, keteladanan pemimpin, pengembangan budaya malu untuk melakukan perbuatan tercela, dan lain-lain.

Singapura, misalnya, pernah melancarkan apa yang disebut *courtesy movement*

(gerakan sopan santun). Ya, santun dalam hal yang menyangkut kepentingan orang lain. Sampai-sampai untuk memerangi kebiasaan meludah orang setempat -- ketika kampanye ini tengah gencar-gencarnya dilakukan -- disarankan agar setiap orang membawa *tissue* di sakunya kemana saja mereka pergi. Setelah itu membudaya, setelah orang tidak lagi harus saling sikut hanya untuk naik bus, dan setelah mereka tidak lagi membuang sampah dari jendela mobil, maka semuanya berjalan normal. Perilaku budaya baru tumbuh, menyatu dalam kehidupan masyarakat, dan diinternalisasikan. Apa yang dulu dianggap lazim, tanpa ada sanksi hukum dan sanksi sosial, malah dianggap kurang ajar. Jadi kampanye itu telah menghasilkan suatu *reverse effect*, suatu arus-balik budaya pada masyarakat.

Disiplin dan Moralitas

Pengembangan hidup berdisiplin pada masyarakat berkaitan erat dengan pengertian moralitas. Secara sosial, moralitas diartikan sebagai cara seseorang memperlakukan orang lain atas dasar keadilan dan kelayakan -- *Morality is the way people treat each other on the basis of justice and fairness.*³ Ini berlaku baik dalam kontak langsung maupun dalam situasi-situasi di mana ada pertemuan kepentingan antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Dalam pengembangan disiplin nasional, kesadaran moral merupakan hal yang sangat fundamental, karena di dalamnya tersangkut dua hal: (a) cara orang hidup bersama; dan (b) cara orang saling memperlakukan satu sama lain.

³Lawrence Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development* (San Fransisco: Harper & Row, 1981).

Bahwa isyu tentang moralitas ini perlu dikedepankan, karena masalah disiplin nasional sesungguhnya mengacu kepada cara kita hidup bersama dalam suatu tatanan masyarakat. Ini menjadi semakin tidak sederhana masalahnya karena perlakuan yang kita berikan kepada orang lain dan kita terima dari orang lain pada dasarnya merupakan refleksi dari bagaimana kita saling memandang keberadaan, posisi, peran, dan martabat individu.

Dalam proses interaksi itu, setiap individu menarik inferensi tentang: (a) AKU seperti yang AKU persepsikan; (b) AKU seperti yang KAMU atau orang lain persepsikan; (c) KAMU seperti yang AKU persepsikan; dan (d) persepsi AKU dan KAMU terhadap dunia, lingkungan atau medan yang terlibat dalam interaksi sosial. Kesejalan antara AKU-KAMU-DUNIA⁴ akan menghasilkan mental yang sehat, yang salah satu manifestasinya adalah hidup berdisiplin. Sebaliknya, distorsi persepsi akan menumbuhkan mental yang sakit dan perilaku antisosial.

Inti dari jalinan interpersepsi di atas ialah kemauan setiap orang untuk menempatkan dirinya dalam perspektif orang lain. Dalam hal ini, perlakuan yang layak dan adil, yang merupakan kondisi bagi hidup berdisiplin, didasari oleh kemauan individu untuk secara proporsional melihat dunianya dari perspektif *others* (menyangkut pikirannya, perasaannya, harapannya, kepentingannya, hak dan kewajibannya), dan bukan semata-mata dari sudut pandang kepentingan dirinya sendiri. Jadi persoalan disiplin bermuara pada *the ability of any person to understand the perception of others, that others could be*

*different from him*⁵ -- di samping tentu saja banyak persamaannya.

Dari sinilah tumbuhnya empati, komitmen pada nilai-nilai hidup bermasyarakat yang tertib, kesepakatan untuk berbhinneka-tunggal-ika, dan bahkan *agree in disagreement* sebagai dasar demokrasi. Meskipun dasarnya adalah pemahaman terhadap perbedaan persepsi, yang akan tumbuh kemudian adalah kebersamaan, di mana martabat individu dihargai di satu pihak, dan individu siap untuk mengorbankan sebagian kepentingannya bagi kepentingan bersama, di pihak lain. Jadi, yang terjadi bukan "cuk" dan cuma mau tahu kepentingan sendiri tanpa mengabaikan kepentingan orang lain; sebab menurut Teori Kontrak Sosial, sejak lahir individu telah "teken kontrak" untuk menyerahkan sebagian (bukan semua) dari kebebasan pribadinya untuk orang lain, yakni masyarakat tempat ia hidup.

Dalam pengembangan disiplin nasional, memang kedua hal ini (kepentingan pribadi dan bersama) perlu mendapatkan tempat yang seimbang. Keseimbangan ini penting, karena disiplin akan tumbuh jika ada kesadaran bahwa hidup berdisiplin itu merupakan kepentingan setiap orang, yang akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi-nya, di samping untuk kepentingan bangsa dan negara. Disiplin dalam membayar pajak, misalnya, erat kaitannya dengan pertimbangan para wajib pajak untuk memperoleh pelayanan sosial yang secara kualitatif sepadan dengan jumlah yang dibayarkannya. Dan ini sangat manusiawi. Dalam contoh ini, prinsip moralitas seperti dikemukakan di atas seyogyanya secara timbal balik dipa-

⁴Martin Buber, *I and Thou* (New York: Harper & Row, 1970).

⁵Donald A. Biggs & Donald H. Blocher, *The Cognitive Approach to Ethical Counselling* (New York: Springer, 1987), hal. 42.

hami oleh pemungut pajak dan para wajib pajak.

Plus-Minus Budaya Kolektif

Dalam rangka mengembangkan disiplin nasional, agaknya kita perlu secara kritis memeriksa plus-minus dari tradisi budaya *guyub* (kolektivisme) yang kita miliki dan sering kita banggakan. Jangan-jangan anggapan kita selama ini tidak sepenuhnya benar, dan tidak dapat mendukung tumbuhnya disiplin nasional. Di pihak lain, mungkin kita perlu melihat segi-segi positif dari budaya individualisme yang sering kita cibarkan. Tinjauan macam ini diperlukan, karena individu dan kelompok mendapatkan tempat terhormat dalam Negara Pancasila.

Dalam budaya kolektif, mestinya tenggang rasa, misalnya, lebih berkembang karena hubungan antarindividu lebih akrab. Orang lebih mengenal satu sama lain, bukan hanya karena persamaan kepentingan, melainkan karena dorongan intrinsik untuk hidup bermasyarakat. Ini membuka peluang bagi setiap orang untuk dapat lebih menyelemami perasaan orang lain dan kemudian memperlakukannya dengan penuh empati. Tetapi, yang terjadi adalah berbeda. Sebagai salah satu manifestasi dari masih rendahnya disiplin, perlakuan serampangan terhadap sesama masih banyak ditemukan dalam masyarakat kita yang disebut-sebut menjunjung tinggi kebersamaan. Dalam hal ini kita patut bertanya, mengapa *emphatic understanding* tampaknya lebih berkembang dalam masyarakat yang tidak dengan bangga menyebut dirinya sebagai "masyarakat *guyub*"?

Kita masih sering menemukan peristiwa yang dapat dinyatakan dengan kata-kata: "Dia itu orang lain, karena itu persetan dengan kesan dia tentang aku. Toh aku cuma ketemu satu kali." Di pihak lain, dalam relasi sosial yang melibatkan kepentingan banyak orang, di mana peraturan seyogyanya ditegakkan secara impersonal, kata-kata yang terucapkan lewat perilaku malah demikian: "Aku kenal dia sebagai teman atau kerabatku; karena itu aku beri pelayanan yang istimewa, mendahului orang lain, dalam bidang yang aku layani. Suatu ketika aku pun memerlukannya." Dalam masyarakat yang lebih rasional, yang terjadi adalah: "Aku tak kenal dia secara pribadi. Dia itu orang lain. Karena itu aku pantas lebih menghargainya. Aku malu berbuat tidak layak terhadapnya, karena aku pun tak mau diperlakukan serampangan olehnya."

Kekeliruan kita jelas bukan terletak pada prinsip kolektivisme itu sebagai suatu abstraksi dari sosok kehidupan sosial yang dinginkan, melainkan pada penerjemahannya secara operasional. Jangan-jangan kita hanya mengartikan kolektivisme sebagai konformisme belaka dengan mengabaikan perbedaan individual. Jika ini yang terjadi, maka akan tumbuh *keemohan* sebagai efek sebaliknya dari keadaan yang kita inginkan, dan ini mewujud dalam perilaku serba tak acuh pada kepentingan orang lain. Di tengah masih kurangnya tingkat kematangan intelektual masyarakat kita pada umumnya untuk menafsirkan prinsip-prinsip yang kelewat abstrak (yang berhubungan dengan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang mempengaruhi kemampuan untuk memahami dan menginternalisasikan aturan), maka operasionalisasi pengertian budaya kolektif perlu lebih jelas agar tidak mengundang kebingungan.

Evolusi Pemikiran tentang Disiplin Nasional

Pemikiran tentang pentingnya disiplin nasional untuk ditegakkan memang bermula dari lingkungan ABRI. Seminar dan Rapim ABRI di Seskoad, Bandung, pada 20-21 Agustus 1986 menempatkan peningkatan disiplin nasional sebagai salah satu dari lima masalah yang menuntut langkah terobosan. Kelima masalah itu ialah: (1) peningkatan disiplin nasional; (2) peningkatan produktivitas nasional; (3) pemantapan stabilitas nasional; (4) pemerataan kesempatan kerja dan berusaha; dan (5) penyempurnaan sistem pendidikan nasional.⁶

Gagasan itu sesungguhnya merupakan puncak dari pemikiran yang telah sejak lama berkembang, khususnya di kalangan pimpinan ABRI. Panca Tertib yang digariskan oleh Presiden Soeharto tahun 1968 menanamkan disiplin nasional sebagai salah satu hal yang harus ditegakkan dalam masyarakat umumnya dan aparatur pemerintahan khususnya. Jadi, tekad ini telah muncul jauh sejak Orde Baru berkuasa, menyusul situasi penuh anarki pada era pasca-Orla.

Akan tetapi tekad ini tidak lantas dapat diwujudkan dan didifusikan secara luas, akibat banyaknya persoalan mendesak yang harus ditangani saat itu. Sepuluh tahun kemudian, seminar di Sesko ABRI (1978) kembali menegaskan hal serupa. Ini disusul oleh seminar di Universitas Andalas, Padang (1983), seminar di Lemhanas (1984), seminar di Depdikbud (1986), dan seminar di Seskoad (1986). Hasil seminar terakhir inilah yang mewarnai GBHN 1988 dan Panca Krida Kabinet Pembangunan V yang memberi-

kan bobot kuat pada penegakan disiplin nasional sehingga menjadi suatu gerakan nasional.

Seminar-seminar yang dilakukan kemudian di berbagai instansi dan perguruan tinggi pada dasarnya merujuk kepada hasil-hasil seminar terdahulu, dengan lebih memberikan tekanan kepada operasionalisasi penegakan disiplin dalam setiap *setting* kehidupan, misalnya di jalan raya, di lingkungan kerja, di sekolah, di kampus, dan lain-lain. Dari sini terlihat bahwa jauh sejak proses perumusan dan kristalisasi gagasan tentang pentingnya disiplin nasional untuk ditegakkan dalam masyarakat, peranan ABRI sangat menonjol. ABRI-lah yang untuk pertama kalinya secara peka mampu mendekripsi masalah rendahnya disiplin nasional (aparatur pemerintah dan masyarakat) sebagai masalah nasional yang bisa menghambat tercapainya tujuan nasional.

Bahwa peranan ABRI sangat menonjol, antara lain karena disiplin pada mulanya digunakan dalam organisasi militer. Dari lingkungan militer itulah pada mulanya dikenal istilah tindakan indisipliner yang pasti dikenakan sanksi. Proses perkembangan disiplin dari lingkungan militer ke lingkungan organisasi non-militer dan masyarakat umumnya didorong oleh karena disiplin diperlukan untuk mencapai tujuan. Tidak ada suatu pun organisasi atau himpunan kemasyarakatan lainnya yang dapat mencapai tujuannya tanpa adanya disiplin terhadap norma-norma yang telah disepakati bersama.

Komitmen militer terhadap disiplin, seperti dikemukakan oleh Sayidiman Surjohadiprodjo,⁷ disebabkan karena militer lazimnya merupakan suatu organisasi yang harus menjalankan tugas pokoknya (perang,

⁶Try Sutrisno, "Peranan Disiplin Nasional dalam Pembangunan Pendidikan Indonesia," *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia* (Bandung, 1988), hal. 3.

⁷Kompas, 15 Agustus 1988.

menjaga keamanan) dan mencapai tujuannya dalam kondisi yang diliputi oleh ancaman terhadap kehidupannya. Untuk itu diperlukan jaminan disiplin, yakni kepatuhan, dari para anggotanya. Musuh terbesar militer sesungguhnya bukanlah musuh yang dihadapinya di medan laga, melainkan tindakan indisipliner dan situasi anarki dalam tubuhnya; sebab inilah yang bisa membuat organisasi militer rontok dari dalam dan semua rencananya berantakan.

Lambat laun, pengertian disiplin tidak hanya terbatas pada lingkungan militer, karena organisasi-organisasi lain juga -- dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya -- memerlukan kepatuhan dan ketataan dari para anggotanya terhadap peraturan yang ada. Dalam perkembangan kemudian, ketika peranan negara nasional semakin dominan, disiplin tumbuh dalam lingkup yang lebih luas menjadi "disiplin nasional," yaitu disiplin seluruh warga negara terhadap norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

kam, melainkan sebagai kekuatan sosial politik. Fungsi ganda yang kemudian dikenal dengan dwifungsi ini mulai terasa sangat menonjol pada era Orde Lama, tatkala pandangan-pandangan politik ABRI tidak selalu sejalan dengan pemerintah yang ke-kiri-kirian. Untuk mengimbangi situasi yang membahayakan itu, ABRI memperluas peranan sosial-politiknya. Dalam kata-kata T.B. Simatupang, "Perluasan peran TNI itu antara lain diperlukan untuk menghadapi perluasan pengaruh PKI, yang terbukti tidak dapat dibendung oleh partai-partai politik yang lain."⁸

Peristiwa 17 Oktober 1952 -- ketika sekelompok anggota TNI di bawah Jenderal A.H. Nasoetion mengarahkan moncong meriamnya ke Istana Kepresidenan -- merupakan salah satu contoh dari penolakan TNI untuk dikendalikan oleh politisi sipil.⁹ Peristiwa itu juga sekaligus menunjukkan kemandirian ABRI dalam menentukan sikap yang tidak selalu sejalan dengan pemerintah Orde Lama yang kebijakan politiknya banyak yang tidak disetujui oleh TNI/ABRI.

Keberanian ABRI dalam menentukan sikap yang "tidak sejalan" dengan kebijakan pimpinan nasional ditunjukkan pula ketika secara spontan ABRI menumpas G-30-S/ PKI, padahal Presiden Soekarno tidak mengambil isyarat apa pun untuk tindakan itu. Bawa kemudian tindakan yang diprakarsai oleh Mayjen Soeharto itu mendapatkan legitimasi melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), itu merupakan konsekuensi logis dari tindakan berani ABRI dan posisi Bung Karno yang sudah "kepepet."

⁸T.B. Simatupang, "Menelaah Kembali Peranan TNI -- Refleksi Kesejarahan dan Perspektif Masa Depan," *Prisma*, No. 12 (1980), hal. 23.

⁹Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), hal. 74.

Mengapa ABRI?

Menunjuk kembali amanat Presiden Soeharto yang dikutip di atas, ada cukup alasan untuk menjadikan ABRI sebagai pelopor dalam mengembangkan disiplin yang kondusif bagi tumbuhnya dinamika, moralitas, dan kreativitas masyarakat. Alasan-alasan itu dapat dilacak pada sejarah pertumbuhan bangsa ini, tradisi kehidupan yang tumbuh dalam organisasi militer, dan peran yang dimainkan oleh ABRI di tengah kiprah kehidupan sosial-politik di tanah air.

Jauh sejak revolusi kemerdekaan, ABRI tampil bukan hanya sebagai kekuatan han-

Tindakan yang diambil oleh ABRI itu lebih dari sekedar tindakan militer, melainkan menunjukkan peran sosial-politiknya. Mengenai tindakan spontan ABRI dalam menumpas G-30-S/PKI, seorang penulis melukiskan, "Seandainya hanya merasa sebagai kekuatan pertahanan keamanan, ABRI akan tinggal diam menunggu kebijaksanaan pemerintah. Tetapi karena juga merasa sebagai kekuatan sospol, tanpa ragu-ragu ABRI melangkah mendahului pemerintah untuk menyelamatkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Ideologi Negara Pancasila." Hal ini dilandasi komitmen kuat ABRI kepada Ideologi Negara, seperti dikatakan oleh Panglima Besar Sudirman, "Ideologi Negara (Pancasila) adalah satu-satunya ideologi tentara."¹⁰

Fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial-politik secara implisit mulai diakui oleh UU No. 7/1957 tentang Dewan Nasional dan UU No. 8/1958 tentang Dewan Perancang Nasional yang menetapkan keanggotaan ABRI dalam kedua dewan tersebut. Pengakuan ini semakin dipertegas pada masa Orde Baru -- setelah ABRI bersama rakyat dan mahasiswa keluar sebagai pemenang dalam menumpas G-30-S/PKI -- yaitu dalam UU Pemilu dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Tetapi baru pada TAP MPR No. IV/1978 (GBHN), dwifungsi ABRI diakui secara eksplisit, yang antara lain menyatakan: "ABRI di samping selaku kekuatan hankam, juga merupakan kekuatan sosial." Penegasan ini diulang dalam GBHN 1983 dan 1988. Dalam bentuk UU, dwifungsi ABRI ditegaskan dalam UU No. 20/1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara. Dalam UU itu

¹⁰Achmad Roestandi, Kol.Caj., "Masa Depan Dwi Fungsi ABRI," *Karya Wira Jati* (Majalah Seskoad), No. 66 (1989), hal. 70-71.

pula mulai diperkenalkan istilah "stabilisator" untuk fungsi hankam ABRI dan "dynamisator" untuk fungsi sosial-politik ABRI.¹¹

Sebagai konsekuensi logis dari dwifungsinya, ABRI lebih banyak berhubungan dengan rakyat dari kota-kota sampai ke desa-desa terpencil. Intensitas dan ekstensitas hubungan ABRI-rakyat ini yang terjalin sejak revolusi merebut dan mempertahankan kemerdekaan bahkan lebih kuat dari yang dijalin oleh partai-partai politik mana pun yang pernah ada di negeri ini. Dalam era Orde Baru, secara formal tampaknya juga hanya ABRI yang dapat menjangkau masyarakat pedesaan, sehubungan tidak dibukanya jalur formal untuk parpol guna membuka kantor cabangnya di tingkat desa.

Di pihak lain, melalui program AMD (ABRI Masuk Desa) ABRI semakin memperkokoh kehadirannya di tengah masyarakat desa. Intensitas hubungan ABRI-rakyat yang diabstraksikan dalam semboyan "keamanungan ABRI-rakyat" membuka peluang bagi ABRI untuk menjadi sarana dalam mendidik rakyat agar menjadi warga negara yang cakap, tahu akan hak dan kewajibannya, memahami arah perjuangan dan pembangunan bangsa,¹² serta menghayati dan melaksanakan hidup berdisiplin.

Keunggulan-keunggulan ABRI

Fungsi sosial-politik ABRI menjadikannya pula sebagai kekuatan dominan dalam menentukan arah kebijaksanaan nasional. Dalam era Orde Baru ini, di mana ABRI tampil menonjol pada hampir semua sektor

¹¹*Ibid.*, hal. 67.

¹²Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik* (Jakarta: Idayu, 1981), hal. 106.

kepemimpinan, hampir tak ada kebijaksanaan nasional penting yang luput dari sumbangsih pemikiran ABRI. Meskipun jumlah anggotanya kecil, ABRI (khususnya Angkatan Darat) mempunyai kekuatan penentu yang luar biasa besar dalam menggariskan arah kebijaksanaan nasional dalam berbagai sektor kehidupan. Satu kenyataan juga yang sulit dibantah ialah bahwa suara ABRI, baik sebagai individu maupun sebagai korps, lebih bergema dan didengar oleh masyarakat umumnya dan pemegang kebijaksanaan nasional umumnya. Secara jujur harus diakui bahwa hal ini merupakan konsekuensi dari berbagai sebab yang mendahuluinya, alih-alih merupakan kepandaian ABRI sendiri dalam mewujudkan fungsi sosial-politiknya.

Di antara sebab-sebab yang bisa disebut antara lain ialah, ABRI mampu menjalin kerjasama yang erat dengan kalangan teknokrat sebagai otak kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Maka terjalin kerjasama yang bukan hanya militer-sipil, melainkan militer-sipil-teknokrat. Di samping itu, ABRI sendiri mampu melahirkan pemikir-pemikir dari kalangannya yang bukan hanya mampu mengkaji masalah-masalah strategi militer, melainkan juga masalah-masalah kehidupan masyarakat secara keseluruhan.¹³ A.H. Nasoetion, Sayidiman Surjohadiprodjo, Ali Moertopo, T.B. Simatupang dan Soemitro, adalah beberapa contoh dari pemikir-pemikir cemerlang di lingkungan ABRI. Dalam hal ini, peranan lembaga-lembaga seperti Seskoad (yang dijuluki sebagai dapur pemikir ABRI), Sesko-sesko lain, dan Lemhanas sangat berperan dalam menghasilkan para pemikir ABRI yang bukan hanya mempunyai wawasan kemiliteran, melainkan wawasan sosial-budaya-politik. Inilah antara

lain yang membedakan profil ABRI dengan militer di negara lain.

Sebab lain, meskipun belakangan ada gejala bahwa Golkar lebih menunjukkan kemandiriannya sebagai suatu kekuatan sosial-politik (misalnya tampak pada SU-MPR 1988), masih sulit untuk diukur sejauh manakah kadar kemandirian Golkar itu. Tampaknya Golkar tetap masih ada dalam pengaruh kuat ABRI. Ini tidak sulit dipahami mengingat secara historis, (Sekber) Golkar dibentuk tahun 1964 atas prakarsa ABRI. Para pimpinan terkemuka Golkar juga umumnya adalah para purnawirawan ABRI. Dan suatu tradisi yang baik pada ABRI ialah bahwa meskipun para anggotanya sudah purnawirawan dan kemudian mengabdi dalam bidang-bidang non-militer, mereka tetap ada dalam korps ABRI yang terus dibina dan dipantau karir dan jejak langkahnya; suatu hal yang berbeda dengan para pensiunan pegawai negeri sipil.

Banyaknya pos pemerintahan dan keanggotaan badan-badan legislatif yang dijabat oleh anggota ABRI -- sebagai perwujudan dari dwifungsinya -- juga menjadi sebab lebih bergemanya pemikiran ABRI. Melalui mereka itulah ABRI mendifusikan gagasan-gagasananya di bidang pembangunan ke tengah masyarakat, lingkungan pemerintahan, dan badan legislatif. Fakta bahwa Angkatan Bersenjata, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, lebih disegani oleh kalangan sipil, adalah keunggulan lain dari militer. Ini ada kaitannya dengan ABRI sebagai pemegang monopoli dalam menyimpan dan menggunakan senjata.

Sejumlah kelebihan dari militer/ABRI yang relevan disebut di sini ialah: (a) lebih terorganisasi daripada sipil melalui sentralisasi komando, hirarki, disiplin, jalur komu-

¹³ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1980), hal. 265.

nikasi, dan semangat korps yang kuat; (b) lebih mampu mengembangkan keterikatan melalui simbol kondensasi; (c) lebih mampu melepaskan diri dari ikatan-ikatan primordial, dan di pihak lain lebih berorientasi nasional; (d) lebih terikat pada cara berpikir yang rasional, efisien, dan pragmatis; dan (e) lebih memiliki keberanian dalam menentukan sikap dan pandangan yang berbeda dengan sipil mengenai masalah-masalah pembangunan.¹⁴

Meskipun peranan ABRI semakin dominan, ABRI tampaknya tetap mengambil jarak untuk tidak terjebak pada pelebaran kekuasaan secara formal. Jaminan bahwa kecenderungan ini tidak akan menjurus kepada militerisme dan oligarki militer berkali-kali ditegaskan oleh para pejabat tinggi militer. Dan memang apa yang terjadi sejauh ini membenarkan hal itu. Alfian misalnya mengemukakan: "Walaupun sewaktu Orde Baru lahir ABRI sebenarnya mempunyai kemampuan (dan peluang) buat memonopoli seluruh kekuasaan politik, tetapi itu tidak terjadi. Kekuasaan berlebih yang mereka miliki berhasil mereka batasi pemakaiannya." Kemudian, mengutip Sayidiman, Alfian menilai, hal itu disebabkan oleh karena ABRI tidak menghendaki adanya diktator atau oligarki militer.¹⁵

Karena alasan ini, kalangan "realis politik" melihat bahwa persoalannya bukan lagi terletak pada dominannya peran ABRI melalui dwifungsinya, melainkan bagaimanakah peran dominan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebab, seperti dikatakan oleh A.H. Nasoetion yang banyak berperan dalam mengembangkan dan memper-

¹⁴Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, hal. 72-78.

¹⁵Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, hal. 23-24.

juangkan gagasan tentang dwifungsi ABRI, selama ABRI melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi, maka selama itu pula pengaruhnya akan baik.¹⁶

Dalam rumusan yang berbeda, T.B. Simatupang melukiskan: "Yang menjadi masalah ialah bagaimana caranya agar peranan TNI sebagai stabilisator dan dinamisator menjadikannya sebagai partisipan yang positif dan kreatif dalam proses pembangunan masyarakat modern, adil, makmur, dan lestari berdasarkan Pancasila. Dengan sendirinya, masalah tadi juga mencakup tugas untuk menghindarkan peranan tadi merosot menjadi faktor yang bertentangan dengan, atau menyimpang dari, cita-cita bangsa yang hendak dicapai itu." Ini memang merupakan harapan yang cukup realistik, meskipun diakui bahwa kehadiran ABRI seperti yang ada sekarang masih mengundang kritik, seperti misalnya direkam oleh Ali Moertopo dan Achmad Roestandi.¹⁷

Konsekuensi dari Peranan ABRI

Peran ABRI yang menonjol dalam kehidupan sosial-politik mempunyai konsekuensi terhadap tanggungjawab yang harus dipikulnya dalam pembangunan nasional. Ada korelasi yang erat antara peran ABRI yang semakin besar dengan lingkup tanggungjawabnya. Dan secara jujur harus kita akui bahwa dalam mengembangkan tugas-tugasnya sebagai stabilisator dan dinamisator, ABRI cukup berhasil. Tetapi kita pun percaya bah-

¹⁶Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik*, hal. 108.

¹⁷Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1974), hal. 117-120; Achmad Roestandi, *Masa Depan Dwifungsi ABRI*, hal. 65.

wa ABRI belum puas atas hasil yang telah dilakukannya, dan masih melihat titik-titik rawan dalam pembangunan bangsa ini. Justru perasaan kebelumpuan inilah yang akan menggerakkan ABRI bersama rakyat untuk mencapai yang lebih tinggi lagi, *in search of excellence*, di masa-masa kini dan mendatang.

Salah satu konsekuensi dari tanggungjawab ABRI itu menyangkut upaya untuk turut membudayakan hidup berdisiplin dalam seluruh spektrum kehidupan sosial. Dalam hal ini, Ali Moertopo mengemukakan: "... masalah disiplin dan hukum bukanlah semata-mata masalah ABRI, dan bukan pula masalah yang dapat dipisahkan dari masalah-masalah lain seperti masalah pendidikan umum, pendidikan kesadaran masyarakat... Meskipun ini tidak boleh dijadikan *excuse* untuk tidak melaksanakan disiplin dan menegakkan hukum, jelas bahwa masalahnya harus ditanggulangi secara menyeluruh dalam usaha memecahkan masalah-masalah kompleks yang sedang dihadapi bangsa."¹⁸

Kompleksitas masalah yang diisyaratkan oleh Ali Moertopo bukan hanya menyangkut masalah-masalah pembangunan yang secara nyata dengan mudah bisa kita amati (misalnya pemerataan dan keterbelakangan). Kompleksitas itu juga meliputi masalah-masalah yang lebih mendasar lagi, yakni alternatif nilai-nilai yang harus kita pilih sebagai rujukan.

Kita sudah sepakat (untuk tidak bisa dianggu gugat) bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan acuan dasar dalam hidup bernegara, menegara, berbangsa, dan membangsa, yang diamalkan melalui program-program pembangunan. Pengamalan dan penjabarannya itulah yang masih menjadi

persoalan besar. Kita misalnya belum tahu bagaimanakah operasionalisasi Pancasila ke dalam usaha menegakkan disiplin nasional? Dalam hal-hal seperti inilah kita dituntut untuk berpikir lebih banyak. Presiden Soeharto sendiri pernah menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka untuk dikembangkan (melebihi 36 butir P4 itu), jadi bukan sila-silanya. Dan justru dengan cara menempatkan Pancasila seperti itu, ia akan fleksibel dan akomodatif dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang tak pernah henti.

Di pihak lain, kita pun mengakui betapa perubahan sosial yang begitu cepat melalui pembangunan dan interaksi global yang begitu intens menghadapkan kita pada rentangan pilihan nilai-nilai yang semakin beragam (dalam ekonomi, etika, dan aspek-aspek sosial budaya lainnya) yang tidak selalu bisa kita pilih dan putuskan dengan mudah, atau kita rujukkan langsung kepada Pancasila dan UUD 1945 (seperti dalam acara "Cepat Tepat" SD di TVRI). Kematangan intelektual, kreativitas, kearifan, dan keberanian diperlukan.

Kegagalan dalam menempuh langkah ini bisa menimbulkan kebingungan dan bahkan perilaku anomali akibat ketidakmampuan kita dalam menentukan norma-norma (sebagai operasionalisasi nilai-nilai). Ini pada gilirannya bisa mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam mengembangkan hidup berdisiplin dalam masyarakat. Tampaknya, di sinilah letak relevansi diagnose Soemitro yang dikutip terdahulu, mengenai timbulnya erosi budaya yang berkaitan dengan kaburnya norma-norma.

Seperti halnya keterbukaan dalam mengembangkan masyarakat Pancasila, pemaknaan hidup berdisiplin sebagai salah sa-

¹⁸Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, hal. 121.

tu seginya juga memerlukan keterbukaan. Disiplin nasional yang ingin kita kembangkan bukanlah disiplin mati, yang secara kaku terpaku pada *status quo*. Sesuai dengan dinamika perubahan sosial, pengembangan hidup berdisiplin dan acuan norma-normanya seyogyanya dipandang sebagai suatu proses berkelanjutan yang tidak berhenti pada titik tertentu, meskipun nilai-nilai dasarnya tetap tak berubah, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Transfer Pengalaman ABRI

Dalam melaksanakan dan menghayati hidup berdisiplin, ABRI mempunyai pengalaman yang kaya, yang telah berhasil mereka kembangkan dalam lingkungan organisasinya. ABRI juga ada dalam posisi yang menguntungkan untuk mampu menggerakkan upaya ini, karena sebagai korps atau perorangan, ABRI cukup disegani oleh masyarakat. Apa yang dilakukan oleh ABRI mudah diikuti oleh masyarakat, bahkan tidak jarang masyarakat dan organisasi sospol/ke-masyarakat mengidentifikasi dirinya kepada ABRI untuk mencari keabsahan dari perilakunya. Ada kesan, suatu prakarsa atau gagasan yang telah didukung oleh ABRI akan begitu mudah diterima oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, ABRI menjadi acuan legitimasi bagi perilaku sosial-politik masyarakat. Di pihak lain, tindakan kurang terpuji dari anggota ABRI mudah memancing sinisme dari masyarakat.

Dewasa ini tampaknya hampir tidak ada satu pun organisasi sospol, kemasyarakatan, atau organisasi profesi yang mempunyai kekuatan begitu besar untuk mendifusikan perubahan sosial seperti yang dimiliki ABRI -- melalui dwifungsinya. Secara jujur kita

perlu menerima kenyataan ini. Persoalannya ialah, bagaimanakah caranya agar pengalaman itu bisa ditransfer ke dalam lingkup kehidupan sosial yang lebih luas? Dan yang lebih kritis lagi ialah, bagaimanakah pula caranya agar pengembangan disiplin itu dapat menunjang kreativitas masyarakat, seperti diisyaratkan oleh Presiden Soeharto?

Transfer pengalaman ABRI dalam hidup berdisiplin tidak harus berarti bahwa semua cara-cara ABRI diterapkan dalam kehidupan sosial, sebab situasinya jelas banyak berbeda. Kalangan ABRI sendiri mengakui hal ini. Brigjen TNI (Purn.) Suparyo Sri Inranton dalam suatu seminar bertema: "Disiplin sebagai Sarana Bantu dalam Pembangunan Masyarakat" di UPN Veteran Jakarta, misalnya, pernah mengatakan: "Bukan berarti bahwa bila disiplin militer itu ditiru, lantas masyarakat harus dibuat seperti tentara, sebab fungsinya berbeda." Tetapi ia mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu cara-cara militer itu bisa digunakan di luar militer, tergantung pada kebutuhannya.

Hal yang inti sesungguhnya bukan transfer pengalaman ABRI secara apa adanya. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa cara-cara seperti itu tidak cukup efektif. Misalnya, prinsip "pembiasaan" dalam mengembangkan hidup berdisiplin melalui apel pagi pukul 7.00 dan apel sore pukul 14.00 di sementara kantor pemerintahan serta latihan kemiliteran untuk pegawai sipil, tampaknya baru menyentuh kulit luar dari hidup berdisiplin pegawai negeri. Ini tampak dari tetap berlangsungnya keadaan yang secara kelakar disebut "Brigade 702" (suatu istilah yang pernah dilontarkan oleh seorang pejabat tinggi ABRI), yaitu apel pukul 7.00, lalu tinggal di kantor hanya dengan mengobrol atau ongkang-ongkang kaki, apel lagi pukul 2.00 sore, dan kemudian pulang.

Transfer pengalaman ABRI seyogyanya dipahami dalam konteks pengadopsian prinsip-prinsipnya untuk diterapkan secara arif pada lingkungan non-ABRI sesuai dengan situasi. Prinsip-prinsip itu misalnya keteladan, pengawasan melekat (dengan tetap menjamin rasa aman), penggunaan kelompok-kelompok kecil sebagai sarana, penerapan aturan secara konsisten dan impersonal, pengembangan komitmen total terhadap tugas, membangkitkan rasa memiliki dan *esprit de corps*, dan pengembangan aturan mengikuti tingkat kematangan intelektual dan profesional individu. Prinsip-prinsip ini kemudian dioperasionalisasikan dalam kehidupan organisasi dan masyarakat luas dengan cara-cara yang arif.¹⁹

Prinsip yang disebut terakhir, di mana cara-cara yang dikembangkan militer berbeda menurut kepangkatannya (misalnya untuk bintara dan perwira), bisa diadopsi. Dalam ABRI, aktualisasi nilai-nilai Sapta Marga untuk mereka yang pangkatnya masih rendah lebih menekankan instruksi, pemberian informasi satu arah, dan kontrol yang ketat. Semakin tinggi tingkat kepangkatan, yang juga menunjuk pada kematangan berpikir dalam mencerna nilai-nilai Sapta Marga, maka porsi pemberian informasi secara satu arah semakin berkurang. Di pihak lain, pengembangan profesionalisme dan ketajaman analisis lebih diberi peluang.

Cara-cara pengembangan disiplin seperti ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkembangan psikologis individu, khususnya yang menyangkut aspek kognitif dan etik.²⁰

¹⁹Pernah dikupas dalam artikel penulis berjudul: "Upaya Menegakkan Disiplin Nasional: Menempatkan Pengertian Keteladanannya ABRI." *Suara Karya*, 19 September 1988.

²⁰Secara luas dibahas dalam makalah penulis, *Masalah Disiplin di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan*

Pada tingkat disiplin sebagai kepatuhan, maka informasi, "indoktrinasi," dan klarifikasi tentang standar perilaku yang dikehendaki lebih diperlukan. Sebab individu masih dalam taraf mencari, tanpa memiliki kerangka acuan yang cukup, yang oleh Piaget²¹ disebut *heteronomi* (yang berkembang menuju *otonomi*). Pencarian ini tidak boleh dibiarkan liar. Apa yang dicari harus mengacu kepada apa yang *socially/institutionally desirable*.

Tetapi klarifikasi dan informasi itu tidak boleh eksesif; harus ada peluang bagi individu yang belum matang sekalipun untuk menguji, menghayati, menginternalisasikan, dan merefleksikan makna dari standar perilaku yang (akan) diikutinya. Tanpa peluang ini, maka individu akan tumbuh menjadi "manusia tanpa alternatif." Dalam konteks kehidupan sosial, standar perilaku seyogyanya mencerminkan hasil perjumpaan intersubyektif antara orang-orang yang hendak melaksanakan standar perilaku tersebut.

Dalam asumsi perubahan psikologis secara struktural-progresif-kualitatif, dikemukakan bahwa semakin matang individu, maka semakin mampu ia menemukan dan menghayati nilai-nilai di balik standar perilaku yang ditaatinya. Kematangan ini biasanya berjalan paralel dengan usia, tingkat pendidikan dan pengalaman individu. Semakin tua usia, semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin kaya pengalaman hidup individu, maka ia akan semakin mampu

Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan: Kajian Berasaskan Perspektif Perkembangan Kognitif-Etik (makalah seminar pada Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung, 1987).

²¹Duska, Ronald & Whelan, Mariellen, *Moral Development: A Guide to Piaget and Kohlberg* (New York: Paulist Press, 1975).

memberi dan menemukan makna itu. *Komitmen* sebagai puncak dari perkembangan kognitif-etik (setelah tahap *dualisme* dan *relativisme*)²² dan merupakan inti dari hidup berdisiplin jadinya dipersepsi dan dihayati oleh individu berdasarkan kerangka acuannya (*frame of reference*) berupa struktur-kognitif yang dimilikinya, jadi bukan sekedar "taklid buta."

ABRI, Disiplin Nasional, dan Kreativitas

Menunjuk kembali pesan Presiden Soeharto mengenai kaitan antara disiplin nasional dengan kreativitas, timbul pertanyaan: Apakah penegakan disiplin nasional justru tidak akan menekang kreativitas masyarakat? Jika memang tidak, kondisi-kondisi bagaimanakah yang dianggap kondusif bagi proses aktualisasi potensi kreatif individu dan masyarakat?

Dua pandangan bisa diangkat di sini. Pertama, disiplin dan kreativitas adalah dua hal yang berbeda, sulit dipertemukan, bahkan (meminjam istilah biologi) keduanya dianggap berasal dari "spesies" yang tak mungkin dikawinkan. Apalagi, menurut pandangan ini, jika disiplin nasional diterjemahkan dalam konteks disiplin ABRI, maka kaitannya dengan kreativitas menjadi ibarat minyak dan air. Anggapan ini hanya benar jika disiplin diartikan sebagai upaya mempertahankan *status quo* yang tanpa alternatif, atau sering disebut sebagai "disiplin mati," yang tak memberikan peluang bagi individu untuk mengekspresikan dirinya se-

cara aman dan mewujudkan dirinya secara optimal.

Di pihak lain, ada pandangan bahwa disiplin (nasional) dan kreativitas justru merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya. Tidak ada kreativitas tanpa modal disiplin, karena kreativitas itu sendiri mengimplikasikan adanya disiplin. Bahkan disiplin dianggap sebagai suatu *conditio sine qua non* bagi terciptanya masyarakat yang kreatif dan produktif. Kreativitas tidak akan tumbuh dalam situasi yang anarkis. Sejarah memang menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang telah lebih dahulu menggapai kemajuan -- yang *notabene* adalah manifestasi dari kreativitas manusianya -- adalah bangsa yang telah mampu menegakkan disiplin dalam seluruh spektrum kehidupan masyarakatnya, baik pada tingkat mikro (individu), meso (pranata-pranata sosial dan keorganisasian), dan makro (bangsa secara keseluruhan). Pandangan kedua inilah yang lebih dapat diterima.

Kreativitas di sini dipahami sebagai kemampuan untuk melahirkan gagasan-gagasan dan inovasi-inovasi baru yang fungsional bagi kehidupan. Kemampuan ini tumbuh melalui jalinan interaksi sosial, yang pada tingkat makro melibatkan interaksi antara perangkat birokrasi formal (kepemimpinan, termasuk ABRI), kalangan profesional, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas. Dilihat dari segi masyarakat sebagai kekuatan potensial untuk lahirnya gagasan-gagasan kreatif, interaksi yang dikehendaki adalah yang mampu "mendewasakan" mereka, memberikan rasa aman dan kelonggaran-kelonggaran untuk mengekspresikan kreativitasnya.

Rasa aman diartikan dari dua segi: yaitu aman dari segi kondisi sosial-politik-budaya

²²Diangkat kembali oleh Donald A. Biggs, *The Relevance of International Education: A Cognitive Developmental Perspective* (Albany: State University of New York, 1987), hal. 23-24.

secara keseluruhan (eksternal) yang biasa kita sebut "stabilitas nasional"), yang harus paralel dengan aman menurut apa yang dihayati oleh masyarakat (secara internal). Keseimbangan antara keduanya akan mampu menunjang kreativitas, dan kondisi ini pulalah yang harus diciptakan. Kepeloporan ABRI dalam ikut menegakkan hidup berdisiplin yang mampu menunjang kreativitas masyarakat yang sesuai dengan peran dominannya dalam kehidupan sosial-politik, seyogyanya diterjemahkan dalam konteks ini.

Ada berbagai studi mengenai kondisi-kondisi sosial-budaya yang dibutuhkan untuk perkembangan kreativitas, misalnya yang terkenal ialah dari Gray,²³ Arieti,²⁴ dan Simonton.²⁵ Sejauh relevan dengan topik tulisan ini, Gray dan Simonton menemukan antara lain: (a) faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat menentukan dinamika dan irama perkembangan kreativitas; (b) diversitas dan keterbukaan budaya mempunyai pengaruh sangat positif terhadap kreativitas; (c) ketidakstabilan politik dan iklim kemasyarakatan

an secara total serta pengekangan kebudayaan (*cultural persecution*) berpengaruh negatif terhadap kreativitas.

Secara lebih terinci, melalui studi historisnya terhadap berbagai lingkup kebudayaan, Arieti menemukan sembilan faktor yang ia sebut sebagai *creativogenic society/culture*, yaitu: (a) tersedianya sarana-sarana kebudayaan; (b) keterbukaan terhadap rangsangan-rangsangan budaya yang beragam; (c) orientasi kehidupan yang tidak hanya pada *being*, melainkan *becoming*; (d) adanya keleluasaan bagi berbagai media kebudayaan tanpa diskriminasi; (e) berkurangnya tekanan setelah sekian lama masyarakat dikekam oleh penindasan dan keterkungkungan; (f) keterbukaan terhadap rangsangan budaya, yang kontras sekalipun; (g) adanya toleransi terhadap pandangan-pandangan yang divergen; (h) interaksi antara para pakar yang menguasai bidangnya; dan (i) adanya promosi, hadiah, dan insentif bagi orang-orang berprestasi.

Tidak semua hasil-hasil studi di atas dapat kita terima begitu saja di sini, tetapi kita pun tidak boleh menolak secara *a priori* kebenarannya, hanya karena studi-studi itu dilakukan di negara-negara Barat. Sebab studi lain di Indonesia mengenai faktor-faktor sosial-budaya dalam perkembangan kreativitas menunjukkan banyaknya persamaan²⁶ dengan yang ditemukan di negara lain. Yang diperlukan adalah kemampuan

²³Charles Edward Gray, "An Analysis of Graeco-Roman Development," *American Anthropologist*, 60 (1958), hal. 13-31; "An Epicyclical Model for Western Civilization," *American Anthropologist*, 63 (1961), hal. 1014-1037; "A Measurement of Creativity in Western Civilization," *American Anthropologist*, 68 (1966), hal. 1384-1417.

²⁴Arieti, Silvano, *Creativity: The Magic Synthesis* (New York: Basic Books, 1976), hal. 312-325.

²⁵Simonton, Dean Keith, *Genius, Creativity, and Leadership* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984). Telaah pula dari penulis yang sama: "The Eminent Genius in History: The Critical Role of Creative Development," *Gifted Child Quarterly*, 22,2 (1977), hal. 187-195; "Sociocultural Context of Individual Creativity: A Transhistorical Time-Series Analysis," *Journal of Personality and Social Psychology*, 32 (1975), hal. 1119-1133.

²⁶Misalnya, Frans Mardi Hartanto, *Kepatuhan, Inovasi, dan Kreativitas: Kontradiksi di Dalam Keserasian* (Makalah seminar di IKIP Bandung, 24 Februari 1987, yang diangkat dari disertasinya pada University of Minnesota, 1986). Lihat pula, Dedi Supriadi, *Kreativitas dan Orang-orang Kreatif dalam Lapangan Keilmuan* (Dissertasi, Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung, 1989).

dan kearifan untuk menemukan segi-segi positif dari hasil-hasil studi itu; dan ini tidak bisa ditentukan secara hitam-putih. Kita tidak bisa secara tegas membuat formula, misalnya, tentang kadar keleluasaan berekspre-
si atau kondisi rasa aman untuk menunjang kreativitas.

Satu kenyataan perlu dicatat dalam hal ini ialah bahwa gagasan-gagasan kreatif yang menjadi bidang perubahan sosial cenderung melangkah lebih cepat dari aturan main, sistem hukum yang ada, dan konser-
vativisme birokrasi formal. Itu sebabnya kita senantiasa dituntut untuk menata sistem per-
undang-undangan, peraturan pemerintah,
serta norma-norma kehidupan bernegara
dan bermasyarakat lainnya demi mengako-
modasikan kecenderungan-kecenderungan
baru dan menciptakan sumber legalitas dari
perilaku-perilaku yang muncul. Tujuannya
ialah agar sistem yang ada beserta mekanis-
menya cukup kenyal menghadapi perubahan
sosial. Keadaan yang mengancam kreativitas
akan terjadi jika demi mempertahankan
sistem, hukum atau aturan-aturan dibuat se-
demikian kakunya. Dan justru inilah yang
kini dibuat lebih luwes, longgar, dan akomo-

datif oleh pemerintah yang mendapat du-
kungan kuat dari ABRI.

Penutup

Analisis ini menunjukkan bahwa pada dasarnya disiplin nasional menyangkut ke-
mampuan bangsa Indonesia untuk mengha-
yati dan mewujudkan prinsip-prinsip moralitas
hidup bermasyarakat berdasarkan Pan-
casila. Upaya ini seyogyanya mampu pula
menunjang tumbuh suburnya kreativitas
masyarakat, sebab hanya dengan cara ini
penegakan disiplin nasional akan mempu-
nyai arti yang lebih besar. Dalam keseluru-
han upaya ini, ABRI dapat dan seyogyanya
lebih menampilkan peranannya yang lebih
nyata, sesuai dengan kapasitas tanggungja-
wabnya yang semakin besar sebagai konse-
kuensi dari dwifungsinya. Dari apa yang se-
lama ini tampak, ABRI mempunyai kemam-
puan yang dituntut tersebut. Yang dibutuh-
kan adalah kemauan yang lebih kuat untuk
mewujudkan kemampuan itu dalam lingkup
kehidupan sosial yang lebih luas, yakni
masyarakat melalui keteladanan dan kea-
rifan dalam menggariskan kebijaksanaan.

Peningkatan Pembinaan Disiplin Nasional dalam Sistem dan Pola Pendidikan Nasional

Anwar JASIN

KITA SEKARANG sudah memasuki Repelita V, tahap akhir pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Dalam menghadapi pembangunan jangka panjang tahap kedua, tahun-tahun yang akan datang merupakan masa-masa yang paling kritis dalam pembangunan nasional. Pertanyaan sekaligus tantangan yang harus dijawab adalah apakah pada Repelita VI nanti kita sudah siap tinggal landas dalam arti mampu melaksanakan pembangunan nasional atas atau dengan kekuatan kita sendiri. Ditinjau dari segi kualitas sumber daya insani, masalah ini amat kritis.

Pendidikan nasional sebagai sumber utama penghasil daya insani selama ini masih mengutamakan target kuantitatif dari pada target kualitatif. Padahal tahap tinggal landas membutuhkan manusia-manusia, khususnya tenaga-tenaga ahli, yang berkualitas dalam jumlah yang memadai. Dapatkah sistem pendidikan nasional menjawab tantangan itu? Tantangan itu sungguh berat karena dua target harus sekaligus dapat tercapai yaitu manusia yang berkualitas dan da-

lam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang.

Perangkat lunak yang memberikan arah bagi pembangunan dan pembinaan manusia Indonesia boleh dikatakan sudah lengkap, seperti UUD 1945, GBHN, P-4, Repelita V dan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Asumsi dasar adalah bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia.¹ Dengan demikian manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan, maka perlu ditingkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya insani.² Pancasila telah diakui dan menjadi satu-satunya asas bagi semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, dan menjadi tata nilai nasional yang merupakan norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kualitas manusia yang ingin dihasilkan me-

¹*Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara*, Bab II.B.

²*Idem*, Bab IV, A 4.

lalui sistem pendidikan nasional sudah jelas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja kerja, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan trampil, sehat jasmani dan rohani, cinta tanah air dan tebal semangat kebangsaan serta tebal rasa kesetiakawanan sosialnya.³

Masalahnya sekarang adalah bagaimana menerapkan semua perangkat lunak itu, khususnya tata nilai Pancasila, ke dalam pendidikan pada semua jenis dan jenjang di dalam dan di luar sekolah, sehingga sistem pendidikan nasional dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas seperti yang diinginkan GBHN dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidaklah berlebihan pendapat bahwa mampu tidaknya kita melaksanakan pembangunan dengan kekuatan sendiri sangat bergantung pada kemampuan sistem pendidikan nasional untuk menghasilkan manusia-manusia pembangunan yang berkualitas, khususnya di bidang sains dan teknologi, dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.

Tulisan ini tidak akan membahas semua segi kualitas manusia tetapi hanya satu segi, yaitu disiplin umumnya dan disiplin nasional khususnya serta bagaimana meningkatkan pembinaannya dalam sistem dan pola pendidikan nasional. Berturut-turut akan dibahas pengertian disiplin, hubungan disiplin dan pendidikan, hubungan disiplin nasional dan pendidikan nasional, pembinaan disiplin nasional dalam sistem dan pola pendidikan nasional, peningkatan pembinaan disiplin nasional melalui kurikulum formal, dan kesimpulan.

³Idem, Bab IV, tentang pendidikan. Lihat juga UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 4 tentang Tujuan Pendidikan Nasional.

Pengertian Disiplin

Disiplin berasal dari bahasa Latin *discere* yang berarti *belajar*. Dari kata dasar ini timbul kata *discipulus* = murid atau pelajar, dan kata *disciplina* yang berarti pengajaran atau latihan. Sekarang kata "disiplin" digunakan dalam beberapa pengertian. Pertama, "disiplin" diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Kedua, "disiplin" sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri, agar berperilaku tertib dan efisien. Ketiga, "disiplin" berarti suatu sistem peraturan atau metode yaitu cara berperilaku (misalnya bagi suatu ordo atau sekte keagamaan). Keempat, "disiplin" berarti hukuman atau koreksi terhadap seseorang yang melanggar ketentuan peraturan, yang dilakukan melalui latihan atau dengan jalan mendera. Kelima, "disiplin" sebagai hasil latihan (pengendalian diri), perilaku yang tertib. Keenam, "disiplin" berarti cabang ilmu pengetahuan atau segala sesuatu yang diajarkan.⁴

Dalam tulisan ini pengertian "disiplin" dilihat dari segi pendidikan. Pendidikan sendiri berarti suatu proses, yaitu perkembangan (anak) manusia menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab. Dalam hal ini, pendidikan mencakup pertumbuhan fisik dan perkembangan secara mental spiritual anak belajar, antara lain dalam pengendalian diri dan penyesuaian diri dalam berperilaku sesuai dengan tata nilai lingkungan, sebagaimana dirumuskan *Encyclopedia of Educational Research*, bahwa "Disiplin secara mendasar mengacu pada prinsip bahwa setiap organisme pada tingkat tertentu belajar

⁴Lihat *Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language*, Unabridged, Second Edition (New York: Simon and Schuster, 1979).

mengendalikan diri sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan di sekitarnya yang pernah dialaminya.⁵ Berdasarkan definisi ini terdapat tumpang-tindih atau kesamaan pengertian antara disiplin dan pendidikan. Keduanya mengakui organisme yang dalam pertumbuhan dan perkembangan berinteraksi dengan lingkungan (yang normatif) dan dalam proses itu ia belajar mengendalikan dan menyesuaikan diri dengan (tata nilai) di lingkungannya. Juga benar bahwa keduanya mengakui organisme itu bukan hanya belajar tetapi juga *diajar* (oleh pendidik atau pengajar). Jadi, pendidikan dan disiplin mengasumsikan adanya dua kekuatan yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang (anak), yaitu dari dalam dirinya (*innate forces*) dan dari lingkungannya (*external forces*). Dalam proses itu seseorang *belajar* mengendalikan diri dan menerima otoritas (moral) dari luar atau lingkungan.

Untuk lebih mengenal hakekat disiplin, baiklah dibahas interaksi individu dengan tiga jenis kekuatan lingkungan. *Pertama*, individu berinteraksi dengan kekuatan alam fisik. Dalam alam fisik terdapat tertib hukum yang mengatur peristiwa-peristiwa. Seseorang harus berusaha untuk mengetahui dan mengenal hukum-hukum alam agar ia dapat memanfaatkannya bagi keperluan manusia. Dalam hal ini seseorang harus dapat mengendalikan diri agar tidak menyalahgunakan pengetahuannya itu untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan hukum alam atau hal-hal yang tidak etis. *Kedua*, individu berinteraksi dengan lingkungan kultural. Dalam lingkungan ini, yang dominan adalah kekuatan-kekuatan sosiologis, eko-

nomi dan politik, meskipun sedikit banyak dipengaruhi hukum-hukum kealaman. Dari segi pandangan masyarakat, seseorang yang berdisiplin mampu mengendalikan perilakunya sehingga ia konform dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan, bersifat kooperatif dan mempunyai dorongan untuk ikut serta dalam pembangunan dan perbaikan masyarakatnya. *Ketiga*, individu berinteraksi dengan orang-orang lain. Kedua kekuatan di atas, hukum kealaman dan kemasyarakatan masih bekerja juga dalam interaksi ini, tetapi hanyut dalam hukum-hukum kejiwanan (psikologis). Dalam interaksi ini seseorang belajar mengendalikan hawa nafsu dan dorongan psikologisnya dan manifestasi perilaku yang memperhitungkan atau menengang orang lain, sehingga perilakunya memberikan kepuasan psikologis bagi kedua belah pihak yang berinteraksi.⁶ Jadi inti disiplin adalah kemampuan dari dalam untuk mengendalikan diri dan dari luar dengan sukarela, sadar dan konsisten untuk menerima otoritas (tata nilai) lingkungan, dalam menentukan perilakunya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Hubungan Pendidikan dan Disiplin

Uraian-uraian di atas jelas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tak terpisahkan dan bahkan terdapat tumpang-tindih pengertian antara pendidikan dan disiplin. Pengertian disiplin adalah *inherent* dalam pengertian pendidikan. Dengan kata lain, disiplin adalah bagian dari pendidikan baik ditinjau dari segi proses belajar mengendalikan diri dan menerima otoritas tata nilai lingkungan maupun dari segi penyampaian informasi dalam bentuk berbagai cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu.

⁵Chester W. Harris, ed., *Encyclopedia of Educational Research*, Third ed. (New York: The MacMillan Company, 1960).

⁶Periksa lebih lanjut *Ibid.*

Disiplin adalah unsur mutlak dalam proses pendidikan. Tanpa disiplin tidak ada pendidikan. Pendidikan tanpa disiplin adalah *khaos*.

Jadi bagaimana hubungan pendidikan dengan disiplin? Pendidikan adalah suatu proses, yang dengan dan dalam proses itu seseorang (anak) bertumbuh dan berkembang atau belajar, dan pendidik dengan sengaja mempengaruhi arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat, sampai seseorang itu dianggap mampu memikul tanggungjawab sebagai orang dewasa. Tata nilai itu termasuk norma moral, estetika dan ilmu pengetahuan mempengaruhi perilaku etik seseorang sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Namun kuat lemahnya pengaruh itu sangat bergantung pada kuat lemahnya disiplin yang diterapkan dalam proses pendidikan yang bersangkutan. Dengan kata lain, hal itu bergantung pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri (*self-control*) dan tingkat penerimaan otoritas dari luar secara sadar dan sukarela dalam menentukan perilaku etiknya. Penerapan disiplin yang baik dan kuat dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian yang kuat.

Disiplin sering diartikan sebagai kepatuhan terhadap tata nilai yang dipaksakan (*imposed*) dari luar. Dari segi pendidikan, kepatuhan yang demikian bersifat semu dan bahkan despektif, bukan kepatuhan yang sesungguhnya (*genuine*). Kemampuan mengendalikan diri dan penerimaan tata nilai dari luar secara sadar dan sukarela adalah ciri disiplin yang sejati. Sifat konform terhadap tuntutan tata nilai lingkungan, sifat kooperatif, dan partisipasi aktif dalam pembangunan dan perbaikan masyarakat, asal-

kan dilakukan secara sadar dan sukarela, merupakan ciri disiplin yang sesungguhnya. Disiplin yang sejati hanya dapat ditumbuh-kembangkan melalui *pembentukan katahati* (*gewetensvorming*). Di sini terjadi titik temu antara disiplin dan pendidikan. Menurut *Kohnstamm*, pendidikan itu pada hakekatnya adalah *pembentukan katahati*. Pendidikan berarti belajar mendengarkan dan hidup sesuai dengan suara katahati atau hati nurani.⁷ Maka disiplin yang baik dibentuk melalui proses pendidikan, yaitu proses pembentukan katahati, sehingga kemampuan mengendalikan diri dan penerimaan dan penyesuaian diri dengan tuntutan tata nilai dari lingkungan didasarkan atas suara hati nurani, suatu kecenderungan yang terbaik dalam diri manusia. Dengan demikian, bisa tercipta kesesuaian dan keselarasan antara suara hati nurani, kata, perbuatan dan tata nilai yang berlaku dalam lingkungan.

Di samping kecenderungan yang baik, dalam diri manusia terdapat pula kecenderungan yang buruk, terutama hawa nafsu dalam segala manifestasinya. Nabi Muhammad s.a.w. menganggap perang melawan musuh dengan kekuatan senjata itu sebagai "jihad" kecil, sedangkan "jihad" yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Dalam pembentukan disiplin yang sejati melalui proses pendidikan, secara simultan harus diusahakan di satu pihak kecenderungan yang baik dengan pembentukan katahati, dan di pihak lain penghapusan dorongan hawa nafsu yang rendah dengan latihan pengendalian diri sehingga memperkuat kecenderungan menerima secara sadar dan sukarela tata nilai yang berlaku dalam lingkungan seseorang.

⁷Dikutip M.J. Langeveld dalam *Beknopte Theoretische Paedagogiek* (Groningen, Jakarta: J.B. Wolters, 1955), hal. 165.

Apa yang telah diuraikan di atas adalah pembentukan disiplin moral. Di negeri-negeri Timur umumnya yang ditekankan adalah disiplin moral ini. Di negeri-negeri Barat, di samping disiplin moral, sistem pendidikannya secara historis sangat menekankan pentingnya *disiplin formal* atau *disiplin intelektual*. Seperti kata John Locke (1632-1704): "Sebagaimana kekuatan badan terletak terutama pada kemampuan untuk menanggung penderitaan, demikian juga dengan kekuatan pikiran."⁸ Dengan demikian pendidikan menekankan pada latihan ketahanan mental-intelektual. Alat utama untuk mendisiplin mental dalam arti mendorong dan memperkuat intelek adalah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menurut cabang atau disiplin ilmu (bahasa, matematika, geometri, dan sebagainya). Disiplin ilmu mendisiplin mental atau intelek. Bahasa Yunani dan Latin, matematika dan geometri dianggap paling baik untuk mendisiplin intelek atau kecerdasan, bukan karena kegunaannya secara fungsional bagi kehidupan sehari-hari melainkan kesukarannya sebagai tantangan intelektual. Ilmu pengetahuan untuk mendisiplin intelek disebut mata pelajaran disipliner (*disciplinary subjects*). Barangsiapa yang disiplin dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan dan berhasil menguasai matapelajaran-matapelajaran disipliner dianggap pasti mampu pula menguasai cabang-cabang ilmu pengetahuan lain, apalagi yang lebih mudah daripada matapelajaran disipliner. "Saya telah menyebutkan matematika," kata Locke, "sebagai cara untuk mengatur dalam pikiran kebiasaan nalar dan dalam latihan; tidak karena saya pikir perlu bagi semua orang untuk mendalami matematika, tetapi karena dengan menemukan cara nalar, da-

lam hal mana belajar bisa mengarahkan pikiran, mereka bisa mengalihkannya ke bagian-bagian pengetahuan lainnya sebagaimana mereka memiliki kesempatan."⁹

Itu adalah pendapat klasik tentang disiplin mental dalam hubungannya dengan disiplin ilmu. Pendapat seperti yang dikemukakan Locke memberi kesan seakan-akan disiplin ilmu pengetahuan dapat dipakai untuk mendisiplin mental. Para pendidik modern, seperti David Ausubel, berpendapat bahwa terdapat kesejajaran antara cara pengorganisasian ilmu pengetahuan dan cara orang mengorganisasi atau menyusun struktur pengetahuan kognitif dalam pikiran atau otaknya.¹⁰ Setiap disiplin akademik memiliki struktur konsep (pengertian) yang tersusun secara hierarkis. Pada puncak setiap disiplin ilmu, terdapat sejumlah konsep dan atau dalil yang luas cakupan pengertiannya, suatu pengertian abstrak yang mencakup pengertian-pengertian konkret pada tingkat-tingkat yang lebih rendah dalam struktur itu. Seperti Jerome Brunner, Ausubel berpendapat bahwa struktur konsep setiap disiplin ilmu dapat diidentifikasi dan diajarkan kepada murid, dan baginya struktur konsep itu menjadi sistem pemrosesan informasi (*information-processing system*). Dan struktur konsep itu menjadi peta intelektual yang dapat dipakai murid untuk menganalisis bidang ilmu tertentu dan menyelesaikan masalah-masalah dalam domain atau bidang ilmu terkait. Ausubel menggambarkan otak sebagai sistem pemrosesan informasi dan penyimpanan informasi. Sebagai halnya disiplin ilmu, pikiran (*the mind*) adalah perangkat gagasan (*ideas*)

⁸Ibid., hal. 141.

¹⁰Lihat Bruce Joyce dan Marsha Weil, *Models of Teaching*, Second ed. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1980), hal. 78-79.

⁸Dikutip dari John S. Brubacher, *A History of the Problems of Education* (New York and London: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1947), hal. 140.

yang merupakan jangkar bagi informasi dan gagasan dan berfungsi sebagai gudang informasi dan gagasan.¹¹

Hubungan Disiplin Nasional dan Pendidikan Nasional

Dalam uraian terdahulu dijelaskan bahwa disiplin mengandung dua makna yaitu kemampuan mengendalikan diri dari dalam dan dengan sadar dan sukarela menerima dan menaati tata nilai dari luar sehingga terdapat keselarasan antara kata hati dan perbuatan, dalam perilaku pribadi dan perilaku sosial seseorang dalam lingkungannya. Maka disiplin nasional adalah kemampuan manusia Indonesia baik sebagai pribadi dan warga negara maupun sebagai kelompok (keluarga, suku, agama dan bangsa) untuk mengendalikan diri dan dengan sadar dan sukarela menerima dan menaati tata nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam upaya mencapai tujuan dan aspirasi nasional.

Disiplin nasional bukan ketaatan terhadap tata nilai Pancasila yang dipaksakan dari luar tetapi didasarkan atas pengakuan akan keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.

Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.¹²

Ada dua macam disiplin nasional. Pertama disiplin pribadi (*personal discipline*) sebagai manifestasi atau aktualisasi daripada tanggungjawab pribadi (*personal responsibility*) baik sebagai individu maupun warga negara dan warga masyarakat. Tanggungjawab di sini berarti mengakui dan menerima tata nilai Pancasila dan berusaha hidup sesuai dengan tata nilai itu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, disiplin sosial (*social discipline*) sebagai manifestasi atau aktualisasi tanggungjawab sosial (*social responsibility*) manusia Indonesia sebagai kelompok (keluarga, suku, agama, profesi dan sebagainya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tata nilai Pancasila. Disiplin pribadi dan disiplin sosial atau kelompok adalah dua sisi dari satu mata uang yaitu manusia Indonesia seutuhnya. Keduanya saling melengkapi dan menunjang, jadi bersifat komplementer. Disiplin pribadi tidak dapat dikembangkan secara optimal tanpa dukungan disiplin kelompok, dan sebaliknya, disiplin kelompok tidak dapat ditegakkan tanpa dukungan disiplin pribadi.

Disiplin dan pendidikan berkaitan erat sebagaimana halnya disiplin nasional dengan pendidikan nasional. Disiplin nasional yang sejati (*genuine*) timbul dari kesadaran hati nurani, dan hanya dapat dikembangkan melalui pendidikan nasional. Menurut Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."¹³ GBHN 1988 menyatakan:

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indone-

¹¹*Ibid.*

¹²Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

¹³Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, Bab I, Pasal 1, ayat 2.

sia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada Tanah Air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial.¹⁴

Dengan demikian disiplin merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan nasional.

Disiplin nasional tidak dibatasi pada disiplin moral tetapi mencakup disiplin mental-intelektual. Manusia Indonesia seutuhnya yang berdisiplin nasional tinggi memiliki disiplin moral yang baik sekaligus disiplin mental-intelektual yang kuat dalam menguasai ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional di berbagai bidang. Bukankah pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila? Pembangunan nasional tidak mungkin dilaksanakan oleh manusia-manusia yang hanya memiliki disiplin moral, tetapi mereka yang juga memiliki disiplin mental-intelektual yang kuat dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kalau boleh kita meminjam istilah B.J. Habibie, disiplin mental-intelektual yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan mengendalikan nilai-tambah terhadap dirinya, manusia sendiri harus menjalani proses nilai-tambah, yaitu proses memperoleh dan senantiasa menyempurnakan pengetahuan dan ketrampilannya secara terus-menerus, agar manusia Indonesia itu mampu berkarya secara optimal bagi kepentingan dirinya, masyarakat dan bangsanya. Dengan membangun dirinya sendiri, menguasai ilmu dan teknologi, dan menggunakan ilmu dan teknologi sesuai dengan tun-tunan falsafah hidup Pancasila, manusia In-

donesia menjadi penggerak pembangunan, penggerak transformasi bangsa. Indonesia menjadi suatu bangsa dengan tingkat dan mutu kehidupan dan kesejahteraan yang lebih tinggi dan baik.¹⁵

Disiplin nasional mensyaratkan dan oleh karena itu menuntut *kesadaran* dan *komitmen* tiap warga negara, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, untuk berusaha memenuhi *kebutuhan bangsa* dalam mencapai *tujuan nasional*, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Kesadaran dan komitmen akan melahirkan *rasa tanggungjawab* dalam arti setiap warga negara merasakan sebagai *tugas* dan *kewajibannya* untuk berusaha memenuhi kebutuhan bangsa dan mencapai tujuan nasional. Rasa tanggungjawab berdasarkan kesadaran dan komitmen diharapkan dapat melahirkan tekad, semangat dan sikap belajar dan bekerja keras dalam menjalankan hak dan menunaikan kewajibannya sebagai pribadi dan warga negara serta kelompok.

Bagaimanakah kondisi disiplin nasional sekarang ini? Pengamatan sepintas menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen terhadap kebutuhan bangsa dan tujuan nasional masih kurang dibandingkan dengan kesadaran dan komitmen terhadap kepentingan pribadi dan atau kelompok. Banyak contoh dapat segera kita amati dan saksikan dalam kehidupan sehari-hari tentang keadaan ini. Misalnya, usaha memperkaya diri, dengan seribu satu macam cara atau modus, merugikan kepentingan umum atau orang banyak. Sebuah keluarga dengan telaten memelihara kebersihan dan keindahan rumah

¹⁴Lihat Prof. Dr. B.J. Habibie, *Kebijaksanaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia*, Prasaran pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV di Jakarta, 8-12 September 1986 (Jakarta: Sekretariat LIPI, 1986), hal. 3-9.

¹⁴Ketetapan MPR No. II/MPR/1989.

dan pekarangannya, tetapi dengan seenaknya membuang sampah di luar rumah dan pekarangannya sendiri (di jalan, selokan, kali dan tempat umum) sehingga sampah bertebaran atau tertumpuk di mana-mana. Tanggungjawab sosial dan tanggungjawab nasional masih kurang di antara warga negara Indonesia, dan oleh karena itu perlu diingkatkan.

Pengembangan dan pembinaan tanggungjawab sosial dan nasional memerlukan upaya yang terencana dan lebih terarah, baik melalui jalur pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen setiap warga negara terhadap kepentingan umum dan pembangunan masyarakat Pancasila di atas kepentingan diri dan golongan atau kelompok. Komitmen terhadap kepentingan umum dan masyarakat bukan berarti meniadakan komitmen kepentingan pribadi atau kelompok, karena kepentingan pribadi dan kelompok harus dicapai dalam rangka komitmen terhadap kepentingan umum dan pembangunan masyarakat Pancasila. Di sinilah pentingnya pengendalian diri sehingga kepentingan pribadi diselaraskan dengan kepentingan umum, dan tidak sebaliknya. Pengendalian diri dalam upaya menyelaraskan dan menyerasikan kepentingan diri dan kelompok dengan kepentingan umum, masyarakat dan bangsa memudahkan pembinaan disiplin nasional. Sebaliknya, penguraman kepentingan diri dan kelompok tidak hanya menghambat tetapi bahkan merusak disiplin nasional.

Pembinaan Disiplin Nasional dalam Sistem dan Pola Pendidikan Nasional

Apa yang dimaksud dengan sistem dan pola pendidikan nasional? Menurut Undang-

Undang No. 2 Tahun 1989, "Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional."¹⁶ Selanjutnya dinyatakan: "Sistem Pendidikan Nasional adalah sekaligus alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional."¹⁷ Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional, adalah alat transformasi manusia dan masyarakat Indonesia menjadi manusia dan masyarakat Pancasila. Transformasi ini sekaligus mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bagaimanakah pola pendidikan nasional itu? Pola pendidikan nasional itu bersifat *semesta, menyeluruh* dan *terpadu*. Penjelasan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 menyatakan:

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.¹⁸

Pola pendidikan ini mendukung pengembangan dan pembinaan disiplin nasional, karena sistem dan pola terbuka memungkinkan pengembangan semua warga negara Indonesia dalam satu wadah atau *melting pot* pendidikan Pancasila yang mentransformasikan mereka menjadi manusia Pancasila dalam rangka pengembangan masyarakat Pancasila. Peranan pendidikan formal di seko-

¹⁶Bab I, Pasal 1, ayat 3.

¹⁷Lihat Penjelasan Umum.

¹⁸*Ibid.*

lah sangat besar, karena kurikulum disusun dan suasana kehidupan sekolah secara sadar dan sengaja diciptakan agar kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya manusia-mansusia Indonesia yang dicita-citakan. Dalam konteks ini kita melihat pentingnya peranan berbagai mata pelajaran atau bidang studi dalam pembentukan manusia Indonesia, khususnya bidang-bidang studi yang menyangkut pendidikan moral, terutama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Agama. Pendidikan Agama yang diterapkan dalam konteks pendidikan Pancasila membuat anak-anak toleran terhadap pemeluk-pemeluk agama lain. Akan tetapi pendidikan agama di luar konteks pendidikan Pancasila dapat mengarah pada sikap tidak toleran tidak hanya terhadap para pemeluk agama lain tetapi juga terhadap para pemeluk agama yang sama.

Pola pendidikan nasional yang menyeluruh mengharuskan semua satuan pendidikan di semua jalur (di sekolah dan di luar sekolah), jenjang (tingkat dasar, menengah dan tinggi) dan jenis (umum, kejuruan, keagamaan dan kedinasan) menghasilkan manusia Pancasila, apapun jurusan dan spesialisasinya. Ini memungkinkan lahirnya manusia-mansusia Indonesia yang secara moral pola pikirnya sama yaitu pola pikir Pancasila sesuai dengan *Ekaprasetia Pancakarsa*. Anak-anak diharapkan dapat dididik untuk sadar dan *committed* terhadap pembangunan nasional, sehingga menjadi motivasi bagi mereka untuk belajar dan bekerja keras, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam keikutsertaannya dalam pembangunan nasional.

Dari uraian-uraian terdahulu kita melihat bahwa sistem dan pola pendidikan nasional merupakan wadah yang paling tepat bagi peningkatan pembinaan disiplin na-

sional, bukan saja karena disiplin itu inheren dalam pendidikan tetapi terlebih karena tujuan pembinaan disiplin nasional sudah melekat (*built-in*) dalam tujuan pendidikan nasional serta sistem dan pola pendidikan nasional merupakan wahana yang tepat bagi pengembangan dan pembinaan disiplin nasional. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana caranya untuk memberikan tekanan yang cukup memadai pada pengembangan dan pembinaan disiplin terutama di sekolah. Memang harus diakui bahwa sampai sekarang disiplin belum mendapat tempat yang wajar dan semestinya dalam proses dan kegiatan belajar-mengajar dan dalam suasana kehidupan sekolah sehari-hari. Dalam rangka pembinaan disiplin nasional, sudah waktunya pendidikan disiplin mulai dilaksanakan secara sistematis dan ketat di lembaga-lembaga pendidikan kita. Peningkatan pembinaan disiplin nasional melalui kurikulum formal di sekolah akan dibahas khusus dalam bagian berikutnya.

Dalam bagian ini akan dibahas lebih lanjut tentang pengembangan dan pembinaan disiplin pribadi dan disiplin sosial. Seperti sudah dikemukakan bahwa kedua macam disiplin ini saling berkaitan dan interdependent. Disiplin sosial atau disiplin masyarakat bergantung pada disiplin pribadi baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sebaliknya disiplin pribadi hanya dapat dikembangkan dan dibina secara efektif apabila didukung oleh disiplin sosial atau masyarakat. Pengembangan dan pembinaan keduanya harus saling mendukung dan berlangsung secara simultan.

Pendidikan disiplin harus dimulai sejak anak lahir. Pada prinsipnya pendidikan adalah proses sosialisasi dan pembentukan watak. Pendidikan disiplin harus dilihat dalam

konteks ini. Sejak kecil anak sudah mulai belajar menyelaraskan antara apa yang dia sendiri ingin perbuat dan apa yang orang lain inginkan dia berbuat. Dia belajar mensinkronisasi tujuannya sendiri yang ia ingin capai dengan tujuan yang dikehendaki dan dituntut oleh tata nilai masyarakat. Dalam hal ini proses internalisasi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat amat menentukan. Dalam proses ini kebiasaan memainkan peranan penting sehingga internalisasi tidak dirasakan sebagai dipaksakan dari luar. Dalam proses pembiasaan itu dapat terjadi konflik antara apa yang ingin diperbuat seorang anak dan yang dikehendaki tata nilai, dan mungkin dia tidak dapat memenuhi tuntutan tata nilai itu. Dalam hal ini, harus ditumbuhkan rasa bersalah dan rasa malu. Jadi hukuman atas pelanggaran tata nilai bukan berasal dari luar atau dari orang lain tetapi dari dalam diri anak berupa rasa bersalah atau rasa malu. Jadi rasa malu tidak timbul karena seseorang dipermalukan oleh orang lain, tetapi karena kesadaran sendiri bahwa perbuatannya melanggar tata nilai yang diakuinya sendiri berlaku dalam masyarakat. Demikian juga rasa bersalah bukan karena dipersalahkan oleh orang lain melainkan dari kesadaran sendiri atas pelanggaran itu. Demikianlah disiplin pribadi dan disiplin sosial yang sejati bersumber dari rasa tanggungjawab pribadi dan rasa tanggungjawab sosial, dan bukan sekedar kepatuhan dan konformitas belaka.¹⁹

Disiplin pribadi harus dikembangkan sejak dini, terutama dalam lingkungan keluarga, dengan membiasakan hidup secara teratur. Anak dibiasakan makan, minum, menjaga kebersihan dan kesehatan, belajar, be-

kerja dan tidur secara teratur. Anak dibiasakan pamit kepada orangtua apabila bepergian. Keteraturan yang dibiasakan sejak dini merupakan awal yang baik bagi pengembangan disiplin sosial dan disiplin nasional. Apalagi kalau sejak dini anak mulai dibimbing untuk mempunyai cita-cita dan tujuan hidup dalam menghadapi masa depan. Cita-cita dan tujuan hidup merupakan motivasi belajar dan bekerja keras. Cita-cita dan tujuan hidup pribadi itu harus dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan bangsa sehingga terdapat keserasian antara kepentingan pribadi dan kepentingan bangsa, misalnya menjadi ahli di bidang tertentu (dokter, insinyur, ekonom dan sebagainya) tidak hanya sekedar mencari uang untuk kepentingan pribadi dan keluarga melainkan juga mengabdi bagi kepentingan bangsa atau rakyat banyak. Jadi dengan keahliannya itu ia tidak hanya mencari keuntungan pribadi melainkan juga mengutamakan kepentingan umum.

Kepramukaan adalah salah satu wahana yang sangat efektif dalam upaya pembinaan dan peningkatan disiplin pribadi dan disiplin sosial. Ada dua ciri kepramukaan yang menonjol yaitu keikutsertaan atau keanggotaan yang bersifat sukarela dan kedisiplinan. Setiap anak menjadi anggota Pramuka secara sukarela. Ia mengikuti segala kegiatan Pramuka dengan sukarela. Kegiatan Pramuka selalu disertai dengan kedisiplinan yang tinggi. Ini berarti ia dengan sukarela mengikuti segala kedisiplinan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan hendaknya digalakkan terus dalam rangka upaya peningkatan pembinaan disiplin nasional.

Bagaimana dengan pembinaan disiplin sosial? Upaya pembinaan disiplin sosial lebih sukar daripada pembinaan disiplin pribadi, karena lebih daripada pembinaan

¹⁹Lihat juga George J. Mouly, *Psychology for Effective Teaching*, Third ed. (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1973), hal. 200.

disiplin pribadi. Dalam disiplin sosial tidak hanya diperlukan kesadaran dan pengendalian diri secara pribadi melainkan juga kesadaran dan pengendalian diri secara kolektif, rasa kebersamaan dalam memenuhi hak dan menunaikan kewajiban bersama sebagai satuan sosial untuk mencapai tujuan bersama (sebagai keluarga, sekolah, perkumpulan, masyarakat dan bangsa). Kesadaran dan sikap kebersamaan, kemampuan mengendalikan diri dan rasa tanggungjawab bersama (kolektif) untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan bersama disertai belajar dan bekerja keras dalam mencapai tujuan adalah inti disiplin sosial. Apabila disiplin sosial telah terbina maka satu langkah lagi mencapai disiplin nasional. Yang terakhir dapat tercapai apabila setiap individu atau warga (keluarga, kelompok, bangsa) dapat mengendalikan diri dan menerima dan menempatkan kepentingan dan tujuan nasional di atas kepentingan diri dan kelompok.

Disiplin sosial berawal dari kesadaran sosial, termasuk kesadaran akan kebutuhan, kepentingan dan tujuan bersama (sebagai keluarga, masyarakat dan bangsa). Kesadaran itu menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama untuk memenuhi kebutuhan itu dan untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan rasa tanggungjawab tersebut, dikembangkan sikap-sikap yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan dan tujuan bersama, seperti sikap belajar dan bekerja keras, berdisiplin, teguh dan tabah. Perlu disadari bahwa kepentingan dan tujuan bersama bukanlah *jumlah* kepentingan dan tujuan pribadi, melainkan satu totalitas kesamaan dan kebersamaan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh satuan sosial atau masyarakat. Dengan demikian setiap anggota satuan sosial merasa *committed* dan

bertanggungjawab untuk berupaya mencapai tujuan bersama. Disiplin sosial menuntut setiap anggota satuan sosial yang terkait mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama. Ini tidak berarti dia meniadakan kepentingan dan tujuan pribadinya melainkan menyeraskan kepentingan dan tujuan bersama, dan pemenuhan kepentingan dan tujuan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan dan tujuan bersama.

Maka diperlukan pembinaan disiplin pribadi dan disiplin sosial secara serasi, selaras dan seimbang secara simultan dalam ketiga lingkungan pendidikan: keluarga, sekolah dan masyarakat. Disiplin sosial mulai dibina dari disiplin keluarga, karena keluarga merupakan satuan sosial terkecil. Inti disiplin keluarga adalah kemampuan setiap anggota keluarga mengendalikan diri dan mengakui dan menerima tujuan bersama keluarga dengan kesadaran dan bertanggungjawab dan berupaya belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan itu. Disiplin sosial tentu harus didukung oleh disiplin pribadi dari setiap anggota keluarga. Dengan menyadari tanggungjawabnya masing-masing, setiap anggota keluarga secara sukarela menunaikan tugas dan kewajibannya untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dalam kebersamaan itu bapak berperan sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga dia adalah pemimpin (*leader*). Ibu bersama bapak berperan sebagai pendidik. Sebagai pendidik mereka berdua menjadi teladan dan panutan bagi anak-anaknya. Dalam pembinaan disiplin sosial, kepemimpinan dan keteladanan yang merupakan panutan para anggota satuan sosial mutlak perlu. Tanpa keteladanan dan kepemimpinan yang efektif, disiplin sosial sukar dikembangkan dan dibina.

Wahana lain untuk mengembangkan disiplin sosial adalah sekolah. Yang perlu dibahas adalah disiplin kelas. Suasana kelas yang otoriter, di mana murid-murid hanya taat pada peraturan tata tertib yang dipaksakan dari luar, bukanlah cara yang baik untuk mengembangkan disiplin sejati. Suasana kelas yang kondusif bagi pembinaan disiplin sejati adalah suasana belajar-mengajar yang bermakna (*meaningful learning*) bagi anak-anak. Bermakna di sini tidak hanya berkaitan dengan bahan-bahan pelajaran tetapi juga dengan tujuan belajar. Mereka harus disadarkan mengapa dan untuk apa mereka belajar dan bekerja keras. Guru harus memberi motivasi mengapa dan untuk apa anak-anak mempelajari berbagai mata pelajaran dari kurikulum sekolah. Hendaknya mereka disadarkan bahwa semua itu dipelajari dan dikuasai demi kepentingan masa depan mereka, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu mereka perlu mematuhi disiplin kelas dan sekolah. Tanpa kesadaran dan motivasi itu kegiatan belajar-mengajar bersifat rutin yang membosankan tidak hanya bagi para pelajar tetapi juga bagi para guru.

Peningkatan Pembinaan Disiplin Nasional Melalui Kurikulum Formal

Sekolah merupakan *melting pot* bagi pembentukan manusia Pancasila. Anak-anak dari berbagai latar-belakang (sosial-ekonomi, suku, ras, agama dan budaya) dididik bersama di sekolah dengan kurikulum yang seragam berdasarkan Pancasila. Salah satu tujuan utamanya adalah melahirkan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki kualitas seperti dimaksudkan oleh tujuan pendidikan nasional. Sehubungan dengan itu sekolah adalah lembaga pendidikan yang ideal bagi upaya peningkatan pembinaan di-

siplin nasional. Sungguh ideal bagi semua lembaga pendidikan formal, seperti sekolah umum, sekolah kejuruan dan sekolah agama (madrasah), untuk dapat mencapai standar minimum dalam proses belajar-mengajar dan hasil belajarnya. Kenyataannya, terdapat diskrepansi yang besar pada kondisi berbagai lembaga pendidikan formal baik menurut jenis dan jenjang, maupun menurut lokasi dan daerah. Kondisi itu berkaitan dengan fasilitas bangunan dan perlengkapannya, sarana pelajaran, biaya operasional, kualifikasi guru, latar belakang sosial ekonomi murid-murid, lokasi kota (besar dan kecil) dan daerah pedesaan, keterpenciran (secara fisik dan kultural). Semua mempengaruhi efektifitas proses transformasi murid-murid dengan berbagai latar belakang menjadi manusia-manusia Indonesia yang dicita-citakan.

Kondisi sekolah-sekolah (umum dan kejuruan) umumnya lebih baik daripada kondisi madrasah-madrasah. Kondisi lembaga-lembaga pendidikan negeri umumnya lebih baik daripada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Kondisi di kota-kota (besar dan kecil) umumnya lebih baik daripada kondisi di pedesaan. Ini tidak berarti bahwa kondisi disiplin pada lembaga-lembaga pendidikan di kota lebih baik daripada di pedesaan, dan juga pengembangan dan pembinaan disiplin di kota lebih mudah daripada pembinaan di lembaga-lembaga pendidikan yang lebih baik itu. Bahkan sebaliknya mungkin yang benar. Pengembangan disiplin (pribadi, sosial dan nasional) barangkali lebih mudah dilakukan lembaga-lembaga pendidikan formal di pedesaan daripada di perkotaan. Bukankah perkelahian pelajar terjadi di kota-kota besar? Umumnya anak-anak di daerah pedesaan lebih mematuhi tata nilai lingkungan.

Dalam konteks itu kita harus memahami pelaksanaan kurikulum formal di sekolah-sekolah. Secara konsepsional (*by design*) kurikulum-kurikulum sekolah dan madrasah disusun dengan maksud untuk dipergunakan guru-guru sebagai pola pembentukan atau transformasi anak-anak yang berasal dari berbagai latar belakang menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berpola perilaku Pancasila, artinya yang mengetahui, memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dan berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai itu. Dengan pola perilaku itu, mereka diharapkan sekaligus memiliki disiplin moral dan intelektual yang tinggi. Dalam hal ini kita harus melihat kedudukan dan peranan berbagai mata pelajaran di sekolah dan madrasah.

Bidang-bidang studi yang paling tepat bagi pengembangan disiplin moral (pribadi, sosial dan nasional) adalah Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Agama dan Sejarah Nasional. P-4 dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dapat menjadi wahana peningkatan pembinaan disiplin nasional yang efektif. Semua bidang studi dan pelajaran itu harus dipergunakan sebagai satu paket terpadu dan wahana pengembangan moral dalam berbagai seginya. Sebenarnya isi atau materi inti PMP, P-4 dan PSPB adalah moral Pancasila. Yang berbeda adalah strategi dan cara penyampaian.

Pendidikan Moral Pancasila merupakan proses pendidikan moral jangka panjang, yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Tekanan dilekatkan pada proses sosialisasi dan pembentukan sikap sesuai dengan tata nilai Pancasila, seperti sikap kebersamaan, kekeluargaan dan toleransi. Pada tingkat SD dan tingkat-tingkat selanjutnya sudah ditekankan pada segi kognitif, afektif dan psikomotor

dalam arti penguasaan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pembentukan sikap dan pengamalan. Materi Pendidikan Moral Pancasila diajarkan menurut 3 segi, yaitu: (1) segi historis lahirnya Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; (2) segi hukum kedudukan dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum dan tata nilai yang menjadi pedoman kehidupan berma-syarakat, berbangsa dan bernegara; dan (3) materi pendidikan moral sesuai dengan tata nilai Pancasila, terutama materi P-4.

Penataran P-4 adalah latihan jangka pendek, suatu *crash program*, yang berlangsung 1-2 minggu bagi para siswa yang baru masuk SMP dan SMA serta mahasiswa yang baru masuk Perguruan Tinggi. Materi yang diberikan adalah ke-36 butir-butir P-4, UUD 1945, GBHN dan materi-materi lain yang relevan. Materi-materi disajikan melalui ceramah, diskusi, bermain peran (*role-playing*), praktik (seperti upacara bendera) dan simulasi. Sementara itu, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ditekankan pada pendidikan nilai-nilai kejuangan, jiwa dan semangat Proklamasi dan Perjuangan 1945, yang disajikan dalam konteks sejarah atau episode dan peristiwa sejarah. Dengan demikian generasi muda diharapkan dapat mewarisi dan melestarikan nilai-nilai perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Penyajian pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebaiknya diintegrasikan dengan atau dalam bidang studi Sejarah Nasional, sehingga sejarah nasional tidak hanya sekedar menyajikan kronologi peristiwa sejarah melainkan juga me-lahirkan nilai-nilai kejuangan yang perlu diwarisi dan dilestarikan demi kelanjutan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari segi pengembangan dan pembinaan disiplin nasional, apa yang diharapkan dari pelaksanaan kurikulum PMP, P-4, PSPB dan Sejarah Nasional

adalah tumbuh berkembangnya kesadaran dan komitmen setiap warga negara terhadap kepentingan dan tujuan nasional di atas kesadaran dan komitmen terhadap kepentingan dan tujuan pribadi dan kelompoknya masing-masing.

Dalam konteks ini penyelenggaraan Pendidikan Agama di sekolah menjadi penting. Pendidikan Agama di luar konteks Pendidikan Pancasila dapat mengarah pada keadaan di mana agama dan Pancasila dipertentangkan, fanatisme kelompok agama semakin dipertajam, bahkan perpecahan di antara aliran-aliran atau kelompok-kelompok dalam satu agama. Semuanya membahayakan tidak hanya persatuan dan kesatuan bangsa melainkan juga kepentingan dan tujuan nasional. Pendidikan Agama dalam konteks tata nilai Pancasila tidak hanya bertujuan mengetahui materi, mengembangkan sikap dan melatih pengamalan ritual agama yang bersangkutan, tetapi juga mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan masing-masing agama motivasi pengamalan tata nilai Pancasila, yang pada hakekatnya sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian Pendidikan Moral Agama mendukung peningkatan pembinaan moral dan disiplin nasional. Setiap pemeluk agama diharapkan dapat mengendalikan diri dan dengan sadar dan sukarela menerima tata nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka pembinaan disiplin nasional, disiplin dan komitmen moral saja belum cukup, tetapi harus disertai disiplin dan komitmen intelektual terutama bagi pembangunan nasional di masa yang akan datang. Meminjam kata-kata Habibie, "Proses membangun itu tidak lain adalah proses

nilai-tambah; ... yang dilaksanakan oleh manusia dengan segala kemampuannya: tenaganya, perasaannya, akalnya, ilmu, teknologi dan budayanya."²⁰ Pendidikan dan kurikulum sekolah harus mampu mengembangkan kemampuan para siswa untuk mengendalikan proses nilai tambah pada dirinya sendiri dan nilai tambah terhadap materi atau produk yang dihasilkannya dalam proses pembangunan. Proses pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai ke Perguruan Tinggi disebut Habibie sebagai proses persiapan, dan tahap berikutnya, sejak ia mulai bekerja, adalah tahap penyempurnaan.²¹ Pada tahap kedua seseorang senantiasa menyempurnakan dirinya secara mental, moral, spiritual, intelektual dan ketrampilan.

Dengan proses nilai tambah, baik terhadap dirinya sendiri maupun materi atau produk yang dihasilkannya, komitmen seseorang terhadap pembangunan akan lebih produktif dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara, terutama dalam menghadapi era tinggal landas yang akan dimulai pada Repelita VI. Proses pembangunan yang mengandalkan kemampuan sendiri menuntut manusia-manusia yang berkualitas tinggi, berdisiplin (moral dan intelektual) tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) modern dan komitmen tinggi terhadap pembangunan itu sendiri. Dengan demikian dapatlah terpenuhi harapan Presiden yang disampaikan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-81: "Proses tinggal landas yang dimulai dalam Repelita VI nanti merupakan momen kebangkitan nasional yang kedua, yang dilaksanakan dalam suasana hidup kebangsaan yang sudah kukuh dan bersatu padu. Dalam proses

²⁰Prof. Dr. B.J. Habibie, *op.cit.*, hal. 3.

²¹*Ibid.*, hal. 7.

itu, pembangunan nasional harus berkembang dengan penuh kemandirian.”²²

Beberapa Kendala dalam Pembinaan Disiplin Nasional

Uraian terdahulu memaparkan berbagai sumber yang mendukung upaya peningkatan pembinaan disiplin nasional pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pengertian, legalitas dan validitas tata nilai Pancasila sudah jelas. Kita semua ingin mengembangkan disiplin nasional. Kurikulum sekolah-sekolah sudah mengandung pengembangan disiplin nasional. Lembaga-lembaga pendidikan pun sudah siap mengembangkan disiplin nasional. Namun perlu disadari bahwa jalan untuk mencapai maksud tersebut tidak lurus dan mulus.

Pembinaan disiplin pribadi, disiplin sosial dan disiplin nasional tidak bersifat linear tetapi simultan karena ada sifat interdependensi antara ketiganya. Kita tentu berharap bahwa dengan pembinaan disiplin pribadi kita dapat membina disiplin sosial, dan dari disiplin sosial kita meningkatkannya pada disiplin nasional. Tentu proses pendidikan dimulai dengan disiplin pribadi. Tetapi disiplin pribadi hanya dapat dikembangkan dan dibina secara efektif apabila didukung oleh lingkungan sosial, terutama penegakan tata tertib sosial dan keteladanan para pemimpin dan para pendidik. Sebaliknya, disiplin sosial dapat ditegakkan secara efektif apabila didukung oleh disiplin pribadi para warga masyarakat. Disiplin nasional juga baru dapat ditegakkan apabila didukung oleh adanya disiplin pribadi dan disiplin sosial. Akan tetapi kita tidak boleh terperangkap dalam lingkaran setan: mana yang lebih dahulu ada, telur atau ayam. Semua disiplin itu

harus dikembangkan dan dibina secara simultan.

Namun upaya peningkatan pembinaan disiplin nasional dalam sistem dan pola pendidikan nasional harus menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala itu antara lain adalah kurang serasinya tata nilai yang dipraktekkan dalam ketiga lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat), lemahnya penegakan hukum (*law-enforcement*) dalam masyarakat, kurangnya keteladanan generasi tua sebagai panutan generasi muda, merosotnya kewibawaan para pendidik terutama guru-guru terhadap murid-murid, dan rendahnya status sosial ekonomi guru-guru.

Kendala pertama adalah kurang serasinya nilai dan norma yang dipraktekkan di masing-masing lingkungan pendidikan (sekolah, sekolah dan masyarakat). Kita tentu mengharapkan berlakunya tata nilai Pancasila dan ada upaya untuk menerapkannya di semua lingkungan pendidikan. Dengan kata lain, kita ingin melihat Pancasila *in action* di sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat umumnya. Harapan itu didasarkan atas upaya pemasarakatan tata nilai Pancasila yang intensif dan ekstensif melalui penataran P-4 selama ini. Namun dalam praktik jarak (*gap*) antara kenyataan dan yang seharusnya masih besar. Penegakan disiplin dalam ketiga lingkungan umumnya masih lemah. Ketiga lingkungan itu seharusnya saling menuju-jang dalam penegakan disiplin. Lemahnya penegakan disiplin tidak memungkinkannya. Ada sekolah-sekolah yang berusaha secara konsisten menegakkan disiplin, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari kurang diacuhkan. Ada keluarga-keluarga yang secara konsisten berusaha melaksanakan disiplin dalam

²²Lihat *Kompas*, 22 Mei 1989.

lingkungannya, namun anak-anak menemukan hal-hal yang kurang serasi dengan yang diberlakukan dalam lingkungan keluarganya. Keadaan yang demikian tidak hanya mengurangi dukungan pengembangan dan pembinaan disiplin tetapi bahkan membingungkan anak-anak.

Kendala kedua adalah lemahnya penerapan hukum (*law-enforcement*) dalam masyarakat. Kelemahan itu tidak hanya terlihat pada anggota masyarakat yang seharusnya mematuhi segala ketentuan hukum dan peraturan tetapi juga pada para penegak hukum. Misalnya tata tertib lalu lintas. Sopir-sopir bis dalam usahanya mencapai target setoran sering melanggar peraturan lalu lintas, tetapi para penegak hukum jarang menindak mereka. Contoh lain adalah kebersihan lingkungan. Sudah ada ketentuan larangan membuang sampah sembarangan, tetapi mengapa anggota masyarakat membuang sampah sembarangan sehingga bertebaran di mana-mana? Ada sanksi denda terhadap pelanggar, tetapi mengapa belum ada yang dihukum atas pelanggaran itu? Para pembaca tentu dapat menambah sendiri contoh-contoh kelemahan penegakan hukum di lingkungannya sendiri.

Kendala ketiga adalah langkanya keteladan generasi tua (pemimpin, guru, orangtua dan lain-lain) sebagai panutan generasi muda, terutama dalam pengamalan nilai dan norma yang ingin dididikkan kepada generasi muda. Proses pendidikan itu mengidentifikasi diri anak terhadap pendidik. Apabila generasi muda tidak melihat manifestasi atau realisasi nilai dan norma dalam diri dan perilaku generasi tua, maka dengan apa generasi muda dapat mengidentifikasi dirinya? Disiplin tidak bisa dikembangkan dan dibina dengan kata-kata saja (seperti pengetahuan tentang disiplin atau nasihat-nasi-

hat). Disiplin sejati hanya dapat ditumbuh-kembangkan melalui kesadaran dan pengendalian diri yang didukung oleh proses identifikasi anak terhadap pendidik yang dalam diri dan perilakunya terlihat realisasi nilai dan norma yang ingin dididikkan pada anak didik.

Kendala keempat adalah gejala kemerosotan kewibawaan guru. Kita sama-sama mengetahui bahwa citra guru di masa lampau tinggi sekali. Kewibawaan yang tinggi itu bisa dicapai terutama karena para guru di masa lampau menguasai ilmu yang diajarkannya jauh melebihi siapapun dan kehidupannya tidak atas pemilikan harta kebendaan. Penguasaan ilmu pengetahuan guru-guru sekarang tidak terlalu jauh di atas pengetahuan rata-rata muridnya. Lagipula sekarang pemilikan harta benda menjadi faktor yang membuat seseorang dihormati dalam masyarakat. Keadaan sosial ekonomi guru-guru sekarang berada di bawah rata-rata tingkat sosial ekonomi orangtua murid yang diajarnya. Jadi sekarang ini kebanyakan guru kurang dalam kelebihan penguasaan ilmu pengetahuan yang diajarkannya dan kurang dalam status sosial ekonomi. Maka tidak mengherankan jika kewibawaan guru-guru itu tidak lagi setinggi daripada keadaan di masa lampau.

Kendala-kendala tersebut ditonjolkan dengan maksud agar kita menyadari bahwa pengembangan dan pembinaan disiplin (pribadi, sosial dan nasional) bukan tugas yang mudah. Banyak kendala yang harus diatasi, dan untuk itu diperlukan kemauan politik dan keberanian moral yang sungguh-sungguh dari semua pihak (pemerintah, masyarakat terutama para pemimpinnya, orangtua sebagai panutan keluarga dan para guru) untuk berusaha hidup sesuai dengan tata nilai Pancasila, hidup berdisiplin dan memberi-

kan keteladanan serta menjadi panutan bagi generasi muda umumnya dan para murid dan siswa khususnya. Hanya dengan cara demikian segala usaha dan upaya pengembangan dan pembinaan disiplin nasional dapat efektif.

Kesimpulan dan Harapan

Pengertian disiplin *inherent* dalam pengertian pendidikan. Salah satu tugas dan fungsi pendidikan adalah mengembangkan disiplin moral dan intelektual anak-anak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Disiplin dalam pendidikan didasarkan atas pembentukan kata hati. Disiplin dalam pengertian ini bukanlah sekedar kepatuhan pada tata nilai yang dipaksakan dari luar melainkan merupakan kemampuan pengendalian diri sesuai dengan hati nurani dan dengan sadar dan sukarela menerima tata nilai yang berlaku dalam masyarakat dan berusaha hidup sesuai dengan tata nilai tersebut. Meskipun pengertian disiplin inherent dalam pengertian pendidikan, dalam praktek proses pendidikan sering lebih

mengutamakan pengembangan kemampuan kognitif daripada sikap dan pengamalan hidup berdisiplin.

Sebagaimana pengertian disiplin inherent dalam pengertian pendidikan, pengertian disiplin nasional juga inherent dalam pengertian pendidikan nasional. Dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, disiplin hendaknya dapat dikembangkan dan dibina secara lebih terarah, karena tujuan hidup berdisiplin itu terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. Sudah harus menjadi kewajiban ketiga lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat) untuk secara saling mendukung meningkatkan upaya pengembangan dan pembinaan disiplin nasional berdasarkan tata nilai Pancasila. Semua pihak (pemerintah, para pemimpin formal dan informal, para orangtua dan pendidik serta guru) harus memiliki tekad dan kemauan politik untuk memperlihatkan keteladanan dalam hidup berdisiplin sehingga mereka menjadi panutan bagi generasi muda. Dengan demikian kedisiplinan nasional dapat dikembangkan secara efektif dalam diri generasi muda.

KEPUSTAKAAN

Brubacher, John S, *A History of the Problems of Education*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1947.

Brubacher, John S, *Modern Philosophies of Education*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1962.

Bruner, Jerome S, *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press, 1969.

Bruner, Jerome S, *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1975.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Sekolah Dasar* (1975) (Satu set). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Sekolah Dasar* (1984). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Sekolah Menengah Pertama* (1984), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum*

Sekolah Menengah Atas (1984). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

Harris, Chester W, *Encyclopedia of Educational Research*. Third edition. New York: The MacMillan Company, 1960.

Habibie, BJ, *Kebijaksanaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia* (Sebuah makalah yang disajikan dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV, tanggal 8-12 September 1986 di Jakarta). Jakarta: Sekretariat LIPI, 1986.

Jasin, Anwar, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar, Sejak Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Joyce, Bruce & Weil, Marsha, *Models of Teaching*. Second edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice/Hall International, Inc., 1980.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1987 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Langeveld, MJ, *Beknote Theoretische Paedagogiek*. Groningen, Jakarta: J.B. Wolters, 1955.

Mouly, George J, *Psychology for Effective Teaching*. Third edition. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1973.

Purpel, David & Ryan, Kevin, eds, *Moral Education. ... It Comes with the Territory*. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 1976.

Undang-Undang Dasar 1945.

Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged, Second edition. New York: Simon and Schuster, 1979.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Orientasi Pendidikan Dasar Kita

Washington P. NAPITUPULU

Pendahuluan

PENDIDIKAN dapat dibataskan sebagai usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah tingkah-laku manusia ke arah yang diinginkan. Batasan ini berlaku, baik untuk jalur pendidikan sekolah maupun untuk jalur pendidikan luar sekolah (lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat). Proses pendidikan itu berlangsung dalam tiga lingkungan pendidikan, yakni keluarga, sekolah dan masyarakat.

Arah yang diinginkan di dalam proses pendidikan di Indonesia yang merupakan tujuan total atau tujuan akhir pendidikan adalah terbentuknya manusia Pancasila, yakni manusia yang berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan dan mengungkapkan kelima sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari atau seperti yang terinci dalam ke-36 butir nilai luhur Pancasila (Ekaprasetia Pan-

cakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Sebelum tiba pada tujuan total pendidikan itu, maka perlu dicapai terlebih dahulu tujuan-tujuan antara, yakni *pertama*, pengetahuan atau informasi fungsional yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup; *kedua*, keterampilan yang relevan yang dapat dijadikan bekal untuk mencari nafkah sehari-hari; *ketiga*, sikap mental pembaruan dan pembangunan. Tujuan antara yang pertama (pengetahuan) biasanya disampaikan melalui pengajaran, termasuk kuliah, ceramah, khutbah, dan sebagainya; yang kedua, keterampilan melalui latihan, termasuk pengulangan, dan sebagainya; dan yang ketiga, sikap mental melalui keteladanan. Dalam kaitan yang terakhir inilah penting sekali disimak dan dilaksanakan ketiga prinsip kependidikan atau kepemimpinan yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Dr. Ki Hajar Dewantara, *ing ngarso sung tulodo* (di depan menjadi contoh atau teladan); *ing madyo mangun karso* (di antara yang dipimpin atau dibimbing

membina kehendak dan inisiatif serta kegairahan hidup); dan *tut wuri handayani* (dari belakang mendorong ke arah kemandirian).¹

Pendidikan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan sejak tanggal 27 Maret 1989² -- selanjutnya dalam makalah ini, setiap kali disebut undang-undang maka yang dimaksud adalah undang-undang ini -- di dalam pertimbangannya yang merupakan arah dan tujuan pendidikan -- termasuk pendidikan dasar -- mengemukakan, "bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

Selanjutnya mengenai pendidikan nasional undang-undang menyatakan, antara lain, bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Pernyataan ini tentu bukan berarti, bahwa kita menutup diri terhadap kemajuan di luar Indonesia, apalagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di dalam menerima pandangan dan gagasan baru dari luar negeri hendaklah kita melaksanakan pemilihan atau seleksi, yakni dengan memanfaatkan

nilai-nilai luhur bangsa kita sebagai alat sarungan.

Sistem pendidikan nasional kita adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu memecahkan berbagai masalah dalam berbagai bidang kehidupan, baik masalah yang dihadapi oleh penduduk perorangan maupun masalah yang dihadapi oleh penduduk secara kolektif (keseluruhan). Bangsa yang cerdas selalu mengarahkan pandangan ke masa depan dan berusaha membangun kehidupan yang lebih baik bagi keseluruhan bangsa. Manusia Indonesia seutuhnya yang dikembangkan itu adalah manusia sebagai satu kesatuan fisik-biologis dan mental-spiritual, manusia yang berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan semua ajaran Tuhan Yang Maha Esa di dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan dirinya, sesama manusia, dan lingkungan hidup. Di dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungan hidup itulah diungkapkan keluhuran budi pekerti, artinya perlakuannya terhadap

¹Lihat juga buku I Materi Pelengkap Penataran P4.

²UU RI No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara RI No. 3390.

sesama manusia dan lingkungan hidup adalah atas dasar cinta-kasih, saling menghormati, ramah-tamah, lemah-lembut, dan manusiawi. Manusia Indonesia seutuhnya itu dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup, baik mutu dan taraf hidup diri sendiri maupun mutu dan taraf hidup sesama manusia. Ia berperan serta aktif-positif untuk mengibarkan panji belajar, yakni "memasyarakatkan belajar dan membelajarkan masyarakat." Ia juga perlu menjalankan secara teratur berbagai kegiatan yang akan membantunya sehat jasmani dan rohani, khususnya pengibaran panji olahraga, "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat," dan pelaksanaan anjuran 4 sehat 5 sempurna. Kepribadian yang mantap dan mandiri adalah kepribadian yang seimbang dan menyenangkan, karena mengetahui benar ke mana ia bergerak di dalam kehidupannya dalam upaya membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua. Di dalam semua gerak kehidupannya tampak diungkapkan rasa tanggung-jawab yang tebal terhadap masyarakat dan bangsanya, bukan hanya melalui ucapan tapi terutama melalui perbuatan nyata.

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah persiapan yang diperlukan oleh seseorang, baik yang menyangkut pengetahuan atau informasi fungsional, keterampilan yang relevan, maupun sikap mental pembaruan dan pembangunan yang dapat digunakannya sebagai modal dasar untuk maju terus di dalam kehidupannya. Undang-undang membataskan pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi pe-

ranannya di masa yang akan datang. Tentu yang dimaksud dengan peranan di sini adalah peranan sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat lingkungannya. Ini berarti, bahwa pendidikan bersifat teologis dan terarah ke masa depan. Selanjutnya, pendidikan selalu bersifat etis-religius, sehingga sering pula secara bergurau dikemukakan, bahwa "usaha tukang copet untuk melatih anaknya terampil mencopet" tidak termasuk pendidikan!

Setiap warga masyarakat diharapkan mampu memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat, dan peranan itu tentu membantu masyarakat membangun diri menjadi tempat yang damai dan sejahtera; dan hal itu tentu akhirnya ditujukan bagi warga masyarakat itu sendiri! Peranan yang akan dimainkan oleh tamatan suatu lembaga pendidikan dasar adalah *pertama*, terjun ke dalam masyarakat atau ke dunia kerja, dan untuk keperluan ini, maka bahan persiapan yang diperolehnya harus memadai mutu dan jumlahnya, dan *kedua*, melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan menengah, dan untuk keperluan ini bahan persiapan yang diperolehnya juga harus memadai jumlah dan mutunya. Tentu, semua ini dalam pengertian "dasar" di atas mana pengetahuan dan pengalaman baru akan dibangun oleh warga masyarakat itu sendiri. Dengan perkataan lain, seorang tamatan lembaga pendidikan dasar seyogyanya sudah cukup termotivasi untuk mampu dan mau belajar sepanjang hayat, baik melalui lembaga pendidikan menengah yang diikuti, pengalaman kerja yang dihayati maupun melalui berbagai program pendidikan luar sekolah -- kursus, kelompok belajar, belajar mandiri dengan menggunakan bahan belajar "kerjakan sendiri" atau *do-it-yourself* -- yang diikutinya sambil bekerja. Mengenai pendidikan dasar ini un-

dang-undang berbunyi: "Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang menuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah."

Jika pendidikan dasar pada jalur pendidikan sekolah kemungkinan besar meletakkan tekanan yang sedikit lebih berat pada pencapaian tujuan kedua, yakni mampu mengikuti pendidikan menengah, maka pada jalur pendidikan luar sekolah tekanan yang sedikit lebih berat seyogyanya diletakkan pada tujuan yang pertama yakni mampu hidup di dalam masyarakat, tanpa mengganggu pelaksanaan bunyi undang-undang mengenai keleluasaan gerak peserta didik, dan tanpa melupakan bahwa kedua tujuan itu perlu diraih oleh tamatan pendidikan dasar.

Administrasi dan Kelembagaan

Jika kita berpendapat, bahwa kualitas, efektivitas dan efisiensi pendidikan dasar 9 tahun harus ditingkatkan, maka pertama, pendidikan dasar ini seyogyanya ditangani oleh tenaga-tenaga profesional yang benar-benar dipersiapkan untuk itu; yang dimaksud di sini bukan hanya tenaga pendidik yang langsung berhadapan dengan peserta didik, tapi juga tenaga kependidikan, antara lain pengelola, pengawas, petugas evaluasi dan pemantauan, dan sebagainya; kedua, mengingat bahwa pengelolaan pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maka pengelolaan dalam satu tangan mutlak diperlukan demi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas lembaga-lembaga pendidikan itu,

termasuk tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, supervisi, pelaporan, evaluasi, pemantauan, dan sebagainya; maka seyogyanya dengan kepala dingin ditinjau kembali "Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I."

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 yang sudah berusia 38 tahun ini yang dalam istilah sehari-hari sudah dikenal dengan dualisme pengelolaan SD (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat!) dengan biaya tinggi yang diakibatkannya (dua buah kantor mengurus SD) sudah perlu dicabut. Apalagi sesudah kita memiliki Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tanggal 23 Juli 1974; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah mempunyai perangkat kantor sampai tingkat kecamatan, dan berkemampuan untuk mengelola upaya-upaya pendidikan dan kebudayaan di daerah, khususnya pendidikan dasar dan menengah.

Tenaga Kependidikan

Bersyukurlah kita, bahwa formasi terbuka bagi guru sudah akan menjadi kenyataan (Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 26/Menpan/1989, tentang Angka Kredit Guru tanggal 2 Mei 1989), sehingga seorang guru SD yang memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar sampai meraih gelar sarjana tidak

perlu meninggalkan SD hanya untuk kenaikan golongan kepangkatannya. Dengan peraturan baru ini, maka kemungkinan untuk membangun pendidikan dasar sebagai fundamen yang kuat bagi pendidikan lanjutannya dapat dilaksanakan, baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Dengan peraturan baru ini pula jalur pendidikan luar sekolah akan memperoleh keuntungan, karena tenaga kependidikan dan tenaga pendidik pada jalur pendidikan sekolah untuk memperoleh kredit dapat mengabdikan diri membantu pelaksanaan program-program pendidikan luar sekolah.

Jika bantuan tenaga dari jalur pendidikan sekolah belum mencukupi jumlahnya, maka seperti yang sekarang ini dilaksanakan, kekurangan tenaga itu diambilkan dari tenaga terdidik yang tersedia yang mau mengabdikan diri bagi sesama biarpun ia bukan tamatan lembaga pendidikan tenaga keguruan. Pada jalur pendidikan luar sekolah sudah lama kita mengubah perumpamaan nenek moyang, "jika tiada rotan, akar pun jadilah" dengan menambahkan, karena akar itu adalah manusia, "mudah-mudahan melalui pembinaan yang sungguh-sungguh, akar itu berubah menjadi akar bahan" (lebih kuat daripada rotan dan dapat menyembuhkan penyakit rematik?).

Kurikulum

Undang-undang membataskan pengertian kurikulum sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Rencana dan pengaturan tentang isi, bahan, dan metode atau cara ini tentu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mental dan fisik para peserta didik:

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam hubungan ini, undang-undang telah lebih jauh menegaskan sebagai berikut: "Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan."

Selanjutnya dinyatakan, bahwa isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Ini tidaklah berarti, bahwa ketiga hal ini harus menjadi tiga mata pelajaran atau mata kuliah dalam jadwal pelajaran sehari-hari, akan tetapi isi kurikulum yang harus dipelajari memuat ketiganya. Pendidikan Pancasila untuk jenjang pendidikan dasar tentu dapat diberikan melalui pengaturan suasana belajar-mengajar atau dipadukan ke dalam proses belajar-mengajar mata pelajaran yang sudah ada, dan tidak harus "menghafalkan" kelima sila Pancasila apalagi ke-36 butir nilai luhur Pancasila.

Tenaga pendidik yang selalu berusaha menunjukkan kepada peserta didik, bahwa ia bertekad memperkecil jurang atau kesenjangan antara "apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikehendaki" dengan "apa yang dikatakan atau diucapkan" dengan "apa yang dilakukan atau diperbuatnya" pada hakikatnya sudah menjalankan pendidikan Pancasila dan pendidikan agama. Demikian pula, jika ia berusaha sekuat tenaga untuk

mengendalikan diri di dalam tindak-tanduknya terhadap peserta didik dan teman sejawatnya maupun orangtua murid, dan orang-orang lain yang berhubungan dengannya. Demikian pula dengan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan perkataan lain, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan janganlah disajikan kepada para peserta didik berusia muda, seperti penyajian kepada orang-orang dewasa, apalagi seperti penyajian kepada para mahasiswa. Terutama bagi para peserta didik yang masih muda usia penyajiannya harus serentak memperhatikan anak sebagai manusia seutuhnya: cipta, rasa dan karsa (ranah kognitif, ranah efektif dan ranah psiko-motor). Jadi jangan sampai penguasaan nilai-nilai yang akan dijadikan pedoman tingkah-laku itu hanya kognitif sifatnya, sebab jika hanya demikian maka proses "pendarahdagingan nilai" tidak akan terjadi, dan pengertian tentang nilai-nilai bersifat "buah-bibir" saja.

Undang-undang juga sudah menegaskan isi kurikulum pendidikan dasar yang memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang: (a) pendidikan Pancasila; (b) pendidikan agama; (c) pendidikan kewarganegaraan; (d) bahasa Indonesia; (e) membaca dan menulis; (f) matematika (termasuk berhitung); (g) pengantar sains dan teknologi; (h) ilmu bumi; (i) sejarah nasional dan sejarah umum; (j) kerajinan tangan dan kesenian; (k) pendidikan jasmani dan kesehatan; (l) menggambar; serta (m) bahasa Inggris.

Sejalan dengan uraian tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, maka bahan kajian dan pelajaran yang dicantumkan di atas ini tidaklah serta-merta menjadi mata pelajaran di lembaga pendidikan dasar dalam arti berdiri sendiri dalam jadwal pelajaran sehari-

hari, apalagi dianggap sama bobotnya. Masih diperlukan penelaahan yang mendalam mengenai isi masing-masing bahan kajian dan kaitannya satu dengan yang lain, sehingga sebagai satu kesatuan dan keseluruhan yang terpadu mampu mempersiapkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan dasar. Bahasa Indonesia umpamanya dapat saja diajarkan dengan mengaitkannya dengan pendidikan kewarganegaraan, dan dapat pula dikaitkan langsung dengan membaca dan menulis, bahkan dengan matematika atau berhitung -- seperti pada Program Kejar Paket A.³ Matematika dapat dikombinasikan dengan pelajaran pengantar sains dan teknologi; demikian pula ilmu bumi dan sejarah -- baik sejarah nasional maupun sejarah umum -- dapat diajarkan sekaligus; demikian pula dengan menggambar, kerajinan tangan dan kesenian. Tentu pelajaran bahasa Inggris dapat pula diajarkan sekaligus dengan maksud meningkatkan penguasaan bahasa Indonesia dan membandingkannya dengan bahasa Indonesia.

Uraian di atas menegaskan, bahwa dengan undang-undang yang baru ini, maka di hari depan yang tidak jauh, berhubung pendidikan dasar sembilan tahun (Sekolah Dasar -SD- 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama -SLTP- 3 tahun), maka pada umumnya setiap warganegara yang menantikan pendidikan dasar diharapkan mampu menguasai tiga bahasa dan menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntutan komunikasi, yaitu bahasa ibu/daerah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan tidak lagi hanya dwi-bahasa seperti sekarang ini -- bahasa ibu/daerah dan bahasa Indonesia. Ini tentu berarti peningkatan kualitas manusia Indonesia, dilihat dari su-

³Secara lebih terinci dapat dilihat pada materi Kejar Paket A.

dut penguasaan bahasa yang dapat memperkaya alat komunikasi, pengertian dan perluasan cakrawala pandangan.

Program Kejar Paket A sejak semula disusun sebagai program belajar plus-minus SD, oleh karena itu maka seperti dikemukakan di atas, untuk memenuhi bunyi undang-undang, sekarang ini sedang disusun Program Kejar Paket B. Paket B ini nanti dapat dilihat sebagai program belajar plus-minus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tim yang bekerja di Direktorat Pendidikan Masyarakat sedang mempelajari semua buku dan bahan belajar SMP Regular (biasa) maupun buku-buku modul yang digunakan oleh SMP Terbuka untuk menentukan "pengetahuan umum dasar" yang diperlukan oleh para warga belajar Program Kejar Paket B, di samping persyaratan, bahwa termasuk ke dalam Paket B adalah ketrampilan yang wajib dikuasai yang dapat dijadikan bekal untuk mencari nafkah sehari-hari. Ini berarti, bahwa Paket B terdiri dari dua seri, yaitu seri pertama, merupakan "pengetahuan umum dasar," yang semuanya wajib dipelajari oleh warga belajar Program Kejar Paket B, dan seri kedua, berisi beberapa program ketrampilan yang ditawarkan kepada warga belajar. Setiap warga belajar memilih satu ketrampilan yang diminatinya dan akan dijadikan bekal untuk mencari nafkah sehari-hari. Hal ini menegaskan, bahwa baik Program Kejar Paket A maupun Program Kejar Paket B dipadukan dengan pendidikan mata pencaharian atau pendidikan upajawa. Sebagai contoh mengenai buku ketrampilan seri Paket B.k. yang sekarang ini sedang diolah dan buram pertama sudah siap berjudul sebagai berikut: (1) Usaha Kerajinan Kayu Lapis; (2) Usaha Membuat Telur Asin; (3) Kue Ketan "Intip"; (4) Warung Keontong; (5) Jasa Penawar Dahaga; (6) Usaha

Batako dapat Meningkatkan Penghasilan; (7) Usaha Menyablon Salahsatu Mata Pencaharian; (8) Bubu, sebagai mata pencaharian; (9) Menjahit Pakaian Pria; (10) Menjahit Pakaian Wanita dan Anak; (11) Membuat Rok Model Kerut di Pinggang; (12) Ketrampilan Bertukang Batu; (13) Pembudidayaan Udang Windu; dan (14) Selai Nenas.

Mengenai seri bahan belajar ketrampilan yang termasuk Paket B ini memang tingkatnya berada di atas bahan belajar ketrampilan yang ada di dalam maupun yang dijadikan suplemen Paket A. Paket A yang terdiri dari 100 buah buku itu (A-1 sampai dengan A-100; ditambah suplemen yang relevan!) memang sekumpulan bahan belajar minimum meliputi semua bidang hidup (ipolek-sosbudhankam) yang perlu dipelajari oleh setiap warga negara yang tidak berkesempatan bersekolah alias butahuruf dan mereka yang putus SD, agar mereka terbantu menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan produktif.

Paket A berisi pengetahuan atau informasi fungsional, ketrampilan yang relevan, dan sikap mental pembaruan dan pembangunan. Keseratus buku itu disusun berdasarkan 22 taraf kesulitan, seperti tampak pada bagan berikut:

A 61	A 100
A 21	A 60
A 20	
A 1	

Seri A-1 sampai dengan A-20 terdiri dari pelajaran dasar membaca, menulis, berhitung, dan bahasa Indonesia yang diintegrasikan. Disusun berjenjang: isi nomor yang terdahulu menjadi dasar bagi nomor yang kemudian. Jadi A-1 dasar bagi A-2, A-2 dasar bagi A-3, dan seterusnya. Seri A-1 sampai dengan A-20 ini ibarat kaki huruf T atau tonggaknya bangunan ilmu.

Seri A-21 sampai dengan A-60 terdiri dari bacaan lanjutan pertama berisi tambahan pengetahuan dan kecakapan dasar mengenai bidang-bidang kehidupan (ataupertama huruf T). Seri A-21 sampai dengan A-60 ini ibarat penyangga bangunan ilmu; taraf kesulitannya sama, jadi tidak berjenjang seperti A-1-A-20.

Seri A-61 sampai dengan A-100 terdiri dari bacaan lanjutan kedua berisi perluasan dan pendalaman pengetahuan dan kecakapan mengenai bidang-bidang kehidupan (ataukedua huruf T). Seri A-61 sampai dengan A-100 ini ibarat atapnya bangunan ilmu; taraf kesulitannya setingkat lebih tinggi dari A-21-A-60, juga tidak berjenjang seperti A-1-A-20.

Jadi, jika A-1-A-20 sudah dikuasai, maka seseorang dapat melanjutkannya dengan A-21 tapi dapat pula dengan salah satu buku A-21-A-60, jadi umpamanya A-50. Jika A-21-A-60 semua sudah dikuasai, maka seseorang dapat melanjutkannya dengan A-61 atau salah satu buku A-61-A-100.

Peserta Didik

Mengingat, bahwa undang-undang sudah menegaskan, bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan

jalur pendidikan luar sekolah, maka sasaran pendidikan dasar pada jalur pendidikan sekolah adalah anak-anak dan remaja berusia 6-15 tahun. Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun disebutkan berhak, sedangkan yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat. Sasaran pendidikan dasar pada jalur pendidikan luar sekolah adalah *pertama*, warga negara berusia 7-44 tahun atau tanpa mempersoalkan umur dan yang belum pernah menikmati pendidikan dasar alias buta huruf atau nira-aksara; *kedua*, anak-anak dan remaja berusia 6-15 tahun atau pemuda dan orang dewasa berusia 16 tahun ke atas yang putus SD atau SLTP; dan *ketiga*, warga negara yang sudah tamat SD, baik yang baru tamat maupun yang sudah lama tamat, sehingga mereka belajar terus sampai berpendidikan dasar dalam pengertian undang-undang yang baru (9 tahun bagi anak-anak dan remaja berusia 6-15 tahun, dan pendidikan yang setara -- tanpa menetapkan jumlah tahun belajarnya -- bagi mereka yang berusia 16 tahun ke atas). Dalam hubungan ini undang-undang menyatakan: "Pendidikan yang setara dengan pendidikan dasar berkenaan dengan kemungkinan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang lingkup dan tarafnya sepadan dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah." Ini berarti, bahwa jika kita beranggapan bahwa dalam rangka Wajib Belajar 6-12, isi 100 (seratus) buku Paket A dalam program pemberantasan buta huruf gaya baru atau Program Kejar Paket A sama dengan isi kurikulum SD, maka untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang baru ini, sedang disusun Program Kejar Paket B, sehingga tamatan pendidikan dasar pada jalur pendidikan luar sekolah meliputi Program Kejar

Paket A dan Paket B. Dengan berbuat demikian, maka dapatlah diwujudkan apa yang dinyatakan oleh undang-undang, "Pendidikan dasar pada hakikatnya merupakan pendidikan yang memberikan kesanggupan pada peserta didik bagi perkembangan kehidupannya, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar."

semua lembaga pendidikan dasar. Di samping itu, maka sarana listrik juga amat diperlukan, mungkin yang terakhir ini perlu dikaitkan dengan sarana Perpustakaan Desa, dan Perpustakaan Sekolah. Artinya, usaha membangun desa sebagai tempat bermukim yang lebih menyenangkan menuntut adanya listrik, air bersih, perpustakaan, dan sarana/prasarana lain di desa, dan ini tentu meliputi lembaga pendidikan dasar lengkap dengan sarana yang dibutuhkan itu.

Sarana dan Prasarana

Jika kita mengarahkan pandangan ke daerah pedesaan di seluruh Indonesia, maka dapatlah dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dasar yang lebih memadai, baik mutu maupun jumlahnya masih menuntut perhatian yang lebih sungguh-sungguh dari kita. Jika tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dilihat sebagai sarana dan prasarana, maka tampak kelemahan di bidang ini. Makin jauh suatu SD dan SLTP dari keramaian kota, maka makin jelas kenyataan yang kita hadapi, yakni bukan hanya jumlah guru yang tidak mencukupi, tapi juga mutu tenaga belum tinggi. Masih diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, terutama melalui upaya penataran tertulis dengan menggunakan bahan-bahan belajar *kerjakan sendiri* untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik yang bertugas di daerah pedesaan umumnya, daerah terpencil khususnya.

Sarana dan prasarana, seperti buku-buku pelajaran dan buku-buku bacaan, alat-alat pendidikan jasmani dan olahraga, alat-alat laboratorium terutama untuk pengantar sains dan teknologi, dan alat-alat audio-visual masih diperlukan banyak, karena perlengkapan ini belum merata dan memadai di

Bermain, Belajar, Bekerja dan Berdoa

Orientasi pendidikan dasar kita yang dicoba diuraikan di dalam makalah ini dengan meninjaunya terutama dari sudut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989 itu perlu juga ditinjau dari sudut kegiatan utama manusia, yaitu "bermain, belajar, bekerja dan berdoa."

Anak-anak berusia 8 tahun ke bawah di dalam kehidupannya sehari-hari tampak sibuk bermain saja, oleh karena itulah manusia dalam perkembangan seperti itu dijuluki "manusia bermain" (*homo ludens*). Manusia ini bermain sambil belajar dan bekerja, artinya kegiatan utama bermain itulah wahana baginya untuk mengenal proses belajar dan bekerja. Terutama pada anak balita (bawah lima tahun) tingkah-laku bermain itu amat jelas mendominasi kehidupannya sampai-sampai makan pun dianggapnya bermain pula.

Anak-anak Sekolah Dasar Kelas I, II dan III yang masih dikuasai oleh kebutuhan bermain menuntut tenaga pendidik untuk men-

cari tatacara bermain di dalam membelajarkan sesuatu kepada anak-anak itu. Tugas yang diberikan kepada anak-anak ini untuk dikerjakan juga harus disampaikan dalam suasana bermain dan tidak boleh terlalu sungguh-sungguh seperti kepada mahasiswa. Oleh karena perpusatan perhatian mereka (konsentrasi) juga tidak berlangsung lama-lama, maka agar minat-perhatiannya dapat dipegang dan diarahkan, suatu topik tidak boleh dibicarakan lebih daripada 20-30 menit. Di samping itu anak-anak yang lebih "homo ludens" ini mempunyai daya imajinasi yang hebat, sehingga bagi mereka apa yang kita sebut "kenyataan" belum menarik minat-perhatiannya.

Anak-anak Sekolah Dasar Kelas IV, V dan VI, umumnya berusia 9 tahun ke atas mulai tertarik pada kenyataan atau realitas, dan mulai berkurang perhatiannya terhadap khayalan dan dongeng-dongeng. Proses belajar dan bekerja sudah mulai dapat diperkenalkan kepada mereka ini, agar lambat-laun tapi pasti mereka berkembang menjadi manusia yang suka bekerja (*homo faber*) dan mampu berpikir (*homo sapiens*) melalui proses belajar yang sungguh-sungguh. Proses belajar dan bekerja ini, termasuk belajar sambil bekerja dan bekerja sambil belajar perlu dihayati terus-menerus, terutama oleh generasi muda berusia 13-15 tahun (SLTP). Jika pada usia muda ini mereka sudah dibiasakan untuk belajar dan bekerja tekun, baik mengenai hal-hal yang disajikan di sekolah maupun kegiatan-kegiatan di rumah, juga di lingkungan RT/RW masing-masing, maka sudah dapat dipastikan bahwa pada usia yang di atasnya nanti kita tidak perlu lagi mendorong-dorong mereka agar rajin dan tekun belajar dan bekerja.

Demikian pula mengenai berdoa kepada

Tuhan Yang Maha Kuasa, perlu diajarkan kepada anak-anak sejak kecil sesuai dengan usianya. Kekhusyukan berdoa itu lambat-laun akan terwujud di dalam tingkah-lakunya. Kemampuan berdoa termasuk kemampuan untuk mengenal diri dan kelemahan manusia dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Kesadaran akan eksistensi Yang Maha Kuasa perlu ditanam, dipupuk dan dikembangkan di dalam diri generasi muda kita, bukan untuk membuatnya lemah dan tidak berusaha sekuat tenaga, namun untuk memohon kekuatan pula dari Dia Maha Pencipta, karena pengenalan terhadap Tuhan bukan hanya dalam kapasitas-Nya Yang Maha Kuasa akan tetapi juga Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cinta-kasih terhadap sesama manusia yang menjadi dasar pendidikan hendaklah berasumber dari cinta-kasih Allah terhadap umat-Nya yang lemah ini. Inilah yang dimaksud oleh undang-undang dengan pendidikan agama termasuk kurikulum pendidikan dasar.

Bagi pemuda dan orang dewasa yang lebih dikenal sebagai *homo faber* dan *homo sapiens* sisa-sisa "bermain" tentu masih ada yang diungkapkan dalam bentuk guyongan, di samping olahraga dan permainan lain, namun yang utama kegiatan manusia ini adalah belajar, bekerja dan berdoa sepanjang hayat. Jika ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, teratur dan berencana, maka mutu dan taraf hidup manusia pasti akan meningkat. Untuk dapat melaksanakan kegiatan utama ini dengan sungguh-sungguh, maka modal dasar yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar, baik pendidikan dasar jalur pendidikan sekolah (SD dan SLTP) maupun pendidikan dasar jalur pendidikan luar sekolah (Paket A dan Paket B) hendaklah memadai jumlah dan mutunya.

Dalam kaitan inilah perlu program pendidikan, terutama pendidikan dasar, bersifat kejar, artinya *pertama*, pengertian harfiah, peserta didik mengejar atau melomba "ke-tinggalan" yang dihayatinya; *kedua*, singkatan atau akronim bekerja sambil belajar atau belajar sambil bekerja yang berarti bahwa "teori" yang dipelajari harus dipraktekkan, sehingga tercapai apa yang diungkapkan terakhir dalam pernyataan ini, *I hear, I understand, I see, I know, I do, I can*, dan dengan demikian pula "kepala, hati dan tangan" tiga-tiganya dilibatkan di dalam proses belajar-mengajar; dan *ketiga*, singkatan atau akronim kelompok belajar yang berarti, bahwa di samping belajar bekerja berkelompok, perlu dibentuk kelompok belajar sekaligus tempat berlatih untuk hidup bermasyarakat, di samping belajar bersama saling membantu dan saling mendorong ke arah kemajuan bersama; kelompok tempat belajar saling asih, saling asuh dan saling asah.

Program Kejar Paket A memang didisain sesuai dengan pengertian kejar di atas, tentu nanti Program Kejar Paket B juga demikian halnya. Yang perlu dikemukakan adalah pelaksanaan kejar juga di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Mengingat di sekolah kurang sekali waktu dan kesempatan untuk memperkenalkan anak-anak dan remaja ini ke dunia kerja, maka kerjasama antara sekolah dan keluarga perlu dipererat. Anak-anak dan remaja perlu diberikan pada pekerjaan di rumah sedini mungkin sesuai usia dan kemampuannya seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengatur tempat tidur dan sebagainya. Dengan demikian mereka diperkenalkan pada dunia kerja sehingga tidak akan canggung kelak memasuki dunia kerja itu. Dan sesudah menamatkan pendidikan dasar mereka akan siap kerja dengan etos kerja yang tinggi, apalagi kalau memiliki keterampilan tertentu yang siap digunakan sebagai bekal untuk mencari nafkah sehari-hari.

Profesi Guru di Indonesia: Tawaran dan Tantangannya

T. Raka JONI

Pengantar

JABATAN GURU telah bertradisi cukup panjang di negara kita, meskipun hakikat fungsi, latar tugas serta keduhanan sosiologisnya telah banyak mengalami perubahan. Bahkan ada yang secara sangat lugas menyatakan bahwa sosok guru telah berubah dari tokoh yang *digugu lan ditiru* (dipercaya dan dijadikan teladan), yang kemungkinan menurun dari tradisi latar padepokan, menjadi oknum yang *wagu lan kuru* (kurang pantas dan kurus), di tengah-tengah pelbagai bidang pekerjaan dalam masyarakat yang menjadi semakin terspesialisasikan meskipun peranannya dalam pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia bangsa agaknya masih tetap diakui. Hanya saja, suka-tidak-suka, selama ini mereka diperlakukan secara kurang taat asas, dalam arti dinyatakan sebagai sosok yang teramat penting, tetapi tanpa disertai kesediaan untuk menghargainya sebagaimana mestinya. Dengan perkataan lain, keinginan untuk memprofe-

sionalisasikan jabatan guru, masih belum memperoleh pijakan struktural yang memadai. Cetusan gagasan ke arah itu sekitar satu dekade yang lalu, ditanggapi sebagai tidak lebih dari olah akademik yang tidak ada konsekuensinya yang nyata.¹

Akhir-akhir ini perhatian masyarakat ditujukan kepada langkah penting yang diam-bil oleh pemerintah dalam mengupayakan penghargaan layak kepada guru, melalui Surat Keputusan Menpan No. 26/1989 tertanggal 2 Mei 1989. Sudah terlalu lama memang janji yang ditawarkannya itu ditunggu-tunggu, sehingga kemunculannya disambut dengan sangat gembira. Bagaimanapun, di negara kita, pemerintah merupakan pemerkerja guru yang besar, atau setidak-tidaknya yang penting, sehingga pengakuan eksplisit terhadap bidang layanan keguruan dari pemerintah, akan berdampak sangat menentukan. Akan tetapi, apabila kita memang ber-

¹Bandingkan dengan T. Raka Joni, "Pembentukan Profesional Tenaga Kependidikan," *Majalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Agustus 1977, hal. 23-28.

tekad mewujudkan profesionalisasi jabatan guru melalui kebijaksanaan fungsionalisasi ini, maka di samping memerlukan harapan besar terhadap tawarannya, pada saat yang sama kita juga harus secara bertanggungjawab menghadapi tantangannya. Dengan perkataan lain, tidak dapat dilepaskan dari penghargaan yang diberikan itu adalah tagihannya -- untuk layanan apakah penghargaan itu (seyogyanya!) diberikan? Tanpa sainasekali bermaksud mendahului langkah-langkah yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah dalam menata mekanisme serta prosedur penerapan Surat Keputusan Mennpan tersebut di atas, tulisan ini ingin membahas tentang profesionalisasi jabatan guru.

Profesi dan Profesionalisasi

Istilah profesi dan profesional telah banyak dipakai di kalangan luas, hanya saja dengan makna, atau setidak-tidaknya nuansa yang beranekaragam. Kadang-kadang ia berarti tidak lebih dari sekedar pekerjaan yang merupakan sumber nafkah. Bidang pekerjaan mulai dari kesekretarisan sampai dengan bertinju dinamakan profesi. Ada pula yang menggunakannya untuk menunjuk kepada mutu unjuk atau hasil kerja yang tinggi, yang tidak jarang diikuti dengan konsekuensi imbalan yang tinggi; ke dalam pengertian ini dapat dimasukkan contoh-contoh mulai dari perancangan busana *haute couture* sampai dengan pembuatan bayaran. Atau, kadang-kadang kita jumpai penggunaan istilah ini untuk menunjuk pada gejala monopoli, dengan contoh-contoh mulai dari serikat buruh pelabuhan sampai dengan ikatan dokter.

Semua sisi pengertian profesi dan profesional tersebut di atas ada benarnya, akan

tetapi penerapan yang begitu saja untuk melukiskan apa yang dikehendaki berkenaan dengan profesi keguruan tentu akan mengundang keroyalan alis. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan profesionalisasi jabatan guru, perlu secara eksplisit disepakati maknanya, termasuk spesifikasi khusus penerapannya bagi bidang kependidikan umumnya, dan keguruan khususnya, sehingga dapat dijabarkan arah upaya penggarapannya. Mari-lah kita simak beberapa pendapat yang telah berkembang di tempat lain sebagai perbandingan.

Seorang penulis mengutip batasan profesi sebagai: "... a vocation in which professed knowledge of some department of learning or science is used in its application to the affairs of others or in the practice of an art founded upon it (McCully, 1969, halaman 130). Tersirat dalam pengertian tersebut bahwa dalam profesi, dipergunakan teknik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain. Selanjutnya, seorang pekerja profesional bisa dibedakan dari seorang tukang karena di samping sama-sama menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional juga memiliki *informed responsiveness* (ketanggapan yang berlandaskan kearifan) terhadap implikasi keinasyarakan atas obyek kerjanya. Dengan perkataan lain, seorang pekerja profesional memiliki filosofi dalam menyikapi serta melaksanakan pekerjaannya. Berikut ini ciri-ciri keprofesian yang lazim, dikemukakan secara lebih terinci (Westby-Gibson, 1965), dengan disertai ulasan mengenai penerapannya di bidang keguruan di tanah air.

Pertama, dilakukannya, dan yang terlebih penting lagi, diakuinya oleh masyarakat (dan, di negara kita, juga oleh pemerintah),

adanya bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi. Ketertentuan layanan bidang pendidikan di negara kita agaknya jauh lebih mudah disepakati, akan tetapi tidak demikian halnya mengenai keunikan kualifikasi pemangku-pemangku jabatannya; mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dapat ditemukan guru-guru yang sebenarnya tidak menunjukkan kualifikasi yang unik sebagai tenaga kependidikan.

Kedua, dimilikinya sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan sejumlah teknik serta prosedur kerja yang "unik" itu. Profesi kedokteran misalnya, dapat menyebutkan sejumlah bidang ilmu yang mendasari teknik serta prosedur kedokteran seperti anatomi, bakteriologi, biokimia, patologi, farmakologi, dan sebagainya. Namun bagi profesi keguruan, keharusan penguasaan bidang-bidang ilmu penyangganya tidaklah selugas itu. Bahkan ada sementara pihak yang berpendapat bahwa satu-satunya persyaratan bagi pemangku jabatan guru adalah penguasaan bidang ilmu sumber bahan ajaran. Menurut pengaruh pendapat tersebut, fungsi guru adalah "meneruskan ilmu" dengan memperagakan cara berpikir dan bertindak seorang ilmuwan. Dengan demikian, masalah pokok yang perlu dikaji secara tajam namun dengan pikiran jernih dan kepala dingin dalam hal ini adalah: apakah pelaksanaan tugas guru itu merupakan layanan ahli yang perlu secara sengaja dipelajari?

Ketiga, diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang melaksanakan pekerjaan profesional. Dengan percataan lain, pekerjaan profesional mempersyaratkan pendidikan pra-jabatan yang sistematis yang berlangsung relatif lama. Dalam

hubungan ini, apabila kita perhatikan sejauh per sekolah an, di negara kita ataupun di tempat lain, akan tersimak perkembangan yang serupa: pada permulaannya, jajaran guru diisi oleh mereka yang dianggap menguasai apa yang perlu diajarkan -- veteran perang kemerdekaan di Amerika Serikat atau mantri madat di Jawa pada zaman penjajahan "diangkat" sebagai guru. Akan tetapi setelah lembaga pendidikan pra-jabatan guru didirikan, karena satu dan lain alasan, masih cukup banyak juga jabatan guru diisi oleh mereka yang tidak dipersiapkan secara sengaja untuk maksud itu.

Keempat, dimilikinya mekanisme untuk melakukan penyaringan secara efektif, sehingga hanya mereka yang dianggap kompeten yang diperbolehkan bekerja memberikan layanan ahli yang dimaksud. Sebagaimana dikemukakan di atas, bidang ini merupakan salah satu kelemahan pokok profesi keguruan di negara kita.

Kelima, dimilikinya organisasi profesi yang, di samping melindungi kepentingan anggotanya dari saingan yang berasal dari luar kelompok, juga berfungsi untuk meyakinkan agar para anggotanya menyelenggarakan layanan ahli terbaik yang bisa diberikan, demi kemaslahatan para pemakai layanan. Oleh karena itu kita semua berhak dan bahkan wajib bertanya, apakah organisasi profesi yang ada di negara kita telah menunaikan fungsi ini secara memadai.

Apakah dengan penerapan kelima persyaratan di atas, lantas dapat disimpulkan bahwa bidang keguruan bukan merupakan profesi di negara kita? Apabila hanya diterapkan kriteria profesionalisasi tersebut di atas terhadap keadaan dewasa ini, maka jawabannya adalah jelas: bidang keguruan belum merupakan profesi dalam arti yang se-

penuhnya. Akan tetapi, apabila kita memusatkan kepedulian pada kebutuhan akan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, yang diperlukan untuk meyakinkan kelestarian negara-bangsa, maka penanganan layanan pendidikan, mulai dari perencanaan sampai dengan penyelenggaraannya dari hari ke hari, jelas mempersyaratkan tenaga-tenaga profesional. Penyiapan generasi muda melalui sistem magang (anak petani ikut ayah ke sawah, anak nelayan ikut ayah ke laut, dan sebagainya) jelas sudah tidak memadai lagi untuk *survive* di abad informasi ini. Sebaliknya, penyiapan manusia yang mampu menjemput hari esok sekarang, membutuhkan guru-guru yang benar-benar memiliki *informed responsiveness* terhadap kemungkinan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang akan datang. Dengan perkataan lain, hanya kepada guru-guru yang profesional, masa depan bangsa dapat dipercayakan.

Tantangan Profesionalisasi Jabatan Guru

Dari uraian singkat di atas, tersirat tantangan-tantangan yang harus disambut, apabila ingin memprofesionalisasikan jabatan guru. Dengan perkataan lain, hakikat keprofesionalan jabatan guru tidak akan terwujud hanya dengan mengeluarkan pernyataan bahwa guru adalah pekerja profesional, meskipun pernyataan tersebut dikeluarkan dalam bentuk peraturan resmi. Sebaliknya, status profesional hanya dapat diraih melalui perjuangan yang berat dan panjang. Gagasan penulis yang disebutkan sebelumnya (McCully, 1969) mengemukakan adanya 6 tahapan dalam proses profesionalisasi, sebagai perbandingan.

Pertama, bidang layanan ahli "unik" yang diselenggarakan itu harus ditetapkan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menpan No. 26/1989 tersebut di atas, untuk bidang keguruan tahap ini dapat dikatakan telah tercapai.

Kedua, kelompok profesi dan penyelenggara pendidikan pra-jabatan menyepakati adanya standar tertentu bagi penyelenggaraan penyaringan dan pendidikan pra-jabatan yang mempersiapkan tenaga guru yang profesional, untuk meyakinkan agar para pendatang baru di lingkungan profesi ini memiliki kompetensi minimal bagi penyelenggaraan layanan ahli yang menomor satukan kepentingan pemakai layanan. Kelompok profesi seharusnya merupakan "soko guru" penyanga mutu layanan ahli yang diselenggarakan para anggotanya. Sepanjang yang penulis bisa lihat, hal ini masih belum terjadi di negara kita.

Ketiga, adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada program pendidikan pra-jabatan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk pemberian pengakuan terhadap kelayakan program pendidikan pra-jabatan, penilaian seyogyanya tidak hanya ditujukan terbatas pada gambaran statis masukan instrumental yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pendidikan pra-jabatan (jumlah dosen, ruangan, buku, peralatan laboratorium, dan sebagainya), tetapi juga terhadap proses pemanfaatan masukan instrumental tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan pra-jabatan. Tahap inipun masih mengidap kelemahan mendasar di negara kita, sebab dewasa ini pengakuan lebih banyak didasarkan kepada kepemilikan (program yang diselenggarakan oleh pemerintah otomatis diakui, sedangkan yang diselenggarakan oleh pihak swasta tanpa kecuali

diwajibkan membuktikan kelayakannya). Penetapan pengakuan kelayakan program pendidikan pra-jabatan yang harus dilaksanakan secara berkala inilah yang dinamakan akreditasi.

Keempat, adanya mekanisme untuk memberi pengakuan resmi kepada lulusan program pendidikan pra-jabatan yang memiliki kemampuan minimal yang dipersyaratkan (sertifikasi). Sejak awal dekade ini di Indonesia, setidak-tidaknya untuk guru sekolah menengah, sertifikasi ini diwujudkan dalam bentuk Akta Mengajar I sampai dengan IV. Karena besarnya resiko yang dapat terjadi apabila pekerja profesional melakukan kesalahan dalam bekerja memberikan layanan ahlinya, maka sertifikasi saja sering dianggap belum cukup untuk memberi perlindungan kepada masyarakat umumnya, pemakai layanan khususnya. Maka di samping sertifikasi, juga dianggap perlu diberlakukannya mekanisme pemberian izin praktik (*licensure*). Di Amerika Serikat misalnya, setiap negara bagian memiliki sistem pemberian izin praktik sendiri-sendiri bagi guru SD (Sekolah Dasar) dan SM (Sekolah Menengah), sedangkan di negara kita boleh dikata akreditasi, sertifikasi dan izin praktik dipertukar-pakaikan.

Kelima, secara perorangan dan secara kelompok, kaum pekerja profesional bertanggungjawab penuh atas segala aspek pelaksanaan tugasnya. Karena itu untuk dapat memanfaatkan segenap keahliannya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, seorang pekerja profesional diberi kebebasan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Sedangkan penilaian oleh pihak lain, haruslah berupa penilaian oleh sejawat yang sederajat tingkatan keahliannya (pengawasan kesejawatan). Tanpa kebebasan ini, maka tidak akan ada *independent judgment* yang didasarkan

kepada pertimbangan ahli; dan pada gilirannya, tanpa *independent judgment* mustahil dapat terwujud profesionalitas.

Keenam, kelompok profesional memiliki kode etik, yang merupakan dasar untuk melindungi para anggota yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, di samping merupakan sarana untuk mengambil tindakan penertiban terhadap anggota yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan suratan dan semangat kode etik tersebut. Selanjutnya, baik secara perorangan maupun sebagai kelompok, pekerja profesional berkewajiban untuk secara terus-menerus menjaga dan meningkatkan keterandalan layannya, baik dari segi kemampuan maupun dari segi integritas profesional penyelenggaranya.

Apabila disimpulkan, maka ada dua aspek yang harus hadir secara tunjang-menunjang sehingga sesuatu bidang layanan, termasuk keguruan-kependidikan, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai profesi, yaitu: (a) keterandalan layanan; dan (b) layanan yang khas itu, diakui dan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, suatu layanan dinyatakan dapat diandalikan apabila: (a) si pemberi layanan menguasai betul apa yang dikerjakannya; dan (b) si penerima layanan dapat mempercayai bahwa kemaslahatannya didahulukan dalam proses pemberian layanan itu.

Selanjutnya, dalam bidang keguruan, penguasaan mengenai bidang layanan berarti kemampuan merancang dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar yang sekaligus mencapai dua sasaran, yaitu pencapaian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan di satu pihak, dan di pihak lain, pada saat yang sama penyelenggaraan layanan keguruan juga merupakan

perwujudan urunan nyata bagi pencapaian tujuan utuh pendidikan, mulai dari kebiasaan kerja sampai dengan cinta tanah air. Ini berarti bahwa seorang guru yang profesional memahami apa yang diajarkannya, menguasai bagaimana cara mengajarkannya, dan yang tidak kalah pentingnya, menyadari benar mengapa ia menetapkan pilihan terhadap sesuatu pendekatan serta prosedur tertentu dalam mengelola sesuatu kegiatan belajar-mengajar. Dengan perkataan lain, ia telah memperhitungkan kemungkinan dampak jangka panjang dari setiap keputusan serta tindakannya. Setiap tindakan dan keputusannya berlandaskan wawasan kependidikan, sebagai perwujudan dari *informed responsiveness* sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Akhirnya, dari uraian berikut, dapat disimak bahwa tantangan profesionalisasi tersebut menghadang di berbagai tahap penyediaan guru bagi sistem pendidikan, mulai dari ketersediaan calon sampai dengan pembinaan dalam-jabatan.

Mutu Calon Guru

Beberapa waktu yang lalu terangkat ke permukaan, masalah kemenarikan bidang pekerjaan sebagai pegawai negeri, dibandingkan dengan bidang-bidang pekerjaan lain. Tidak kurang dari Mendagri yang menyatakan bahwa, kalau ingin menjadi kaya, sebaiknya orang jangan menjadi pegawai negeri saja. Sebuah surat pembaca di sebuah harian terkemuka Ibu Kota (kalau tidak salah dari seorang insinyur) menanggapi dengan menyatakan bahwa bukan saja tidak menjadikan kaya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-haripun imbalan yang diterima masih jauh dari cukup. Sebuah surat

pembaca lainnya menjawab surat pembaca pertama, dengan menyatakan bahwa sebagai sarjana, seyogyanya seseorang tidak cengeng. Dengan perkataan lain, apabila bidang pekerjaan sebagai pegawai negeri menawarkan prospek yang kurang cerah, mestinya harus dikerahkan upaya lebih keras untuk mencari bidang lain, yang menjanjikan imbalan lebih besar. Dilihat secara terpisah, pendapat kedua pembaca tersebut di atas memang sulit dibantah, akan tetapi konsekuensinya menjadi samasekali lain apabila dilihat dalam perspektif yang lebih luas dari segi kepentingan nasional.

Apabila bidang pekerjaan guru di tanah air sejak sekitar 4 dekade terakhir diamati, gambaran yang dikemukakan di atas menjadi lebih suram lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, sebagai kecenderungan, pendidikan pra-jabatan guru bukan merupakan pilihan pertama putra-putri terbaik kita. Kita bisa saja membantah dengan contoh-contoh, akan tetapi apabila kita ingin membenahi keadaan, akan jauh lebih produktif apabila kita menerima kenyataan ini. Sebab persoalan yang lebih mendasar adalah ini: apakah bidang ini bisa dibiarkan hanya diisi oleh mereka yang sudah tidak lagi memiliki pilihan lain, dan/atau oleh mereka yang menganggap pekerjaan guru sebagai tempat persinggahan sementara sebelum berhasil memperoleh pekerjaan lain yang menawarkan imbalan lebih baik? Berapa besarkah kemungkinan bangsa kita akan *survive* apabila secara sistematis pendidikan generasi mudanya diserahkan kepada kelompok yang kemampuan serta dedikasinya kurang meyakinkan? Suara dan janji muluk mengenai kemeriliaan bidang pekerjaan guru akan tetap tinggal suara dan janji belaka, apabila tidak ada usaha nyata untuk membuat bidang pekerjaan guru lebih menarik, lebih kompeti-

tif, apabila dibandingkan dengan pekerjaan lain. Sebagaimana diisyaratkan di muka, Surat Keputusan Menpan tersebut di atas, telah mengarah kepada langkah yang tepat menuju peningkatan daya tarik bidang keguruan.

Pendidikan Pra-Jabatan

Sebagaimana diisyaratkan di bagian awal naskah ini, bidang pekerjaan guru hanya pantas memperoleh penghargaan khusus sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Menpan tersebut di atas, apabila jajaran guru memberikan layanan ahli, yang hanya bisa diberikan oleh lulusan pendidikan pra-jabatan. Sebaliknya, mereka yang tidak pernah melalui pendidikan pra-jabatan, tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan layanan khas yang dimaksud. Ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk mencapai keadaan yang dikehendaki itu.

Pertama, untuk meyakinkan pemilikan kemampuan profesional awal, saringan calon peserta pendidikan pra-jabatan perlu dilaksanakan secara efektif, baik dari segi kemampuan potensial, aspek-aspek kepribadian yang relevan, maupun motivasi. Di samping mempersyaratkan mekanisme saringan yang efektif, bidang pekerjaan guru akan memperoleh calon yang bermutu apabila saringan dilakukan terhadap kelompok calon yang relatif bermutu pula. Dengan perkataan lain, keadaan telah sedemikian sehingga sistem imbalannya membuat putra-putri terbaik kita tertarik untuk memasuki bidang pekerjaan guru.

Kedua, pendidikan pra-jabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon untuk menguasai kemampuan profesional awal yang dipersyaratkan. Untuk ini

berbagai pendapat memang masih perlu dibuatkan. Ada yang berpendapat bahwa untuk menjadi guru, hanya diperlukan penguasaan mantap bidang ilmu sumber bahan ajaran -- kemampuan keguruan untuk mengolah dan menyajikan bahan tersebut kepada peserta didik akan tumbuh sendiri dari pengalaman. Bahkan ada yang mengisyaratkan bahwa apabila seseorang mampu memperagakan bagaimana seorang ilmuwan berpikir dan bertindak dalam menggeluti bidangnya, maka sekaligus telah terpenuhilah persyaratan untuk menjadi guru, karena proses belajar ilmu sama dan sebangun dengan proses mengkomunikasikan ilmu, yang juga sama dan sebangun dengan proses mengajarkan ilmu. Dengan perkataan lain, menurut pendapat i. i, tidak diperlukan persiapan khusus untuk menjadi guru. Tidak perlu ditekankan bahwa agaknya pihak ini menganut pendapat bahwa pendidikan sama dengan mengajarkan ilmu (saja!).

Pihak yang lain berpendapat bahwa apabila calon guru menguasai bidang ilmu sumber bahan ajaran, dan apabila kepada mereka diberikan ilmu pendidikan dan teknik mengajar, maka proses sintesis ke dalam bentuk kemampuan keguruan bisa dilakukan sendiri-sendiri, cepat atau lambat. Dengan perkataan lain, persiapan memang diperlukan, tetapi terbatas pada pembekalan ilmu pendidikan dan teknologi mengajar, yang secara sendiri-sendiri dieoba terapkan oleh masing-masing calon guru yang telah menguasai bidang ilmu bahan ajaran.

Sedangkan pengamat penyelenggaraan pendidikan pra-jabatan yang sistematis berpendapat bahwa di samping mempersyaratkan penguasaan bidang ilmu sumber bahan ajaran, pekerjaan profesional keguruan juga memerlukan wawasan kependidikan serta pengetahuan dan ketrampilan keguruan. Se-

lanjutnya, penguasaan bidang ilmu sumber bahan ajaran dan teori serta ketrampilan keguruan-kependidikan itu hanya mungkin terintegrasi ke dalam kiat pembelajaran, apabila pengalaman belajar di dalam pendidikan pra-jabatan menyediakan peluang bagi pembentukan kemampuan keguruan-kependidikan itu secara sistematis. Dengan perkataan lain, pendidikan pra-jabatan guru harus berhasil membentuk penghayatan tentang manusia dan masyarakat masa depan Indonesia yang dikehendaki; memahami manusia dan masyarakat Indonesia masa kini yang menjadi subyek dan latar garapannya; di samping menguasai bahan serta prosedur pengajaran yang mendidik yang dipandu oleh *informed responsiveness*. Sehingga lulusannya mampu mengelola program belajar-mengajar yang menjadi tanggung jawabnya demi memberi urusan nyata bagi perwujudan manusia dan masyarakat masa depan Indonesia yang dicita-citakan.

Jelaslah bahwa pendidikan pra-jabatan guru harus terselenggarakan secara benar-benar mantap, apabila kita menginginkan jajaran guru terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang layanan ahlinya dapat diandalkan. Pada gilirannya, profesionalisasi jajaran guru agaknya merupakan satu-satunya pilihan, sebab masa depan bangsa menjadi taruhannya.

Pembinaan dalam Jabatan

Fungsionalisasi jabatan guru SD dan SM menghadang masalah maha besar bagi pengelola pendidikan di tanah air. Dengan taksiran kasar, lebih dari 1,2 juta guru SD, lebih dari 400.000 guru SMP dan hampir 300.000 guru SMTA, berhak untuk berkompetisi dalam meraih jenjang kepangkatan

yang lebih tinggi, yang belum pernah terbaangkan sebelumnya. Tanpa membicarakan kebutuhan penyediaan dana yang menjadi jauh lebih besar, fungsionalisasi jabatan guru ini juga mempersyaratkan mekanisme promosi yang efektif, yang benar-benar menghargai layanan ahli yang terandalkan. Ada dua kelompok masalah pembinaan dalam-jabatan yang memerlukan penggarapan sungguh-sungguh, apabila ingin menyuskan pembinaan dalam-jabatan, dalam rangka fungsionalisasi jabatan guru ini.

Spektrum Ketenagaan Kependidikan

Apabila disimak, sistem pendidikan diselenggarakan oleh pelbagai jenis tenaga dengan pelbagai aras keahlian. Sejalan dengan bidang layanan medis yang tidak menyatukan dokter dengan bidan, perawat, farmakolog dan psikiater di dalam satu profesi, barangkali juga harus memilah-milahkan para penyelenggara pelbagai layanan ahli menjadi kelompok-kelompok profesi yang berbeda-beda. Paling tidak, Surat Keputusan Menpan tersebut di atas agaknya telah melakukannya dengan menyendirikan layanan keguruan dan bimbingan dan penyuluhan ke dalam suatu kelompok.

Selain itu, sejalan dengan rentangan jenjang kepangkatan yang dimungkinkan, perlu dipertimbangkan kemungkinan sumbangsih dari para pekerja profesional keguruan yang memiliki aras keahlian yang berbeda-beda itu. Untuk keperluan penyelenggaraan program pengajaran, atau katakanlah untuk menjamin kelancaran perputaran roda sistem pendidikan, diperlukan tenaga profesional dengan kualifikasi pengajar: memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai serta sikap yang tepat, sehingga

bisa mengelola proses belajar-mengajar secara efektif; mereka ini dapat dinamakan *system operators*. Mungkin istilah *capable teachers* dapat pula digunakan untuk menunjuk kepada tenaga-tenaga yang dimaksud. Secara ideal, kemampuan mereka ini harus merupakan hasil pendidikan prajabatan.

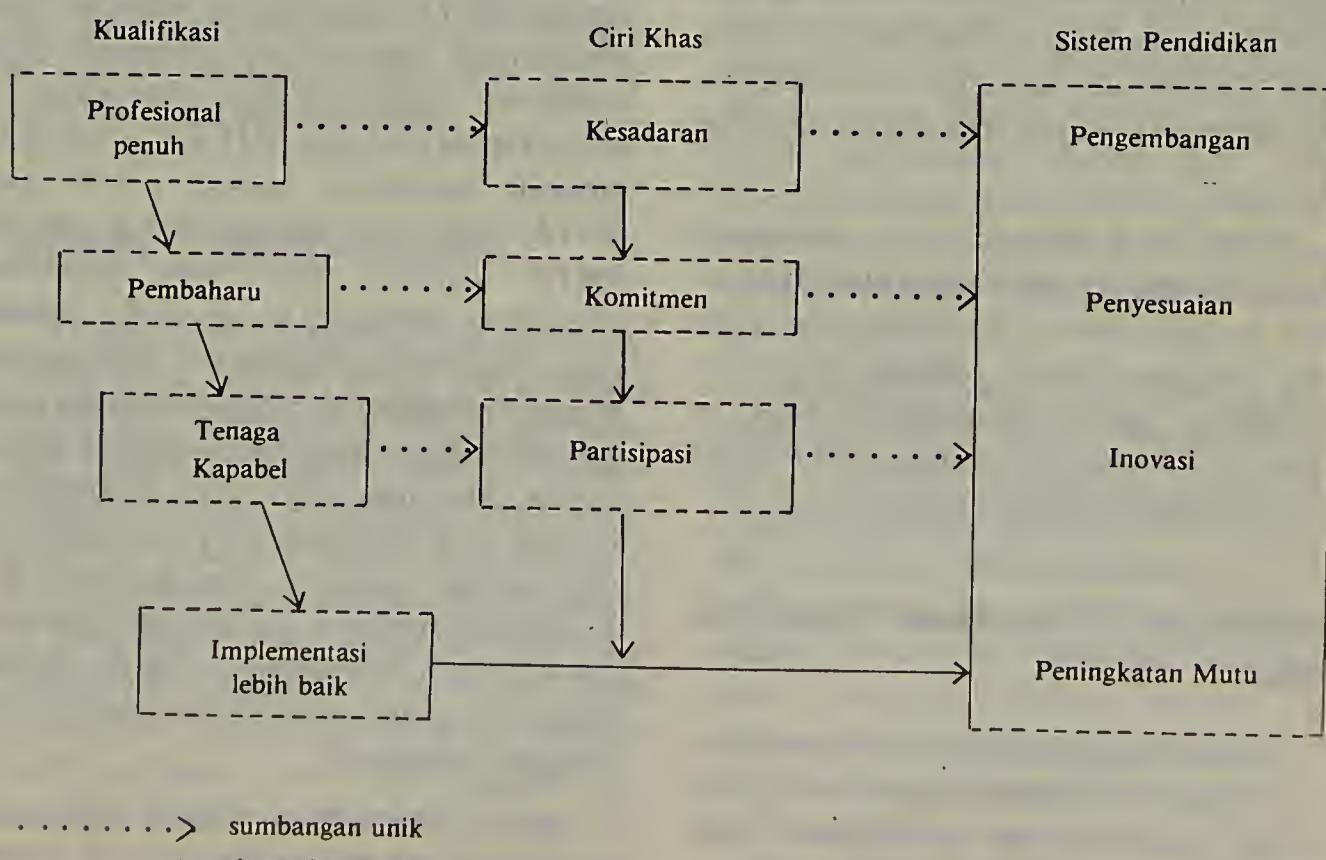
Selanjutnya, untuk mempertahankan vitalitas sistem, diperlukan pula tenaga yang berkualifikasi *committed change agents*, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan terutama sikap terbuka terhadap pembaruan-pembaruan ke arah perbaikan, yang sekaligus dapat berfungsi pula

sebagai penular-penular efektif dari gagasan-gagasan pembaruan yang dimaksud. Jelas, kualifikasi tahap ini hanya mungkin dimiliki apabila tenaga yang bersangkutan telah berkesempatan menghayati pekerjaan beberapa waktu, telah sempat membuat beberapa kesalahan serta telah berhasil melakukan perbaikan-perbaikan terhadapnya, yang memberikan kepada mereka rasa percaya diri untuk menerima dan mencoba sesuatu yang baru.

Akhirnya, pada tingkat yang tertinggi, dibutuhkan pula kaum profesional dalam arti yang selengkap-lengkapnya, yaitu mereka yang di samping memiliki pengetahuan

Diagram 1

**TINGKATAN KUALIFIKASI YANG DIPERLUKAN
UNTUK PENGOPERASIAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN**



dan ketrampilan memadai serta sikap yang tepat untuk penunaian tugasnya, juga memiliki visi yang lebih luas perspektifnya sehingga mampu "melihat" peranan, tantangan serta alternatif yang dihadapi oleh sistem pendidikan, atau sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, telah memiliki *informed responsiveness* dalam arti yang sepenuhnya. Jelas bahwa kualifikasi jenjang tertinggi ini hanya mungkin diraih oleh mereka yang bukan hanya "khatam" sekolahnya, melainkan telah sempat pula mengenyam pahitmanisnya praktek di lapangan di samping telah sempat mengadakan perbandingan-perbandingan -- secara langsung maupun secara *vicarious* -- mengenai berbagai sistem serta pendekatan dalam pemecahan masalah pendidikan. Oleh karena memiliki potensi yang bukan hanya dapat menyempurnakan, akan tetapi kalau perlu juga menemukan alternatif dalam pemecahan masalah, maka tenaga profesional dengan kualifikasi tertinggi ini dapat dinamakan *system developers*. Ketiga jenjang kualifikasi profesional serta ciri khas dan urunannya terhadap sistem pendidikan dilukiskan dalam Diagram 1.

Secara tidak langsung telah disinggung bahwa di samping pembedaan kualifikasi secara vertikal, proses profesionalisasi perlu pula ditujukan kepada pelbagai tenaga kependidikan lainnya berdasarkan latar layanan ahlinya, seperti teknisi, administrator serta peneliti dan pengembang.

Mekanisme Pembinaan Dalam-Jabatan

Dalam penyelenggaraan pelbagai aspek serta tahap penanganan dalam rangka pembinaan dalam-jabatan profesional guru, perlu dilakukan beberapa upaya.

Pertama, mekanisme dan prosedur penghargaan aspek-aspek layanan ahli keguruan perlu dikembangkan. Berlainan dengan jenjang pendidikan tinggi yang telah memberlakukan mekanisme ini dalam waktu relatif lama (dan toh masih mengidap banyak kekurangan), jenjang pendidikan dasar dan menengah samasekali belum berpengalaman dalam hal ini. Bukan hanya itu. Apabila jenjang pendidikan tinggi memiliki kultur kolegial yang telah bertradisi cukup panjang, sebaliknya dunia pendidikan dasar dan menengah justru ditandai oleh struktur hierarkis yang mantap. Dengan perkataan lain, penilaian ahli secara kesejawatan masih belum membudaya, sedangkan penilaian hierarkis-administratif yang selama ini berlaku, justru bertentangan dengan hakikat pengawasan kesejawatan terhadap layanan ahli profesional.

Kedua, sistem kepenilikan di jenjang SD dan terlebih-lebih sistem kepengawasan di jenjang SMTA yang berlaku sekarang, jelas memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang mendasar. Tidak lagi bisa dibenarkan seorang kepala satu jenis SMTA dipromosikan menjadi pengawas, apalagi untuk jenis SMTA yang lain. Bahkan untuk jenjang SMTA mungkin sudah harus dipikirkan kebutuhan mengadakan pengawas bidang studi, meskipun sebagaimana diisyaratkan di atas, hubungan hierarkisnya dengan para guru di lapangan memerlukan banyak penyesuaian. Misalnya, tidak sulit dibayangkan seorang guru berijazah S3 yang "diawasi" oleh seorang pengawas yang berijazah S2. Juga bagaimana hasil pengawasan dimasukkan ke dalam mekanisme penilaian jabatan fungsional, masih memerlukan banyak penjabaran operasional.

Ketiga, keterbukaan formasi juga mempersyaratkan keluasan kesempatan untuk

meraih kualifikasi formal yang lebih tinggi, katakanlah S1, dan bahkan S2 dan S3. Apabila 25% saja dari jajaran guru SD (belum lagi diperhitungkan jajaran guru SMP dan SMTA) berkesempatan untuk menduduki jenjang kepangkatan yang mempersyaratkan pendidikan S1, 10% berkesempatan menduduki jenjang kepangkatan yang mempersyaratkan pendidikan S2, dan 3% berkesempatan menduduki jenjang kepangkatan yang mempersyaratkan pendidikan S3, dapat dibayangkan tambahan pekerjaan yang perlu ditangani oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, baik dari segi daya tampung maupun dari segi pengembangan program yang diperlukan. Sebab dengan mudah dapat dibayangkan bahwa, sekali lagi demi keterandalan layanan ahli yang dibutuhkan sistem pendidikan, program-program baru perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dari segi daya tampung, mekanisme pengumpulan kredit yang tidak seluruhnya mempersyaratkan kehadiran penuh di kampus sebagaimana telah lumrah di negara maju, harus secepatnya mulai dikembangkan.

Peranan Organisasi Profesi

Di atas telah dikemukakan bahwa pengawasan mutu layanan dalam suatu bidang profesional, dilakukan secara kesejawatan, baik melalui perorangan maupun melalui organisasi profesi. Pertanyaan yang muncul dalam hal ini adalah, apakah organisasi profesi yang diharapkan memainkan pengawasan kesejawatan yang dimaksud telah siap menunaikan fungsinya? Tentu saja pada kesempatan ini yang dikehjau bukan semata-mata pernyataan formal kesanggupan mengemban fungsi profesional penting ini, akan tetapi terlebih-lebih terwujudnya me-

kanisme pengawasan kesejawatan yang hakiki, baik berkenaan dengan penyelenggaraan layanan ahli itu sendiri maupun berhubungan dengan pendidikan pra-jabatan para calon pekerja profesional yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, pengawasan dilakukan bukan atas dasar kekuasaan seperti yang sering terjadi di lingkungan serikat buruh. Sebaliknya, pengawasan dilakukan oleh kelompok ahli, yang dipandu oleh nilai-nilai profesi yang sejati, yaitu pengabdian keahlian bagi kemaslahatan orang banyak.

Penutup

Dengan keluarnya Surat Keputusan Menpan No. 26/1989 tertanggal 2 Mei 1989, langkah awal yang mendasar untuk mengakhiri perlakuan kurang taat asas terhadap jajaran guru telah diambil. Di samping menawarkan janji yang membangkitkan harapan, langkah mendasar ini juga disertai seperangkat tantangan berat yang harus dihadapi apabila kita ingin memprofesionalisasikan jabatan guru. Dengan perkataan lain, tekad untuk menjadikan jabatan guru sebagai karir profesional, harus diterjemahkan menjadi pelbagai upaya yang sistematis, konsisten dan berjangka panjang oleh pelbagai pihak yang terkait.

Penanganan yang tepat terhadap semua aspek dan tahap sistem pengadaan guru, yaitu rekrutmen, pendidikan pra-jabatan, pengangkatan-penempatan, dan pembinaan dalam-jabatan, akan berdampak positif bagi profesionalisasi jabatan guru, yang diberi peluang besar oleh keputusan pemerintah untuk memfungsionalkan jabatan guru. Namun di pihak lain, menghadang tantangan-tantangan. Bagaimana kita meyakinkan bahwa mekanisme saringan yang digunakan memang menjaring bibit unggul? Bagaima-

na kita meyakinkan bahwa pendidikan prajabatannya memang menghasilkan lulusan yang memiliki perangkat kemampuan awal yang dipersyaratkan, yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak mengenyam pendidikan pra-jabatan? Bagaimana kita mengembangkan mekanisme pengawasan layanan ahli yang dibayar mahal itu, sehingga kemaslahatan penerima layanan diyakinkan, dan pada gilirannya, masa depan bangsa yang lebih baik, memang secara sistematis telah diupayakan pewujudannya? Akhirnya, bagaimana pengawasan layanan ahli yang dimaksud, sekaligus dapat dijabarkan ke dalam bentuk mekanisme penghargaan yang efektif dalam rangka pembinaan dalam-jabatan, yang secara tepat memberi imbalan kepada pemberi layanan ahli, dan bukan kepada pemilik ijazah atau kepada anggota suatu perserikatan yang menjadi bersifat eksklusif bukan karena alasan keahlian yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak.

Sekali lagi, fajar harapan telah menyinggung bagi jajaran keguruan, akan tetapi tantangan-tantangan bawaannya tidak dapat disepelekan. Penberian imbalan yang kenyataannya tidak didasarkan kepada penghargaan terhadap layanan ahli, akan menjadi bumerang: yaitu dana imbalan yang lebih besar diberikan kepada pihak yang tidak berhak, kepentingan masa depan bangsa terabaikan, jajaran profesional keguruan gagal terwujudkan dan digantikan oleh kelompok yang memperoleh hak khusus karena kesempatan, bukan karena layanan ahlinya yang terandalkan. Oleh karena itu kita berharap, mudah-mudahan -- pengambil keputusan, organisasi profesi, jajaran keguruan serta masyarakat luas -- diberi kejernihan pikiran dan keteguhan pendirian dalam mengupayakan segala yang perlu, untuk mewujudkan profesionalisasi bidang pekerjaan guru melalui fungsionalisasi jabatannya.

BACAAN TERBATAS

C.H. McCully. 1969. *Challenge for Change in Councillor Education*. Minneapolis, Minn.: Burgess Publishing Co.

T. Raka Joni. 1977. "Pembentukan Profesional Tenaga Kependidikan: Permasalahan dan Kemungkinan Pendekatan." *Majalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Agustus, hal. 23-28.

T. Raka Joni. 1987. *Profesionalisasi Jabatan Guru: Permasalahan dan Kemungkinannya*. Naskah disiapkan untuk Rapat Kerja Sub-Dit Pengembangan Kurikulum dan Perlengkapan Pengajaran Ditjen Dikti.

D. Westby-Gibson. 1965. *Social Perspectives on Education*. N.Y.: Wiley.

Pendidikan, Politik, dan Ketahanan Nasional

A.M.W. PRANARKA

”Kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tak akan berhasil, kalau tidak dimulai dari bawah. Sebaliknya rakyat yang sudah kuat, akan pandai melakukan segala usaha yang perlu untuk kemakmuran negeri. Mendidik anak itulah mendidik rakyat. Keadaan dalam hidup dan penghidupan kita pada zaman sekarang itulah buahnya pendidikan yang kita terima dari orang tua pada waktu kita masih kanak-kanak. Sebaliknya anak-anak yang pada waktu ini kita didik, kelak akan menjadi warga negara kita” (*Ki Hadjar Dewantara*)

PENDIDIKAN merupakan hal yang strategis dan fundamental bagi perkembangan sejarah dunia maupun sejarah umat manusia, baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran mondial. Melalui pendidikan manusia yang menghuni dunia semesta ini tidak sekedar sebagai potensi demografikal tetapi secara makin sadar menunaikan tugas dan panggilan eksistensinya sebagai potensi kultural. Sejak munculnya manusia di dunia, sejarah dunia yang se-

belumnya dapat dipandang sebagai sejarah alam kosmik-fisikal semata-mata mengalami transformasi dan peningkatan evolusi secara mendasar menjadi sebuah sejarah kebudayaan. Sejarah itu tidak lagi dibentuk dan digerakkan oleh interaksi kekuatan kosmik-fisikal semata, akan tetapi terutama telah digerakkan serta dibangun oleh interaksi kekuatan kultural di dalamnya. Sejarah menjadi suatu proses interaksi kekuatan lahir maupun kekuatan batin. Manusia adalah kekuatan inti proses transformasi tersebut. Sejarah menjadi sejarah kebudayaan, dan itu tumbuh berkembang lebih lanjut hingga saat kita sekarang ini dan berjalan terus ke masa yang akan datang. Di dalam gerak gelombangnya proses tersebut pendidikan merupakan fungsi yang penting. Pendidikan adalah suatu fungsi internal dalam proses kebudayaan itu melalui mana manusia dibentuk dan membentuk dirinya. Pendidikan adalah bagian dari proses kebudayaan.

Dalam posisi dasar eksistensinya sebagai kekuatan kultural itu, manusia selalu harus mengembangkan pemahaman mendasar

terus-menerus mengenai pendidikan di dalamnya. Dengan perkataan lain, pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, adalah fungsi yang tidak pernah selesai. Pendidikan adalah proses yang tidak pernah akan final selama sejarah kebudayaan manusia masih belum memasuki tahap finalnya yang tuntas.

Politik dan Pendidikan

Berbicara mengenai pendidikan dan politik, masalah pokoknya adalah hubungan antara politik di satu pihak dan pendidikan di lain pihak, antara sistem politik nasional di satu pihak dan sistem pendidikan nasional di lain pihak.

Berbagai pertanyaan dapat dikemukakan guna mempertajam permasalahannya, misalnya saja mempertanyakan manakah yang harus ditekankan: dimensi politik dalam perencanaan pendidikan nasional ataukah dimensi pendidikan dalam perencanaan politik nasional? Apakah posisi pendidikan itu *neben* terhadap politik ataukah *untergeordnet*? Apakah pendidikan itu *onderbouw*-nya politik ataukah politik itu *onderbouw*-nya pendidikan? Apakah kita harus memberi bobot supremasi kepada pendidikan ataukah kepada politik?

Pertanyaan seperti itu masih terus dapat ditambah lagi: apakah sistem pendidikan berada *within the political system* ataukah sebaliknya politik berada *within the educational system*? Apakah politik dan pendidikan itu harus dipisahkan bagaikan separasi total ataukah harus dibaurkan menjadi suatu integrasi total?

Rumus-rumus interrogatif seperti di atas di belakangnya mempunyai latar belakang asumsi pemikiran yang bersifat indikatif.

Semua itu tergantung dari cara berpikir dan kemudian sikap kita tentang dan terhadap pendidikan dan politik, konsep kita mengenai pendidikan dan politik, ideologi kita tentang pendidikan dan politik.

Memang ada dua faktor yang amat mempengaruhi semuanya itu: (1) kenyataan sejarah dan kenyataan sosial yang mengandung gerak, kompleksitas dan interdependensi di dalamnya; (2) sikap dan pandangan manusia mengenai pengetahuan, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam sikap, teori ataupun dalil, baik mengenai pengetahuan manusia maupun pendidikan dan politik itu.

Ditinjau dari titik tolak diri kita, maka kita selalu perlu berusaha mengkaji dan memperjelas tata pikir kita sendiri terlebih dahulu untuk kemudian membangun dan menentukan sikap dan pandangan kita terhadap politik, pendidikan, dan hubungan antara politik dan pendidikan tersebut.

Problemi hubungan antara politik dan pendidikan pada hakikatnya tidak banyak berbeda dengan problem hubungan antara pendidikan dan ekonomi, politik dan ekonomi, ilmu dan falsafah, politik dan agama, pendidikan dan agama, ideologi dan theologi, dan lain sebagainya, yang dari satu pihak dirasakan pembedaan antara yang satu dengan yang lain, dan dari lain pihak ada pembauran antara yang satu dengan yang lain itu.

Dengan perkataan lain, sebagai salah satu bekal perlengkapan intelektual untuk membangun sikap dan pandangan kita terhadap hal-hal tersebut, termasuk mengenai politik dan pendidikan, kita perlu membangun landasan epistemologi.

Epistemologi yang cenderung tumbuh ke arah bentuk absolutisasi total, final, per-

nial, yang cenderung menjadi terlalu intelektual esensialistik serta bersifat deterministik satu dimensional merupakan salah satu sumber kerancuan dalam pemikiran dan sikap mendasar mengenai pendidikan dan politik, yang penuh dengan dikotomi tajam dan antagonisme. Epistemologi seperti itu telah melahirkan pandangan dan pemikiran yang dalilnya misalnya saja "politik untuk politik," "pendidikan untuk pendidikan," ekonomi untuk ekonomi, agama untuk agama, ideologi untuk ideologi, yang melahirkan sikap dan pandangan deterministik seperti politik *uber alles*, ekonomi *uber alles*, ilmu *uber alles*, seni *uber alles*, agama *uber alles*, dan lain sebagainya. Epistemologi seperti ini memacu pertanyaan tentang masalah posisi yang setepatnya: politik untuk manusia ataukah manusia untuk politik; pendidikan untuk manusia ataukah manusia untuk pendidikan; ilmu untuk manusia ataukah manusia untuk ilmu; agama untuk manusia ataukah manusia untuk agama? Ditambah dengan tumbuhnya spesialisasi yang menjadi makin banyak, suasana berpikir seperti itu menciptakan suasana yang penuh antagonisme yang menjadi makin tajam dan makin banyak sekatnya, menjadi makin ruwet dan makin menggurita, di mana masing-masing sistem merasa dan mau menyatakan klaim mutlak bagi dirinya, sebagai sistem yang paling final, paling total, paling penerus: terjadilah suasana yang penuh dengan dikotomi dan antagonisme yang kompleks.

Pandangan-pandangan tersebut melupakan bahwa yang menunaikan pendidikan, politik, ekonomi, ideologi, yang beragama, yang berfalsafah, yang bermasyarakat itu adalah manusia. Manusia adalah konteks dasarnya. Dari manusia asalnya kompleksitas, dari manusia pula asalnya interdependensi; dalam manusia bersumber kebhinne-

kaan, dalam manusia pula terdapat ketunggalikaan.

Yang berpretensi mempunyai ajaran final, total, absolut dan perenial, pandangan yang bersifat deterministik satu dimensional itu dapat disebut sebagai sebuah gejala atheisme modern. Bukan dalam arti atheisme sebagai sikap dan pandangan yang secara eksplisit menolak Tuhan (atheisme dalam jalur dialektika negatif), melainkan atheisme yang secara indirek dan implisit membuangkan Tuhan, karena memberi nilai absolut kepada kenyataan, sistem, doktrin ataupun pemikiran yang sifatnya tidak absolut.

Menempatkan pendidikan, politik, ekonomi, agama, hukum, ilmu, falsafah, theologi, ideologi, teknologi, dan lain sebagainya di dalam manusia sebagai inti kontekstualitasnya, berarti menempatkan semua itu sebagai bagian dari proses kebudayaan.

Maka itu pada diri manusialah pendidikan dan politik kita tempatkan. Di situlah letak titik pembaurannya, di situ pula letak titik pembedaannya (yang tidak selalu harus diartikan sebagai pemisahan). Di situlah konvergensinya, di situ pula divergensinya.

Oleh karena itu pemahaman refleksif kritikal mendasar mengenai pendidikan dan politik serta hubungan antar keduanya, akan selalu meminta secara implisit ataupun eksplisit, secara primitif maupun progresif terjadinya proses pemikiran mendasar pula mengenai manusia dan sifat-sifat dasarnya. Dalam tahapan kebudayaan yang menjadi semakin maju, asumsi-asumsi dasar itu menjadi makin sadar dan reflektif sifatnya.

Jadi, di samping perlunya suatu epistemologi yang jelas, pemahaman mendasar mengenai politik dan pendidikan pun memerlukan landasan *ontologi kemanusiaan*

yang kuat dan jelas. Singkatnya diperlukan landasan falsafah, ideologi ataupun konsep dasar mengenai manusia, hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan manusia-manusia lain, hubungannya dengan sejarah, dunia dan alam semesta, hal-hal yang terbatas dan hal-hal yang tidak terbatas, sampai kepada hubungannya dengan Yang Maha Esa.

Dari pemahaman tersebut kita dapat melihat beberapa sifat dasar politik dan pendidikan sebagai aktualisasi dari sifat-sifat dasar manusia, seperti sifat menyejarah (*historis*), sifat bergerak, berkembang (*evolutif*), sifat eksistensial, sifat kontekstual, sifat dialektikal, sifat struktural, adanya kompleksitas dan interdependensi di dalamnya, dan lain sebagainya.

Pendidikan dan Politik Sebagai Konsep Kekuatan

Guna memahami secara mendasar mengenai politik, pendidikan dan hubungan antara politik dan pendidikan itu, dapatlah kita menelaahnya di dalam konteks konsep kekuatan. Politik dan pendidikan kita pandang sebagai konsep kekuatan.

Hal tersebut tidak berarti bahwa kita harus menganut aliran ajaran mengenai kekuatan dan memandang pendidikan sebagai perangkat dari kekuatan. Ada beberapa pertimbangan mengapa membahas pendidikan dan politik ini sebagai konsep kekuatan: (1) karena akan mempertajam permasalahan yang ada dan karenanya membantu kita untuk membentuk pemahaman maupun sikap yang jelas; (2) karena dalam kenyataannya pendidikan maupun politik dapat dipandang sebagai kekuatan; (3) karena akhirnya samapailah kita kepada pandangan, sikap serta

permasalahan dasar yaitu: bagaimanakah kita perlu berusaha secara terus-menerus untuk membudayakan kekuatan-kekuatan sejarah termasuk kekuatan pendidikan dan politik (atau lebih tepat pendidikan sebagai kekuatan dan politik sebagai kekuatan). Hal ini berlaku pula terhadap kenyataan lain, seperti ilmu, teknologi, ideologi, ekonomi dan agama sebagai kekuatan.

Sejarah dunia dan sejarah umat manusia tampaknya *diciptakan oleh Tuhan* sebagai medan pagelarannya kemungkinan yang dibentuk dan ditentukan oleh interaksi dan pergumulan dua kekuatan dasar: kekuatan alam di satu pihak (*the power of the natural resources*) dan kekuatan manusia di lain pihak (*the power of the human resources*).

Proses kebudayaan -- dan karenanya juga proses pembangunan sebagai aktualisasi dari upaya kebudayaan -- merupakan interaksi antara kekuatan alam dan kekuatan manusia di mana sumber daya alam menjadi bermakna dan dapat dilipatgandakan arti dan manfaatnya oleh tingkatan kualitas sumber daya manusia yang menggumulinya, sehingga pernah saya mencoba mengemukakan gagasan tersebut dalam suatu rumus (yang secara teknikal mungkin kurang sempurna) sebagai berikut: $P = \frac{(SA \times SM)}{W}$

$$P = \frac{(SA \times SM)}{W}$$

Rumus lain yang hampir bersamaan adalah apa yang terdapat di dalam buku *World Power Assessment* di mana dikemukakan berikut ini:

$$P_p = (C + E + M) \times (S + W)$$

P_p = tingkat kekuatan suatu bangsa atau negara

C = Population and Territory

E = Economic Capability

M = Military Capability

S = Strategic Purpose

W = Will to pursue National Strategy

Sementara itu di dalam makalahnya yang berjudul *Meta Strategy*, Dr. Daoed Joesoef mengajukan rumus lain lagi:

$$K_g = (U + N + E + M) \times (t + c + s)$$

K_g = Gambaran Kekuatan Bangsa

U = Unsur Masif

N = Sistem Nasional

E = Kemampuan Ekonomi

M = Kemampuan Militer

t = Tekad Nasional

c = Kecerdasan Penduduk

s = Strategi Nasional

Apa pun perbedaan yang dapat kita lihat dan ungkapkan dari berbagai rumus tersebut, yang jelas adalah bahwa semua itu menunjukkan kepada kualitas manusia sebagai faktor yang paling menentukan.

Manusia secara individu maupun kolektif mengandung di dalamnya kekuatan-kekuatan dan dibentuk oleh interaksi dan integrasi berbagai kekuatan itu: ada kekuatan fisik kosmikal (kekuatan biologikal misalnya), kekuatan rasio (*power of the reason*),

kekuatan kehendak (karena itu kita berbicara tentang *willpower* dan *freedom*), kekuatan afektif emosional, kekuatan rohani (kekuatan moral dan kekuatan spiritual, dan manusia mengemban tugas untuk mengelola interaksi dan integrasi kekuatan-kekuatan itu demi membentuk pribadi dan masyarakat).

Sébelum manusia bereksistensi di dunia, maka sejarah dunia semesta itu bergerak, tumbuh, berkembang, dibentuk oleh kekuatan-kekuatan alam semata yang mungkin dapat disebut sebagai *forces*. Ketika manusia sebagai kekuatan kultural berada di dunia, maka sejarah dibentuk oleh kekuatan manusia adalah menjadi *cultural power of history*, dengan membentuk, membangun, mentransformasikan dunia dan manusia melalui proses pembudayaan kekuatan, baik *forces* maupun *power* (kekuasaan). Pembudayaan kekuasaan itu mengembangkan konsep *power* sampai mengalami transformasi ke dalam konsep *authority*, yaitu kekuasaan yang mempunyai keabsahan, dan hukum menjadi salah satu perangkat dalam proses pembudayaan kekuasaan manusia. Itu sebabnya mengapa semakin maju sejarah manusia semakin sadarlah ia bahwa negara, misalnya, tidak boleh didasarkan atas kekuasaan semata-mata, melainkan harus didasarkan atas hukum.

Dengan memahami manusia sebagai pengemban tugas mengelola (*management*) kekuatan maupun kekuasaan dalam rangka membudayakan segala kekuatan dan kekuasaan baik secara individual maupun secara kolektif itu (kekuatan rasio, kehendak, kemerdekaan, emosi, politik, ekonomi, masyarakat, agama dan lain-lainnya) dapatlah kita lihat tempat pendidikan dan tempat politik di dalam konstelasi aktif-evolutif-dialektikal dari berinteraksinya kekuatan maupun ke-

kuasaan itu.

Politik, misalnya, adalah suatu wujud aktualisasi dari kekuasaan melalui mana masyarakat manusia mengadakan pilihan eksistensi, mengambil keputusan, menata dan mengarahkan. Politik adalah aktualisasi kekuasaan sebagai proses, produk maupun masyarakat. Maka itu politik akan menentukan pilihan atas sistem pendidikan, ekonomi, hukum, masyarakat dan sebagainya. Dalam pada itu pendidikan merupakan aktualisasi dari proses membudayakan kekuatan maupun kekuasaan, termasuk membudayakan politik. Politik mungkin dapat kita pandang sebagai peradaban, yaitu perangkat dari proses kebudayaan. Sedangkan pendidikan adalah fungsi dari kebudayaan, melalui mana manusia membudayakan perangkat-perangkat tersebut.

Posisi dasar baik pendidikan maupun politik sebagai konsep kekuatan itu dengan sendirinya juga mempunyai jalur-jalur aktualisasinya masing-masing: pendidikan melalui institusi pendidikan, politik melalui institusi politik. Pendidikan membentuk komunitas edukatif, politik membentuk komunitas politikal. Atau lebih tepat melalui pendidikan manusia membangun komunitas edukatif, melalui politik manusia membangun komunitas (plus institusi) politik.

Politik dan Pendidikan Sebagai Aktualisasi dari Ideologi

Setelah menelaah beberapa hal di atas, maka dapatlah kita berkata bahwa politik dan pendidikan pada dasarnya adalah suatu aktualisasi dari ideologi. Terutama karena baik pendidikan maupun politik merupakan aktualisasi dari pilihan eksistensi manusia secara kolektif, bagi dirinya, serta bagi ma-

syarakat yang diperjuangkan dan dicita-citakannya.

Kalau dalam hal ini saya berbicara mengenai ideologi, maka walaupun tetap memperhatikan konsep-konsep mengenai ideologi dari berbagai aliran, dari zaman sebelum Napoleon hingga konsep-konsep kontemporer dewasa ini, saya tidak menganut salah satu aliran tersebut, karena aliran-aliran itu mencerminkan kecenderungan absolutisasi satu dimensi yang dogmatik. Ideologi saya artikan sebagai cara berpikir manusia mengenai apa yang dicita-citakan dan cara berpikir mengenai cara kerja manusia itu untuk mencapai dan memperjuangkan yang dicita-citakan.

Kalau pendidikan dan politik adalah suatu konsep kekuatan maka ideologi adalah juga sebuah konsep kekuatan. Melalui dan di dalam ideologi itu manusia memilih dan menetapkan acuan sikap dan pandangannya terhadap kekuatan dan kekuasaan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa problem legitimasi mempertanyakan secara mendasar hal kekuasaan itu: untuk siapakah kekuasaan tersebut, dan apa dasar keabsahan dari kekuasaan itu. Mengenai hal ini terdapat berbagai sikap dan pandangan (dan karena itu melahirkan berbagai macam ideologi, sistem politik dan sistem pendidikan). Pandangan dan sikap yang satu dimensional lazimnya melahirkan ideologi, politik dan sistem pendidikan yang sifatnya diskriminatif. Seperti misalnya ajaran: kekuasaan untuk kekuasaan, ajaran kedaulatan negara, ajaran kedaulatan kekuatan senjata, ajaran kedaulatan kekuatan ekonomi, ajaran kedaulatan Tuhan dan ajaran kedaulatan agama, serta macam-macam ajaran mengenai kedaulatan tersebut. Pada hakikatnya problem legitimasi mempunyai kaitan erat de-

ngan problem kedaulatan (suverinitas, otonomi). Konsep mengenai legitimasi dan kedaulatan dengan sendirinya mengalir ke dalam aktualisasi strukturalnya. Maka konsep legitimasi yang sifatnya deterministik satu dimensional melahirkan aktualisasi dalam pola struktural yang bersifat diskriminatif.

Bagi kita bangsa Indonesia, tampaknya problem ideologi, legitimasi dan struktur telah memperoleh pembahasan mendasar sejak zaman Kebangkitan Nasional. Masalahnya adalah: Indonesia merdeka itu untuk siapa. Di sinilah kita dapat melihat makna dari tumbuhnya Wawasan Kebangsaan Indonesia, di mana legitimasi dan kedaulatan ada di tangan rakyat yang disatukan sebagai satu bangsa. Maka dengan Proklamasi Kemerdekaan kita mewartakan kemerdekaan bangsa, dan melahirkan negara kebangsaan, serta dengan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan ideologi nasional, dan konstitusi sebagai hukum dasarnya bangsa Indonesia. Melalui Proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, merdeka, dan berdaulat, dan melalui proses pembangunan (sebagai proses kultural) berusaha juga menjadi bangsa yang maju.

Sejarah kebudayaan tampaknya membawa serta ajaran mengenai persamaan harkat dan martabat manusia. Dan karena itu kriteria dasar dari legitimasi dan kedaulatan (dan karena itu juga ideologi, politik dan pendidikan) adalah konfrontasinya dengan sifat-sifat dasar manusia yang sama dan se-derajat tersebut. Karena itulah Wawasan Kebangsaan kita menjauhi aktualisasi struktural yang diskriminatif dan dogmatik. Karena itu kita memilih bentuk Republik, karena itu kita memilih demokrasi.

Karena pendidikan dan politik adalah aktualisasi dari ideologi, maka perkembang-

an menunjukkan betapa masing-masing bangsa, masyarakat dan negara, membangun pula sistem pendidikannya, yang bagi kita di Indonesia adalah sistem politik nasional dan sistem pendidikan nasional. Maka itu pula sistem politik dan sistem pendidikan itu adalah bagian dari sistem nasional. Maka itu sistem politik dan sistem pendidikan nasional harus pula merupakan jawaban terhadap problem dan konsep legitimasi serta aktualisasi struktural yang kita anut.

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional

Manifestasi yang paling jelas mengenai hubungan antara politik dan pendidikan dapat kita temukan dalam UU No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Walaupun UU itu berbicara mengenai Sistem Pendidikan Nasional, namun dokumen tersebut bukanlah sebuah dokumen pendidikan. UU, termasuk UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah suatu proses dan sekaligus juga sebuah produk politik.

Dalam konteks sistem pendidikan nasional kita UU pendidikan tersebut dapatlah kita pandang sebagai hasil dari proses musyawarah untuk mufakat, di mana rakyat Indonesia membangun konsensus bersama mengenai sistem pendidikannya. Dalam pengertian ini pula menjadi lebih jelas betapa pendidikan dan politik keduanya merupakan suatu aktualisasi dari ideologi nasional kita.

Walaupun UU Nomor 2 Tahun 1989 tersebut, sebagai sebuah sistem, dirasa mengandung kerancuan internal dalam bidang tertentu (khususnya yang berkenaan dengan

pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional), dalam keseluruhannya amatlah jelas betapa sistem pendidikan nasional tersebut dibangun atas dasar acuan-acuan dasar nasional. Dan karena itu perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya dapat dan harus selalu dikaji berdasarkan atas prinsip-prinsip nasional.

Sebagai sebuah produk politik UU itu tidak merupakan sebuah resep siap pakai untuk membangun dan meningkatkan pendidikan nasional kita, apalagi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hubungan antara UU Nomor 2 Tahun 1989 dengan Sistem Pendidikan Nasional, terutama yang menyangkut mutu dan relevansinya, bukanlah hubungan yang tanpa mediasi (*immediata relatio*) melainkan hubungan yang memerlukan mediasi-mediasi yang perlu diupayakan (*relatio mediata*).

Yang paling penting adalah bahwa UU tersebut memuat amanat politik berkenaan dengan mutu, pemerataan dan relevansi. Bila kita kaji dari segi ini, dapat dikatakan bahwa UU Nomor 2 Tahun 1989 telah memuat di dalamnya amanat mengenai pemerataan, kualitas dan relevansi, untuk membangun pendidikan nasional secara terus-menerus sebagai aktualisasi ideologi nasional kita.

Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan sebagai konsep kekuatan dan aktualisasi ideologi nasional, dengan sendirinya membawa kita lebih lanjut kepada upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional. Kata sistem berasal dari kata majemuk bahasa Yunani, *suntithemai*, yang artinya kira-kira adalah meletakkan bersama. Maka sistem ada kaitannya dengan susunan, bangun-

an, kesatuan yang mempunyai banyak bagian-bagiannya.

Istilah sistem mengandung di dalamnya hal-hal berikut:

- a. Adanya satu kesatuan yang utuh dan bulat;
- b. Adanya bagian-bagian yang membentuk kesatuan yang utuh itu;
- c. Adanya hubungan keterkaitan antara bagian satu dengan yang lain dan antara bagian dengan keseluruhan;
- d. Adanya gerak dinamika (karena pada dasarnya sistem adalah kekuatan yang bergerak dan menggerakkan);
- e. Adanya arah serta produk dari sistem tersebut yang mempunyai makna dan manfaat.

Dalam suatu sistem terdapat komponen-komponen yang membentuk akan tetapi sekaligus juga menjadi bagian dari kebulatan sistem. Sistem itu juga selalu berkaitan dengan sistem lain, sehingga orang dapat berbicara mengenai sistem dalam arti mikro, sistem dalam arti makro, dan berbicara mengenai subsistem di dalam suatu sistem.

Dalam pengertian itu kita dapat berbicara mengenai sistem politik dan sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari sistem nasional. Kita dapat berbicara tentang hubungan dialektikal dari sistem pendidikan dan sistem politik, karena ada interrelasi dan interdependensi, baik dalam arti dialektika positif maupun dalam arti dialektika negatif. Bahkan kita perlu pula melihat keterkaitan (yang saat ini menjadi makin struktural) antara sistem nasional dengan sistem global, yang juga dibentuk oleh berbagai kekuatan dengan berbagai sistem di dalamnya.

Dalam sistem pendidikan maupun sistem politik kita dapat berbicara mengenai kom-

ponen-komponen internalnya, mengenai subsistem yang ada di dalamnya. Misalnya saja: tanggung jawab yang ada pada keluarga, pemerintah dan masyarakat. Adanya sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta. Adanya jenis-jenis dan jenjang-jenjang pendidikan. Adanya pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Dalam sistem politik misalnya kita menemukan adanya suprastruktur politik dan infrastruktur politik, adanya perbedaan antara ormas dan orpol.

Kiranya perlu dikemukakan bahwa pendidikan dan politik sebagai aktualisasi ideologi yang merupakan pilihan eksistensi, akan selalu mempunyai sifat kontekstual yang bergerak, berubah dan berkembang. Dalam hal ini sistem pendidikan maupun politik haruslah mempunyai daya relevansi sehingga dapat produktif, tepat guna dan berhasil guna.

Maka itu berbicara mengenai sistem pendidikan maupun sistem politik nasional sebagai aktualisasi ideologi nasional sekurang-kurangnya kita harus mengemukakan tiga pertanyaan berikut:

- a. Seberapa jauh sudah dilandasi oleh wawasan dasar nasional sebagai pilihan eksistensi nasional kita;
- b. Seberapa jauh telah membangun dan mengembangkan komponen-komponen dasar seperti komponen struktural, didaktikal, serta prosedural; dan membuat komponen-komponen itu berinteraksi secara tepat dalam membangun dan menjadikan seluruh sistem itu, di mana tidak ada kendala internal, kontradiksi internal dan tabrakan internal;
- c. Seberapa jauh terbuka sehingga dapat memiliki daya relevansi yang tepat dan tinggi.

Pendidikan dan Ketahanan Nasional

Memahami pendidikan *in terms of* kekuatan, mempermudah kita untuk melihat kaitan antara pendidikan dan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah sebuah konsep strategis, sebuah konsep yang didasarkan atas wawasan kejuangan bangsa. Itulah sebabnya maka tumpuan dasar dari konsep ketahanan nasional adalah konsep mengenai kekuatan: kekuatan perjuangan bangsa, kekuatan nasional. Maka ketahanan nasional berbicara tentang kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa.

Dalam pola pikir ini manusia sebagai kekuatan merupakan tumpuan dasar dari konsep dan doktrin ketahanan nasional tersebut. Dan di sinilah letak kaitan antara ketahanan nasional dengan kebudayaan, ketahanan nasional dengan pendidikan.

Ketahanan nasional adalah salah satu wujud interpretasi kreatif dari wawasan kebangsaan dan wawasan kejuangan. Wawasan kebangsaan, dalam arti bahwa ketahanan nasional itu tumpuannya adalah kekuatan nasional. Kekuatan nasional adalah kekuatan yang dijiwai oleh wawasan kebangsaan. Wawasan kejuangan dalam arti bahwa suatu bangsa itu harus bergulat dengan medan sejarahnya: minimal untuk bertahan dan atas dasar kemampuan bertahan tersebut berusaha mencapai kemajuan-kemajuan. Maka itu doktrin ketahanan nasional mengatakan bahwa ketangguhan dan kemampuan itu adalah untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya (batas minimumnya adalah survival) menuju kejayaan bangsa dan negara (gerak maksimumnya adalah menuju kepada kemajuan, kejayaan). Dalam rumus lain wawasan ini sering diungkapkan

sebagai berikut: berusaha mencapai yang sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya, tidak hancur dalam kondisi yang sejelek-jeleknya.

Ketahanan nasional adalah sebuah doktrin kejuangan, karena itu adalah suatu gerakan dan yang bergerak dan menggerakkan. Ketahanan nasional mempunyai *sifat historis*; artinya bergerak dalam sejarah dan menggerakkan sejarah; mempunyai *sifat kontekstual* dan *dialektikal*, karenanya ketahanan nasional merupakan suatu proses dan produk dari upaya suatu bangsa memberi *creative responses to the actual challenges* yang dihadapi dalam perjalanan perputarannya roda sejarah. Itulah sebabnya maka ketahanan nasional berbicara tentang *kondisi dinamis*.

Konsep ketahanan nasional sebagai ungkapan kreatif dari wawasan kebangsaan membawa implikasi sifat dasar pada ketahanan nasional. Wawasan kebangsaan adalah suatu konsep yang multidimensi, integralistik: mencakup konsep ideologi, tetapi juga konsep negara, masyarakat, politik, ekonomi, hukum, kebudayaan dan persatuan-keamanan. Maka itu doktrin ketahanan nasional mengajarkan tentang kondisi dinamis dan integral yang meliputi tiap-tiap aspek kehidupan bangsa secara terpadu, terintegrasi.

Kebudayaan itu intinya adalah manusia. Pendidikan hakikatnya adalah upaya sadar dan terencana membangun manusia dari eksistensinya sebagai kekuatan potensial menjadi kekuatan kultural real. Pendidikan adalah upaya mengadakan proses transformasi mengubah manusia sebagai kekuatan kultural potensial, kekuatan nasional potensial menjadi kekuatan kultural real, kekuatan nasional real.

Kaitan antara doktrin ketahanan nasional dengan konsep kebudayaan dan pendidikan itu membawa beberapa implikasi terhadap politik pendidikan nasional kita, yang harus kita pilih dan kita bangun sebagai pilihan langkah aktualisasi ideologi bangsa. Implikasi itu di antaranya adalah:

- a. Politik pendidikan nasional harus dijiwai dan dilandasi wawasan kebangsaan. Hal ini berarti dikondisi dan dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945. Didasarkan atas prinsip-prinsip nasional dan karena itu cita-cita demokrasi dan kemajuan bangsa;
- b. Politik pendidikan nasional harus digerakkan oleh wawasan kejuangan: yaitu membangun manusia Indonesia untuk mengalami proses transformasi dari kekuatan nasional potensial menjadi kekuatan nasional real;
- c. Politik pendidikan nasional harus dibangun secara dinamis dan integralistik. Integralistik dalam arti memperhatikan semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dinamis dalam arti menjadi proses dari produk dan respons kita terhadap perubahan kondisi dan keadaan secara terus-menerus;
- d. Politik pendidikan nasional perlu didukung oleh kesadaran kesejarahan yang tinggi, tidak saja sejarah sebagai konsep

Implikasi Doktrin Ketahanan Nasional bagi Perancangan Pendidikan Nasional

Memahami sumber daya manusia sebagai kekuatan dasar dan utama bagi ketahanan nasional dan pembangunan bangsa berarti menempatkan kebudayaan dan pendidikan sebagai upaya penting di dalamnya.

masa lampau akan tetapi sejarah sebagai konsep proses masa kini dan masa depan;

e. Politik pendidikan nasional harus selalu kontekstual, dalam arti memiliki daya relevansi yang tinggi terhadap perkembangan dan pergeseran lingkungan yang terjadi.

Merancang Pendidikan yang Dipusatkan kepada Kekuatan Daya Relevansi

Dalam perspektif strategis sebagaimana diinginkan oleh doktrin ketahanan nasional, maka politik pendidikan, baik dalam jangka dekat, menengah maupun panjang, perlu *dipusatkan kepada fokus relevansi*: artinya kita perlu membangun sistem pendidikan nasional yang memiliki daya relevansi yang tinggi.

Dalam *setting strategis* dewasa ini politik pendidikan yang ditujukan ke arah daya relevansi yang tinggi tersebut perlu memperhatikan hal-hal berikut:

a. Realitas demografi nasional: membutuhkan perhatian karena masih banyaknya masalah yang berhubungan dengan laju pertumbuhan, struktur, komposisi dan penyebarannya. Potensi demografi inilah yang melalui proses pendidikan ingin kita ubah menjadi potensi kultural nasional real;

b. Realitas faktual dalam perkembangan global: kita menjadi makin terkait secara struktural dengan perkembangan dunia, sehingga kita harus membangun *strategic adjustment* yang tepat dan handal untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan, kecenderungan, ancaman dan peluangnya;

c. Pluralisme sosiologikal baik nasional maupun internasional, sebagai kenyataan yang perlu kita bangun melalui proses pendidikan untuk tidak menjadi hambatan melainkan justru menjadi tumpuan kekuatan;

d. Tantangan yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif: politik pendidikan harus mampu secara seimbang dan serasi memberikan jawaban terhadap desakan kuantitas di satu pihak dan desakan kualitas di lain pihak. Dalam kerangka ketahanan nasional sudah barang tentu kita perlu menetapkan basis kualitatif mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan atas basis kualitatif mendasar dan minimal tersebut dapat dikembangkan diversifikasi gerak kekuatan guna menjawab tantangan yang antara lain datang dari desakan kualitas. Kerangka pendekatan tersebut dapatlah disebutkan perencanaan sistem pendidikan nasional, dengan antara lain memperhatikan hal-hal berikut:

- Perencanaan Sistem Pendidikan Nasional harus didasarkan atas prinsip-prinsip nasional, yaitu pilihan eksistensi nasional baik yang ideologikal maupun yang struktural;
- Perencanaan pendidikan nasional harus berpegang kepada cita-cita dan prinsip demokrasi (demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi kultural kemasyarakatan);
- Perencanaan pendidikan harus didasarkan atas cita-cita modernisasi;
- Perencanaan pendidikan harus disertai dengan kemampuan kita membaca gerak gelombang perubahan alam dan zaman, melihat berbagai kemungkinan di dalamnya, dan mengadakan pilihan-pilihan daripadanya;

- Perencanaan pendidikan harus mengacu kepada upaya pembangunan daya relevansi yang tinggi dalam rangka mewujudkan dan menumbuhkan sumber daya manusia sebagai kekuatan potensial menjadi kekuatan real;
- Perencanaan pendidikan perlu didasarkan atas kesadaran bahwa sistem pendidikan adalah salah satu bagian dari sistem nasional, dan bukan satu-satunya bagian dari sistem nasional, karena itu pendidikan dapat mendukung perkembangan sistem lainnya dan didukung oleh sistem-sistem lainnya, namun tidak harus mengambil oper dan disuruh mengambil oper eksistensi maupun fungsi dan sistem-sistem yang lain, seperti sistem politik dan sistem ekonomi.

Beberapa Langkah Terobosan dalam Politik Pendidikan

Di medan yang serba majemuk dan serba gerak yang sifatnya luas seperti yang dihadapi oleh dunia pendidikan nasional, serta adanya keterbatasan sumber daya maupun dana yang dapat dimanfaatkan, kita perlu memilih beberapa pilihan untuk dijadikan prioritas. Prioritas ini perlu sekali dipilih berdasarkan pertimbangan *manfaat strategis yang memiliki daya "multi-relevansi."* Dalam hal ini ada beberapa tindakan yang perlu dipandang sebagai upaya terobosan yang sifatnya tidak sekedar taktikal akan tetapi yang sungguh bersifat strategis. Di antaranya:

1. Terobosan di tingkat pendidikan dasar: ditempuh dengan upaya pemerataan, wajib belajar, adanya bahan minimal dasar, sebagai bekal dasar yang harus dimiliki

oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka ini, di samping upaya wajib belajar dan pemilihan materi kurikularnya, maka upaya melebarkan basis pendidikan dasar yang akan menjangkau tingkat SLTP sekarang ini kiranya dapat dipandang sebagai langkah terobosan strategis untuk masa yang akan datang. Ini adalah langkah basis yang amat penting dalam menegakkan materi pendidikan nasional.

2. Terobosan di tingkat pendidikan menengah. Pada jangka ini medan akan menjadi makin majemuk, karena itu perlu diversifikasi dalam langkah strategis. Diversifikasi perlu memikirkan tuntutan kuantitatif di satu pihak dan relevansi kualitatif di lain pihak, walaupun perlu dihindari kecenderungan mengembangkan "diversifikasi" itu menjadi jaringan-jaringan yang terlalu ruwet. Di samping itu perlu mulai dirancangkannya upaya membangun relevansi yang kita bagi yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di satu pihak dan relevansi terhadap perkembangan dunia kerja dan profesionalisme yang produktif di lain pihak. Dengan perkataan lain, pada tingkat pendidikan menengah ini perlu sekali dipikirkan dan dipertegas pengembangan jalur keilmuan di satu pihak dan jalur kejuruan vokasional di lain pihak. Perkembangan di masa mendatang kiranya meminta agar pendidikan menengah kejuruan yang kita selenggarakan hingga saat ini mengalami proses transformasi yang amat mendasar. Maka harus ada orientasi baru yang mengubah penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan. Hendaknya sekolah menengah kejuruan itu tidak sekedar menjadi pendidikan kelas atau pengajaran. Sekolah menengah kejuruan seyogyanya juga menjadi pusat produksi terkait secara aktual dengan proses pemasaran

maupun proses modal. Dengan perkataan lain, pendidikan kejuruan itu memadu secara kreatif: proses edukasi, proses produksi, proses pemasaran dan kaitannya dengan sirkulasi permodalan. Mungkin ini akan dirasa sebagai perubahan yang agak mendasar. Namun tanpa perubahan seperti itu pendidikan menengah kejuruan akan semakin kehilangan daya relevansi dan karena itu juga daya tarik bagi anak-anak kita.

3. Terobosan di tingkat pendidikan tinggi. Di sini diversifikasi antara jalur keilmuan dan jalur profesi menjadi makin penting, walaupun interdependensi mungkin akan menjadi makin mengembang (ingat perkembangan hubungan antara ilmu dan teknologi). Perlu pula disadari bahwa pendidikan tinggi ini merupakan jemb-

tan strategis yang mempersiapkan sebagian kekuatan nasional untuk berinteraksi di dalam percaturan global. Maka itu tuntutan *comparative advantage* yang kompetitif perlu sekali menjadi masukan dalam membangun sistem pendidikan tinggi kita dan dari situ tumbuh kekuatan nasional yang memiliki disiplin tangguh dan produktivitas yang mempunyai daya relevansi kualitatif yang tinggi.

4. Terobosan untuk membangun "Guru" sebagai tenaga inti di dalam membangun kekuatan nasional.

Langkah-langkah terobosan itu harus diikuti oleh dukungan-dukungan lain seperti implikasi dalam menentukan kurikulum, dalam pengelolaan, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, dan lain sebagainya.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:
*SUDIBYO (Editor),
Yoyok ARIESSUSANTO*

I. KERJASAMA ASEAN

A. Kerjasama Industri

1. Industri Semen ASEAN
2. Proyek Industri ASEAN
3. Seminar Keramik ASEAN

B. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata

1. Sidang Tahunan AHPADA
2. Pameran Dagang ASEAN ke-4
3. Pariwisata Mobil ASEAN
4. Musyawarah Komisi Kerja Kelompok-14 (G-14)
5. Pertemuan Kamar Dagang dan Industri ASEAN

C. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi

1. Konperensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1
 - a. Persiapan Konperensi Menteri Penerangan ASEAN
 - b. Pelaksanaan Konperensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1
2. Lokakarya Penggunaan Sistem Radio Cellular
3. ASEAN Worlddidac Expo
4. Festival Lagu ASEAN

D. Kerjasama Kesehatan

1. Simposium ASI se ASEAN
2. Rehabilitasi Pecandu Narkotika
3. Sidang ASOD ke-12
4. Kongres Psikiatri dan Kesehatan Jiwa
5. Pertemuan Konsultasi Kesejahteraan Anak ASEAN

II. MASALAH KEAMANAN ASEAN

A. Seminar Keamanan Regional ASEAN

B. Kerjasama Militer dan Keamanan ASEAN

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA

A. Hubungan ASEAN-UNDP

B. Hubungan ASEAN-MEE

C. Hubungan ASEAN-Amerika Serikat

1. Masalah Kawasan Bebas Senjata Nuklir
2. Laporan Komite Pengarah Hubungan ASEAN-Amerika Serikat
3. Seminar ASEAN-Amerika Serikat

D. Hubungan ASEAN-Jepang

1. Dana Pinjaman Jepang
2. Sikap Pemerintah Jepang terhadap ASEAN
3. Sistem Perdagangan Terbuka Jepang
4. Konperensi ASEAN-Jepang ke-2
5. Kunjungan PM Noboru Takeshita ke ASEAN
6. Jepang dan Asia Mencari Peran Baru
7. Kerjasama Lingkungan ASEAN-Jepang

IV. USAHA ASEAN MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

A. Pertemuan Hun Sen - Sihanouk di Jakarta

B. Perbedaan Pendapat di antara Faksi-faksi

C. Peranan Uni Soviet dan RRC

D. Rencana KTT Paris Gagal

V. HUBUNGAN ASEAN-VIETNAM

I. KERJASAMA ASEAN

A. KERJASAMA INDUSTRI

1. Industri Semen ASEAN

Simposium Teknik Industri Semen ASEAN ke-10 berlangsung di Jakarta tanggal 29-31 Maret 1989. Simposium dihadiri oleh 250 orang peserta dari ASEAN dan para ahli semen dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Spanyol, Swiss, Australia, Amerika Serikat, Jerman Barat, Swedia dan Denmark untuk membahas sistem peningkatan distribusi dan produksi semen serta membahas usaha efisiensi produksi semen. Simposium ini juga merupakan sarana untuk tukar-menukar informasi antara para ahli semen ASEAN dan sarana diskusi para produsen semen ASEAN.

Dirjen Industri Kimia Dasar Indonesia, Wardiyoso, mengatakan bahwa: (1) Indonesia dewasa ini merupakan negara pengekspor dan produsen semen terbesar di ASEAN; (2) kapasitas produksi semen Indonesia 17,2 juta ton/tahun dan produksi nyata 15,5 juta ton/tahun; (3) keperluan dalam negeri 10,5 juta ton/tahun dan 3,5 juta ton untuk diekspor; (4) perkembangan industri semen di Indonesia selama tahun 1985-1988 belum menggembirakan dan kebutuhan domestik pada periode ini baru 900.000 metrik ton; (5) dewasa ini terlihat perkembangan permintaan semen dalam negeri dan diperkirakan beberapa tahun mendatang akan meningkat 5-7%/tahun (*Antara*, 29 Maret 1989).

2. Proyek Industri ASEAN

Wakil Menteri Industri Muangthai, Dusit Rangkasa, mengatakan di Bangkok tanggal 20 Maret 1989 bahwa: (1) para Menteri Ekonomi negaranya sepakat untuk mengusulkan proyek industri tambang potash di negaranya menjadi proyek industri ASEAN; (2) pertemuan COIME (*Committee on Industry, Mineral and Energy*) ASEAN bulan Februari 1989 pada dasarnya sepakat untuk menerima proyek ini menjadi proyek industri ASEAN; (3) bila ASEAN menolak proyek ini, Kementerian Industri negaranya akan membuatnya menjadi proyek nasional dan perusahaan-perusahaan swasta diundang untuk menanamkan modalnya; (4) proyek tambang potash ini memerlukan dana investasi US\$305,83 juta dan kapasitas produksi 1 juta ton serta akan bertahan sampai 30 tahun; (5) hasil proyek akan diekspor ke negara-negara ASEAN, Jepang dan Cina (*Antara*, 22 Maret 1989).

3. Seminar Keramik ASEAN

Seminar Keramik ASEAN ke-7 yang dibarengi dengan Pameran Keramik Indonesia ke-3 berlangsung di Jakarta tanggal 22 Maret 1989 untuk membahas: (1) masa depan industri keramik di ASEAN; (2) masalah perkembangan industri dan bahan baku keramik; (3) kemungkinan mengembangkan pasaran bersama keramik ASEAN. Pertemuan ini dihadiri oleh 32 orang peserta dari ASEAN dan non-ASEAN.

Menteri Perindustrian Indonesia, Ir. Hartarto, mengatakan pada pembukaan seminar bahwa: (1) teknologi pembuatan mesin biasanya bersumber dari pabrik, karena pabrik merupakan tempat proses produksi berlangsung; (2) Indonesia telah banyak menghasilkan mesin sendiri dan harganya lebih murah dibanding harga impor; (3) dalam Pelita VI mesin diharapkan menjadi salah satu komoditi andalan ekspor, karena ekspor komoditi yang menggunakan bahan baku dari alam semakin terbatas; (4) para pengusaha hendaknya terus mengembangkan mesin-mesin sesuai dengan proses produksi di pabrik masing-masing; (5) dewasa ini banyak negara yang tertarik mengembangkan industri keramik; (6) seminar diharapkan dapat dijadikan sarana mempromosikan berbagai produk keramik negara-negara anggota ASEAN; (7) Indonesia dapat menguasai teknologi dan cukup tersedia bahan baku serta pasarannya cukup baik; (8) meskipun dewasa ini nilai eksporinya masih relatif kecil, industri keramik Indonesia diharapkan terus berkembang dan dapat menjadi salah satu andalan ekspor di masa mendatang; (9) pemerintah mengharapkan nilai ekspor barang keramik dapat ditingkatkan lebih dari 200% dari nilai ekspor tahun 1988, US\$14 juta (*Antara*, 23 Maret 1989).

B. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

1. Sidang Tahunan AHPADA

Sidang tahunan AHPADA (*ASEAN Handicraft Promotion and Development Association*) atau Asosiasi Pengembangan dan Promosi Produk Kerajinan Tangan ASEAN berlangsung di Bali tanggal 3 Maret 1989. Sidang dihadiri oleh 30 orang peserta dari ASEAN dan wakil-wakil Pusat Perdagangan Internasional (ITC atau *International Trade Centre*) untuk: (1) saling bertukar informasi mengenai produk kerajinan tangan di antara anggota ASEAN; (2) membahas usaha-usaha pembuat-

an produk bermutu yang dapat diwujudkan di masa mendatang.

Ketua BPEN Arifin Lumban Gaol mengatakan pada pembukaan sidang itu bahwa: (1) para pengrajin Indonesia jangan hanya membuat kerajinan tangan yang bersifat etnik (mode kebudayaan), karena pemasarannya sangat terbatas; (2) para pengrajin ASEAN perlu memproduksi kerajinan tangan yang bersifat fungsional agar dapat dipakai semua konsumen manca negara; (3) pengrajin ASEAN hendaknya berusaha mencari temuan baru yang dapat menembus pasaran manca negara; (4) industri kecil yang berkembang pesat dapat menyerap tenaga kerja yang relatif besar dan menambah devisa negara lewat ekspor non-migas; (5) Indonesia mentargetkan nilai ekspor non-migas selama Pelita V mencapai US\$23 miliar atau dua kali lipat dibandingkan Pelita IV; (6) peran industri kecil diharapkan membantu menambah devisa negara dan sumbangan penyerapan tenaga kerja; (7) selama ini pengadaan bahan baku masih cukup untuk menunjang kelancaran produksi; (8) produsen kerajinan tangan masih kurang informasi mengenai pemasaran hasil produknya; (9) pengusaha besar diharapkan membantu sepenuhnya pengrajin kecil yang potensial untuk mengembangkan dan memasarkan hasil produknya ke manca negara (*Antara*, 6 Maret 1989).

Pada saat yang sama, Ketua AHPADA Abdul Latif mengatakan: (1) AHPADA harus berperan untuk memasarkan produk kerajinan tangan anggota ASEAN ke manca negara, karena masalah pemasaran hingga kini masih menjadi hambatan bagi pengrajin ASEAN; (2) bila ingin menerobos pasaran manca negara, AHPADA harus membenahi aspek manajemen, yang mencakup pemasaran dan kemampuan serta aspek keuangan yang berkaitan dengan modal; (3) pengusaha dan pengrajin ASEAN perlu lebih berani menerobos pasaran manca negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat; (4) sumbangan ekspor industri kecil di Indonesia selama ini berkisar US\$200-US\$300 juta (*Antara*, 14 Maret 1989).

2. Pameran Dagang ASEAN ke-4

Pameran Dagang ASEAN ke-4 akan berlangsung di Jakarta tanggal 3-13 Oktober 1989. Selain akan menampilkan berbagai jenis produk ASEAN juga akan diisi dengan seminar dan pertemuan antar pengusaha ASEAN untuk bertukar pengalaman di antara para anggota ASEAN.

Departemen Perdagangan Indonesia menjelaskan bahwa: (1) pameran diharapkan mampu menarik minat 400 pengusaha dari ASEAN; (2) pameran diharapkan mampu mengundang minat calon pembeli dari luar kawasan ASEAN; (3) calon konsumen dari luar ASEAN diharapkan mengetahui potensi produk-produk ASEAN dari daya saing, mutu dan harganya; (4) untuk menarik minat pengusaha luar, BPEN akan memberikan pelayanan khusus (*Antara*, 4 Maret 1989).

Ketua BPEN Arifin Lumban Gaol mengatakan kepada pers di Bali tanggal 3 Maret 1989 bahwa: (1) pekan dagang ASEAN ke-4 di Jakarta akan diikuti 500 pengusaha swasta ASEAN dan mengundang sejumlah negara pembeli seperti Amerika Serikat dan Jepang yang merupakan pasaran utama ekspor non-migas ASEAN; (2) Indonesia akan mengundang wakil Pusat Perdagangan Internasional (ITC) dan Jetro dari Jepang. Diharapkan kedua organisasi itu dapat dimanfaatkan; (3) pekan dagang ini untuk mempromosikan dan sekaligus menerobos pasaran manca negara yang selama ini masih dirasakan menghambat peningkatan volume dan nilai ekspor ASEAN; (4) keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha sebagai mitra pemerintah sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekspor non-migas di masa mendatang (*The Jakarta Post*, 4 Maret 1989).

Menteri Perdagangan Arifin Siregar mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 18 Mei 1989 bahwa: (1) Indonesia menginginkan peningkatan perdagangan antar negara anggota ASEAN; (2) hambatan peningkatan hubungan dagang antar ASEAN terutama disebabkan oleh persamaan hasil komoditinya. Hal ini terasa karena mereka baru mengembangkan sektor industri; (3) Indonesia dianggap sebagai negara anggota ASEAN yang paling lamban dalam peningkatan hubungan dagang antar ASEAN. Sementara itu Indonesia ingin menghilangkan kesan sebagai negara pengekspor komoditi primer; (4) dalam sektor promosi, Indonesia masih ketinggalan dari negara anggota ASEAN lainnya, oleh karena itu produk mereka lebih dikenal daripada Indonesia (*The Jakarta Post*, 19 Mei 1989). Lebih lanjut Menteri menjelaskan bahwa: (1) ASEAN harus meningkatkan lagi kerjasama dan kebersamaan untuk menghadapi langkah-langkah proteksionis yang dilancarkan oleh negara maju. Di tahun-tahun mendatang ASEAN masih akan menghadapi wujud proteksionisme; (2) selama 10 tahun (1976-1986) perdagangan intra-ASEAN meningkat dari US\$53,7 miliar menjadi US\$129,6 miliar atau meningkat 14,1%; (3) setiap anggota ASEAN telah berbuat banyak untuk mengurangi hambatan per-

dagangan intra ASEAN melalui deregulasi; (4) banyak prestasi yang menggembirakan yang diraih ASEAN dalam kerjasama ekonomi untuk menghadapi pihak ketiga. Tetapi persoalan tersulit justru dalam peningkatan perdagangan intra ASEAN; (5) melalui PTA cakupan komoditi akan diperluas agar sesama anggota ASEAN dapat berdagang tanpa hambatan tarif berarti atau bahkan samasekali tanpa bea masuk (*Kompas*, 19 Mei 1989).

3. Pariwisata Mobil ASEAN

Pada tanggal 20 April 1989, Konsul Jenderal Malaysia di Medan, Takwir Din, mengatakan bahwa: (1) program pembebasan keluar masuk mobil-mobil pribadi untuk kepentingan pelancong antar negara ASEAN sangat menguntungkan; (2) program ini sangat bermanfaat untuk memperdalam pengenalan tentang negara-negara ASEAN; (3) para pelancong Malaysia menghendaki pembebasan keluar masuk mobil-mobil Malaysia ke Indonesia dapat segera terwujud; (4) Medan merupakan salah satu pintu masuk utama bagi wisatawan mobil ke Indonesia; (5) para wisatawan Barat yang masuk ke Malaysia mungkin menyukai wisata mobil; (6) wisata mobil belum tentu menguntungkan Indonesia, karena dapat menimbulkan pengangguran bagi angkutan dalam negeri. Konsep pariwisata mobil hanya baik berlaku di Eropa (*Angkatan Bersenjata*, 25 April 1989).

4. Musyawarah Komisi Kerja Kelompok-14 (G-14)

Musyawarah Komisi Kerja Kelompok-14 (G-14) berlangsung di Kuala Lumpur, tanggal 13 Mei 1989 untuk membahas kerjasama ekonomi dan integrasi ASEAN.

Ketua Komisi Kerja Kelompok-14, Datuk Paul Long mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 24 Mei 1989 bahwa: (1) Kadin ASEAN (ASEAN-CCI) yang mewakili sektor swasta berhasrat mendirikan pusat pengkajian ASEAN (*Cast - Centre for ASEAN Studies*) untuk meningkatkan interaksi antara sektor swasta dan pemerintah di negara-negara ASEAN; (2) pusat pengkajian ini akan ditingkatkan sebagai sekretariat teknik tetap ASEAN-CCI untuk menjalankan interaksi dengan pemerintah negara anggota ASEAN dan sebagai rekan dialog ASEAN; (3) pusat pengkajian ini kelak merupakan sebuah badan otonom yang tugasnya tidak akan dibatasi pada penelitian teknik saja; (4) sumber dana badan ini diperoleh dari sektor swasta dan

donatur pihak ketiga; (5) laporan lengkap gagasan ini akan disampaikan pada pertemuan Kadin ASEAN di Bali tanggal 7 Juni 1989; (6) ASEAN-CCI disarankan agar memberikan prioritas kepada negara yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi tempat pusat pengkajian; (7) G-14 menilai, sekarang saatnya sektor swasta bertindak lebih tegas dan berada di barisan paling depan untuk meningkatkan kerjasama; (8) Ketua dan Wakil Ketua ASEAN-CCI ditunjuk oleh Kadin ASEAN untuk merancang kerja yang lebih efektif dan bermanfaat (*Antara*, 25 Mei 1989).

5. Pertemuan Kamar Dagang dan Industri ASEAN

Pertemuan Kadin ASEAN atau *ASEAN Chamber of Commerce and Industry* (ASEAN-CCI) berlangsung di Bali tanggal 2-10 Juni 1989 untuk membahas: (1) pelaksanaan keputusan Sidang Uruguay (*Uruguay Round*) tentang perdagangan bebas internasional; (2) pembentukan kelompok kerja mengenai pangan, pertanian dan kehutanan; (3) kerjasama industri dan perdagangan ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 5 Juni 1989).

Salah seorang pimpinan Kadin Indonesia, dr. Rosita S. Noor, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 17 Mei 1989 bahwa: (1) pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan antara ASEAN-CCI dan para mitra dialog, seperti *ASEAN-New Zealand Business Council* (ANZEC), *ASEAN-EEC Business Council* (AEBC) dan *ASEAN-Canada Business Council* (ACBC); (2) Indonesia menilai pertemuan di Bali yang akan datang itu sangat penting dan hasil-hasil pertemuan itu akan dibawa ke sidang para Menteri Ekonomi ASEAN di Brunei, bulan November 1989; (3) dalam pertemuan ini MEE diperkirakan akan menuduh sejumlah negara anggota ASEAN telah melakukan hambatan non-tarif secara sepihak; (4) dalam pertemuan ini, Indonesia akan mendapat sorotan mengenai kepatuhannya terhadap ketentuan-ketentuan GATT; (5) masalah kayu tropis merupakan persoalan yang hangat dan akan dipermasalahkan oleh para mitra dialog, khususnya oleh pihak Kanada; (6) pihak internasional telah menuduh Indonesia melakukan pembabatan hutan secara kurang terkendali; (7) GATT menuduh Indonesia memberikan subsidi dalam bentuk kredit kepada swasta dan subsidi itu sekarang diputuskan untuk dicabut yang pelaksanaannya dipercepat dua tahun. Sedangkan pemerintah Indonesia berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekspor non-migas tidak diperlukan kredit semu lagi, seperti subsidi (*Antara*, 24 Mei 1989).

Seusai membuka sidang pleno Kelompok Kerja Perdagangan (*Working Group on Trade* atau WGT) Kadin ASEAN di Bali, tanggal 6 Juni 1989 Menteri Muda Perdagangan RI, Dr. J. Soedradjad Djiwandono, mengatakan bahwa: (1) Indonesia telah melaksanakan saran negara-negara maju untuk lebih kompetitif dan mengurangi subsidi; (2) Indonesia menegih janji negara-negara maju agar tetap membuka pasarnya bagi komoditi Indonesia; (3) upaya membuat komoditi Indonesia menjadi kompetitif dan meningkatkan rasa percaya diri akan sia-sia jika pasar negara-negara maju tidak terbuka; (4) di setiap forum internasional Indonesia dan anggota ASEAN lainnya jangan bosan menuntut pembukaan pasar di negara-negara maju; (5) Indonesia menempatkan sektor perdagangan sebagai pengumpul devisa utama yang sangat diperlukan untuk pembangunan; (6) Jepang, AS dan MEE merupakan pasar utama komoditi Indonesia, yang nilai ekspornya mencapai US\$10,96 miliar dari total ekspor sebesar US\$14,8 miliar pada tahun 1986; (7) nilai ekspor Indonesia ke MEE mencapai US\$1,38 miliar atau 9,3% ke AS dan Kanada US\$2,96 miliar atau 20% dan ke Jepang US\$6,64 miliar atau 44,9%; (8) dewasa ini muncul kecenderungan-kecenderungan yang berdampak tidak menentu terhadap perkembangan ekonomi dunia; (9) pembentukan persetujuan dagang AS-Kanada dan pembentukan pasar tunggal Eropa berpengaruh atas perkembangan ekonomi dunia; (10) terbentuknya blok-blok perdagangan yang diusahakan oleh negara-negara maju akan sulit ditembus oleh komoditi-komoditi dari negara berkembang; (11) yang penting dan harus diyakini ASEAN adalah bahwa negara-negara industri maju tidak menarik keterikatannya dari sistem perdagangan multilateral yang menentukan kemakmuran dunia; (12) ASEAN perlu waspada terhadap kebijaksanaan negara-negara industri maju; (13) ASEAN mengharapkan tahun 1990-an merupakan era kepercayaan Eropa, sehingga ekonomi mereka tetap terbuka; (14) ASEAN perlu mendesak Jepang agar lebih memperlebar pasarnya bagi produk-produk ASEAN; (15) kerjasama industri antara ASEAN dan Jepang disambut baik; (16) salah satu ancaman yang paling berbahaya bagi kemajuan sistem perdagangan dunia adalah berlanjutnya usaha pembentukan kendala perdagangan serta tindakan dan efisiensi sepihak; (17) Undang-undang Perdagangan AS seksi 301 merupakan faktor yang mengguncangkan perdagangan dunia dan memprihatinkan ASEAN (*Antara*, 6 Juni 1989).

Lebih lanjut Menteri Muda Perdagangan, Dr. J. Soedradjad Djiwandono itu mengatakan bahwa: (1)

negara-negara anggota ASEAN yang menganut sistem ekonomi terbuka tidak menghendaki adanya proteksionisme dalam perdagangan internasional; (2) ASEAN sangat menyayangkan negara-negara industri maju yang akhir-akhir ini makin menunjukkan sikap proteksionis; (3) ASEAN sudah sepantasnya menentang sikap negara-negara industri maju yang proteksionis; (4) salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan ASEAN adalah menentang segala bentuk proteksionisme di negara-negara maju (*Suara Karya*, 7 Juli 1989). Selain itu ia juga mengatakan bahwa: (1) peningkatan ekspor harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup; (2) jika usaha eksploitasi sumber alam tidak hati-hati Indonesia akan menghadapi masalah karena berbagai ekspor komoditinya berasal dari hasil eksploitasi sumber-sumber alam; (3) eksploitasi sumber alam yang tidak dapat diperbarui harus dilakukan secara hati-hati; (4) pada dasarnya kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan tindakan investasi yang memerlukan penggunaan sumber daya alami; (5) di samping tantangan untuk melaksanakan pembangunan semakin besar, sumber daya alam makin terbatas oleh sebab itu harus dijaga, dipelihara dan digunakan sesuai dengan kebutuhan (*Antara*, 7 Juni 1989).

Menteri Muda Perindustrian, T. Ariwibowo mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) di pasar dunia, negara-negara anggota ASEAN saling bersaing karena komoditinya hampir sejenis; (2) ASEAN agar mempercepat kerjasama dan mengambil sikap bersama jika menghadapi hambatan-hambatan perdagangan, seperti kuota dan isyu-isyu non-tarif; (3) pemerintah negara-negara ASEAN berusaha menciptakan iklim yang dapat mendorong terwujudnya kerjasama antar swasta ASEAN; (4) para pengusaha swasta sudah didorong untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dari negara-negara non-ASEAN; (5) proyek-proyek kerjasama dengan non-ASEAN perlu dikembangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan ekonomi anggota ASEAN; (6) kekurangan modal, teknologi dan kemampuan teknis merupakan hambatan pembangunan ekonomi negara-negara anggota ASEAN; (7) kerjasama antara ASEAN untuk mewujudkan proyek industri sangat menarik investor non-ASEAN yang memiliki modal dan teknologi; (8) kerjasama industri ASEAN akan menjamin pemasaran produk-produknya; (9) anggota ASEAN harus dapat menyesuaikan kebijaksanaan dan bersatu dalam perdagangan internasional; (10) ASEAN harus merumuskan strategi untuk meningkatkan kerjasama guna mengha-

dapi tantangan-tantangan yang akan terjadi dalam waktu dekat; (11) pasar ASEAN harus dimanfaatkan bagi hasil produk anggotanya; (12) tiga ratus juta jiwa penduduk ASEAN merupakan potensi pasar yang besar dan untuk mengubah potensi ini menjadi riil diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka; (13) dari kesepakatan pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-20 untuk menambah 14 proyek ke dalam daftar final dan 5 proyek dalam daftar sementara, baru tiga proyek yang dilaksanakan dengan penyertaan modal non-ASEAN; (14) proyek AIJV tidak mensyaratkan semua negara anggota ASEAN terikat, oleh karena itu dua negara saja dapat berjalan (*Antara*, 7 Juni 1989).

Presiden Dewan Kadin ASEAN, Dr. Arselio Periquet Jr., mengatakan bahwa: (1) kelambanan laju integritas ASEAN menyebabkan kerjasama ekonomi belum mencapai titik optimal; (2) penyebab lambannya kemajuan kerjasama ASEAN banyak dipertanyakan; (3) tingkat pembangunan ekonomi yang hampir sama dan keinginan para anggota ASEAN untuk mencapai status negara industri baru (NICs atau *Newly Industries Countries*) mengakibatkan mereka saling bersaing di berbagai bidang; (4) penanganan perdagangan bebas yang mendadak di ASEAN dapat menimbulkan diskontinuitas yang banyak ditentang oleh kelompok-kelompok negara-negara maju; (5) upaya pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN menimbulkan benturan-benturan kepentingan jangka pendek, tetapi justru akan menguntungkan dalam jangka panjang; (6) pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan, mengingat kawasan-kawasan lain telah membentuk blok serupa (*Antara*, 7 Juni 1989).

Penanggung jawab sidang Kadin ASEAN-Dewan Bisnis Kanada, dr. Rosita S. Noor, mengatakan kepada pers di Bali tanggal 6 Juni 1989 bahwa: (1) delegasi Filipina menilai, biaya angkutan di negara-negara ASEAN mahal, oleh sebab itu ASEAN perlu mendirikan perusahaan patungan pembuat kapal angkut dagangan; (2) perusahaan ini diharapkan dapat menekan biaya angkutan kapal ke beberapa pelabuhan di kawasan ASEAN; (3) biaya angkutan ekspor yang mahal membuat produk non-migas di kawasan ini tidak mampu berkompetisi, meskipun bea masuk bagi mata dagangan tertentu relatif kecil; (4) ASEAN harus memperbaiki sistem perekonomiannya agar lebih terbuka dan transparan; (5) penataan dan rangkaian kelompok kerja ASEAN pada sidang Kadin ASEAN ini dilakukan untuk menghadapi mitra dialognya; (6) hasil pembahasan Sidang G-14 akan dijadikan sikap ASEAN dalam per-

temuannya dengan para mitra dialog (*Antara*, 7 Juni 1989).

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia, Sotion Ardjanggi, mengatakan bahwa: (1) kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi yang dilancarkan pemerintah negara-negara anggota ASEAN merupakan titik tolak yang penting bagi para pengusaha swasta ASEAN untuk melakukan kerjasama; (2) kebijaksanaan deregulasi dapat mendorong terwujudnya proyek kerjasama ASEAN dengan non-ASEAN; (3) usaha patungan swasta non-ASEAN diperbolehkan memiliki saham proyek sampai 60% dan anggota ASEAN minimum; (4) perkapan dan keuangan merupakan dua sektor yang harus diperhatikan untuk memperluas perdagangan; (5) tanpa tersedianya kapal yang memadai, kerjasama perdagangan dan AIJV tidak dapat berjalan dan terwujud (*Antara*, 8 Juni 1989).

Keputusan sidang antara lain: (1) Kadin ASEAN akan menyampaikan nota keprihatinan atas langkah proteksionisme AS terhadap berbagai jenis komoditi negara-negara ASEAN; (2) nota ini akan dikirimkan kepada Presiden George Bush, Menteri Perdagangan AS dan para dubes AS di negara-negara ASEAN; (3) sidang mengesahkan rencana pembentukan Pusat Studi ASEAN (*Centre for ASEAN Studies*), yang merupakan sekretariat Kadin ASEAN untuk melakukan studi berbagai proyek potensial; (4) usaha untuk mewujudkan pembentukan pusat studi ini akan dibahas lebih lanjut pada Konferensi Kadin ASEAN di Singapura tanggal 27 November 1989; (5) sidang menerima rekomendasi rencana penyelenggaraan Pekan Dagang Yokohama yang berlangsung tanggal 26-31 Juli 1989. Semua negara anggota ASEAN akan mengikuti pekan dagang itu kecuali Malaysia; (6) para pengusaha swasta ASEAN akan menyelenggarakan Pekan Dagang ASEAN di Jakarta tanggal 3-13 Oktober 1989 untuk meningkatkan perdagangan antara ASEAN dan memperkuat ASEAN sebagai pemasok yang andal serta merangsang perdagangan dan investasi (*Antara*, 8 Juni 1989).

Juru bicara pertemuan Kadin ASEAN dengan para mitra dialognya, Achmad Sarbini, mengatakan kepada pers di Bali tanggal 9 Juni 1989 bahwa: (1) dampak negatif pembentukan Pasar Tunggal Eropa 1992, Perse-tujuan Perdagangan Bebas AS-Kanada dan Pasaran Bebas Australia-Selandia Baru sangat dikhawatirkan ASEAN; (2) keuntungan ASEAN atas terbentuknya Pasaran Tunggal Eropa adalah ekspor ASEAN yang hanya melalui satu pintu, sedangkan kerugiannya ada-

lah terdapatnya perbedaan sistem waktu kuota antar negara anggota ASEAN; (5) Indonesia mengeluh kepada MEE karena ekspor tapiokanya dibedakan dengan Muangthai. Kuota Indonesia harus diperbarui setiap tahun, sedangkan Muangthai setiap empat tahun; (4) ASEAN, khususnya Indonesia, mengusulkan agar masalah ekspor diperlakukan sama dan secara wajar. MEE memaklumi keluhan itu dan menganjurkan Indonesia untuk menyampaikan penjelasan resmi; (5) mulai sekarang ASEAN harus siap menciptakan kesamaan pandangan antara pemerintah dan dunia usaha ASEAN untuk menghadapi Pasaran Tunggal Eropa; (6) persetujuan perdagangan bebas AS-Kanada dikhawatirkan akan mengurangi perhatian Kanada pada ASEAN; (7) Kanada berkepentingan sekali pada AS karena nilai perdagangannya dengan negara itu mencapai 72%; (8) Kanada menjanjikan bahwa persetujuan dengan AS tidak akan merugikan ASEAN, dalam arti tidak akan ada peraturan yang bersifat proteksionistik; (9) investasi Kanada di ASEAN masih relatif kecil dan masih dapat ditingkatkan; (10) investasi Malaysia dan Singapura di Kanada bergerak di bidang perhotelan, perbankan; (11) terbentuknya perdagangan dan pasaran bebas Australia-Selandia Baru akan menghambat ekspor ASEAN ke Australia, dan dikhawatirkan Australia akan mengalihkan impornya ke Selandia Baru; (12) Selandia Baru sepakat untuk membicarakan masalah ini dengan ASEAN, khususnya Indonesia; (13) Selandia Baru meminta daftar barang dagangan ASEAN yang diekspor ke Australia; (14) hingga saat ini dampak positif pasaran bebas Australia-Selandia Baru belum diketahui; (15) ASEAN mengajukan sejumlah pendekatan kepada mitra dialog seperti: (a) anggota ASEAN agar diperlakukan sama di Pasaran Tunggal Eropa; (b) Kanada agar meningkatkan investasinya di ASEAN dan melanjutkan sidang Kadin dengan dewan pengusaha Kanada pada akhir tahun 1989; (c) Selandia Baru agar sungguh-sungguh memperhatikan daftar barang ASEAN, khususnya Indonesia, yang diekspor ke Australia; (d) Selandia Baru agar meningkatkan kerjasama dengan ASEAN di bidang peternakan dan kehutanan; (16) dialog ini sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan dan peluang ekonomi di masa mendatang (*Antara*, 10 Juni 1989).

Seusai penutupan pertemuan Kadin ASEAN dengan para mitra dialognya, juru bicara pertemuan Achmad Sarbini mengatakan kepada pers tanggal 9 Juni 1989 bahwa: (1) dewasa ini mekanisme perdagangan intra ASEAN masih berlumpu pada kelancaran angkutan kapal laut, pengadaan bahan baku dan pemasaran sc-

jumlah produk ekspor; (2) masalah transportasi, komunikasi dan perdagangan dibicarakan secara intensif dan disarankan agar dibenahi; (3) angkutan kapal sekarang ini merugikan negara-negara berkembang karena tarifnya ditentukan oleh pemilik kapal, yang umumnya dimiliki oleh negara maju; (4) pelayaran lintas reguler sangat penting untuk kelancaran ekspor-impor; (5) hingga sekarang pelayaran lintas reguler antar sejumlah pelabuhan di ASEAN belum ada; (6) kelompok kerja perdagangan mengusulkan agar dibentuk asosiasi pengguna jasa dan pemilik kapal untuk menekan biaya angkutan; (7) hubungan kapal laut intra ASEAN sangat menentukan kelancaran ekspor-impor antar anggotanya; (8) ASEAN perlu membentuk semacam *sogo shosha* seperti yang dilaksanakan di Jepang; (9) kelompok kerja perdagangan sepakat untuk: (a) mempelajari pembelian bahan baku bagi para pengusaha industri menengah dan kecil di ASEAN; (b) membentuk organisasi pemasaran guna membantu ekspor perusahaan menengah dan kecil di ASEAN; (c) meningkatkan kerjasama antar pengusaha di ASEAN; (d) mengadakan seminar kerajinan tangan ASEAN di Bali pada bulan Juli 1989; (10) kelompok kerja industri sepakat agar: (a) perdagangan antar negara ASEAN diperlancar; (b) pemerintah-pemerintah ASEAN menetapkan standar perdagangan; (c) standar perdagangan yang perlu diwujudkan memakai standar perdagangan internasional; (11) kelompok kerja pangan sepakat untuk: (a) meningkatkan kerjasama pengembangan sumber daya alam, pangan, perikanan, kehutanan dan pemberantasan penyakit hewan; (b) membentuk restoran ASEAN yang menawarkan makanan dan menu ASEAN; (c) memperbaiki mutu makanan melalui penelitian yang akan dilaporkan kepada Komite Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (d) melakukan kerjasama di beberapa sektor yang akan dituangkan ke dalam suatu proyek bersama di bidang pangan, pertanian, kehutanan dan transportasi serta komunikasi seperti yang tertuang dalam usaha patungan industri ASEAN (AIJV); (e) mengadakan dialog lanjutan di Brunei Darussalam tanggal 22-25 Agustus 1989 (*Antara*, 10 Juni 1989).

C. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Konferensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1

a. Persiapan Konferensi Menteri Penerangan ASEAN

Menteri Penerangan RI, Harmoko mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 Mei 1989 bahwa: (1)

Konferensi Menpen ASEAN ke-1 yang akan diselenggarakan di Jakarta diharapkan dapat mendekatkan hubungan antar pribadi para Menteri Penerangan ASEAN untuk membina kerjasama yang lebih baik; (2) konferensi ini mengacu pada hasil KTT Manila serta sidang Komite Kebudayaan dan Informasi tahun 1987; (3) telah saatnya para Menteri Penerangan ASEAN membicarakan pembentukan Tata Informasi dan Komunikasi Dunia Baru; (4) kerjasama bilateral antar anggota yang telah baik dan hasil KTT Manila 1987 merupakan landasan tata informasi ASEAN (*Antara*, 17 Mei 1989).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan RI, Drs. F. Rahimadi mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 17 Mei 1989 bahwa tujuan konferensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1 adalah untuk: (1) meningkatkan kerjasama ASEAN secara fungsional; (2) saling mendalami eita-eita ASEAN sehingga dapat menyerap aspirasi politik dan ekonomi guna kepentingan rakyat; (3) memupuk pengertian yang lebih kuat antar anggota ASEAN mengenai identitas regional masing-masing; (4) menghargai latar belakang sejarah, wilayah, sumber alam dan berbagai aspek lainnya di wilayah ASEAN; (5) mengupayakan peningkatan kerjasama di bidang media massa, pertukaran ahli media elektronika, kantor berita dan alih teknologi informasi (*Antara*, 18 Juni 1989).

Pertemuan para pejabat senior bidang penerangan ASEAN (*Senior Official Meeting* atau SOM) yang berlangsung di Jakarta tanggal 21-22 Mei 1989 itu dihadiri oleh para delegasi dari Filipina yang dipimpin oleh Asisten Menteri Kantor Kebudayaan dan Jasa-jasa Penerangan pada Departemen Luar Negeri Jorge Lorredo, Brunei Darussalam dipimpin oleh Setia Usaha Tetap Jabatan Perdana Menteri Pehin Udana Khatib Dato Paduka Ustaz Awang Haji Badaruddin, Malaysia yang dipimpin oleh Sekjen Kementerian Penerangan Dato Dr. Mohd. Nor bin Abdul Ghani, Singapura dipimpin oleh Direktur Penerangan Kementerian Perhubungan dan Penerangan James Fu Chiao Sian, dan Muangthai dipimpin oleh Dirjen Departemen Hubungan Masyarakat Kantor Perdana Menteri Menit Varin dan Indonesia dipimpin oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Dr. Janner Sinaga, untuk mempersiapkan dokumentasi dan masalah administrasi konferensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1 (*Antara*, 20 Mei 1989).

Antara tanggal 22 Mei 1989 memberitakan bahwa pertemuan SOM yang berlangsung tertutup itu untuk: (1) membahas usaha peningkatan kerjasama pers dan televisi, radio, film dan video antar negara ASEAN; (2)

menimbang rancangan deklarasi Menteri Penerangan ASEAN dan rancangan pernyataan bersama; (3) memiliki Ketua dan Wakil Ketua SOM serta menyusun agenda pertemuan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil-hasil pertemuan SOM ini akan diserahkan kepada konferensi Menteri Penerangan ASEAN untuk mendapat pengesahan (*Antara*, 22 Mei 1989).

b. Pelaksanaan Konferensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1

Konferensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1 yang berlangsung di Jakarta tanggal 24-25 Mei 1989, dihadiri oleh 54 orang peserta terdiri atas 17 orang wakil Indonesia, 8 orang wakil Malaysia, 7 orang wakil Filipina, 11 orang wakil Singapura, 5 orang wakil Muangthai dan 6 orang wakil Brunei Darussalam untuk membahas: (1) peningkatan arus informasi ASEAN melalui kantor berita, surat kabar dan media elektronik; (2) peningkatan kualitas insan penerangan di ASEAN melalui pelaksanaan pendidikan dan latihan; (3) usaha penurunan tarif telekomunikasi bagi pertukaran informasi dan berita antar ASEAN, termasuk penggunaan jasa satelit (*Antara*, 22 Mei 1989).

Pembantu Perdana Menteri Muangthai bidang Penerangan, Kunyung Supara Masdit, mengatakan kepada pers di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 23 Mei 1989 bahwa: (1) pemerintahnya menerima dan mendukung usul Indonesia untuk membentuk Tata Informasi ASEAN; (2) pembentukan Tata Informasi ASEAN akan memperlancar arus informasi antar negara ASEAN; (3) informasi yang berkembang di kawasan ASEAN masih didominasi oleh informasi dari negara-negara Barat; (4) dominasi informasi dari negara Barat dapat dikurangi sedikit demi sedikit; (5) arus informasi yang dilanearkan ASEAN selain bermanfaat bagi negara-negara anggotanya, juga sangat berguna bagi negara-negara maju yang membutuhkannya (*Merdeka*, 24 Mei 1989).

Pada saat yang sama Menteri Penerangan Singapura, Yeo Ning Hong, mengatakan bahwa: (1) kerjasama informasi intra ASEAN sudah sedemikian baik, sehingga dapat menimbulkan saling pengertian yang mendalam antar sesama anggotanya; (2) usulan pembentukan Tata Informasi ASEAN sangat baik, tetapi masih perlu dibicarakan dalam konferensi; (3) pertemuan Menteri Penerangan ASEAN ke-1 ini akan mempererat kerjasama ASEAN di bidang penerangan (*Merdeka*, 24 Mei 1989).

Presiden Soeharto mengatakan pada pembukaan konferensi itu di Bina Graha bahwa: (1) bagi anggota ASEAN, informasi dan komunikasi bukan hanya merupakan kebutuhan hidup, melainkan juga merupakan salah satu sarana untuk menciptakan rasa kebersamaan regional dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik; (2) situasi dunia dewasa ini bergerak menuju ke arah zaman baru yang memungkinkan bangsa-bangsa hidup damai, saling mengerti dan kerjasama untuk ke-sejahteraan umat manusia; (3) ketegangan dan berbagai konflik di berbagai kawasan dunia telah mereda, keadaan semacam ini memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa untuk melakukan pembangunan; (4) masing-masing anggota ASEAN dan bersama-sama harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mempercepat pembangunan; (5) informasi dan komunikasi mempunyai arti yang penting bagi ASEAN; (6) peningkatan persaudaraan, saling percaya dan kerjasama antar anggota ASEAN dapat mencerminkan tekad para anggotanya untuk mengurus dan menentukan masa depannya sendiri; (7) untuk mewujudkan ketetapan hatinya, ASEAN harus terus-menerus berusaha memperkuat rasa kebersamaan regional di berbagai bidang, khususnya dalam bidang komunikasi; (8) negara-negara sedang membangun, termasuk ASEAN masih dibanjiri berita-berita yang di satu pihak menguntungkan kepentingan negara-negara maju dan di lain pihak justru merusak citra negara-negara yang sedang membangun; (9) perjuangan untuk mengubah ketimpangan informasi merupakan bagian yang penting dari perjuangan untuk mewujudkan tata dunia baru di bidang politik dan ekonomi. Perjuangan ASEAN untuk mengubah ketimpangan ini merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral; (10) pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab; (11) pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab dapat menanggulangi pengaruh buruk akibat ketimpangan informasi (*Suara Pembaruan*, 24 Mei 1989).

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan bahwa: (1) pengalaman berharga satu negara ASEAN akan merupakan nilai pembanding bagi negara anggota ASEAN lainnya. Dengan perbandingan ini, ASEAN secara bersama-sama dapat mengambil manfaat bagi kemajuan pembangunan di tingkat nasional maupun

regional; (2) kerjasama intra ASEAN di berbagai bidang, khususnya di bidang penerangan, dapat menambah saling pengertian yang kuat di antara negara-negara anggotanya; (3) penyebaran arus informasi melalui media massa di negara-negara ASEAN tidak terlepas dari sistem nilai-nilai sosial budaya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara anggota; (4) bagi setiap negara anggota ASEAN tidak ada cara lain yang lebih berharga, selain saling menghormati dan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai serta ketentuan yang berlaku di negara masing-masing; (5) untuk menghadapi keanekaragaman sistem di negara-negara anggotanya, ASEAN harus memiliki kesamaan kepentingan untuk menyebarluaskan arus informasi yang benar-benar dapat dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab; (6) penyebaran arus informasi yang bebas dan bertanggungjawab dapat memantapkan ketahanan regional kawasan ASEAN; (7) ASEAN agar menciptakan keseimbangan penyebaran arus informasi antara negara maju dan negara berkembang; (8) ASEAN agar lebih mempersatukan pengertian dan memperkuat sikap terhadap kepentingan cita-cita pembentukan Tata Internasional Baru di bidang informasi dan komunikasi; (9) majunya teknologi informasi dan komunikasi pembangunan penerangan ASEAN banyak mengalami kemajuan (*Antara*, 24 Mei 1989).

Menteri Penerangan Malaysia, Dato Mohammad Rahmat, mengatakan bahwa: (1) semua hambatan yang mengganggu kelancaran pertukaran informasi intra ASEAN perlu dihilangkan; (2) pembatasan-pembatasan arus informasi antar negara, tarif informasi tinggi dan perbedaan sistem birokrasi merupakan penyebab tidak bebas dan lancarnya arus informasi intra ASEAN; (3) pertukaran barang cetakan antar negara ASEAN perlu dibebaskan dari hambatan, misalnya dengan memperbaiki peraturan dan tata hukum yang tidak membedakan antara barang cetakan yang berasal dari dalam dan luar ASEAN; (4) buku-buku tentang pendidikan dan pengetahuan jangan diijinkan memasuki kawasan ASEAN secara bebas; (5) pertukaran kesenian dan kebudayaan ASEAN memerlukan dorongan; (6) pertukaran dan arus informasi yang bebas di ASEAN akan meningkatkan kesadaran rakyat negara-negara anggotanya untuk berpartisipasi memperjuangkan cita-cita ASEAN; (7) persatuan ASEAN sebagai aspirasi bersama sangat tergantung pada kuatnya persatuan rakyat ASEAN; (8) pada kesempatan ini sangat tepat untuk memikirkan bahasa pergaulan ASEAN (*Kompas*, 25 Mei 1989).

Para Menteri Penerangan ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama dan meningkatkan peranan mereka bagi kemajuan dan pengembangan informasi sebagai upaya meningkatkan kerjasama dan solidaritas di segala bidang. Selain itu para menteri juga menyadari kedudukan dan peranan pers yang penting serta strategis dalam proses pembangunan nasional di setiap negara ASEAN. Kesepakatan-kesepakatan lainnya: (1) pers ASEAN agar didasarkan pada asas pers yang bebas dan memiliki tanggung jawab sosial; (2) pers ASEAN agar tetap peka untuk menangani masalah yang dapat mempengaruhi solidaritas bersama; (3) hubungan redaktur dan wartawan agar ditingkatkan untuk mempertinggi kesadaran mengenai pentingnya ASEAN; (4) negara-negara dalam jaringan Pertukaran Berita ASEAN (ANEX atau *ASEAN News Exchange*) agar terus memperkuat sarana ANEX dalam pengumpulan dan penyebaran berita di dalam maupun di luar ASEAN; (5) Singapura dan Brunei Darussalam agar segera mendirikan kantor berita; (6) mereka akan berkonsultasi dengan instansi telekomunikasi di negara masing-masing untuk mengusahakan agar tarif bersama penggunaan jasa komunikasi ANEX menjadi lebih murah; (7) mereka mempertimbangkan untuk mendirikan sebuah pusat pers yang bertugas sebagai bank data tentang ASEAN dan negara-negara anggotanya; (8) mereka bersedia saling tukar-menukar pengalaman agar masing-masing negara dapat mengembangkan hubungan dengan media asing; (9) perlu dicarikan jalan keluar agar pemberitaan media asing mengenai anggota ASEAN lebih seimbang dan obyektif; (10) media asing agar memperhatikan nilai-nilai serta kepekaan bangsa-bangsa ASEAN; (11) pers ASEAN agar turut membantu usaha untuk mencapai tujuan ASEAN, termasuk pemeliharaan kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, keadilan sosial, kesatuan regional dan pengembangan sumber daya manusia (*Kompas*, 26 Mei 1989).

Di samping itu, Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan pula kepada pers di Gedung Seknas ASEAN Jakarta tanggal 25 Mei 1989 bahwa: (1) pers yang bebas dan memiliki tanggung jawab sosial adalah pers yang memperjuangkan kesejahteraan sosial, mengangkat harkat dan memelihara stabilitas rakyatnya; (2) pers ASEAN yang bebas dan bertanggungjawab bukan berarti mencampuri sistem pers masing-masing negara anggotanya; (3) ASEAN tidak berkonfrontasi, tetapi akan bekerjasama dengan pers asing untuk menciptakan arus informasi yang seimbang dan memiliki kepekaan (*Kompas*, 26 Mei 1989).

2. *Lokakarya Penggunaan Sistem Radio Cellular*

Lokakarya penggunaan sistem radio cellular ASEAN yang diikuti 20 orang pengelola dan operator telekomunikasi dari ASEAN serta 2 orang ahli dari Selandia Baru dan Hongkong berlangsung di Kuala Lumpur, tanggal 27 Maret 1989 untuk membahas dan menyelidiki penggunaan sistem radio cellular di kawasan ASEAN.

Deputi Menteri Pos, Telekomunikasi dan Energi Malaysia, Ghani Othman, mengatakan pada pembukaan lokakarya itu bahwa: (1) penggunaan sistem radio cellular pada telepon mobil di Malaysia, yang dikenal dengan ATUR (*Automatic Telephone Radio*) bukan langkah baru; (2) pada tingkat ASEAN penggunaan telepon radio otomatis mungkin dapat diterapkan; (3) sekarang saat yang tepat untuk mengadakan kerjasama dalam sistem radio otomatis di ASEAN (*Antara*, 27 Maret 1989).

3. *ASEAN Worlddidac Expo ke-2*

ASEAN Worlddidac Expo ke-2 yang diikuti oleh 120 peserta dari 25 negara berlangsung di Singapura tanggal 13 Mei 1989 untuk: (1) mempertemukan para konsumen dan produsen alat-alat pendidikan dan latihan khususnya di Asia Tenggara; (2) mencari jawaban mengenai masalah pendidikan di masa depan; (3) membuka peluang dan memperkenalkan produsen di pasaran ekspor (*Pelita*, 15 Maret 1989).

4. *Festival Lagu ASEAN*

Festival lagu populer ASEAN (*ASEAN Popular Song Festival* atau APSF) ke-6 dan pertemuan tahunan Asosiasi Industri Musik ASEAN (*ASEAN Music Industry Association* atau AMIA) berlangsung di Manila tanggal 14 April 1989 untuk: (1) merangsang lahirnya lagu-lagu asli bermutu dari kawasan ASEAN; (2) menumbuhkan semangat mempromosikan pertukaran budaya antar anggota ASEAN (*Suara Pembaruan*, 7 April 1989).

Pengurus Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), T.J. Sinarjo, mengatakan di Jakarta tanggal 17 April 1989 bahwa: (1) pemusik Indonesia yang dikenal ke festival itu berhasil meraih gelar lagu terbaik dan runner-up, serta penyajian terbaik dan runner-up; (2) kemenangan ini membanggakan karena untuk pertama kali dalam sejarah APSF satu negara memborong semua gelar (*Kompas*, 17 April 1989).

D. KERJASAMA KESEHATAN

1. *Simposium ASI se ASEAN*

Simposium ASI ASEAN yang diikuti oleh wakil-wakil negara anggota ASEAN dan 9 negara non-ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 22 Maret 1989 untuk memperoleh masukan mengenai penggunaan ASI dan upaya penggalakkan penggunaan ASI (*Pelita*, 15 Maret 1989).

2. *Rehabilitasi Pecandu Narkotika*

Kursus latihan Para Perancang Program Rehabilitasi Obat Terlarang ASEAN berlangsung di Malaysia tanggal 17 Maret 1989 untuk membahas usaha mengurangi kambuhnya pecandu narkotika yang sudah mendapatkan perawatan.

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Wan Sidek Wan Abdul Rahman, mengatakan pada penutupan kursus itu bahwa: (1) negara-negara ASEAN membutuhkan program partisipasi langsung masyarakat untuk mengurangi kambuhnya pecandu narkotika yang sudah dirawat; (2) langkah ini diperlukan karena pembauran ke masyarakat merupakan tahap paling penting dalam proses rehabilitasi ketergantungan pada narkotika; (3) partisipasi langsung masyarakat dapat berupa pelayanan wajib dan sukarela serta partisipasi penuh dari pecandu narkotika yang sudah sembuh; (4) angka bromocorah di antara pecandu narkotika di ASEAN masih tinggi; (5) ASEAN sedang melaksanakan proses pengembangan program rehabilitasi dengan strategi pendekatan ke arah pengurangan jumlah bromocorah, meskipun hasilnya belum memuaskan (*Antara*, 15 Maret 1989).

3. *Sidang ASOD ke-12*

Sidang ASOD (*ASEAN Senior Opium Drug*) ke-12 yang dihadiri 70 orang ahli dari ASEAN berlangsung di Bangkok tanggal 23-29 Mei 1989 untuk: (1) mengkaji kemajuan hasil sidang terakhir ASOD di Singapura; (2) melanjutkan kegiatan mengatasi penyalahgunaan narkotika di negara-negara ASEAN; (3) membahas kebijakan ASEAN untuk mempererat kerjasama mengatasi persoalan narkotika (*Antara*, 30 Mei 1989).

Hasil sidang antara lain: (1) mengundang Birma, Laos dan Hongkong untuk berperan serta dalam sidang ASOD mendatang; (2) pencegahan perkara narkotika dan pengawasan kegiatan di kawasan ASEAN agar di-

tingkatkan dan sumber dana harus dilibatkan; (3) kesinambungan dukungan dana dan teknik oleh mitra dialog ASEAN dan organisasi dunia lainnya kepada kegiatan ASEAN yang berkaitan dengan masalah narkotika diberi penghargaan; (4) menyetujui pendirian dana narkotika ASEAN untuk melatih para petugas anti narkotika.

Pertemuan itu juga memutuskan bahwa: (1) kegiatan ASEAN yang berkaitan dengan narkotika pada masa-masa mendatang agar dirumuskan sesuai dengan pedoman garis besar keterpaduan kegiatan pengawasan penyalahgunaan narkotika di masa mendatang, persetujuan PBB tahun 1988 tentang peredaran gelap narkotika dan obat terlarang serta rencana kerja lima tahun ASEAN; (2) sidang mendatang diselenggarakan di Brunei Darussalam tahun 1990 (*Antara*, 30 Mei 1989).

4. *Kongres Psikiatri dan Kesehatan Jiwa*

Kongres Psikiatri dan Kesehatan Jiwa ASEAN yang dihadiri oleh 300 orang peserta dari ASEAN berlangsung di Singapura tanggal 30 Maret - 2 April 1989 untuk membahas: (1) arti penting psikiatri dan kesehatan jiwa; (2) psikiatri biologik, pandangan baru mengenai pengobatan penyakit skizofrenia, gangguan efektif, neurosa, alkoholisme dan gangguan kepribadian; (3) aspek psikiatri dari penyakit AIDS; (4) undang-undang kesehatan jiwa di negara-negara anggota ASEAN; (5) masa depan psikiatri di ASEAN; (6) berbagai masalah psikiatri dan kesehatan jiwa dalam Angkatan Bersenjata (*Suara Pembaruan*, 1 Mei 1989).

Pejabat Menteri Kesehatan Singapura, Mr. Yeow Cheow Tong, mengatakan pada pembukaan Kongres itu: (1) pembinaan dan pelayanan masyarakat akan dikembangkan, ditingkatkan dan disentralisasi ke pelayanan di poliklinik yang tersebar di Singapura; (2) proyek percontohan terakhir untuk membantu keluarga merawat anggotanya yang menderita gangguan jiwa di rumahnya sendiri sedang dilaksanakan di Singapura; (3) saat ini Singapura mempunyai 47 dokter jiwa dan pada tahun 2000 akan meningkat menjadi 98 orang; (4) penambahan jumlah psikiatri mutlak diperlukan karena jumlah pasien yang datang berkonsultasi dan berobat di klinik psikiatri anak dan remaja terus meningkat (*Suara Pembaruan*, 1 Mei 1989).

Direktur Rumah Sakit Jiwa Woodbridge, Prof. Teo Seng Hoek, mengatakan bahwa: (1) tidak ada satu negara di dunia yang berhasil memberikan pelayanan psikiatri di rumah sakit jiwa saja; (2) pelayanan psikiatri

bagi pasien gangguan jiwa oleh masyarakat pasti lebih baik; (3) perawatan di rumah sakit lebih tepat bagi mereka yang gangguan jiwanya sudah kronik; (4) pelayanan psikiatri masyarakat yang komprehensif mutlak diperlukan tidak hanya di Singapura, tetapi di negara-negara anggota ASEAN lainnya (*Suara Pembaruan*, 1 Mei 1989).

5. Pertemuan Konsultasi Kesejahteraan Anak ASEAN

Pertemuan Konsultasi Kesejahteraan Anak ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 15-16 Mei 1989 untuk: (1) mempersiapkan utusan ASEAN ke Sidang Umum PBB bulan September 1989; (2) tukar-pikiran dan pengalaman mengenai berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang akan menggantikan generasi tua (*Antara*, 17 Mei 1989).

Ketua Delegasi Indonesia, Dr. Suyono Yahya MPH, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 Mei 1989 bahwa: (1) setelah 10 tahun diproses masalah pembinaan kesejahteraan anak-anak di ASEAN mendekati penyelesaian; (2) melalui pertemuan ini, diharapkan kelangsungan hidup anak-anak dapat terwujud dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak dapat dilaksanakan; (3) kepincangan dalam kesejahteraan kehidupan anak-anak disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, perang, musibah alam dan penyebab lainnya yang memaksa mereka terlantar, hidup tidak menentu dan berkeliaran; (4) keadaan ini tetap menjadi perhatian pemerintah dan organisasi-organisasi sosial atau keagamaan di negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasinya (*Antara*, 17 Mei 1989).

Pada saat yang sama, Ketua Delegasi Muangthai, Saisuree Chotikul, mengatakan bahwa: (1) kesimpulan yang diperoleh dalam pertemuan itu cukup baik dan dapat disetujui; (2) jauh sebelum lahir Tahun Internasional Anak 1979, negaranya telah ada Undang-Undang yang mengatur masalah kesejahteraan anak dan kewajiban orang tua untuk membina dan menyantuni anak-anak terlantar (*Antara*, 17 Mei 1989).

II. MASALAH KEAMANAN ASEAN

1. SEMINAR KEAMANAN REGIONAL ASEAN

Menlu Malaysia Abu Hassan Omar mengatakan pada seminar Keamanan Regional ASEAN tanggal 4 Mei 1989 bahwa: (1) kekuatan ekonomi Jepang yang belum pernah dialami sebelumnya merupakan ancaman

bagi ASEAN; (2) dalam menghadapi abad ke-21 investasi langsung, pemutaran kembali surplus perdagangan, pasaran barang-barang ASEAN dan program bantuan teknologi serta bantuan pembangunan Jepang sangat menguntungkan ASEAN; (3) yang terpenting bukan kesimbangan ekonomi dan militer yang absolut, tetapi pencegahan ketidakseimbangan yang sangat menyolok; (4) ASEAN harus bekerjasama lebih keras untuk mencapai sasaran-sasaran baru dalam kerjasama ekonomi, politik dan militer (*Suara Karya*, 6 Mei 1989).

2. KERJASAMA MILITER DAN KEAMANAN ASEAN

Konferensi Militer dan Keamanan ASEAN berlangsung di Singapura tanggal 22-25 Maret 1989 dengan tema: "Towards Greater ASEAN Military and Security Cooperation: Problems and Prospects." Pada konferensi ini Dr. J. Soedjati Djiwandono membahas tentang "The Big Powers, ASEAN and Asia Pacific Security: A Jakarta Perspective" (*Nawala CSIS*, Tahun VIII, No. 5, Maret 1989).

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA

A. HUBUNGAN ASEAN-UNDP

Siaran pers Perwakilan UNDP Jakarta tanggal 3 Februari 1989 menyebutkan bahwa: (1) Sekjen ASEAN, Roderick Yong, dan Kepala Perwakilan UNDP Jakarta, Galal M. Magdi, telah menandatangani naskah kerjasama perikanan; (2) kerjasama ini akan mendidik tenaga-tenaga pelatih tingkat regional dalam bidang aplikasi teknik manajemen, monitoring, kontrol dan supervisi; (3) proyek yang dilaksanakan organisasi pangan dunia (FAO) akan berlangsung selama 18 bulan dengan bantuan sebesar US\$400.000 (*Antara*, 3 Februari 1989).

B. HUBUNGAN ASEAN-MEE

Ketua Perwakilan ASEAN ke persidangan MEE, Dr. Abdul Hadi Derani, mengatakan di Brussel tanggal 16 Maret 1989 bahwa: (1) ASEAN perlu membuat persiapan awal dan mengadakan pembicaraan dengan investor asing sehubungan dengan pembentukan pasaran tunggal MEE; (2) ASEAN mempunyai waktu dua tahun untuk menyusun strategi sebagai tindak balas terhadap pembentukan pasaran tunggal MEE; (3) pembentukan

pasaran tunggal MEE memberikan pengaruh buruk terhadap perjanjian perdagangan antara negara berkembang dan anggota MEE; (4) meskipun pembentukan pasaran tunggal MEE itu untuk menghadapi ekonomi Amerika Serikat, akan tetapi negara berkembang dapat terkena akibat yang cukup berat; (5) peraturan pasaran tunggal MEE mewajibkan produk-produk yang dieksport ke negara-negara MEE, 80% bahan mentahnya harus diproses di negara anggota MEE. Hal ini akan menghambat pertumbuhan industri, khususnya industri elektronika negara berkembang; (6) pasaran tunggal akan menghambat masuknya investor asing di negara berkembang, karena mereka khawatir mengalami kesulitan untuk memasarkan barangnya ke negara-negara Eropa; (7) ASEAN telah meminta MEE untuk memberikan laporan lengkap dan meminta jaminan bahwa pasaran tunggal MEE tidak merusak perjanjian dagang dua arah; (8) ASEAN merasa khawatir karena parlemen Eropa mendukung gagasan MEE untuk memperketat syarat pemberian bantuan dari negara-negara MEE (*Antara*, 20 Maret 1989).

C. HUBUNGAN ASEAN-AMERIKA SERIKAT

1. Masalah Kawasan Bebas Senjata Nuklir

Ketua Komisi I DPR-RI, Imron Rosyadi SH, mengatakan di Jakarta tanggal 3 April 1989 bahwa: (1) sikap Amerika yang tidak mendukung perjuangan ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara bebas senjata nuklir sangat disesalkan dan dukungan Uni Soviet terhadap gagasan ini patut dipuji; (2) penyebaran nuklir dan pangkalan militer asing mengganggu dan mengancam usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian dunia; (3) tidak benar dan tidak wajar jika negara adikuasa hanya memperjuangkan dan menginginkan konsep bebas senjata nuklir di sebagian wilayah Eropa saja (*Angkatan Bersenjata*, 4 April 1989).

2. Laporan Komite Pengarah Hubungan ASEAN-Amerika Serikat

Hasil laporan Komite Pengarah Hubungan ASEAN-AS yang beranggotakan 25 peneliti dari ASEAN dan Amerika Serikat yang disiarkan oleh pemerintah Singapura tanggal 9 Februari menyebutkan bahwa: (1) rangsangan hubungan ekonomi yang lebih erat antara ASEAN dan AS akan diajukan kepada pemerintah Bush pada bulan April 1989; (2) suatu kerangka persetujuan ekonomi kedua pihak akan diadakan, sehingga

memberikan peluang bagi setiap anggota ASEAN untuk menandatangani suatu persetujuan perdagangan bebas bilateral (FTA atau *Free Trade Agreement*) dengan AS; (3) kerjasama dua arah dalam perdagangan, investasi dan teknologi perlu diperkuat (*Antara*, 10 Februari 1989).

3. Seminar ASEAN - Amerika Serikat

Seminar ASEAN-AS yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian East-West Center Hawaii dan Institut of South-East Asia Studies Singapore berlangsung di Washington tanggal 13 April 1989 untuk merundingkan kerangka kerja yang merupakan payung kerjasama ekonomi menuju zona perdagangan bebas antara ASEAN dan AS (*Suara Karya*, 15 April 1989).

Dr. Michel Plumer dari East-West Center mengatakan dalam seminar itu bahwa: (1) kesadaran untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan, kini mulai dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN; (2) selama ini investasi AS di ASEAN didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar permifyikan dan elektronika; (3) sekarang ASEAN perlu membuka diri untuk investasi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil (*Suara Karya*, 15 April 1989).

Sementara itu, Wakil Presiden East-West Center bidang perencanaan, Dr. Seiji Naya mengatakan bahwa hasil dan usul-usul dalam seminar ini akan dibahas oleh pemerintah AS dan ASEAN dalam dialog mereka bulan Oktober 1989 (*Suara Karya*, 15 April 1989).

Seminar menyarankan agar: (1) salah satu isi persetujuan kerjasama ekonomi itu merupakan komitmen bersama untuk meliberalkan perdagangan dan investasi; (2) komite Trans-Pasifik yang anggotanya terdiri dari Menteri Perdagangan AS dan ASEAN dengan penasihat para ahli dan wakil dari pihak swasta dibentuk. Komite itu akan bertemu setahun sekali untuk menangani perselisihan perdagangan dan investasi serta melakukan perundingan untuk meneapai persetujuan lebih jauh mengenai subsidi, penghapusan pajak berganda dan berbagai hambatan perdagangan, hak cipta, investasi dan jasa; (3) persetujuan perdagangan AS dan ASEAN menjadi tujuan akhir dari kerangka persetujuan; (4) persetujuan itu diharapkan menjadi dasar persetujuan-persetujuan selanjutnya di wilayah Asia Pasifik; (5) semua persetujuan berdasarkan pada peraturan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) (*Suara Karya*, 15 April 1989).

D. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

1. Dana Pinjaman Jepang

Pimpinan Bank Pembangunan Malaysia, Nik Ibrahim, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 31 Januari 1989 bahwa: (1) para pengusaha Malaysia menyambut baik adanya dana pinjaman pembangunan Jepang-ASEAN; (2) dana ini merupakan proyek gabungan kerjasama ekonomi antara pemerintah Jepang dan negara-negara anggota ASEAN; (3) Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang mendapat persetujuan untuk meminjam dana itu (*Antara*, 1 Februari 1989).

2. Sikap Pemerintah Jepang Terhadap ASEAN

PM Jepang Noburo Takeshita, mengatakan di sidang DPR Jepang (*Diet*) tanggal 10 Februari 1989 bahwa Jepang akan berusaha mempererat hubungan dengan ASEAN dan negara-negara Pasifik serta negara-negara tetangga lainnya (*Suara Pembaruan*, 11 Februari 1989).

Pada saat yang sama Menteri Luar Negeri Jepang, Susuke Uno, mengatakan: (1) ASEAN merupakan kunci stabilitas Asia Tenggara dan Jepang berusaha meningkatkan hubungan kerjasama di berbagai bidang dengan ASEAN; (2) penyelesaian masalah Kamboja tidak dapat dipisahkan dari usaha mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara; (3) Jepang ingin membantu mewujudkan stabilitas dan pembangunan di kawasan Asia Pasifik; (4) penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja dan pencegahan kebijaksanaan brutal yang dijalankan rezim Pol Pot sangat penting untuk membantu memecahkan masalah Kamboja; (5) Jepang akan terus membantu usaha ASEAN untuk membantu terlaksananya penentuan nasional rakyat Kamboja dan pembentukan negara Kamboja yang merdeka, bebas dan netral (*Antara*, 11 Februari 1989).

3. Sistem Perdagangan Terbuka Jepang

Duta Besar Jepang untuk Malaysia, Noburu Nakahira, mengatakan kepada Klub Pemilik Bank di Malaysia tanggal 16 Mei 1989 bahwa: (1) ASEAN agar meningkatkan usaha untuk menggunakan peluang yang muncul dari sistem perdagangan Jepang yang terbuka; (2) jika ASEAN tidak menggunakan sepenuhnya peluang itu, sistem perdagangan terbuka Jepang tidak

akan banyak memberikan keuntungan; (3) langkah Jepang itu dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kepada ASEAN untuk memasuki pasaran Jepang; (4) ASEAN perlu mengkaji kembali sistem perdagangan bilateralnya dengan Jepang agar peningkatan hubungan perdagangan antara kedua negara dapat diwujudkan; (5) untuk masa-masa mendatang ASEAN diperbolehkan menjual lebih banyak produknya ke Jepang (*Antara*, 18 Mei 1989).

4. Konferensi ASEAN-Jepang ke-2

Konferensi ASEAN-Jepang ke-2 yang diselenggarakan oleh CSIS bekerjasama dengan The Japan Institute of International Affairs (JIIA) dan ASEAN-ISIS, dihadiri oleh 40 peserta, di antaranya 14 orang wakil Jepang dan Dubes Jepang untuk Indonesia, Sumeo Edamura, berlangsung di Bali tanggal 20-21 Maret 1989. Konferensi ini membahas perkembangan ekonomi, politik dan keamanan di wilayah Asia Pasifik, yang dibagi menjadi 4 bagian yakni: (1) *International Situation in Asia and Pacific*; (2) *Situation in Southeast Asia*; (3) *Japan's Security Policy*; dan (4) *Internationalization of Japan*.

Makalah-makalah yang dibahas dalam konferensi ini adalah:

1. Sino-Soviet Rapprochement -- Its Impacts on East and Southeast Asia: Tatsumi Okabe.
2. The USSR's "New Thinking" in the Asia-Pacific Region -- Focus on the Sino-Soviet Detente: Bilveer Singh.
3. A Decade War in Cambodia -- Regional Initiative under International Pressure: Yoneji Kuroyanagi.
4. The Philippines -- Problems and Prospects: Cayetano Paderanga.
5. Japan's Security Policy and Implications on the ASEAN Nations: Seizaburo Sato.
6. Japan's Security -- An ASEAN Perspective: Jusuf Wanandi.
7. Japan's International Role: Tadashi Ideka.
8. Internationalization of Japan -- Cultural Aspects: Chatthip Nartsupha.

Menhankam L.B. Moerdani mengatakan pada pembukaan konferensi itu bahwa: (1) munculnya Jepang sebagai negara adidaya ekonomi tidak disangskakan lagi menjadi asset atau modal memperkuat perekonomian negara-negara ASEAN; (2) peningkatan anggaran pertahanan Jepang menjadi pusat perhatian negara-negara

berkembang. Tetapi persoalannya sekarang adalah kemungkinan Jepang untuk menyebarkan satuan keamanannya ke arah selatan; (3) peningkatan keamanan Jepang memang tidak sekaligus berarti kehadiran militernya langsung, tetapi yang penting adalah menjaga dan memelihara kerjasama antar semua pihak, termasuk ASEAN (*Antara*, 21 Maret 1989); (4) melalui persahabatan dan saling menghormati, Jepang dapat melanjutkan bantuan pembangunan ekonomi kepada Indonesia dengan investasi langsung ke daerah-daerah di luar Jawa; (5) ASEAN dan Jepang saat ini ditantang, baik secara individu maupun kolektif, untuk menjawab cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai wilayah dunia, terutama di Pasifik; (6) ASEAN dan Jepang harus dapat bekerjasama membangun lingkungan dunia yang terbuka, stabil dan damai atas dasar saling menghormati serta mewujudkan saling ketergantungan yang lebih berimbang; () saling ketergantungan yang lebih berimbang tercermin pada distribusi keuntungan yang lebih adil dari pemanfaatan semua jenis sumber daya yang terbatas; (8) laju pertumbuhan ekspor yang tinggi dan masuknya modal Jepang ke negara-negara ASEAN merupakan keuntungan ASEAN; (9) ASEAN sudah dikenal sebagai satu kesatuan yang dapat memainkan peranan yang konstruktif dalam berbagai perundingan internasional; (10) Jepang dan ASEAN dapat bersama-sama atau saling mendukung posisi masing-masing di forum internasional (*Kompas*, 22 Maret 1989).

Prof. Seizaburo Sato, dari Universitas Tokyo, mengatakan kepada pers di Bali tanggal 21 Maret 1989 bahwa: (1) Jepang tidak akan mengubah kebijaksanaan pertahanannya yang berlaku sekarang, selama stabilitas lingkungannya tidak berubah; (2) sistem keamanan semesta (*comprehensive security*) Jepang sama dengan konsep ketahanan nasional Indonesia; (3) tentara beladiri Jepang tidak memiliki peralatan militer jarak jauh; (4) semua kapasitas perang Jepang hanya untuk menghalangi kemungkinan serangan ke negaranya; (5) kebijaksanaan pertahanan Jepang punya kaitan dengan tingkah laku Uni Soviet dan AS; (6) AS dan Uni Soviet tidak dapat mempertahankan seluruh kepentingannya secara militer, apalagi Jepang yang pernah mengalami trauma dalam hal itu (*Kompas*, 22 Maret 1989).

Direktur Pusat Pengkajian Masalah Internasional (CSIS), Jusuf Wanandi mengatakan kepada pers di Bali tanggal 20 Maret 1989 bahwa: (1) Jepang akan memegang peranan penting di kawasan Asia Pasifik; (2) ASEAN tidak perlu khawatir pada penambahan anggaran pertahanan Jepang yang digunakan untuk mem-

pertahankan dan memelihara keamanan lautnya dari serangan kapal selam musuh; (3) Jepang harus menanggung beban keamanan AS dan ikut menjaga kestabilan keamanan di Asia Pasifik; (4) Jepang kini semakin di perhitungkan, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi di masa mendatang peran politiknya semakin nyata dalam hubungan internasional; (5) berbagai kebijakan ekonomi Jepang sudah berusaha membantu pemasaran produk-produk negara-negara ASEAN dengan perlakuan istimewa atau proteksi tradisional; (6) penting bagi ASEAN untuk belajar teknologi dan mempelajari budaya konsumen serta selera masyarakat Jepang agar dapat menerobos pasaran negara itu (*Merdeka*, 23 Maret 1989).

5. Kunjungan PM Noboru Takeshita ke ASEAN

Laporan Harian Yomiuri Shimbun Tokyo tanggal 7 April 1989 mengatakan bahwa: (1) PM Jepang Noboru Takeshita akan mengumumkan Doktrin Takeshita untuk memperkokoh solidaritas dengan ASEAN; (2) Doktrin ini akan disampaikan dalam pidatonya di Jakarta tanggal 5 Mei 1989, dalam rangkaian kunjungan muhibahnya ke negara-negara ASEAN tanggal 29 April - 7 Mei 1989; (3) Takeshita menyambut baik penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan menjanjikan bantuan untuk mempercepat pulihnya suasana damai di kawasan; (4) Jepang akan menawarkan kerjasama penuh untuk membantu pembangunan Kamboja; (5) Takeshita akan menegaskan sikap Jepang dan ASEAN untuk terus bahu-membahu membantu perbaikan ekonomi maupun mengusahakan perdamaian dunia; (6) Jepang akan mengutarkan kesanggupannya untuk meningkatkan bantuan pinjaman Yen kepada ASEAN serta melonggarkan persyaratan untuk membantu pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN; (7) Jepang akan menjelaskan upaya-upayanya untuk mengisi tiga prinsip kebijaksanaannya menyangkut kerjasama internasional, membantu perdamaian, ekonomi serta tukar-menukar kebudayaan; (8) Jepang menginginkan perluasan dan peningkatan hubungan Jepang dengan ASEAN secara keseluruhan (*Antara*, 7 April 1989).

Kepala Konsuler Kedutaan Jepang di Kuala Lumpur, Wataru Nishigahira, mengatakan kepada wartawan di Kuala Lumpur tanggal 26 April 1989 bahwa: (1) PM Takeshita akan meletakkan jabatannya setelah Parlemen Jepang (*Diet*) menyetujui anggaran belanja negara tahun 1989; (2) Takeshita telah memutuskan untuk meneruskan rencana kunjungan ke negara-negara ASEAN; (3) msalah hutang ASEAN sehubungan de-

ngan kenaikan nilai Yen, Kamboja dan peluang barang-barang produksi ASEAN masuk ke pasaran Jepang akan merupakan topik pembicaraan kunjungan Takeshita itu (*Antara*, 26 April 1989).

Anggota Komisi I DPR-RI, Marzuki Darusman mengatakan kepada pers di Jakarta bahwa: (1) kunjungan PM Jepang Takeshita harus disambut baik, meskipun ia sudah menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya; (2) kunjungan itu menguntungkan karena berarti hubungan baik kedua negara selama ini tidak terputus akibat gejolak intern di Jepang; (3) kunjungan itu bermakna untuk mengikat Jepang agar memperbesar peranannya di Asia Tenggara sesudah kepemimpinan Takeshita; (4) Indonesia perlu memanfaatkan kunjungan itu untuk merundingkan kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara; (5) bantuan Jepang untuk pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya bantuan yang bersifat mengikat, perlu dibahas dengan Takeshita; (6) doktrin Takeshita jangan sampai dipersepsikan untuk meresmikan suatu hubungan ketergantungan kepada Jepang (*Angkatan Bersenjata*, 27 April 1989).

Menteri Sekretaris Negara Moerdiono mengatakan kepada pers di Bina Graha tanggal 26 April 1989 bahwa: (1) Presiden Soeharto tetap akan memberikan penghormatan sepenuhnya kepada PM Takeshita yang akan berkunjung di Indonesia tanggal 4-6 Mei 1989; (2) Takeshita tetap sebagai PM dan mewakili pemerintah dan rakyat Jepang (*Kompas*, 28 April 1989).

Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 27 April 1989 bahwa: (1) rencana kunjungan PM Jepang Noboru Takeshita ke ASEAN tetap penting; (2) krisis politik yang melanda pemerintahan Takeshita tidak akan mengubah kebijakan negara itu terhadap Asia Tenggara; (3) pergantian pimpinan di Jepang hanya berlangsung di dalam LDP, bukan pergantian pimpinan dari partai yang berkuasa ke partai oposisi (*Kompas*, 28 April 1989).

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Sumio Edamura, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 1 Mei 1989 bahwa: (1) PM Takeshita akan mengadakan pembicaraan secara terbuka dengan para pemimpin ASEAN mengenai penyelesaian politik di Kamboja; (2) PM Takeshita akan membicarakan masalah kelanjutan pembangunan dan pengembangan seluruh kawasan Indocina sebelum pertemuan puncak Cina-Soviet medio Mei dan Konferensi Post-Ministerial ASEAN bulan Juni

1989; (3) pembicaraan masalah Kamboja sangat penting karena merupakan kunci untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan; (4) pertemuan JIM-II di Jakarta bulan Februari 1989 merupakan contoh prakarsa yang baik dari ASEAN; (5) langkah ini selaras dengan Prakarsa Kerjasama Internasional Takeshita bulan November 1987 yang meliputi tiga pilar yakni: (a) penguatan kerjasama mencapai perdamaian; (b) pengukuhkan pertukaran kebudayaan internasional; (c) peningkatan Bantuan Pembangunan Resmi Jepang (ODA); (6) ASEAN merupakan penerima terpenting prakarsa itu, sehingga PM Takeshita berusaha meningkatkan hubungan pemerintahannya dengan ASEAN; (7) Jepang memandang kawasan Asia Pasifik sebagai satu di antara wilayah yang paling dinamis dan berkembang di dunia. Kawasan ini akan memainkan peranan utama untuk memajukan dunia; (8) kunjungan Takeshita kali ini sangat berarti, karena akan mendapat kesempatan mengadakan tukar pandangan secara terbuka dengan para pemimpin ASEAN mengenai kerjasama yang dimungkinkan di kawasan Asia Pasifik pada abad 21; (9) kunjungan PM Jepang ke ASEAN merupakan suatu tradisi untuk meningkatkan kesinambungan, kemanfaatan dan kehandalan hubungan Jepang-ASEAN (*antara*, 1 Mei 1989).

Dalam pidatonya yang berjudul "Jepang dan ASEAN Bersama dan Maju Bersama," di Hotel Borobudur tanggal 5 Mei 1989, PM Takeshita menegaskan: (1) tentang prinsip yang menjadi pilar Prakarsa Kerjasama Internasional (*International Cooperation Initiative - ICI*) adalah: (a) memperkokoh kerjasama untuk membina perdamaian; (b) memperluas bantuan resmi pembangunan (*Official Development Assistance - ODA*); (c) meningkatkan pertukaran kebudayaan internasional, sehingga rakyat yang berbeda-beda dapat saling menghormati dan mengerti sebagai sesama manusia; (2) ASEAN merupakan salah satu kawasan terpenting dan oleh karena itu Jepang akan meningkatkan prakarsanya di kawasan ini; (3) berdasarkan konstitusinya, Jepang tidak ingin menjadi negara militer; (4) Jepang mengerahkan kemampuan semaksimalnya untuk secara aktif bekerjasama meneapai perdamaian; (5) Jepang akan melakukan usaha-usaha diplomasi secara aktif untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan mengirimkan para ahli dan personil ke tempat timbulnya kesulitan serta memberikan bantuan keuangan bagi pemeliharaan perdamaian; (6) Jepang bertekad untuk menyempurnakan volume dan kualitas ODA demi terecapainya perdamaian dan kemanfaatan dunia; (7) Jepang menganggap ASEAN sebagai salah satu mitra pa-

ling penting dalam kerjasama ekonomi; (8) Jepang telah mengalokasikan 50% dari jumlah total ODA untuk ASEAN; (9) Jepang menjadi negara donor ODA terbesar bagi negara-negara ASEAN; (10) Jepang akan terus menekankan hubungan dengan ASEAN karena hal itu sudah menjadi kebijakan; (11) penyelesaian politik yang adil di Kamboja memerlukan jaminan bagi penarikan mundur pasukan Vietnam di bawah pengawasan internasional serta mencegah terulangnya kembali politik rezim Pol Pot; (12) pemilihan umum yang bebas dan adil di Kamboja diperlukan agar rakyat dapat menentukan nasibnya sendiri; (13) mekanisme pengawasan yang tepat guna dan segala upaya penyelesaian politik harus menjamin tercapainya stabilitas dalam negeri Kamboja (*Pelita*, 6 Mei 1989).

6. Jepang dan Asia Mencari Peran Baru

Seminar yang diselenggarakan Pusat Sumber Informasi Singapura, yang dihadiri oleh 100 orang dari kalangan diplomat, cendekiawan dan usahawan ASEAN, berlangsung di Singapura tanggal 10 Juni 1989 untuk membahas masalah "Jepang dan Asia Mencari Peran Baru."

Mantan Menlu RI, Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) negara-negara Asia Tenggara harus dapat meyakinkan Jepang dan AS bahwa Jepang tidak boleh mempunyai kebijaksanaan pertahanan yang terpisah; (2) Jepang tidak boleh diberi peran sebagai polisi di Asia Timur dan Asia Tenggara; (3) pengakuan atas kebutuhan pertahanan negara-negara Asia Tenggara termasuk hak mereka untuk menentukan kebutuhan bagi kepentingan kawasan sangat penting; (4) setiap usaha dan rencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang sebagai bagian dari konsep strategi atau pertahanan harus mempertimbangkan masalah itu; (5) sepanjang masyarakat Asia Tenggara dapat mengambil manfaatnya, maka peningkatan pertahanan Jepang tidak harus dilihat sebagai suatu hal yang negatif; (6) selain AS dan Uni Soviet, ancaman terhadap keamanan di kawasan Asia Pasifik dapat datang dari negara lainnya; (7) karena kemajuan di bidang keuangan dan perekonomian, Jepang menjadi mitra penting ASEAN; (8) ASEAN harus membujuk Jepang untuk memanfaatkan uangnya di Asia Tenggara; (9) usaha-usaha ASEAN dan Jepang di bidang sosial dan budaya masih terlalu kecil (*The Jakarta Post*, 12 Juni 1989).

7. Kerjasama Lingkungan ASEAN-Jepang

Simposium Lingkungan ASEAN-Jepang dihadiri oleh Menteri Lingkungan dari Cina, Singapura, Malaysia, Muangthai, Filipina, Indonesia dan Jepang (sebagai tuan rumah) berlangsung di Tokyo tanggal 7 Juni 1989 untuk mengadakan konsultasi dan koordinasi mengenai lingkungan (*Antara*, 8 Juni 1989).

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia, Prof. Emil Salim, mengatakan pada simposium itu bahwa: (1) Indonesia mengusulkan pembentukan mekanisme gabungan Jepang-ASEAN untuk konsultasi dan koordinasi kerjasama lingkungan; (2) konsultasi berkala dan pelaksanaan proyek-proyek kerjasama dapat dimanfaatkan untuk menganalisa kebutuhan kawasan saat ini dan di masa mendatang untuk melindungi kualitas lingkungan, sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan; (3) konsultasi seperti ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bantuan yang diperlukan ASEAN; (4) konsultasi berkala Jepang-ASEAN agar dilembagakan pada tingkat pejabat senior seperti kelompok Ahli ASEAN (AEGE) dengan badan Lingkungan Hidup Jepang (JEA); (5) konsultasi ini dapat diperluas menjadi kerjasama kawasan sehingga dapat memperkokoh landasan terciptanya kerjasama global; (6) Indonesia mengharapkan kerjasama ini terus meningkat di masa mendatang; (7) semua upaya lingkungan di masing-masing negara ASEAN tetap bertumpu pada kepentingan lingkungan ASEAN; (8) Indonesia akan terus berusaha memperkokoh kelembagaan pengelolaan lingkungan untuk mengantisipasi masalah lingkungan; (9) di Indonesia terdapat sekitar 20 juta ha lahan kritis, dan pemerintah merencanakan penghutanan kembali 300.000 ha/tahun dengan biaya US\$300 juta; (10) rehabilitasi lahan kritis ini memberikan waktu 65 tahun. Oleh karena itu Indonesia mengundang partisipasi masyarakat internasional untuk membantu proyek ini agar dapat diperpendek waktunya; (11) pencemaran laut dan hutan tropis merupakan masalah yang dihadapi ASEAN saat ini; (12) Jepang yang mempunyai kepentingan di perairan ASEAN agar turut berpartisipasi mengatasi masalah itu (*Antara*, 8 Juni 1989).

Hasil simposium antara lain: (1) mengakui eratnya ketergantungan antara lingkungan global, kegiatan manusia dan kemiskinan; (2) mengimbau semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan global; (3) sepakat untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan dengan mengerahkan semua kebijaksanaan dan ke-

mampuan melalui kerjasama global dan regional; (4) sepakat agar kerjasama regional, termasuk pertukaran informasi lingkungan, semakin ditingkatkan; (5) sepakat agar kerjasama gabungan antar negara Asia, khususnya di sektor meteorologi dan kondisi lingkungan, semakin ditingkatkan; (6) perlu kerjasama dengan negara-negara industri, termasuk Jepang, untuk mengatasi masalah lingkungan, karena negara-negara Asia pada umumnya miskin dan lemah teknologinya (*Antara*, 8 Juni 1989).

PM Jepang, Susuke Uno, mengatakan pada penutupan simposium itu bahwa: (1) permasalahan dan usulan simposium akan disampaikan pada KTT negara industri di Paris bulan Juni 1989; (2) Jepang akan hadir pada KTT itu sebagai wakil Asia; (3) Jepang akan menyelenggarakan pertemuan seperti ini pada bulan September 1989 (*Antara*, 8 Juni 1989).

IV. USAHA ASEAN MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

A. PERTEMUAN HUN SEN - SIHANOUK DI JAKARTA

Tanggal 26 Maret 1989, Pangeran Norodom Sihanouk menerima pesan dari PM Hun Sen untuk mengadakan KTT di Jakarta tanggal 2-3 Mei 1989.

Dari Bangkok tanggal 8 April 1989 diberitakan bahwa KTT antara PRK dan CGDK batal dilangsungkan di Jakarta, dan akan dipindahkan ke Paris (*Kompas*, 9 April 1989). Akan tetapi berita ini segera disanggah oleh Pangeran Norodom Sihanouk dan Perancis. KTT itu pasti akan diadakan di Jakarta (*Suara Karya*, 10 April 1989).

Pada tanggal 9 April 1989, Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan bahwa: (1) Hun Sen telah siap dengan konsesinya yang bersedia menghapuskan kata "Republik Rakyat" untuk nama Kamboja. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah apakah Kamboja akan tetap menjadi sebuah negara komunis; (2) dia menginginkan agar PRK yang komunis dihapuskan dari Kamboja agar rakyat Kamboja dapat melaksanakan pemilihan umum yang diawasi secara internasional (*Antara*, 10 April 1989).

Pada tanggal 13 April 1989 Pangeran itu juga mengatakan bahwa dalam pertemuannya nanti dengan Hun Sen dia tidak akan membuat sebuah keputusan

pun. Pertemuan itu hanya untuk mendengar dan membicarakan beberapa hal yang menyangkut masalah Kamboja serta untuk mengetahui konsesi-konsesi yang akan diajukan oleh Vietnam dan Hun Sen (*Antara*, 15 April 1989).

Mengenai peranan Indonesia dalam pertemuan di Jakarta ini, Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 27 April 1989 bahwa pertemuan ini bukan kelanjutan dari JIM, oleh sebab itu Indonesia tidak banyak berperan, hanya menyediakan tempat (*Suara Karya*, 28 April 1989).

Sesuai dengan rencana, pembicaraan terpisah antara PM Hun Sen dan Pangeran Norodom Sihanouk, serta antara PM Hun Sen dan PM CGDK, Son Sann, berlangsung di Jakarta tanggal 2-3 Mei 1989. Mereka membicarakan masalah-masalah yang dapat menjembatani tercapainya penyelesaian damai di Kamboja.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 30 April 1989, Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan bahwa dia akan berusaha bersikap lunak dan realistik dalam pertemuannya dengan Hun Sen, antara lain dengan: (1) tidak lagi menuntut penghapusan PRK; (2) tidak lagi menuntut peranan pemeliharaan perdamaian PBB (*International Peace Keeping Force* atau IPKF) untuk mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam, dan sebagai gantinya mengusulkan Komisi Pengawas Internasional (ICC) atau Mekanisme Pengawasan Internasional (ICM). Namun demikian Pangeran itu juga mengatakan bahwa para anggota ICM itu harus ditentukan melalui suatu Konferensi Internasional yang akan diadakan di Paris di bawah pimpinan Presiden Francois Mitterand, dan tidak ditentukan asal saja seperti yang diinginkan oleh rezim Phnom Penh dan Hanoi (*Kompas*, 1 Mei 1989); (3) Indonesia akan menjadi peserta utama Konferensi Paris itu (*Antara*, 3 Mei 1989).

Selama berada di Jakarta, Pangeran itu juga mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Soeharto, Wakil Presiden AS, Dan Quayle, dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri India, Natwar Singh.

Setibanya di Lanuma Halim Perdanakusuma tanggal 1 Mei 1989, PM Hun Sen mengatakan bahwa berbagai perubahan mendasar telah dilakukan pemerintahnya demi tercapainya perdamaian di Kamboja. Perubahan-perubahan itu antara lain: (1) banyak pasal UUD-nya yang telah diubah; (2) hukuman mati bagi pelaku tindak kriminalitas dihapus; (3) nama Pemerintah Republik Rakyat Kamboja diubah menjadi Pemer-

rintah Kamboja; (4) bendera nasional telah diubah pula, warna dasar merah diganti merah biru, meskipun gambar pagoda dengan lima stupa tetap (*Antara*, 2 Mei 1989). Sementara itu, Hun Sen tetap berpendirian bahwa pihaknya bersedia mengadakan kompromi asal tidak untuk Pol Pot, karena kompromi dengan Pol Pot hanya akan merugikan rakyat Kamboja (*Kompas*, 2 Mei 1989).

Seusai mengadakan perundingan tanggal 2 Mei 1989, PM Hun Sen mengatakan kepada para wartawan bahwa pertemuannya dengan pemimpin CGDK telah mencapai kemajuan yang berarti. Ini terbukti dengan: (1) tercapainya kesepakatan mengenai pembentukan Mekanisme Pengawas Internasional (*International Control Mechanism* atau ICM) untuk menggantikan IPKF, meskipun komposisinya masih akan ditentukan dalam konperensi internasional yang telah disepakati akan dilangsungkan di Jakarta dan Paris; (2) penghentian semua bantuan asing kepada faksi-faksi Kamboja yang bertikai setelah ditariknya pasukan Vietnam dari Kamboja; (3) Pangeran Norodom Sihanouk menyetujui perubahan nama Republik Rakyat Kamboja menjadi Negara Kamboja, agama Budha menjadi agama negara, penghapusan hukuman mati dan perubahan warna bendera sebagaimana diusulkan olehnya (*Suara Karya*, 3 Mei 1989). Namun beberapa hal seperti lagu kebangsaan dan peranan partai-partai dalam kehidupan berne-gara masih perlu dibicarakan lebih lanjut.

PM Hun Sen juga mengatakan bahwa: (1) dalam pembicaraannya dengan Pangeran Norodom Sihanouk itu dia meminta Pangeran tersebut untuk segera kembali ke Kamboja setelah pasukan Vietnam ditarik mundur, untuk menjadi Kepala Negara Kamboja; (2) di Kamboja perlu dibentuk Dewan Nasional Tertinggi (*Supreme National Council* atau SNC) atau Dewan Nasional Agung (DNA) yang terdiri atas para pemimpin Kamboja di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk. Pemimpin SNC akan didampingi oleh tiga wakil dari tiga faksi lainnya (pembentukan SNC ini ditolak Pangeran Norodom Sihanouk). SNC dapat berada di Phnom Penh maupun di luar negeri (*Angkatan Bersenjata*, 5 Mei 1989); (3) SNC bertugas mengawasi pelaksanaan persetujuan yang telah dicapai oleh faksi, membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, serta menyiapkan rancangan konstitusi untuk disampaikan kepada Majelis Nasional; (4) untuk menjalankan tugas itu, NSC dibantu oleh ICM (*Suara Karya*, 3 Mei 1989); (5) Pangeran Norodom Sihanouk tampaknya tidak begitu tertarik dengan rencana pembentukan SNC, sebaliknya banyak tertarik pada serang-

kaian perubahan pasal-pasal Konstitusi Kamboja dan mengajukan beberapa usul, seperti dihapuskannya sistem satu partai dan sebaliknya mengusulkan sistem multipartai yang dikukuhkan dalam konstitusi melalui amandemen; (6) pada prinsipnya Pangeran itu bersedia kembali ke Kamboja asalkan usulnya, terutama mengenai amandemen konstitusi, dilaksanakan dan semua tentara Vietnam telah ditarik dari Kamboja (*Kompas*, 3 Mei 1989). Namun Pangeran Norodom Sihanouk itu juga mengingatkan, apabila sampai bulan September nanti dia tidak dapat memenuhi undangan tersebut, jangan dipersalahkan. Sementara itu PM Hun Sen juga menjawab, apabila sampai saat itu Pangeran belum juga kembali ke Kamboja, semoga jangan menentangnya (*Kompas*, 3 Mei 1989); (7) dia dan Pangeran Norodom Sihanouk setuju agar Konperensi Internasional tentang Kamboja itu sekali diselenggarakan di Jakarta dan sekali berlangsung di Paris; (8) paling tidak terdapat enam negara peserta konperensi itu, yakni dua negara nonblok, dua negara sosialis dan dua negara Barat. Dua negara nonblok itu mungkin Indonesia dan India; (9) sebelum berlangsung Konperensi Paris itu, dia akan bertemu terlebih dahulu dengan Pangeran Norodom Sihanouk di Paris tanggal 24 Juli 1989, yang kemudian disusul dengan pertemuan empat faksi juga di Paris tanggal 25 Juli 1989; (10) dalam Konperensi Internasional itu akan ditentukan komposisi ICC atau ICM; (11) dalam pembicaraan itu, Pangeran Norodom Sihanouk tampak lebih sungguh-sungguh dan tidak lagi mengusulkan pembubaran pemerintahan Kamboja bantuan Vietnam (PRK) serta dapat menerima pembentukan ICC atau ICM daripada IPKF. Pangeran itu justru lebih serius daripada Son Sann; (12) apabila melalui pemilihan umum itu rakyat menghendaki pembubaran PRK, dia tidak berkeberatan; (13) SNC berdiri tanpa campur tangan CGDK maupun PRK. Hal ini berarti selama SNC ada, PRK tetap ada untuk sekedar melakukan kegiatan sosial ekonomi dan PRK otomatis akan bubar bila telah terbentuk pemerintahan Kamboja hasil pemilihan umum (*Antara*, 3 Mei 1989).

Sementara itu setelah mengadakan pembicaraan terpisah dengan Son Sann, yang juga menyertai Pangeran Norodom Sihanouk, PM Hun Sen menjelaskan bahwa: (1) terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Pangeran Norodom Sihanouk dan Son Sann; (2) Son Sann tetap menginginkan pembubaran PRK, dan sebaliknya menginginkan terbentuknya pemerintahan koalisi empat partai untuk mengawasi pemilihan umum. Son Sann juga tetap menginginkan adanya IPKF dan menolak perubahan konstitusi sebelum dilangsungkan pem-

lihan umum (*Suara Karya*, 3 Mei 1989); (3) pembicaraannya dengan Son Sann agak alot. Son Sann bukan PM CGDK tetapi hanya sebagai salah satu pemimpin kelompok di Kamboja (*Kompas*, 3 Mei 1989).

Seusai mengadakan pertemuan tanggal 3 Mei 1989, Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan bahwa: (1) dia bersedia kembali ke negaranya apabila seluruh permintaannya dipenuhi, yakni penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan berbagai modifikasi pada konstitusi baru, terutama yang menyangkut peran partai. Konstitusi baru harus menjamin adanya sistem pemerintahan multipartai, bukan pemerintahan satu partai seperti sekarang ini. Pasal yang berbunyi "Partai Revolusioner adalah partai utama" diganti menjadi "Kamboja menggunakan sistem multipartai." Di samping itu Hun Sen agar memodifikasi pemerintahannya dengan mengikutsertakan wakil-wakil keempat faksi Kamboja. Di samping itu, Hun Sen agar menerima kondisi genecatan senjata dan komposisi pasukan seperti sekarang ini; (2) Khmer Merah harus diajak bergabung ke dalam pemerintahan baru di Kamboja, tetapi apabila Khmer Merah menolak akan ditinggalkan dan dia akan membentuk pemerintahan tiga faksi; (3) ia setuju bantuan asing untuk kelompoknya dihentikan asal penarikan pasukan Vietnam sungguh-sungguh dilaksanakan, oleh sebab itu penarikan pasukan itu harus dimonitor sungguh-sungguh. Untuk itu dia setuju usul Hun Sen mengenai pembentukan ICM sebagai pemantau (*Suara Karya*, 5 Mei 1989); (4) Hun Sen tampaknya bersedia memperhatikan usulnya, bahkan Hun Sen bersedia mengirimkan isi konstitusi itu untuk dipelajarinya; (5) dia menolak pemilu yang dilaksanakan oleh SNC. Pemilihan umum harus diselenggarakan oleh pemerintah sementara empat pihak. Lebih baik menjadi raja seumur hidup di pengasingan daripada harus mengikuti pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Hun Sen (*Antara*, 3 Mei 1989). Namun dia juga menilai bahwa pertemuannya dengan Hun Sen kali ini telah menghasilkan kemajuan yang nyata, bahkan lebih maju daripada JIM II. Baru pada bulan November 1989, dia dapat memutuskan untuk kembali atau tidak ke Kamboja (*Antara*, 3 Mei 1989).

Pada tanggal 4 Mei 1989, Menlu Ali Alatas sebagai Ketua JIM mengatakan kepuasannya atas hal-hal yang telah dicapai dalam pembicaraan Jakarta tanggal 2-3 Mei yang lalu itu (*Suara Karya*, 5 Mei 1989). Namun sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa perbedaan pendapat di antara mereka tentang masalah-masalah yang mendasar masih terlalu luas. Salah satu di antaranya adalah perbedaan pendapat tentang pembentukan

pemerintahan sementara empat pihak, yang oleh CGDK disebut Pemerintah Koalisi Sementara Empat Pihak Persatuan Nasional. Sihanouk dan kawan-kawannya berpendapat bahwa PRK hanya suatu partai politik seperti faksi-faksi lain dalam CGDK. Sebaliknya PRK menginginkan agar dua faksi nonkomunis dalam CGDK (KPNLF dan Funcinpec) menyerah kepada pemerintah PRK. PRK juga tidak dapat menerima Khmer Merah karena telah melakukan pembantaian massal terhadap rakyat Kamboja. Keikutsertaan Khmer Merah dalam pemerintahan sementara empat faksi juga akan memberikan kesempatan padanya untuk berkuasa di Kamboja kembali. Sebaliknya kelompok perlawan menghendaki keikutsertaan Khmer Merah, dengan alasan untuk menghindari pembantaian massal lagi (*Antara*, 5 Mei 1989).

Selanjutnya Menlu Ali Alatas mengatakan: (1) Presiden Soeharto mengharapkan pertemuan Paris akan lebih maju dari pertemuan Jakarta; (2) Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Hun Sen menyerahkan sepenuhnya kepada Indonesia dan Perancis untuk berkonsultasi guna menentukan siapa yang lebih dahulu menjadi penyelenggara konferensi internasional itu; (3) Indonesia tidak pernah mempunyai ambisi untuk mendominasi penyelesaian masalah Kamboja. Tetapi sebagai Ketua JIM Indonesia mengharapkan, segala sesuatu yang menyangkut konferensi internasional tentang Kamboja merupakan hasil konsensus JIM, sebab JIM sendiri menegaskan, konferensi semacam itu penting sebagai kelanjutan JIM sendiri (*Antara*, 5 Mei 1989).

Sementara itu PM Hun Sen mengatakan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 4 Mei 1989 bahwa: (1) usahanya merangkul Sihanouk masuk ke dalam suatu aliansi Sihanouk-Hun Sen merupakan usaha untuk menciptakan situasi baru, agar tercapai penyelesaian menyeluruh di Kamboja. Untuk itu dia membuka pintu bagi Sihanouk dan beberapa pembantunya tertentu untuk masuk ke dalam pemerintahan Phnom Penh, sehingga terbentuk persekutuan politik dan militer untuk memojokkan Khmer Merah; (2) bila persekutuan ini tercapai, Muangthai maupun RRC harus juga menentukan sikap atas Khmer Merah, Muangthai dapat menentukan sikap sendiri, bebas dari tekanan RRC; (3) koalisi CGDK dengan bantuan asing terbukti tidak dapat membalikkan situasi di Kamboja. Sebaliknya jika suatu pemerintah yang efektif, yang menguasai keadaan Kamboja sepenuhnya, bersekutu dengan seseorang yang mendapat dukungan internasional, maka situasinya akan berubah samasekali; (4) selanjutnya persekutuan atau aliansi ini akan menarik dua kelompok

lainnya, Khmer Merah dan KPNLF, sehingga terjadi koalisi empat kelompok. Tetapi koalisi empat kelompok ini tidak dapat sekaligus terwujud, karena Khmer Merah selalu memvononya; (5) aliansinya dengan Sihanouk itu ibarat dua roda depan sebuah mobil, yang berfungsi menarik dan menentukan arah mobil. Kedua roda depan itu sekarang telah terpasang, tetapi sekrupnya belum dikencangkan; (6) dia berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan Sihanouk bergabung dengannya. Sihanouk diijinkan membawa pengawal pribadinya bila dia tidak percaya pada pengamanan yang dilakukan oleh pasukan PRK; (7) konstitusi Kamboja akan ditinjau sebagaimana diusulkan oleh Sihanouk dan amandemen akan dilakukan, sehingga tercapai kesepakatan dengan Sihanouk; (8) pihaknya akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang akan datang agar Sihanouk terpilih sebagai Kepala Negara Kamboja (*Kompas*, 5 Mei 1989).

Sedangkan pada tanggal 3 Mei 1989, Son Sann mengatakan bahwa: (1) masih terdapat berbagai perbedaan mendasar antara CGDK dan Pemerintah Phnom Penh pimpinan Hun Sen; (2) CGDK menolak mengakui PRK beserta konstitusinya, karena merupakan konstitusi komunis yang diciptakan di bawah penguasaan asing (Vietnam) tanpa melalui proses pemungutan suara; (3) pembentukan Pemerintahan Koalisi Empat Partai tidak ada masalah, asalkan PRK bersedia dianggap hanya sebagai suatu kesatuan politik dan apa yang dinamakan sebagai Konstitusi itu hanya berlaku bagi intern partai itu; (4) pihaknya mengusulkan pembentukan Pemerintahan Koalisi Sementara Empat Partai Persatuan Nasional yang bertugas menyiapkan pemilihan umum yang bebas di bawah pengawasan internasional yang efektif, sebaliknya Hun Sen tetap mempertahankan PRK dan tidak mengikutsertakan Khmer Merah (*Antara*, 3 Mei 1989); (5) Hun Sen tidak tertarik pada penyelesaian aspek internal masalah Kamboja, tidak lagi menyebut rujuk nasional dan justru sebaliknya menyiapkan perang saudara setelah dilakukan penarikan pasukan Vietnam secara terselubung atau bersyarat (*Angkatan Bersenjata*, 5 Mei 1989).

Menanggapi rencana Konperensi Internasional tentang Kamboja di Paris itu, Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 27 April 1989 bahwa konperensi internasional itu penting dan perlu diselenggarakan, akan tetapi akan lebih baik bila dilangsungkan sesudah tereapai kemajuan dalam rangka JIM. Konperensi internasional yang tanpa persiapan dikhawatirkan akan mengalami kegagalan, dan pada akhirnya hanya merupakan suatu proses kemunduran

bagi penyelesaian masalah Kamboja (*Suara Karya*, 28 April 1989).

Di samping itu, dalam rangka menanggapi usul Vietnam untuk menghidupkan kembali ICCI yang dibentuk di Jenewa, Indonesia dan India sependapat dengan usul Vietnam, meskipun Pangeran Sihanouk menolaknya (*Merdeka*, 1 Mei 1989).

B. PERBEDAAN PENDAPAT DI ANTARA FAKSI-FAKSI

Pada tanggal 3 Maret 1989, Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, dan PM Muangthai, Chatichai Choonhavan, mengimbau faksi Kamboja untuk mengadakan perundingan lagi guna mengakhiri perang Kamboja (*Antara*, 5 Maret 1989). Tetapi himbauan ini ditolak oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Dia menyatakan bahwa Hun Sen adalah Quisling, pengkhianat, yang tidak mengerti bahasa kemerdekaan nasional Kamboja (*Antara*, 5 Maret 1989).

Pada tanggal 3 Maret 1989, Pangeran Norodom Ranariddh bahkan mengatakan bahwa: (1) pertemuan tingkat regional mengenai Kamboja agar dibatalkan dan sebagai gantinya diselenggarakan suatu konperensi internasional yang disponsori PBB; (2) JIM II itu merupakan suatu kegagalan, oleh sebab itu untuk mengadakan pembicaraan selanjutnya diperlukan dua persyaratan, yakni: (a) Hun Sen harus menyetujui bahwa pembicaraan itu untuk membahas suatu penyelesaian dan bukan untuk mempublikasikan rezimnya; (b) tempat perundingan harus di negara netral; (3) negara-negara anggota ASEAN, Vietnam, Laos, negara-negara anggota tetap DK PBB, India, Jepang, dan Australia agar mengambil bagian dalam konperensi internasional itu (*Antara*, 5 Maret 1989).

Pernyataan Pangeran Ranariddh tentang JIM itu tampaknya merupakan sikap yang kurang setuju dengan formula Jakarta. Indonesia yang menjadi tuan rumah JIM I dan JIM II dianggap lebih dekat dengan Vietnam dan sekutu-sekutunya (*Antara*, 5 Maret 1989). Ketidakhadiran Pangeran Norodom Sihanouk pada JIM II tampaknya merupakan suatu bentuk pemboikotan atas pertemuan itu pula (*Antara*, 5 Maret 1989).

Diketahui bahwa Hanoi dan Phnom Penh justru menolak peranan PBB karena organisasi dunia ini mengakui CGDK pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk.

Sampai saat ini, CGDK juga masih tetap mengisi kedudukan Kamboja di PBB (*Antara*, 5 Maret 1989).

Menanggapi ketidaksenangan dunia internasional terhadap rezim Pol Pot, Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan di Beijing tanggal 5 Maret 1989 bahwa dia telah menerima jaminan dari RRC dan Khmer Merah mengenai tidak akan berkuasanya kembali faksi Pol Pot di Kamboja (*Antara*, 6 Maret 1989).

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Yugoslavia, yang juga disiarkan dalam radio Demokrasi Kampuchea Khmer Merah tanggal 16 Maret 1989, pemimpin Khmer Merah, Khieu Samphan, mengatakan bahwa: (1) manakala tercapai penyelesaian damai di Kamboja, Khmer Merah tidak akan memonopoli kekuasaan. Kelompoknya menginginkan rekonsiliasi nasional; (2) rekonsiliasi tidak mungkin hanya dalam kerangka negara Demokrasi Kamboja Khmer Merah; (3) apabila ingin menormalisasi hubungan dengan RRC, Uni Soviet harus mengambil peranan untuk ikut menyelesaikan konflik Kamboja (*Antara*, 17 Maret 1989).

Selanjutnya pada tanggal 16 April 1989, Khieu Samphan meminta kepada para negara pendukung Pemerintah Perlawanan untuk mendesak agresor Vietnam agar mengakhiri pendudukannya atas Kamboja (*Antara*, 17 April 1989).

Sementara itu para pemimpin Koalisi Perlawanan Kamboja yang terdiri atas Pangeran Norodom Sihanouk, Khieu Samphan (Khmer Merah) dan Son Sann (KPNLF) mengadakan pembicaraan (rapat kerja) di Beijing tanggal 12 Maret 1989 mengenai usaha menggalakkan perjuangan melawan tentara Vietnam di Kamboja, untuk memperkuat persatuan, solidaritas dan kerjasama di antara kelompok-kelompok perlawanan Kamboja serta menyatukan pandangan dalam rangka persiapan KTT Paris (*Suara Karya*, 13 Maret 1989). Pernyataan bersama tanggal 14 Maret 1989 menegaskan bahwa: (1) mereka sepakat untuk membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional guna memperteguh kerjasama; (2) 21.000 tentara Sihanouk, 40.000 tentara Khmer Merah dan 10.000 tentara Son Sann kini berada di bawah pimpinan Sihanouk. Namun demikian masing-masing pasukan itu tetap mempertahankan beberapa otonomi (*Kompas*, 15 Maret 1989); (3) seandainya penyelesaian politik Kamboja tercapai, pasukan gabungan itu akan dikurangi sampai menjadi 10.000 tentara untuk mewakili Angkatan Bersenjata Kamboja Bersatu (*Antara*, 15 Maret 1989).

Pada kesempatan itu, Pangeran Norodom Sihanouk menegaskan pula bahwa: (1) wakil-wakil tiga faksi Kamboja dan pemimpin rezim Phnom Penh akan bertemu di Paris, bulan April 1989. Tetapi kapan tanggalnya tidak dijelaskan; (2) KTT RRC-Uni Soviet diharapkan mendesak Vietnam dan Hun Sen untuk menerima pengawasan PBB atas penarikan mundur pasukan Vietnam dan pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah sementara semua partai (*Kompas*, 15 Maret 1989).

Rapat Kerja di Beijing ini menarik untuk diperhatikan karena diselenggarakan beberapa hari setelah PM Hun Sen membeberkan kemenangan kelompoknya. Penegasan yang disampaikan di Kompong Son itu menyebutkan antar lain: (1) pemerintahnya telah mencatat beberapa kemenangan diplomatik dalam beberapa bulan terakhir ini; (2) harga diri pemerintah Phnom Penh semakin tinggi setelah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Pangeran Norodom Sihanouk, JIM II dan kunjungannya ke Muangthai pada bulan Januari 1989; (3) meningkatnya hubungan Kamboja-Muangthai dan fleksibilitas kebijaksanaan Muangthai telah mengkhawatirkan apa yang disebut Pemerintahan Koalisi Tiga Faksi (*Suara Karya*, 13 Maret 1989).

Sementara itu, Pangeran Ranariddh berada di AS, pada awal bulan Maret 1989 untuk meminta bantuan militer. Pada tanggal 17 Maret 1989, Pangeran Ranariddh menegaskan bahwa: (1) pemerintah dan Kongres AS menyatakan untuk memberikan dukungan atas semua permintaannya. Bantuan non-militer AS akan ditingkatkan dari US\$5 juta menjadi US\$7 juta. Meskipun demikian bagaimana rincian bantuan militer AS tidak jelas; (2) keikutsertaan Khmer Merah dalam Pemerintahan Sementara Kamboja merupakan suatu sikap yang realistik. Tidak ada rakyat Kamboja yang setuju berbagi kekuasaan dengan Pol Pot dan kawan-kawannya tetapi realitas menunjukkan adanya dua kelompok komunis dan dua kelompok non-komunis; (3) CGDK harus memperkuat posisinya untuk menghadapi sikap Vietnam yang semakin keras; (4) CGDK telah banyak memberikan konsesi, sebaliknya Vietnam justru berusaha mengulur-ulur waktu penarikan pasukannya, yang semula dijadwalkan menjelang bulan September 1989 diundur sampai bulan Desember 1990; (5) JIM II tidak gagal, meskipun tidak berhasil mencari penyelesaian berbagai masalah penting, seperti penentuan jadwal, mekanisme pengawasan internasional dan komposisi Pemerintahan Sementara Empat Faksi di Kamboja. Akan tetapi JIM harus merintis jalan berikutnya, yakni suatu Konferensi Internasional tentang Kamboja di bawah pengawasan PBB (*Antara*, 18 Maret 1989).

Pada tanggal 17 Maret 1989, Pangeran Norodom Sihanouk menegaskan kembali peranannya dalam Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional sebagai berikut: (1) dewan itu bukan Komando Tinggi dan dia sendiri bukan pula panglima tertingginya; (2) meskipun semua pejuang perlawanan Kamboja berada di bawah komando-nya, dia tidak berkuasa atas gerilyawan-gerilyawan nasionalisme dan Khmer Merah; (3) dewan itu hanya sebagai koordinasi untuk memperbaiki kemampuan Khmer Merah, gerilyawan nasionalis dan kelompok Sihanoukist dan menghindarkan bentrokan-bentrokan antar faksi dalam CGDK; (4) bila Khmer Merah akan mengambil alih kekuasaan di Kamboja, pasukannya akan melawan Khmer Merah. Pol Pot tidak boleh berkuasa di Kamboja (*Antara*, 18 Maret 1989).

Selama ini, kelompok nasionalis dan kelompok Sihanoukist sering diserang sendiri oleh Khmer Merah. Untuk menghindari hal ini, maka Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional dibentuk. Namun demikian Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Front Pembelaan Nasional Rakyat Khmer (KPNLF), Jenderal Dien Del, mengatakan di Aranyaprathet tanggal 18 Maret 1989 bahwa: (1) meskipun tidak ingin menjadi musuh Khmer Merah dan bersedia bertukar informasi maupun melakukan koordinasi kegiatan, tetapi fakta bahwa mereka menolak bergabung dalam satu komando tempur dengan faksi komunis itu; (2) koordinasi antara Funcinpec dan KPNLF belum lancar, dan justru situasi akan bertambah kacau apabila masih harus berkoordinasi dengan Khmer Merah (*Suara Karya*, 22 Maret 1989). Tetapi yang paling mendasar bagi Jenderal Dien Del sebenarnya adalah sulitnya melupakan jatuhnya Phnom Penh di bawah Lon Nol ke tangan Khmer Merah, karena dia sendiri pernah menjadi panglima suatu divisi Angkatan Bersenjata Kamboja semasa Lon Nol (*Suara Karya*, 22 Maret 1989).

Menanggapi sikap beberapa negara yang ingin tetap memberi bantuan kepada Pemerintahan Perlawanan, pada tanggal 5 April 1989 pemerintah Hanoi menegaskan bahwa pemerintah Phnom Penh mempunyai hak sah untuk meminta bantuan negara-negara lain agar rakyat Kamboja dapat melindungi dirinya (*Antara*, 7 April 1989).

Pada tanggal 6 April 1989, Pangeran Norodom Sihanouk meminta Presiden Perancis, Francois Mitterrand, untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai Kamboja di Paris (*Antara*, 7 April 1989). Di samping itu pemerintah perlawanan sekaligus meminta PBB untuk memainkan peranan kunci untuk

mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja (*Antara*, 7 April 1989).

Komunikasi bersama Vietnam, Laos dan PRK tanggal 5 April 1989 mengatakan: (1) Komisi Pengawasan Internasional mengenai Indochina (ICCI), yang dibentuk di Jenewa tahun 1954, beranggotakan India, Kanada dan Polandia, perlu diaktifkan kembali; (2) Indonesia dan seorang wakil dari Sekjen PBB agar bekerjasama dengan ICCI untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dan menjamin bahwa bantuan militer kepada pihak-pihak yang bertikai di Kamboja telah dihentikan.

India dan Kanada menyambut baik komunikasi bersama negara-negara Indochina itu (*Antara*, 7 April 1989). Tetapi Pangeran Sihanouk menolak rencana penarikan pasukan Vietnam seperti itu, karena Vietnam bukan pemilik legal Kamboja (*Antara*, 10 April 1989).

Sementara itu PM Hun Sen sekali lagi menegaskan bahwa penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja akan dilakukan pada bulan September 1989, dan tiga bulan sesudahnya akan diselenggarakan pemilihan umum (*Suara Karya*, 26 April 1989).

Sebaliknya, Pangeran Norodom Sihanouk tetap menolak meninggalkan Khmer Merah dan pelaksanaan pemilihan umum yang demikian itu. Sebaliknya dia justru mendesak pembubaran pemerintahan Phnom Penh (PRK) (*Antara*, 29 April 1989).

Dalam usahanya memecahkan masalah Kamboja, Majelis Nasional Phnom Penh mengadakan pertemuan luar biasa tanggal 28-29 April 1989 untuk membahas perubahan beberapa pasal UUD Kamboja. Majelis Nasional itu menyetujui perubahan beberapa pasal UUD Kamboja, antara lain: (1) nama PRK menjadi "Negara Kamboja"; (2) agama Budha menjadi agama negara; (3) penghapusan hukuman mati.

Majelis Nasional menegaskan pula bahwa perubahan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baru di Kamboja dan memenuhi keinginan rakyat Kamboja untuk mencapai perdamaian dan rujuk nasional (*Antara*, 2 Mei 1989).

PM Hun Sen mengatakan di Phnom Penh tanggal 10 Mei 1989 bahwa: (1) faksi Khmer Merah agar membubarkan pasukannya demi tercapainya perdamaian di Kamboja; (2) dia mengutuk Perancis yang telah memberi bantuan militer senilai US\$1,55 juta kepada kelompok Sihanouk (*Merdeka*, 13 Mei 1989); (3) Pol Pot dan Seng Sary harus dihukum mati sebelum konstitusi baru diberlakukan. Mereka akan dikucilkan dari

klausul Konstitusi Kamboja yang baru, yang menghapuskan hukuman mati (*Suara Karya*, 13 Mei 1989).

Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan di Beijing tanggal 20 Mei 1989 bahwa Khmer Merah setuju negara Kamboja menjadi negara non-komunis.

Para diplomat Barat di Bangkok berpendapat bahwa sikap Khmer Merah ini merupakan usaha untuk menghapuskan kekhawatiran rakyat Kamboja mengenai keinginannya untuk berkuasa kembali di Phnom Penh. Mereka juga berpendapat bahwa sikap Khmer Merah itu merupakan hasil tekanan Beijing agar mereka memperlunak sikapnya (*Kompas*, 22 Mei 1989).

C. PERANAN UNI SOVIET DAN RRC

Muncul berbagai anggapan bahwa KTT Uni Soviet - RRC bulan Mei 1989 itu dapat membantu menyelesaikan pertikaian di Kamboja. Menanggapi anggapan ini Deputi Menlu Uni Soviet, Igor Rogachev, mengatakan di Bangkok ketika menghadiri sidang ESCAP tanggal 29 Maret 1989 bahwa: (1) meskipun Uni Soviet menyatakan kesiapannya untuk membantu menyelesaikan masalah Kamboja, tetapi negaranya bukan merupakan aktor utama dalam masalah Kamboja; (2) Uni Soviet bukan pada posisinya untuk membuat keputusan akhir atas nama partai-partai di Kamboja; (3) salah satu kunci utama untuk mengakhiri konflik Kamboja itu adalah melanjutkan dialog antara Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Hun Sen. Kedua pemimpin ini perlu segera bersatu bahasa untuk menyelesaikan negaranya; (4) di samping itu perlu diingatkan bahwa pemerintah Phnom Penh kini cukup kuat dan dapat hidup terus tanpa perlu melanjutkan perundingan dengan para pemimpin koalisi; (5) meskipun Sihanouk dapat menjadi tokoh utama dalam penyelesaian masalah Kamboja, tetapi ia seorang yang keras kepala, selalu menundu-nunda perundingan damai tentang Kamboja dan menolak bertemu dengan Hun Sen. Justru sikap Pangeran Sihanouk yang demikian itu dapat diartikan sebagai menyerukan untuk dilanjutkannya perang saudara di Kamboja (*Kompas*, 30 Maret 1989); (6) KTT Uni Soviet-RRC bulan Mei mendatang bukan untuk menyelesaikan masalah Kamboja (*Suara Karya*, 30 Maret 1989).

Awal April 1989, Kemlu RRC menyatakan bahwa Beijing tidak akan menghentikan bantuan kepada pemerintah perlawanan kecuali telah terbukti bahwa semua pasukan Vietnam telah ditarik mundur dari Kamboja. Di samping itu, RRC juga menghendaki agar

penarikan pasukan itu diawasi oleh PBB (*Antara*, 7 April 1989).

Masalah keikutsertaan Khmer Merah dalam pemerintahan di Phnom Penh merupakan salah satu masalah yang belum mendapat kesepakatan KTT Uni Soviet-RRC itu. Dalam suatu konferensi pers di Beijing tanggal 17 Mei 1989, Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, menegaskan bahwa: (1) KTT Uni Soviet-RRC tidak mungkin memecahkan masalah Kamboja secepat mungkin; (2) penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah Kamboja, tetapi orang Kamboja sendirilah yang dapat mengakhiri konfliknya itu (*Antara*, 18 Mei 1989).

D. RENCANA KTT PARIS GAGAL

Pada awal Maret 1989, PM PRK, Hun Sen, menyampaikan surat undangan kepada Pangeran Norodom Sihanouk untuk mengadakan KTT Paris antara para pemimpin faksi Kamboja guna mencari penyelesaian damai tentang masalah Kamboja.

Dalam jawabannya tertanggal 10 Maret 1989, Pangeran Norodom Sihanouk menyatakan akan mengirim Direktur Kabinetnya dan seorang wakil lain untuk mengadakan pembicaraan dengan PM Hun Sen mengenai rencana KTT Paris. Juga ditegaskan bahwa kapan saja KTT dapat dilaksanakan asal semua setuju (*Suara Karya*, 13 Maret 1989).

Menurut rencana KTT ini akan diselenggarakan di Paris tanggal 10 April 1989, tetapi gagal diselenggarakan karena tidak jelas siapa-siapa yang menjadi wakil-wakilnya.

V. HUBUNGAN ASEAN-VIETNAM

Kebijakan ASEAN tentang pengungsi Indocina adalah sebagai berikut: (1) sejak 14 Maret 1989 warga Vietnam yang mencari suaka dan mendarat di wilayah ASEAN tidak secara otomatis memenuhi syarat untuk dimukimkan kembali di sebuah negara ketiga; (2) langkah itu untuk mencegah arus eksodus besar-besaran keluar Vietnam sebelum dilaksanakan Konferensi Jenewa 13 Juni 1989; (3) Konferensi Jenewa akan lebih ketat lagi memberikan status pengungsi bagi manusia perahu Vietnam; (4) hanya mereka yang keluar Vietnam karena ditindas diakui sebagai pengungsi dan lainnya akan dikembalikan ke negaranya (*Kompas*, 15 Maret 1989).

Para Penulis

- **JASIN, Anwar,**
Sarjana Muda Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia (1985), Master of Education, University of Sydney (1962) dan Doktor Pendidikan, Fakultas Pasca Sarjana, IKIP Jakarta (1983). Sejak tahun 1986 hingga sekarang Staf Ahli Menteri P dan K, Bidang Pengembangan Kurikulum.
- **JONI, T. Raka,**
Lulus Sarjana Muda FKIP Universitas Airlangga, Malang (1961); Master of Science in Elementary Education, State University College at Buffalo, N.Y. (1964), dan pada tahun 1969-1970 bertugas belajar berturut-turut pada Educational Testing Service, Princeton, N.Y., State University of New York at Albany dan Centro Intercultural de Documentación, Guanajuato, Mexico. Mendapat gelar Doktor dalam Psikologi Pendidikan IKIP Malang (1972). Sejak tahun 1976 mengajar pada Program Doktor, yang kemudian menjadi Fakultas Pasca Sarjana IKIP Malang. Pada tahun 1980, diangkat sebagai Guru Besar IKIP Malang.
- **NAPITUPULU, Washington P.,**
Lulus B-1 Pedagogik, di Jakarta (1954); Sarjana Pedagogik dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta (1959); dan memperoleh gelar Doctor of Education dari Stanford University, California, USA (1962), Guru Besar Pendidikan di IKIP Jakarta. Pekerjaan utama sekarang adalah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- **PRANARKA, A.M.W.,**
Memperoleh gelar Sarjana Filsafat dari Athenaeum, Poona, India (1965); Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1969) dan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, dari universitas yang sama tahun 1984. Sekarang Anggota Dewan Direktur CSIS dan Ketua Departemen Politik, CSIS Jakarta dan Ketua Konsorsium Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjanawiyata, Tamansiswa Yogyakarta.
- **SUPRIADI, Dedi,**
Sarjana Pendidikan dari IKIP Bandung (1982); Magister Pendidikan, lulus Cum Laude (1985); mendalmi studi kreativitas di State University of New York (1986). Doktor Ilmu Pendidikan dari IKIP Bandung, lulus Cum Laude (1989). Koresponden Harian Suara Karya sejak 1981 dan Anggota Dewan Redaksi Mimbar Pendidikan, IKIP Bandung.
- **SURYOHADIPROJO, Sayidiman,**
Lulusan Akademi Militer, Yogyakarta (1948); memperoleh pendidikan Perwira Infanteri, Fort Benning, AS (1952); Sekolah Staf dan Komando, Hamburg, Jerman Barat (1965). Mantan pelbagai posisi penting, antara lain Gubernur Lemhanas (1974-1978), Duta Besar RI di Jepang (1979-1983). Sejak 1983 hingga sekarang Penasihat Menristek, juga menjadi dosen Ketahanan Nasional pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Catatan:

tempel
perangko
di sini

Kepada:

Biro Pemasaran

Centre for Strategic and
International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27
Jakarta 10160
Telepon: 356532-5

Naskah Naskah-naskah untuk ANALISIS hendaknya diketik dengan jarak dua spasi, sepanjang 20-30 halaman kuarto, termasuk referensi dalam bentuk catatan kaki dan/atau daftar bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS.

Langganan Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS.

Alamat Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534, 356535.